



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan upaya menciptakan Pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan, dimana laporan tersebut merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 khususnya Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan disusun guna memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* yang relevan antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Laporan Keuangan berisikan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis selama Tahun Anggaran 2022 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan antara lain mengenai pendapatan-LRA, pendapatan-LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memahami tentang:

- a. Kemampuan penerimaan dari pendapatan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya terhadap anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD**

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia tak terkecuali Kabupaten Bengkalis, tidak saja menyerang dari sisi kesehatan, namun juga dari sisi perekonomian.

Pembangunan daerah merupakan bagian daripada pembangunan nasional. Oleh sebab itu arah kebijakan ekonomi daerah harus sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional. Berkenaan dengan itu sinkronisasi pembangunan antar tingkatan pemerintahan merupakan suatu hal yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah haruslah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pemerintah Provinsi. Dalam rangka itu, untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan secara menyeluruh, pembangunan Kabupaten Bengkalis juga harus selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional.

Pandemi COVID-19 berdampak cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Oleh karenanya, evaluasi dampak dan proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, serta langkah kebijakan yang diambil pada tahun 2021 menjadi bagian penting dalam perumusan sasaran makro pembangunan tahun 2022 pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tema pembangunan pada tahun 2022 “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, dengan prioritas pembangunannya yaitu: memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dan memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan tema Pembangunan Provinsi Riau tahun 2022 adalah: “Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis industri, pertanian dan pariwisata dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima”, dengan prioritas berfokus pada: pertanian, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan kondisi seperti yang dijelaskan pada dua paragraf di atas, untuk menjaga konsistensi arah kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022 telah menetapkan tema pembangunan yaitu: “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan aksesibilitas dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan”, dengan prioritas berfokus pada: sumber daya manusia, aksesibilitas dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan perekonomian daerah. Namun, pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2022, berdasarkan penelahaan terhadap perkembangan capaian triwulan ke-II, perubahan asumsi beberapa indikator makro serta pemetaan terhadap distribusi perubahan pagu indikatif, maka didapatkan adanya perubahan skala prioritas pembangunan dengan fokus pada: aksesibilitas dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pembangunan sumber daya manusia, penguatan penyelenggaraan pemerintahan dan penguatan pemulihan perekonomian daerah.

a. Ekonomi Makro Kabupaten Bengkalis

Kondisi perekonomian Kabupaten Bengkalis di tahun 2022 khususnya pada perkembangan Triwulan II telah menunjukkan nilai yang positif yang sejalan dengan membaiknya juga beberapa indikator makro pada tahun 2022. Perkembangan yang positif tersebut disebabkan oleh keberhasilan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai pada triwulan ke-3 tahun 2021 dengan tetap kontrol yang ketat terhadap perkembangan varian baru covid-19 yang masih terus ada hingga tahun 2022 ini, ditambah dengan adanya perubahan penanganan terhadap covid-19 yang semula dari pandemi menjadi endemi maka diharapkan kondisi ekonomi Nasional dan juga Kabupaten Bengkalis pada semester kedua tahun 2022 akan lebih meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, pelaksanaan PEN tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan beberapa program unggulan yang bersasar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis juga membantu percepatan kontraksi positif terhadap pertumbuhan makro ekonomi daerah di triwulan ke-II tahun 2022 ini.

Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Bengkalis tahun 2022 secara eksplisit dapat dilihat pada data perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten Bengkalis tahun 2020-2022 yang disajikan pada tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel II-1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Perubahan 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	%				
	- Dengan Migas		-3,30	0,51	-1,02	0,55
	- Non Migas		-0,02	4,79	1,25	4,85
2	Laju Inflasi Kumulatif	%	2,42	2,0	2,0	2,0
3	PDRB Per Kapita ADHK	Rp.Juta /Kapita	127,46	129,43	201,17	201,17
4	Kemiskinan	%	6,40	6,63	6,07	6,05
5	Indeks Gini	Tanpa satuan	0,28	0,273	0,279	0,275
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,31	6,63	8,75	6,65

Sumber : RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

Berdasarkan tabel II-1 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis dengan migas menunjukkan kontraksi yang positif pada tahun 2021 dengan nilai 0,51 %, hal ini didukung dengan adanya peralihan pengelolaan minyak bumi dan gas dari chevron mobile ke PT. Pertamina Hulu Rokan yang menyebabkan adanya peningkatan target eksploitasi sumur minyak yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, oleh karena itu, untuk perubahan target tahun 2022, Kabupaten Bengkalis mengoreksi asumsi pertumbuhan ekonomi dengan migas dari -1,02 % menjadi 0,55 % dengan harapan adanya pertumbuhan di berbagai sektor sehingga kontraksi positif ini akan berkelanjutan hingga tahun-tahun mendatang.
- (2) Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis non migas menunjukkan pertumbuhan yang terus membaik sebesar 4,79%, khususnya di tahun 2021 yang memperlihatkan keberhasilan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta kebijakan pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah Pusat pada daerah-daerah yang tingkat pandemi covid-19 nya terbilang rendah termasuk di Kabupaten Bengkalis, dengan demikian untuk asumsi pertumbuhan ekonomi non migas di perubahan tahun 2022 mengalami koreksi yang sebelumnya pada angka 1,25 % menjadi 4,85 %.
- (3) Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Bengkalis yang mengacu pada laju inflasi Provinsi Riau dalam kurun 2020-2022 masih relatif besar sebagai akibat masih besarnya tingkat ketergantungan daerah khususnya di Kabupaten Bengkalis terhadap sejumlah bahan pokok dari luar Kabupaten Bengkalis, laju inflasi yang masih berkisar di angka 2 % ini juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan inflasi di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai sebagai pusat distribusi barang kebutuhan pokok ke Kabupaten Bengkalis. Namun, dari sisi



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

inflasi non bahan pokok untuk Kabupaten Bengkalis tidak terlalu signifikan mempengaruhi kondisi inflasi di tingkat kabupaten karena disebabkan oleh dukungan anggaran pada sektor-sektor pelayanan dasar bagi masyarakat relatif besar setiap tahunnya. Namun, yang perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk akhir tahun sesuai dengan data dari Bank Indonesia terkait peningkatan inflasi nasional sebesar 4,7 – 5,5 % yang membutuhkan kesiapan daerah dalam menghadapi dan mengantisipasinya melalui terobosan kebijakan akhir tahun yang dapat mengurangi beban inflasi bagi masyarakat.

- (4) PDRB per Kapita atas harga berlaku (AHB) menunjukkan adanya kondisi penurunan sebagai akibat menurunnya sejumlah sektor di tahun 2020, namun pada tahun 2021 Kabupaten Bengkalis terjadi peningkatan dari Rp. 127,46 Juta/Kapita menjadi Rp. 129,43 Juta/Kapita dan terus mengalami peningkatan sebesar Rp. 201,17 Juta/Kapita di tahun 2022 dengan mempertimbangkan akan adanya pergerakan sektor-sektor pendukung ke pertumbuhan yang positif khususnya dari kelompok-kelompok sektor di Kabupaten Bengkalis sebagai akibat meningkatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan 2022.
- (5) Pertumbuhan PDRB per Kapita tersebut juga menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,63 %, sehingga untuk tahun 2022 kondisi TPT Kabupaten Bengkalis yang diperkirakan sebesar 8,75 % dikoreksi penurunannya menjadi 6,65 %. Adanya peningkatan yang tidak terlalu signifikan terhadap TPT diperkirakan dari kontribusi Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) di tahun 2022 yang belum sepenuhnya akan terserap di akhir tahun 2022.
- (6) Jika disandingkan dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 sebesar 6,63 % yang turun dari tahun 2020, dan kemudian dengan asumsi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif dari sektor-sektor pemberi lapangan kerja dan tidak terlalu besarnya kemungkinan TPT di tahun 2022 serta meningkatnya penyerapan anggaran dari sejumlah program unggulan daerah dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah, maka untuk tahun 2022 kondisi kemiskinan di Kabupaten Bengkalis diperkirakan akan menurun yang relatif besar dari tahun sebelumnya yaitu pada angka 6,05 %.
- (7) Pengaruh pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB per kapita dan penurunan angka kemiskinan diharapkan juga akan berdampak pada menurunnya kesenjangan kesejahteraan (Gini ratio/indeks Gini) yang pada tahun 2022 diprediksi menurun III-5 menjadi 0.275 point sekalipun masih lebih besar dari angka di tahun 2021 sebesar 0,273 Point.

Perkembangan indikator Ekonomi Makro tahun 2022 yang mengalami perubahan asumsi tersebut selain sebagai dampak membaiknya kondisi ekonomi Kabupaten Bengkalis juga sebagai akibat adanya peningkatan asumsi pendapatan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

bersumber dari dana transfer pusat ke daerah yang masuk di TW II tahun 2022 sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga akan melakukan sejumlah peningkatan belanja pada perubahan tahun 2022 ini.

2.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan tidak dapat dilepaskan dari kapasitas anggaran penerimaan yang tersedia untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal itu, anggaran belanja daerah ditentukan dari hasil analisis perkiraan sumber-sumber penerimaan daerah.

Perumusan kebijakan keuangan daerah menyangkut pada upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memaksimalkan belanja daerah. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut di Kabupaten Bengkalis mengedepankan prinsip money follow program dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran yang lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi yang dituangkan dalam RPJMD 2016-2021 dan prioritas pembangunan RKPd 2022. Dengan demikian kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dapat diuraikan pada bagian berikut ini.

a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Seiring dengan perkembangan masyarakat maka kebutuhan akan pendanaan pembangunan daerah juga semakin meningkat. Kondisi saat ini Kabupaten Bengkalis dihadapkan pada ketersediaan anggaran pendapatan dari sumber-sumber pendapatan yang sudah ada yang sangat terbatas. Penyebaran virus covid-19 yang begitu masif, diperkirakan pada tahun 2022 akan semakin berkurang seiring dengan telah dilakukannya vaksinasi secara bertahap. Namun eksese-eksese dari dampak penyebarannya akan tetap dirasakan dan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Bagi Kabupaten Bengkalis tidak hanya penyebaran Covid-19 sebagai variabel pengganggu pertumbuhan ekonomi tetapi juga menurunnya secara drastis harga minyak di pasaran internasional, dan kecenderungan menurunnya produksi minyak. Kondisi yang demikian diprediksi akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis. Berkenaan dengan hal tersebut untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis maka dilakukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah, khususnya yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Memperbaiki tata kelola pendapatan asli daerah dengan melakukan perombakan administrasi perpajakan dan retribusi daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 3) Mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah;
- 5) Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi;
- 6) Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal dan antar instansi pengelola pendapatan daerah;
- 7) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama menyangkut dengan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
- 8) Sosialisasi, mendorong dan mewajibkan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang bagi wajib pajak yang melakukan usaha dan pekerjaan di wilayah Kabupaten Bengkalis;

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut diatas diperkirakan akan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Berdasarkan asumsi tersebut, perkiraan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- a) Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan dari anggaran pendapatan tahun berjalan sebesar 22,96% pada tahun 2022;
- b) Dana Bagi Hasil diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar 17,46 % dari anggaran tahun berjalan pada tahun 2022;
- c) Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus diperkirakan meningkat sebesar 10,43 % pada tahun 2022, karena pendapatan pemerintah pusat juga diperkirakan akan meningkat;

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2022-2023, sektor pendapatan yang dominan masih bersumber dari transfer Pemerintah Pusat, yakni dengan total kontribusi pada kisaran 78,12 persen dari total pendapatan secara keseluruhan. Kondisi yang demikian disebabkan karena Kabupaten Bengkalis adalah merupakan daerah penghasil minyak terbesar di Provinsi Riau yang mendapatkan porsi dana bagi hasil khususnya bagi hasil sumberdaya alam yang cukup besar. Namun demikian pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus di genjot penerimaannya dengan berbagai kebijakan baik itu intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dengan demikian diproyeksikan pada tahun 2022 kontribusi PAD terhadap total pendapatan meningkat dari 10,77 persen tahun menjadi 11,30 persen.

Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah yang menjadi sumber utama dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis masih tergantung pada sumber-sumber yang berasal dari pemerintah pusat. Kondisi ini tentu harus disikapi secara bijak, serta terus memacu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat melalui inovasi-inovasi daerah dalam merangsang peningkatan pendapatan asli daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

b. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam mengalokasikan belanja daerah, maka kebijakan yang harus dilakukan adalah memprioritaskan penganggaran pada belanja yang wajib dan mengikat. Belanja yang mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Setelah terpenuhinya belanja wajib dan mengikat selanjutnya barulah menganggarkan belanja yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tentunya berhubungan dengan kewenangan daerah baik itu urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 tahun akuntansi. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sementara belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. pada tahun 2022 belanja Kabupaten Bengkalis diproyeksikan meningkat. Peningkatan belanja didasarkan pada meningkatnya proyeksi pendapatan pada tahun 2022.

Dengan berlandaskan pada kondisi yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan permasalahan dan issue yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut :

- Pemanfaatan belanja daerah secara efisien dan efektif yang diarahkan pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga proporsi belanja operasi khususnya belanja barang dan jasa dan belanja modal.
- Memprioritaskan belanja wajib dan mengikat, serta belanja mandatori seperti belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengembangan SDM aparatur.
- Memprioritas belanja yang terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum
- Memprioritaskan belanja modal yang berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- Kebutuhan belanja daerah diarahkan dengan memperbesar barang dan jasa serta belanja modal untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah, yaitu diarahkan untuk mempercepat mengatasi permasalahan pokok daerah seperti perbaikan mutu pelayanan publik, utamanya pelayanan dasar, penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja,



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB dan perluasan daya saing investasi.

- Meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi, dan mengefisienkan belanja hibah maupun belanja sosial.

Belanja daerah sebagaimana yang tertuang dalam APBD baik murni maupun APBD Perubahan menggunakan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan umum belanja daerah Tahun Anggaran 2022 dilakukan melalui penerapan strategi yang mengutamakan pencapaian sasaran program pembangunan dimana alokasinya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu dan penanganan masalah-masalah khusus yang perlu ditangani serta menampung aspirasi masyarakat yang mendesak dan membutuhkan perhatian lebih dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, pemberian Pinjaman Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Bengkulu pada umumnya berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, yang dipergunakan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak ketiga lainnya serta untuk menutup defisit Anggaran.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 diarahkan pada SILPA yang diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran. Sementara itu kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 diarahkan untuk penyertaan modal daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai kebijakan keuangan daerah, lebih lanjut dijabarkan dalam indikator pencapaian fiskal daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2022. Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022.

Tabel II.2

Indikator Kinerja Fiskal Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022

(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	APBD MURNI	PERUBAHAN APBD	KENAIKAN /PENURUNAN APBD	
			Rp	%
I.Pendapatan	3.470.189,00	3.347.978,00	122.211,00	(3,52)
I.1.Pendapatan Asli Daerah	289.630,00	344.413,00	54.783,00	18,91
I.2.Dana Perimbangan	3.180.559,00	3.003.565,00	176.994,00	(5,56)
I.3.Lain-Lain Pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00
II.Belanja	3.989.958,00	4.517.938,00	527.980,00	13,23
II.1.Belanja Operasi	2.474.938,00	2.799.554,00	324.616,00	13,12
II.2.Belanja Modal	973.652,00	1.186.441,00	212.789,00	21,85
II.3.Belanja Tidak Terduga	6.804,00	15.939,00	9.135,00	134,26
II.4.Belanja Transfer	534.562,00	516.003,00	(18.559,00)	(3,47)
Surplus/Defisit	(519.768,00)	(1.169.959,00)	(650.191,00)	125,09
III.Pembiayaan	529.768,00	1.179.959,00	(650.191,00)	122,73
III.1.Penerimaan	529.768,00	1.179.959,00	(650.191,00)	122,73
III.2.Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
SilPA Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Tujuan pokok dan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 merupakan penjabaran dan penerjemahan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 serta penyelarasan terhadap RKP 2022 dan RKPD Provinsi Riau tahun 2022. Selain itu, RKPD juga merupakan kristalisasi dari komitmen pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap masyarakat dalam pencapaian Visi Pembangunan Daerah:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”

Agar pencapaian Visi Pembangunan 2021-2026 dapat dilaksanakan dengan baik, maka ditetapkanlah sejumlah misi, tujuan dan sasaran pembangunan untuk mendukung pencapaian tersebut. Dimana keterhubungan misi, tujuan dan sasaran dapat dijelaskan pada tabel II.3. berikut ini.

Tabel II.3 Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada RPJMD

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PRIORITAS 2022
1	Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian	Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman	Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian daerah Perekonomian Daerah	Perekonomian Daerah
			Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemic	Perekonomian Daerah
		Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang unggul, mandiri dan berdaya saing	Terwujudnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing	Sumber daya manusia
			Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Sumber daya manusia
Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan asset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif	Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah	Perekonomian Daerah		
	Terciptanya iklim investasi yang kondusif	Perekonomian Daerah		
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur berkarakter untuk mencapai kinerja pembangunan daerah yang lebih baik	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan modernisasi birokrasi	
		Meningkatkan hubungan masyarakat yang harmonis berlandaskan nilai agama dan budaya	Terwujudnya kerukunan umat beragama	
			Terwujudnya nilai-nilai budaya Melayu	
Terwujudnya masyarakat yang berkarakter	Terwujudnya pengembangan olahraga dan kepemudaan serta pencegahan penyalahgunaan narkoba			
	Terwujudnya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan melalui agenda perempuan berdaya keluarga sejahtera			
3	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan	Meningkatkan kualitas aksesibilitas antar wilayah dan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas	
			Tersedianya kawasan pemukiman dan perumahan	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat		yang tertata secara baik	
		Tersedianya layanan airbersih	
		Tersedianya layanan energi listrik yang memadai	
	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkesinambungan Tersedianya aksesibilitas infrastruktur antar kawasan, antar daerah dan antar wilayah Terwujudnya sinergi pembangunan antar kawasan, antar daerah dan antar pemerintah dengan memanfaatkan potensi kawasan perbatasan Tersedianya layanan air bersih Tersedianya layanan energi listrik yang memadai	
	Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah perbatasan		

Tabel II.4 berikut ini menyajikan konsistensi tema (tujuan pokok) pembangunan tahun 2022 antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis.

Tabel II.4 Konsistensi Tema (Tujuan Pokok) Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

NASIONAL	PROVINSI RIAU	KABUPATEN BENGKALIS
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural	Meningkatkan kemandirian ekonomi berbasis industri, pertanian dan pariwisata dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan aksesibilitas dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan

Untuk melihat keterkaitan yang lebih terperinci sasaran antara pemerinatah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.5 Konsistensi Prioritas/Sasaran Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

NASIONAL	PROVINSI RIAU	KABUPATEN BENGKALIS
<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Industri Pertanian Pariwisata Infrastruktur Sumber daya manusia Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber daya manusia Aksesibilitas dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan Perekonomian Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar • Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim • Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik 		
---	--	--

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pada perencanaan jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026. Sementara itu, perencanaan pada tingkat Provinsi Riau, tahun 2022 merupakan pelaksanaan Tahun ke-3 RPJMD 2020-2025, demikian pula dengan RPJM Nasional.

Konsistensi rencana pembangunan tahun 2022 antara Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Bengkalis adalah pada:

- 1) sumberdaya manusia
- 2) aksesibilitas dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
- 3) Perekonomian daerah

Konsistensi antara isu strategis dan sasaran pokok (prioritas) pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dapat dilihat pada tabel II.6 berikut ini.

Tabel II.6 Konsistensi Isu Strategis dan Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

Isu Strategis	Sasaran Pokok (Prioritas)
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sumber daya manusia
Peningkatan aksesibilitas dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Aksesibilitas dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan
Peningkatan perekonomian masyarakat	Perekonomian daerah

Konsistensi antara sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2022 dengan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026 seperti terlihat pada tabel II-7 berikut ini :

Tabel II-7 Konsistensi Sasaran Pokok (Prioritas) Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 dan Sasaran RPJMD Kab. Bengkalis Tahun 2021-2026

Sasaran Pokok (Prioritas) RKPDP 2022	Sasaran RPJMD
Sumber daya manusia	Terwujudnya SDM yang unggul, mandiri dan berdaya saing Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat
Aksesibilitas dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan	Tersedianya infrastruktur yang berkualitas Tersedianya kawasan pemukiman dan perumahan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Perekonomian daerah	<p>yang tertata secara baik</p> <p>Tersedianya layanan airbersih</p> <p>Tersedianya layanan energi listrik yang memadai</p> <p>Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkesinambungan</p> <p>Tersedianya aksesibilitas infrastruktur antar kawasan, antar daerah dan antar wilayah</p> <p>Terwujudnya sinergi pembangunan antar kawasan, antar daerah dan antar pemerintah dengan memanfaatkan potensi kawasan perbatasan</p> <p>Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian daerah</p> <p>Terwujudnya pemulihan ekonomi daerah dan reformasi sosial pasca pandemic</p> <p>Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah</p> <p>Terciptanya iklim investasi yang kondusif</p>
---------------------	---

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Tabel II.8 berikut ini menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran prioritas RPJMD Kabupaten Bengkalis 2021 – 2026 pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022.

Tabel II.8 Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kab. Bengkalis 2021- 2026 untuk target tahun 2022

N O.	Indikator	Satuan	Target Tahun 2022	Kondisi akhir RPJMD 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi (Dengan Migas)	% *ADHK	-1,02%	0,51%
2.	Pertumbuhan Agregat sektoral di luar Migas	% *ADHK	1,25%	3,25%
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	74,47	76,122
4.	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	%	11,86%	15,98%
5.	Pendapatan Perkapita Penduduk	Juta Rp/Kapita/Tahun *ADH	201,17	205,59
6.	Angka pengangguran	%	8,75	8,34
7.	Angka Kemiskinan	%	6,07	5,56
8.	IKLH	%	70,61	71,44
9.	Indeks Resiko Bencana		100,1	62,56
10.	Gini Ratio	Point	0,279	0,275
11.	Indek Reformasi Birokrasi		80	90
12.	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	55,49	63,43

Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan untuk target tahun 2022 terhadap capaian kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2021–2026. Program dan kegiatan yang dituangkan berdasarkan skala prioritas pencapaian visi dan misi daerah yang juga merupakan akumulasi berbagai aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Rencana kerja pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan capaian kinerja daerah pada tahun sebelumnya serta sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 yang merupakan tahun kedua bagi Bupati Bengkulu periode 2021–2026. Selain itu, juga mempertimbangkan isu terkini yang memerlukan antisipasi pada tahun 2022. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu untuk mendanai kegiatan yang telah dianggarkan;
- e. Posisi keuangan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan berupa pajak, retribusi dan penerimaan lainnya serta kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu akibat dari pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022; dan
- f. Informasi tentang perubahan Posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor;);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu;
- r. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

1.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari SKPD dan PPKD (BUD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022 yang berbasis akrual terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Daerah menyajikan data tentang pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan daerah. Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyajikan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal. Data/informasi keuangan dari PPKD (BUD) terdiri dari Pendapatan Transfer, Lain-Lain PAD yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, dan Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2) Laporan Arus Kas (LAK)

Data keuangan mengenai aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Bendaharawan Umum Daerah (BUD) disusun dalam salah satu Laporan Keuangan yaitu Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas hanya disusun oleh Entitas Pelaporan yakni Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada dibawah pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu.

3) Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset yang disajikan terdiri dari aset lancar dan aset nonlancar, kewajiban disajikan terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Untuk data mengenai kas daerah, investasi, dana cadangan, tuntutan perbendaharaan, piutang dana transfer, utang bunga, utang luar negeri (jangka pendek dan jangka panjang) didasarkan pada neraca PPKD (Bendahara Umum Daerah), sedangkan data mengenai kas dibendahara penerimaan, kas dibendahara pengeluaran, piutang pajak, piutang retribusi, tuntutan ganti rugi, persediaan, aset tetap, aset lainnya, utang pemotongan pajak (PFK) didasarkan pada neraca konsolidasi dari SKPD.

4) Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal, Silpa/Sikpa, Koreksi, dan Saldo Anggaran Lebih akhir.

5) Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan LO, Beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar terhadap koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap, lain-lain dan ekuitas akhir.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang menjelaskan tentang akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL). Penjelasan mengenai kondisi umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, penjelasan mengenai Kebijakan Akuntansi yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu, Ekonomi makro, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan yang dilengkapi dengan tabel dan grafik. Informasi tambahan dengan diterapkan akuntansi berbasis akrual yakni pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Semua informasi dan penjelasan tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan guna pengungkapan yang andal dan memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan penggabungan antara Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

b. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022 berjumlah 47 OPD terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat dan Kecamatan, dengan rincian pada Tabel 1.1.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 1.1

Daftar OPD pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2022

No	SKPD	Alamat Kantor
1	Sekretariat Daerah	Jl. Ahmad Yani Bengkulu
2	Sekretariat DPRD	Jl. Antara Bengkulu
3	Dinas Pendidikan	Jl. Pertanian Bengkulu
4	Dinas Kesehatan	Jl. Pertanian Bengkulu
5	RSUD Kabupaten Bengkulu	Jl. Kelapapati Tengah Bengkulu
6	RSUD Kecamatan Mandau	Duri Kec. Mandau
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jl. Pertanian Bengkulu
8	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Jl. Pramuka Bengkulu
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Ahmad Yani Bengkulu
10	Dinas Pemadam Kebakaran	Jl. Sudirman Bengkulu
11	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. H.R Subrantas Bengkulu
12	Dinas Sosial	Jl. Antara Bengkulu
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Duri Kec. Mandau
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jl. Pertanian Bengkulu
15	Dinas Ketahanan Pangan	Jl. Antara Bengkulu
16	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Pertanian Bengkulu
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jl. Pertanian Bengkulu
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jl. Pertanian Bengkulu
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jl. Hang Tuah Bengkulu
20	Dinas Perhubungan	Jl. Pramuka Bengkulu
21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Jl. Kartini Bengkulu
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jl. Pertanian Bengkulu
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jl. Antara Bengkulu
24	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Jl. Arif Rahman Bengkulu
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jl. Pertanian Bengkulu
26	Dinas Perikanan	Jl. Pertanian Bengkulu
27	Dinas Perkebunan	Jl. Pertanian Bengkulu
28	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Jl. Pertanian Bengkulu
29	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Jl. Pertanian Bengkulu
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Antara Bengkulu
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jl. Pertanian Bengkulu
32	Badan Pendapatan Daerah	Jl. Sudirman Bengkulu
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Jl. Antara Bengkulu



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	SKPD	Alamat Kantor
34	Badan Penelitian dan Pengembangan	Jl. Pertanian Bengkalis
35	Inspektorat	Jl. Antara Bengkalis
36	Kantor Camat Bengkalis	Jl. Panglima Minal Bengkalis
37	Kantor Camat Bantan	Kec. Bantan
38	Kantor Camat Bukit Batu	Kec. Bukit Batu
39	Kantor Camat Siak Kecil	Kec. Siak Kecil
40	Kantor Camat Bandar Laksamana	Kec. Bandar Laksamana
41	Kantor Camat Rupert	Kec. Rupert
42	Kantor Camat Rupert Utara	Kec. Rupert Utara
43	Kantor Camat Mandau	Kec. Mandau
44	Kantor Camat Pinggir	Kec. Pinggir
45	Kantor Camat Bathin Solapan	Kec. Bathin Solapan
46	Kantor Camat Talang Muandau	Kec. Talang Muandau
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. Antara Bengkalis

c. Entitas Pelaporan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis disusun oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang juga selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 yang berbasis akrual merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan SKPKD.

1.4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

a. Sejarah Kabupaten Bengkalis

Pembentukan geologi wilayah Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari sejarah pembentukan geologi Pulau Sumatera pada masa ratusan juta tahun yang lalu, dimana sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera (Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu dan Siak Kecil) terbentuk dari endapan gambut masa lalu sebagai akibat dari erosi besar pada bagian hulu sungai-sungai besar di Pulau Sumatera, yang selanjutnya semakin ke muara endapan yang terbawa semakin besar mengendap sehingga di beberapa bagian timur pesisir Pulau Sumatera (terutama yang masuk pada bagian cekungan tengah) telah membentuk formasi endapan-endapan gambut pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya, diantaranya Pulau Bengkalis dan Pulau Rupert yang juga merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis.

Sejarah terbentuknya wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, merupakan bagian dari wilayah pemerintahan Kerajaan Siak



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sri Indrapura. Setelah diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti dengan penyerahan kekuasaan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

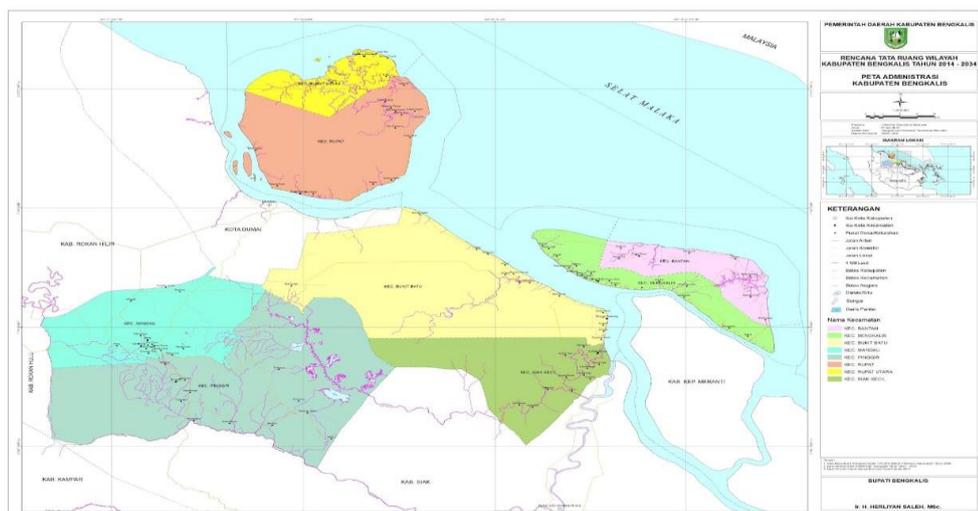
Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan bahwa Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II, yang pada waktu itu masih berada dibawah Provinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Padang. Dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Pada saat itu Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau. Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, sejumlah wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis satu demi satu dimekarkan. Dimulai pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 terbentuklah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya pada tahun yang sama melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 dibentuklah Kota Dumai merupakan pemekaran pertama dari Kabupaten Bengkalis. Dan terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 beberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Bengkalis memiliki luas 8.403,28 km² yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan sebanyak 15 pulau utama.

Gambar. I-1 Peta Administratif Kabupaten Bengkalis





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kabupaten Bengkalis terdiri dari 11 kecamatan, 18 kelurahan dan 136 desa. Adapun luas wilayah pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel I-1 berikut.

Tabel I-1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bengkalis

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Persentase
1	Bengkalis	Bengkalis Kota	3	28	464,04	5,32
2	Bantan	Selatbaru	-	23	443,29	5,12
3	Bukit Batu	Sungai Pakning	1	9	603,93	6,97
4	Bandar Laksamana	Tenggayun	-	7	1,321,88	15,26
5	Siak Kecil	Lubuk Muda	-	17	942,86	10,88
6	Mandau	Air Jamban	9	2	521,86	6,02
7	Batin Solapan	Sebangar	-	13	686,32	7,92
8	Pinggir	Pinggir	2	8	775,03	8,95
9	Talang Muandau	Beringin	-	9	1,379,26	15,92
10	Rupat	Batu Panjang	4	12	1,145,30	13,22
11	Rupat Utara	Tanjung Medang	-	8	378,41	4,37
Total Keseluruhan			18	136	8.662,18	100,00

Sumber : RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

Secara astronomis wilayah Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi 100°57'57,6" – 102°30'25,2" Bujur Timur dan 2°7'37,2" - 0°55'33,6" Lintang Utara. Sedangkan secara geografis wilayah Kabupaten Bengkalis terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis berada bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dari bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur.

Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dengan luas total daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 938 km² atau 93.840 hektar dan Pulau Rupat yang terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dengan luas daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 62.850 Ha atau 1.524,85 km², dimana Pulau Rupat memiliki 15 buah pulau-pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik merupakan endapan-endapan geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya.

Untuk geografis kawasan pesisirnya terdiri terdiri dari Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan luas daratan dan perairannya 187.021 Ha atau 1.870,21 km². Kawasan tersebut berada di perairan Selat Pakning yang menghubungkan antara kawasan tersebut dengan Pulau Bengkalis dan Pulau Merbau (Kabupaten Kepulauan Meranti). Selanjutnya, geografis kawasan daratan terdiri dari Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir,



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau yang merupakan bentangan tengah dan timur yang terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi elevasi daratan yang bergelombang dengan luas total daratannya sebesar 3.440,47 km².

Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis, selain karena sebagian wilayahnya ada yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka serta pesisir barat Malaysia dan ada juga sebagian wilayahnya yang berada pada jalur ekonomi penting Pulau Sumatera dan beberapa kabupaten/kota disekitarnya. Posisi tersebut tentunya dapat saja 9 berimplikasi positif dan negatif pada posisi geostrategis Kabupaten Bengkalis di masa mendatang. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kabupaten Bengkalis masih memiliki potensi daya tarik bagi investor lokal maupun luar kabupaten, hal ini dikarenakan lahannya yang masih potensi untuk dikembangkan, ketersediaan sumber daya serta anggaran daerah yang masih cukup besar untuk dijadikan market modal bagi kedatangan investor ke wilayah Kabupaten Bengkalis.

c. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Bengkalis umumnya relatif datar dengan kemiringan lereng rata-rata sebesar 2-6 mdpl. Bentuk wilayah daratannya sebagian besar berbentuk datar dengan kemiringan berkisar antara 0-3 mdpl yang mencakupi 71 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 551.949 ha, kecuali pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu yang memiliki kemiringan lereng antar 3-8 mdpl yang mencakupi 19% dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 147.705 ha. Selanjutnya kemiringan antara 8-16 mdpl dengan tekstur berombak hingga bergelombang yang mencakupi luas 2 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 15.548 ha dan terakhir kemiringan >16 mdpl dengan tekstur bergelombang hingga berbukit kecil yang mencakupi 8 % dari luas wilayah kabupaten atau setara dengan 62.191 ha. Adapun fisiografi wilayah Kabupaten Bengkalis dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a) Cekungan Rawa Daerah ini dijumpai di bagian tengah, berupa cekungan tertutup yang terdiri dari rawa gambut yang berasal dari bahan endapan aluvial. Bentuk wilayah datar sampai cekung (0-3 mdpl) dengan bentukan drainase alam yang jelek. Daerah ini mencakup 71% dari luas kabupaten yang tersebar di Kecamatan Rupert, Rupert Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. b) Dataran Fisiografi ini berasal dari endapan aluvial mencapai 21% dari luas kabupaten. Bentuk wilayah pada unit fisiografi ini adalah bergelombang sampai berombak (3-18 mdpl) dengan bentukan drainase sedang sampai baik. Disamping yang terbentuk dari endapan aluvial, bentuk dataran ini juga berasal dari sabuk meander dan teras laut tua. Bentuk wilayah ini terdapat pada beberapa bagian kecil di Kecamatan Mandau, Pinggir dan sedikit di Kecamatan Bukit Batu. Uraian di atas menunjukkan wilayah Kabupaten Bengkalis didominasi oleh kelompok kubah gambut dan kelompok marin. Kelompok kubah gambut berkembang dari endapan organik dan semakin tebal jika semakin jauh dari pantai. Gambut yang dipengaruhi oleh air laut mempunyai potensi asam sulfat tinggi. Sedangkan kelompok marin berkembang dari endapan mineral yang dipengaruhi pasang surut air laut dan mempunyai lebar bervariasi antara 0,5-5 km.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

d. Geologi

Pembentukan geologi wilayah Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari sejarah pembentukan geologi Pulau Sumatera pada masa ratusan juta tahun yang lalu, dimana sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Kecamatan Mandau, Pinggir, Bukit Batu dan Siak Kecil berada di bagian pesisir timur Pulau Sumatera yang terbentuk dari endapan gambut masa lalu sebagai akibat dari erosi besar pada bagian hulu sungai-sungai besar di Pulau Sumatera dimana semakin ke muara endapan yang terbawa semakin besar mengendap sehingga di beberapa bagian timur pesisir Pulau Sumatera (terutama yang masuk pada bagian cekungan tengah) telah membentuk formasi endapan gambut pulau-pulau besar dan kecil di sekitarnya yang diantaranya membentuk Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat. Secara umum kondisi geologi wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari tiga formasi yaitu: formasi petani (Tup), formasi telisa (TMT) dan formasi pematang (TLpe). Formasi petani disebut sebagai lapisan palembang tengah dan bawah, sedangkan kuartar terdiri dari formasi minas (Qpmi), endapan permukaan muda (Qh) dan endapan permukaan tua (Qp). Aluvium tua umumnya merupakan bagian kering yang terdapat di Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bukit Batu. Sedangkan aluvium muda menempati cekungan atau daerah belakang pantai yang berawa dan alur-alur pasang surut yang terdapat di Kecamatan Rupat, Rupat Utara, Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil. Khusus Kecamatan Mandau dan Pinggir terletak dalam struktur tersier dan cekungan deposit yang sering disebut sebagai cekungan Sumatera Tengah dimana endapan dan cekungan ini terdiri atas lapisan yang tebal di antara deposit minyak bumi dan batu-batuan.

e. Hidrologi

Kabupaten Bengkalis memiliki dua belas aliran sungai yang berada di Kecamatan Rupat, Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bukit Batu. Kedua belas aliran sungai tersebut adalah: Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Senebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Sair, Sungai Penonton, Sungai Jangkang, Sungai Bantan Tengah dan Sungai Kembang Luar. Diantara sungai yang ada di Kabupaten Bengkalis yang sangat penting peranannya sebagai prasarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah aliran Sungai Siak dan Siak Kecil dengan panjang ± 90 Km. Beberapa sungai yang mencirikan kondisi hidrologi daerah rawa diantaranya adalah Sungai Siak Kecil, Sungai Pakning, Sungai Bukit Batu, Sungai Penebak, Sungai Raya, Sungai Rempang, Sungai Nyiur, Sungai Suir, Sungai Penonton, Sungai Jangkang dan Sungai Bantan Tengah. Sungai-sungai tersebut dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Sehingga intrusi air laut tersebut berpotensi menyebabkan kualitas air tanah di wilayah ini bersifat payau/asin dengan salinitas sedang sampai tinggi. Keadaan drainase wilayah sebagian besar dicirikan oleh adanya tanah gambut yang tersebar di Kecamatan Bukit Batu, Mandau dan Rupat. Pada beberapa bagian wilayah banyak yang masih mengalami genangan, terjadi di Kecamatan Rupat dan Mandau. Keberadaan lahan gambut yang mendominasi wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan kantong-kantong penyimpanan air yang sangat besar.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

f. Klimatologi

Kondisi iklim Kabupaten Bengkalis, menurut klasifikasi Oldeman menunjukkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupal dan Rupal Utara termasuk zona agroklimat E dengan sub zona agroklimat E3, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya 4-6 bulan dalam setahun dengan curah hujan < 100 mm/bulan. Sedangkan Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu dan Siak Kecil termasuk dalam kelompok sub zona agroklimat E1, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya kecil atau sama dengan dua bulan. Berdasarkan data curah hujan bulanan rata-rata Kecamatan Bantan, Bengkalis, Bukit Batu dan Siak Kecil memiliki empat bulan kering, yaitu Januari, Februari, Maret dan Juni dan tidak memiliki bulan basah. Sedangkan Kecamatan Mandau, Pinggir, Rupal dan Rupal Utara memiliki satu bulan kering yaitu bulan Februari dan satu bulan basah yaitu bulan Oktober. Setiap kecamatan memiliki tipe hujan yang hampir sama yaitu memiliki puncak hujan bimodal (Maret -April dan Oktober-November) dan musim kering yang lemah.

g. Demografi

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bengkalis mencapai 65 jiwa per km². Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis termasuk kategori penduduk sangat jarang. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Bengkalis tiap tahunnya semakin bertambah dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan kepadatan penduduk tersebut seiring dengan makin berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dan regional yang terjadi di daerah ini. Jumlah penduduk yang paling padat terdapat pada Kecamatan Mandau yaitu sebanyak 190 jiwa/km², dengan jumlah penduduk sebanyak 150,806 jiwa atau sebesar 27% dari total penduduk pada Kabupaten Bengkalis. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Rupal Utara yaitu sebanyak 13.783 Jiwa atau 2,49 persen dari total penduduk Kabupaten Bengkalis. Kepadatan penduduk per wilayah akan memberikan pengaruh terhadap permintaan lahan baik untuk penggunaan perumahan maupun untuk sektor pertanian dan lainnya sehingga akan memicu terjadinya peningkatan harga lahan dan perlunya penyediaan sarana dan prasarana pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Kondisi penduduk yang padat juga akan mengakibatkan terjadinya persolaan sosial terutama menyangkut kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan dan antar wilayah.

Sementara dari komposisi penduduk, jumlah penduduk laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan penduduk perempuan, di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Pinggir, Bathin Solapan, Talang Muandau dan Bandar Laksamana. Rasio Jenis Kelamin pada Kabupaten Bengkalis berada pada angka 105 yang artinya dalam 100 jumlah perempuan pada kabupaten Bengkalis terdapat 105 laki laki.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

1.5 SUMBER DANA

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp4.517.938.208.653,00 yang bersumber dari:

- | | | |
|--|------|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sebesar | : Rp | 344.413.626.080,00 |
| b. Pendapatan Transfer sebesar | : Rp | 3.003.565.233.511,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar | : Rp | 3.347.978.859.591,00 |
| d. Penerimaan Pembiayaan | : Rp | 1.179.959.349.062,00 |

1.6 KEBIJAKAN KONVERSI

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

1.7. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian untuk mensinergikan antara Peraturan sebagaimana tersebut diatas, khusus untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 melakukan penyesuaian dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana kode rekening dikonversi ke kode akun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan pelaksanaannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, yang secara teknis akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu disajikan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu
- 1.5. Sumber Dana
- 1.6. Kebijakan Konversi
- 1.7. Perubahan kebijakan Akuntansi
- 1.8. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
- 2.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
- 3.3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Target Pendapatan Tahun Anggaran 2022

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
 - 5.1.1. Pendapatan-LRA
 - 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
 - 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 5.1.1.2 Pendapatan Transfer
 - 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
 - 5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
 - 5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya
 - 5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan
- 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah
- 5.1.2. Belanja
 - 5.1.2.1 Belanja Operasi
 - 5.1.2.2 Belanja Modal
 - 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga
- 5.1.3. Transfer
- 5.1.4. Pembiayaan Netto
 - 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan
- 5.1.5. Pendapatan-LO
- 5.1.6. Beban
- 5.1.7. Aset
- 5.1.8. Kewajiban
- 5.1.9. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Daerah.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI LAINNYA

- 6.1. Informasi Rekening Giro yang Dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
- 6.2. Informasi Deposito Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
- 6.3. Informasi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)
- 6.4. Informasi Lainnya

BAB VII PENUTUP



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Pada hakekatnya anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan adanya anggaran pada setiap daerah di seluruh Indonesia yang dikelola dengan baik dan transparan maka tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat akan tercapai sebagai mana mestinya. Penyelenggaraan urusan Pemerintah akan terlaksana dengan optimal apabila diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Tahun Anggaran 2022 Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu setelah perubahan sebesar Rp4.517.938.208.653,00 (Empat Triliun Lima Ratus Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), terdiri dari pendapatan daerah Rp3.347.978.859.591,00 ditambah penerimaan pembiayaan Rp1.169.959.349.062,00.

APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp344.413.626.080,00, Dana Transfer ditargetkan sebesar Rp3.003.565.233.511,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan sebesar Rp0,00. Sementara itu belanja dianggarkan sebesar Rp4.517.938.208.653,00 terdiri dari Belanja Operasi Rp2.799.554.077.247,00, Belanja Modal sebesar Rp1.186.441.773.748,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp15.939.026.526,00 serta Transfer Rp516.003.331.132,00. Untuk penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp1.179.959.349.062,00 sementara pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp10.000.000.000,00.

Realisasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu selama Tahun Anggaran 2022 secara ringkas dapat digambar pada Tabel III.1.

Tabel III.1.

Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022

(dalam jutaan)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
I. Pendapatan	3.347.978	3.329.414	18.564	0,55
I.1 Pendapatan Asli Daerah	344.413	349.634	-5.220	-1,52
I.2 Pendapatan Transfer	3.003.565	2.979.779	23.785	0,79
I.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	Selisih	
			Rp	%
II. Belanja	4.517.938	4.216.524	301.413	6,67
II.1 Belanja Operasi	2.799.554	2.598.560	200.993	7,18
II.2 Belanja Modal	1.186.441	1.109.714	76.726	6,47
III.3 Belanja Tak Terduga	15.939	0	15.939	100
IV. Transfer	516.003	508.249	7.753	1,50
Surplus/Defisit	(1.169.959)	(887.110)	282.848	24,18
III. Pembiayaan	1.169.959	1.179.959	-10.000	0,89
III.1 Penerimaan	1.179.959	1.179.959	0	0,00
III.2 Pengeluaran	10.000	0	10.000	100
SILPA Tahun Berjalan	0	293.010	-293.010	0

Tabel III.1 merupakan ringkasan dari Realisasi Anggaran dalam jutaan rupiah, dengan penjelasan sebagai berikut, untuk Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp3.347.978.859.591,00 dengan realisasi sebesar Rp349.634.385.373,15 atau 101,51%. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk lebih jelas dan juga sebagai data pembandingan tentang posisi Pendapatan Daerah mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, digambarkan berupa Tabel, hal ini dilakukan guna mempermudah dalam membaca dan memahami isi laporan yang disajikan. Berikut digambarkan tabel dan penjelasan terhadap pendapatan, belanja, pembiayaan beserta realisasi dan persentase perkembangannya.

a. PENDAPATAN

Pendapatan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan atas.

1) Pendapatan Asli Daerah

Tabel III.2

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 s.d. 2022

(dalam juta rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2017	373.540	271.149
2	2018	444.510	319.280
3	2019	429.370	226.245
4	2020	306.842	251.925
5	2021	344.444	284.247
6	2022	344.413	349.634



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Secara keseluruhan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 baik target maupun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis mengalami kenaikan kecuali ada penurunan pada tahun 2019, 2020 dan 2022. Untuk Tahun Anggaran 2022 penurunan target sebesar Rp30.699.285,00 atau 0,09% yaitu Rp344.413.626.080,00 dari tahun 2021 sebesar Rp344.444.325.365,00. Dan realisasi tahun 2022 sebesar Rp349.634.385.373,15 terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2021 yang realisasinya sebesar Rp284.247.223.795,72 atau 23,00%.

Dilihat dari realisasi PAD Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.47.414.915.184,03 atau 17,44% dibanding realisasi Tahun 2017. Pada tahun 2019 mengalami penurunan Rp.93.034.626.359,89 atau 29,14% dibandingkan realisasi tahun 2018. Dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.25.679.985.183,31 atau 11,35% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Pada tahun 2021 PAD sebesar Rp.284.235.094.573,72 terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2020 yang realisasinya sebesar Rp.251.925.869.915,53 atau 12,82%.

2) Pendapatan Dana Transfer

Target dan realisasi dana transfer dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, digambarkan dengan tabel dan penjelasan secara rinci guna mempermudah membaca dan memahaminya.

Tabel III. 3

Perkembangan Dana Transfer Tahun Anggaran 2017 s.d. 2022

(dalam Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2017	3.536.299	2.909.490
2	2018	3.055.965	3.040.447
3	2019	3.385.824	3.463.146
4	2020	2.538.339	2.573.597
5	2021	3.014.118	3.955.128
6	2022	3.003.565	2.979.779

Dana Transfer Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp3.003.565.233.511,00 dan target Tahun 2021 sebesar Rp3.014.118.217.102,70, terdapat penurunan target dari tahun sebelumnya sebesar Rp10.552.983.591,70 atau 0,35%.

Realisasi Dana Transfer tahun 2022 sebesar Rp2.979.779.293.552,00 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3.955.128.529.440,00 mengalami penurunan sebesar Rp975.349.290.358,00 atau 24,66%. Realisasi Dana Transfer tahun 2021 sebesar Rp3.955.128.529.440,00 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2.573.597.479.818,49 mengalami kenaikan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Rp1.381.531.104.061,51 atau 53,68%. Realisasi Dana Transfer tahun 2020 sebesar Rp2.573.597.479.818,49 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp3.463.146.359.212,47 mengalami penurunan sebesar Rp889.548.879.393,98 atau 25,69%. Realisasi tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp422.698.905.773,59 atau 13,90% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp3.040.447.453.438,88. Realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 130.957.263.557,88 atau 4,50% dibandingkan Tahun 2017 sebesar Rp2.909.490.189.881,00.

3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, mencakup beberapa ketentuan antara lain:

- 1) Hibah;
- 2) Dana darurat; dan/atau
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mulai Tahun Anggaran 2013, Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I berupa Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota dimana Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari:

- Pendapatan Hibah
- Pendapatan Dana Darurat
- Pendapatan Lainnya

Untuk mempermudah membaca dan memahami perkembangan lain-lain pendapatan yang sah berikut disajikan dengan tabel, grafik dan penjelasan secara rinci.

Tabel III.4
Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah
Tahun Anggaran 2017 s.d. 2022

(dalam Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2017	52.315	49.426
2	2018	0.00	0.00
3	2019	86.287	85.045
4	2020	92.243	91.869
5	2021	84.924	82.544
6	2022	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sebagaimana yang digambarkan pada tabel III.4 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, Lain-lain pendapatan yang sah tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp0,00 dan target Tahun 2021 sebesar Rp84.924.400.000,00, terdapat penurunan target dari tahun sebelumnya sebesar Rp84.924.400.000,00 atau 100%.

Realisasi Lain-lain pendapatan yang sah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp49.426.893.668,94 atau 100%, dari tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp85.045.520.000 atau 100%. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp6.824.360.000,00 atau 8,02%, tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp9.324.970.000,00 atau 10,15%, dan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp82.544.910.000,00 atau 100%.

b. BELANJA

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan membagi jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Perbedaan jenis belanja tersebut sangat signifikan, sehingga untuk menghasilkan laporan berupa laporan realisasi anggaran harus dilakukan konversi dari kode rekening ke kode akun.

Tahun Anggaran 2022 belanja ditargetkan sebesar Rp4.517.938.208.653,00 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.594.498.516.273,70, terdapat kenaikan target dari tahun sebelumnya sebesar Rp923.439.692.379,30 atau 25,69%. Untuk tahun anggaran 2022 realisasi belanja sebesar Rp4.216.524.993.951,88 dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi belanja sebesar Rp3.292.971.152.357,36, terdapat kenaikan realisasi belanja sebesar Rp923.564.180.754,52 atau 28,05%. Perkembangan belanja yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak terduga dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022, dapat digambarkan dan dijelaskan melalui tabel sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

1) Belanja Operasi

Tabel III.5
Perkembangan Belanja Operasi Tahun
Anggaran 2017 s.d. 2022

(Dalam Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2017	2.541.067	2.234.571
2	2018	2.070.115	1.846.310
3	2019	2.374.493	2.191.978
4	2020	2.079.598	1.981.293
5	2021	2.430.196	2.199.513
6	2022	2.799.554	2.598.560

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp2.799.554.077.247,00 dibandingkan dengan target tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.430.196.251.004,70, terdapat kenaikan target sebesar Rp369.357.826.242,30 atau 15,20%. Realisasi belanja operasi tahun 2022 sebesar Rp2.598.560.224.108,88, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp2.199.513.911.321,94, terdapat kenaikan realisasi belanja operasi sebesar Rp399.066.306.986,94 atau 18,14%.

Dari Tabel III.4 dapat dilihat perkembangan anggaran dan realisasi Belanja Operasi dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 hampir setiap tahun mengalami peningkatan, kecuali tahun 2018 dan tahun 2020.

2) Belanja Modal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Untuk Tahun Anggaran 2022 seperti tahun sebelumnya, juga ada refocussing dan realokasi anggaran Belanja Modal untuk penanganan Pandemi Covid-19 sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Persentase belanja modal dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Tahun Anggaran 2017 sebesar 35,68%. Untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar 28,18%, Tahun Anggaran 2019 sebesar 90,99%, Tahun Anggaran 2020 sebesar 17,72%, Tahun Anggaran 2021 sebesar 20,73% dan Tahun Anggaran 2022 sebesar 26,26%. Perkembangan belanja modal digambarkan dengan tabel dan penjelasan terinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel III.6
Perkembangan Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 s.d. 2022
(dalam Juta Rupiah)

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi
1	2017	1.417.368	982.284
2	2018	982.172	903.407
3	2019	1.217.603	1.108.175
4	2020	559.891	500.329
5	2021	745.222	679.492
6	2022	1.186.441	1.109.714

Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp1.186.441.773.748,00, dibandingkan dengan target belanja modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp745.222.567.165,00, terdapat kenaikan target belanja modal sebesar Rp441.219.206.583,00 atau 59,21%. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.109.714.993.117,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp679.492.555.913,42, terdapat kenaikan realisasi belanja modal sebesar Rp430.222.437.203,58 atau 63,32%.

Perkembangan realisasi belanja modal dari tahun ketahun dapat dijelaskan sebagai berikut: dari tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami penurunan Rp78.877.097.909,68, dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan Rp204.768.232.108,67 atau 22,67%, dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp607.845.917.912,15 atau 54,85%, dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp179.162.892.930,58 atau 35,81%.

Pembiayaan daerah merupakan salah satu pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus, Tahun Anggaran 2022 penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.179.959.349.062,00 direalisasikan sebesar 100,00%, realisasi penerimaan pembiayaan tersebut merupakan SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp1.179.959.349.062,91. Sedangkan alokasi untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00.

Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2022 dianggarkan defisit sebesar Rp601.992.716.957,90 merupakan Surplus/Defisit-LO, dimana jumlah pendapatan-LO secara keseluruhan lebih kecil dari jumlah Beban. Total Pendapatan-LO sebesar Rp3.235.063.694,31 sementara total Beban sebesar Rp3.838.027.443.642,21 serta Surplus/Defisit Penjualan sebelum Pos luar biasa sebesar Rp955.544.021,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

3.2 FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Secara umum faktor-faktor penunjang dalam pencapaian target pendapatan Tahun 2022 antara lain:

- a. Adanya perbaikan tata kelola pendapatan asli daerah dengan melakukan perombakan administrasi perpajakan dan retribusi daerah;
- b. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. Meningkatnya sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi;
- d. meningkatnya koordinasi internal dan eksternal dan antar instansi pengelola pendapatan daerah khususnya pada kinerja pemungutan dan data hasil pemungutan;
- e. Adanya koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama menyangkut dengan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
- f. Adanya Sosialisasi, mendorong dan mewajibkan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang bagi wajib pajak yang melakukan usaha dan pekerjaan di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target pendapatan Tahun 2022 antara lain:

- a. Penyebaran virus covid-19 yang begitu masif, diperkirakan pada tahun 2022 akan semakin berkurang seiring dengan telah dilakukannya vaksinasi secara bertahap, namun ekses-ekses dari dampak penyebarannya akan tetap dirasakan dan mengganggu pertumbuhan ekonomi;
- b. Sumber utama dalam pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis masih tergantung pada sumber-sumber yang berasal dari pemerintah pusat;
- c. Menurunnya secara drastis harga minyak di pasaran internasional, dan kecenderungan menurunnya produksi minyak, kondisi yang demikian diprediksi akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis
- d. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah;
- e. Peremajaan data dan validasi data objek pajak dan objek retribusi belum memadai;
- f. Pengawasan dan evaluasi dari pejabat terkait terhadap pemungutan pajak dan retribusi kurang optimal; dan
- g. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi kurang maksimal oleh setiap SKPD penerima pajak atau retribusi;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

- h. Pertambahan wajib pajak dan wajib retribusi baru untuk sebagian jenis pajak/retribusi tidak signifikan terutama wajib pajak reklame dan wajib pajak PBB;
- i. Kapasitas yang tersedia tidak mengalami pertambahan sehingga potensi objek retribusi yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal;
- j. Kurangnya kreatifitas dan inovasi dari SKPD penerima pajak dan retribusi untuk menggali potensi-potensi penerimaan daerah;
- k. Birokrasi yang berbelit dan proses yang lama membuat wajib pajak dan wajib retribusi mengurungkan niatnya untuk membayar pajak dan retribusi;
- l. Kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia terutama aparatur pengelola keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memadai.

3.3 MANDATORY 20 PERSEN ANGGARAN UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Sesuai Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam Pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2023 Pasal 1. Dana pendidikan selain Gaji dan biaya Pendidikan kedinasan di Alokasikan minimal 20 persen dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada tahun 2022 telah mengalokasikan untuk Bidang Pendidikan sebesar Rp892.281.592.471,00 dari total Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp4.517.938.208.653,00 atau sebesar 20% dari total Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Amandemen ke 4 pasal 31 ayat 4.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5. 3. PENJELASAN POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas.

5. 3. 1. Aset

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
9.054.735.127.515,06	9.358.668.744.217,05	(303.933.616.701,99)

Aset Pemerintah Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp9.054.735.127.515,06 dan Rp9.358.668.744.217,05 terdiri dari:

Tabel 5. 77 Rincian Aset Kabupaten Bengkulu

	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Aset Lancar	449.421.333.248,76	1.327.884.329.697,55	(878.462.996.448,79)
Investasi Jangka Panjang	517.383.104.479,00	518.272.400.090,00	(889.295.611,00)
Aset Tetap	7.522.101.779.551,60	7.309.978.441.934,46	212.123.337.617,14
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	565.828.910.235,70	202.533.572.495,04	363.295.337.740,66
	9.054.735.127.515,06	9.358.668.744.217,05	(303.933.616.701,99)

A. Aset Lancar

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
449.421.333.248,76	1.327.884.329.697,55	(878.462.996.448,79)

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing Rp449.421.333.248,76 dan Rp1.327.884.329.697,55 terdiri dari:

Tabel 5. 78 Rincian Aset Lancar

	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Kas di Kas Daerah	277.994.694.649,52	1.168.554.249.066,37	(890.559.554.416,85)
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.540.999.407,00	1.581.400,00	3.539.418.007,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	6.308,00	(6.308,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	1.179.559,00	1.758.070,00	(578.511,00)
Kas di Bendahara JKN	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	11.452.247.027,66	11.349.091.889,54	103.155.138,12
Kas di Bendahara BOS	21.048.100,00	52.662.329,00	(31.614.229,00)
Kas Lainnya	258.507.223,15	0,00	258.507.223,15
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	95.530.271.319,87	90.008.134.003,73	5.522.137.316,14
Piutang Retribusi Daerah	6.345.736.695,50	5.701.751.469,50	643.985.226,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.121.958.022,01	19.692.453.118,00	(12.570.495.095,99)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	5.051.200.495,00	0,00	5.051.200.495,00
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	33.829.083.722,51	11.352.317.619,51	22.476.766.103,00
Piutang Lainnya	12.781.757.258,24	11.803.187.344,24	978.569.914,00
Penyisihan Piutang	(79.581.794.870,19)	(74.229.823.209,38)	(5.351.971.660,81)
Beban Dibayar Dimuka	52.207.800,00	48.875.000,00	3.332.800,00
Persediaan	75.022.236.839,49	83.548.085.289,04	(8.525.848.449,55)
	449.421.333.248,76	1.327.884.329.697,55	(878.462.996.448,79)

1. Kas di Kas Daerah

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
277.994.694.649,52	1.168.554.249.066,37	(890.559.554.416,85)

Akun ini merupakan kas sebesar Rp277.994.694.649,52 yang berada di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan Rp1.168.554.249.066,37 di Kas Daerah per 31 Desember 2021. Nilai kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 terinci sebagai berikut:

Tabel 5. 79 Rincian Kas di Kas Daerah

Nama Bank	Nomor Rekening	31 Des 2022	31 Des 2021
Bank Riau Cabang Bengkalis	108-02-00180	278.016.208.149,52	1.168.575.762.066,37
Deposito Bank Riau Cabang Bengkalis	108-02-96000	0,00	0,00
Koreksi Kurang Kesalahan Pencatatan		-21.513.000,00	-21.513.000,00
Kesalahan Kurang Transfer Bank Riau		(500,00)	0,00
Jumlah Kas di Kas Daerah		277.994.694.649,52	1.168.554.249.066,37

Terjadinya perbedaan saldo Rekening Koran Bank Riau dengan Saldo Pembukuan karena adanya:

-Kurang Transfer untuk Nomor SP2D 001160 Tanggal 16 Desember 2022	(500)
-Salah setor Dana BOS Th 2021 SD IT Al Huda Duri	(21.513.000)
	(21.513.500,00)

Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis

Nomor Rekening : 108-02-00180

Tabel 5. 80 Mutasi Kas di Kas Daerah Bank Riau Kepri Cab. Bengkalis

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	1.168.575.762.066,37	0,00	1.168.575.762.066,37
Pendapatan 2022	2.947.194.563.227,15		4.115.770.325.293,52
Setoran UYHD 2021 (Jasa Giro)	60.421,00		4.115.770.385.714,52
Setoran UYHD 2022	36.458.033.679,00		4.152.228.419.393,52
Belanja (SP2D)		3.874.215.557.022,00	278.012.862.371,52



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	1.758.070,00		278.014.620.441,52
Kesalahan Transfer Potongan Pajak PPN Bank Riau	1.587.708		278.016.208.149,52
Kesalahan kelebihan Transfer Bank Riau	18.166.418,00	18.166.418,00	278.016.208.149,52
Biaya ADM Bank	5.771.481,00	5.771.481,00	278.016.208.149,52
Salah Debet Pajak id Billing	15.000,00	15.000,00	278.016.208.149,52
Salah Debet Pajak id Billing	173.140,00	173.140,00	278.016.208.149,52
Salah Debet Pajak id Billing	3.498.163,00	3.498.163,00	278.016.208.149,52
	4.152.259.389.373,52	3.874.243.181.224,00	278.016.208.149,52

Saldo kas pada Bank Riau Kepri Per 31 Desember 2022 sebesar Rp278.016.208.149,52

Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis

Nomor Rekening : 108-02-00180

Tabel 5. 81 Mutasi Kas di Kas Daerah Bank Riau Kepri (PFK) Cab. Bengkalis

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	0,00
Penerimaan PFK	64.233.193.696,00	0,00	64.233.193.696,00
Pengeluaran PFK	0,00	64.233.193.696,00	0,00
	64.233.193.696,00	64.233.193.696,00	-

Untuk melihat rincian Kas di Kasda dapat di lihat pada:

Lampiran Kas di Kasda

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
	3.540.999.407,00	1.581.400,00	3.539.418.007,00

Akun ini merupakan saldo kas yang masih dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 82 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	3.540.888.407,00	0,00	3.540.888.407,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.000,00	0,00	11.000,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	400,00	(400,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Siak Kecil	100.000,00	0,00	100.000,00
Kecamatan Talang Muandau	0,00	1.581.000,00	(1.581.000,00)
Jumlah	3.540.999.407,00	1.581.400,00	3.539.418.007,00

Atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut, Dinas Pendidikan sebesar Rp3.540.888.407,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.000,00, dan Kecamatan Siak Kecil sebesar Rp100.000,00 telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah pada Tahun 2023.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan kas yang dilakukan oleh masing-masing OPD, dalam Berita Acara tersebut dijelaskan posisi kas pada OPD yang bersangkutan.

Untuk melihat rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dapat di lihat pada:
[Lampiran Kas di Bendahara Pengeluaran](#)

3. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
0,00	6.308,00	(6.308,00)

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tahun 2021 sebesar Rp6.308,00 terdiri dari Jasa Giro di Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial yang belum disetor ke Kas Daerah serta utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti: PPh dan PPN. Pada tahun 2022 sudah disetor ke kasda sehingga saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

4. Kas di Bendahara Penerimaan

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
1.179.559,00	1.758.070,00	(578.511,00)

Akun ini merupakan saldo kas yang ada dalam pengelolaan bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 83 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Badan Pendapatan Daerah	1.179.559,00	1.758.070,00	(578.511,00)
Jumlah	1.179.559,00	1.758.070,00	-578.511,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 disajikan berdasarkan hasil pemeriksaan kas yang dilakukan oleh masing-masing OPD, dalam Berita Acara tersebut dijelaskan posisi kas pada OPD yang bersangkutan.

5. Kas di Bendahara JKN

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Kas di Bendahara JKN merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2022 yang merupakan dana yang masih berada di rekening maupun tangan Bendahara Penerimaan JKN pada FKTP - UPT Kesehatan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bengkulu.

Pada Tahun 2022, Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas se-Kabupaten Bengkulu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

6. Kas di BLUD

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
11.452.247.027,66	11.349.091.889,54	103.155.138,12

Kas di BLUD merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2022 yang merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu, Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Bengkulu.

Pada Tahun 2022, Pengelolaan Keuangan UPT Puskesmas se-Kabupaten Bengkulu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tabel 5. 84 Rincian Kas di BLUD per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	3.895.605.133,10	953.521.139,10	2.942.083.994,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	7.019.066.471,56	10.395.570.750,44	(3.376.504.278,88)
Dinas Kesehatan	537.575.423,00	0,00	537.575.423,00
Jumlah	11.452.247.027,66	11.349.091.889,54	103.155.138,12

OPD	Kas Di Bank	Kas Tunai	Jumlah
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	3.874.851.106,10	20.754.027,00	3.895.605.133,10
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	6.980.210.894,56	38.855.577,00	7.019.066.471,56
Dinas Kesehatan	537.575.423,00	0,00	537.575.423,00
Jumlah	11.392.637.423,66	59.609.604,00	11.452.247.027,66

Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu

Tabel 5. 85 Mutasi Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	953.521.139,10	0,00	953.521.139,10
Pendapatan BLUD	72.031.428.172,00	0,00	72.984.949.311,10
Belanja BLUD	0,00	69.089.344.178,00	3.895.605.133,10



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Jumlah	72.984.949.311,10	69.089.344.178,00	3.895.605.133,10
---------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

Adapun Kas di Bendahara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu terdapat pada :

Tabel 5. 86 Rincian Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu

No	Keterangan	No Rekening	Saldo
1	Kas Tunai	-	20.754.027,00
2	Bank Riau Kepri Cabang Bengkulu	108-02-00086	219.607,00
3	Bank Riau Kepri Cabang Bengkulu	108-02-00087	0,00
4	Bank BRI Cabang Bengkulu	18901000921307	3.874.631.463,10
5	Kesalahan Bank		36,00
	Jumlah		3.895.605.133,10

Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

Tabel 5. 87 Mutasi Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	10.395.570.750,44	0,00	10.395.570.750,44
Pendapatan BLUD	77.276.967.293,00	0,00	87.672.538.043,44
Belanja BLUD	0,00	80.653.471.571,88	7.019.066.471,56
Jumlah	87.672.538.043,44	80.653.471.571,88	7.019.066.471,56

Adapun Kas di Bendahara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau terdapat pada:

Tabel 5. 88 Rincian Kas BLUD di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

No	Keterangan	No Rekening	Saldo
1	Kas Tunai	-	38.855.577,00
2	Bank Riau Kepri Cabang Duri Kota	122-03-00006	0,00
3	Bank Riau Kepri Cabang Duri Kota	122-03-00034	781.663.164,59
4	Bank BRI Cabang Duri Kota	56001000834306	6.198.547.729,97
	Jumlah		7.019.066.471,56

Kas BLUD di Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu

Tabel 5. 89 Mutasi Kas BLUD di Dinas Kesehatan Kab. Bengkulu

Keterangan	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD	16.992.771.928,00	0,00	16.992.771.928,00
Belanja BLUD	0,00	16.455.196.505,00	537.575.423,00
Jumlah	16.992.771.928,00	16.455.196.505,00	537.575.423,00

Adapun Kas di Bendahara BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu terdapat pada:

Tabel 5. 90 Rincian Kas BLUD di Dinas Kesehatan

No	Keterangan	No Rekening	Saldo
----	------------	-------------	-------



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

1	Kas Tunai		-
2	UPT PUSKESMAS KECAMATAN BENGKALIS	8-200-351-084	89.925.854,00
3	UPT PEMATANG DUKU	8-200-351-083	25.488.973,00
4	UPT SELAT BARU	8-200-35-1085	164.153.942,00
5	UPT TELUK PAMBANG	8-200-351-087	1.773.953,00
6	UPT SEI. PAKNING	8-200-351-241	33.461.313,00
7	UPT LUBUK MUDA	8-200-351-242	11.986.700,00
8	UPT SADAR JAYA	8-200-351-243	25.000.002,00
9	UPT PUSKESMAS BATU PANJANG	104-0-201291	133.689.950,00
10	UPT TELUK LECAH	104-0-201290	2.675.000,00
11	UPT TANJUNG MEDANG	8-200-351-086	4.306.691,00
12	UPT DURI KOTA	8-200-351-225	8.994.780,00
13	UPT BALAI MAKAM	8-200-351-222	2.380.846,00
14	UPT SEBANGAR	8-200-351-224	2.972.325,00
15	UPT PUSKESMAS PINGGIR / SEBANGA	8-200-351-226	1.556.897,00
16	UPT MUARA BASUNG	8-200-351-221	1.478.453,00
17	UPT PKM SERAI WANGI	8-200-351-227	10.475.319,00
18	UPT TENGGAYUN	8-200-351-225	11.170.418,00
19	UPT PEMATANG PUDU	8-200-351-223	6.084.007,00
	JUMLAH		537.575.423,00

7. Kas di Bendahara Dana BOS

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
21.048.100,00	52.662.329,00	(31.614.229,00)

Kas di bendahara Dana BOS merupakan nilai saldo kas per 31 Desember 2022 yang merupakan dana yang masih berada di tangan Bendahara Dana BOS pada SD dan SMP Negeri di Kabupaten Bengkalis.

Tabel 5. 91 Rincian Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dana BOS Reguler / 392 Sekolah	19.529.454,00	51.083.262,00	(31.553.808,00)
Dana BOS Afirmasi / 0 Sekolah	720.686,00	720.686,00	0,00
Dana BOS Kinerja / 0 Sekolah	237.660,00	237.660,00	0,00
Jumlah	20.487.800,00	52.041.608,00	(31.553.808,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 92 Rincian Kas di Bendahara BOS (Jasa Giro)

Kas di Bendahara BOS	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Jasa Giro	560.300,00	620.721,00	(60.421,00)
Jumlah	560.300,00	620.721,00	(60.421,00)

8. Kas Lainnya

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
258.507.223,15	0,00	258.507.223,15

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp258.507.223,15, merupakan saldo yang terdapat di rekening penampung pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkulu Selatan. Saldo kas tersebut terdapat di rekening penampung Dinas Kesehatan sebesar Rp808.958,15. dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp257.698.265,00., berikut daftar rekening penampung:

Tabel 5. 93 Rincian Saldo Kas Lainnya

No.	Dinas	No. Rekening Penampung	Nama Bank	Nilai
1	Dinas Kesehatan	108-00-1064695-9	Bank Mandiri	808.958,15
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	108-03-17190	Bank Riau Kepri	205.705.035,00
		108-03-00571	Bank Riau Kepri	51.993.230,00
Jumlah				258.507.223,15

Terhadap sisa saldo di rekening penampung Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp808.958,15. Saldo pada Dinas Kesehatan sudah disetor ke kas daerah tanggal 04 Mei 2023. Sedangkan saldo kas yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum dapat disetor karena perlu ditelusuri lebih lanjut, karena penyeterannya sesuai nama (*by name*) yang melakukan pembayaran.

9. Piutang

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
81.130.420.442,94	64.376.895.345,60	16.753.525.097,34

Akun ini merupakan saldo Piutang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp81.130.420.442,94 dan Rp64.376.895.345,60 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 94 Rincian Piutang

Jenis Piutang	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Piutang Pajak Daerah	95.530.271.319,87	90.008.134.003,73	5.522.137.316,14
Piutang Retribusi Daerah	6.345.736.695,50	5.701.751.469,50	643.985.226,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.121.958.022,01	19.692.453.118,00	(12.570.495.095,99)
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat	5.051.200.495,00	0,00	5.051.200.495,00
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi	33.829.083.722,51	11.352.317.619,51	22.476.766.103,00
Piutang Lainnya	12.781.757.258,24	11.803.187.344,24	978.569.914,00
Penyisihan Piutang	(79.581.794.870,19)	(74.229.823.209,38)	(5.351.971.660,81)
Beban Dibayar Dimuka	52.207.800,00	48.875.000,00	3.332.800,00
	81.130.420.442,94	64.376.895.345,60	16.753.525.097,34

a) Piutang Pajak Daerah

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
95.530.271.319,87	90.008.134.003,73	5.522.137.316,14

Akun piutang pajak daerah merupakan selisih antara nilai pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan nilai yang dibayarkan oleh wajib pajak daerah termasuk tunggakan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 95 Mutasi Piutang Pajak Daerah

Jenis Piutang	Saldo Awal Jan 2022	01 Mutasi 2022	Saldo Akhir 2022
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00
Pajak Hotel	917.805.426,56	(208.025.713,86)	709.779.712,70
Pajak Restoran	457.749.508,00	(31.973.580,00)	425.775.928,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	399.851.500,24	(110.029.024,00)	289.822.476,24
Pajak Sarang Burung Walet	84.085.000,00	0,00	84.085.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	217.996.004,60	(172.243.048,00)	45.752.956,60
Pajak PBB P2	87.858.774.606,00	6.007.833.532,00	93.866.608.138,00
Pajak Reklame	71.871.958,33	36.575.150,00	108.447.108,33
Jumlah	90.008.134.003,73	5.522.137.316,14	95.530.271.319,87

b) Piutang Retribusi Daerah

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
6.345.736.695,50	5.701.751.469,50	643.985.226,00

Akun piutang retribusi daerah merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh objek pajak termasuk tunggakan tahun sebelumnya. Retribusi yang menimbulkan piutang adalah yang melalui mekanisme penetapan Surat Ketetapan Retribusi



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Daerah (SKR-D) atau dokumen penetapan retribusi lainnya. Adapun rincian piutang retribusi daerah per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 96 Mutasi Piutang Retribusi Daerah

Jenis Piutang	Saldo Awal Jan 2022	01	Mutasi 2022	Saldo Akhir 2022
Retribusi Izin Gangguan / HO Golongan	3.002.227.945,50		0,00	3.002.227.945,50
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.006.925.500,00		156.800.000,00	1.163.725.500,00
Retribusi Pelayanan Pasar	7.500.000,00		4.200.000,00	11.700.000,00
Retribusi Limbah Cair	3.517.300,00		0,00	3.517.300,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	490.000.000,00		0,00	490.000.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	792.711.646,00		13.885.226,00	806.596.872,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	103.100.000,00		469.100.000,00	572.200.000,00
Jasa umum Pasien 2011	12.706.150,00		0,00	12.706.150,00
BPJS Kesehatan	280.259.100,00		0,00	280.259.100,00
BPJS Ketenagakerjaan	2.803.828,00		0,00	2.803.828,00
Jumlah	5.701.751.469,50		643.985.226,00	6.345.736.695,50

Untuk Piutang Retribusi Berdasarkan Jenis Retribusinya adalah sebagai berikut :

Retribusi HO Golongan

Tabel 5. 97 Rincian Piutang Retribusi HO Golongan

- Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	426.426.125,00
- Badan Pendapatan Daerah	2.575.801.820,50
Jumlah	3.002.227.945,50

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Tabel 5. 98 Rincian Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.163.725.500,00
Jumlah	1.163.725.500,00

Retribusi Pelayanan Pasar

Tabel 5. 99 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

- Dinas Perdagangan dan Perindustrian	11.700.000,00
Jumlah	11.700.000,00

Retribusi Limbah Cair

Tabel 5. 100 Rincian Piutang Retribusi Limbah Cair

- Dinas Lingkungan Hidup	3.517.300,00
Jumlah	3.517.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Tabel 5. 101 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00
- Dinas Perhubungan	490.000.000,00
Jumlah	490.000.000,00

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Tabel 5. 102 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

- Dinas Perhubungan	806.596.872,00
Jumlah	806.596.872,00

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Tabel 5. 103 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

- Dinas Perhubungan	572.200.000,00
Jumlah	572.200.000,00

Jasa umum Pasien 2011

Tabel 5. 104 Rincian Piutang Retribusi Jasa umum Pasien 2011

- Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah	12.706.150,00
Jumlah	12.706.150,00

BPJS Kesehatan

Tabel 5. 105 Rincian Piutang Retribusi BPJS Kesehatan

- Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	280.259.100,00
Jumlah	280.259.100,00

BPJS Ketenagakerjaan

Tabel 5. 106 Rincian Piutang Retribusi BPJS Ketenagakerjaan

- Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	2.803.828,00
Jumlah	2.803.828,00

Jenis Piutang Retribusi Berdasarkan OPD terdiri dari :

Tabel 5. 107 Rincian Piutang Retribusi per OPD

Piutang Retribusi	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah	12.706.150,00	12.706.150,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	283.062.928,00	283.062.928,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.517.300,00	3.517.300,00	0,00
Dinas Perhubungan	1.868.796.872,00	1.385.811.646,00	482.985.226,00
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	426.426.125,00	426.426.125,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.175.425.500,00	1.014.425.500,00	161.000.000,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	2.575.801.820,50	2.575.801.820,50	0,00
Jumlah	6.345.736.695,50	5.701.751.469,50	643.985.226,00

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 disajikan berdasarkan Surat Ketetapan besarnya retribusi yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2022 oleh pelanggan kepada pengelola pendapatan retribusi.

Untuk rincian Piutang retribusi per OPD dapat dilihat pada:

[Lampiran Piutang Retribusi](#)

c) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
7.121.958.022,01	19.692.453.118,00	(12.570.495.095,99)

Akun piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah Piutang BLUD yang merupakan selisih antara nilai retribusi yang ditetapkan dengan nilai yang dibayar oleh objek pajak termasuk tunggakan tahun sebelumnya yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp.3.334.523.419,00. Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau sebesar Rp.3.715.961.209,00 dan serta pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa Remunerasi (pendapatan Bunga) atas dana TDF sebesar Rp.71.473.394,01. Adapun rincian piutang BLUD per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Tabel 5. 108 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
BPJS	3.157.599.800,00	72.151.867,00	3.085.447.933,00
Ambulance BPJS	70.376.000,00	70.376.000,00	0,00
Jamkesda Meranti	106.547.619,00	107.516.997,00	(969.378,00)
Covid-19	0,00	19.293.265.500,00	(19.293.265.500,00)
Jumlah	3.334.523.419,00	19.543.310.364,00	(16.208.786.945,00)

Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

Tabel 5. 109 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Jamkesda Siak	0,00	46.605.773,00	(46.605.773,00)
Jampersal Siak	0,00	80.108.072,00	(80.108.072,00)
Jampersal Rohil	7.428.909,00	7.428.909,00	0,00
BPJS	3.602.770.300,00	0,00	3.602.770.300,00
Covid	105.762.000,00	0,00	105.762.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sewa ATM BRI	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)
Jumlah	3.715.961.209,00	149.142.754,00	3.566.818.455,00

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 5. 110 Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Remunerasi Dana TDF	71.473.394,01	0,00	71.473.394,01
Jumlah	71.473.394,01	0,00	71.473.394,01

d) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
	5.051.200.495,00	0,00	5.051.200.495,00

Akun piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat merupakan selisih antara surat ketetapan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan dana yang telah disalurkan ke daerah.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.051.200.495,00 dan Rp0,00. Piutang ini merupakan Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 111 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

Jenis Piutang	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	19.155,00	0,00	19.155,00
DBH Pajak Penghasilan	0,00	0,00	0,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
DBH CTH	19.155,00	0,00	19.155,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam	5.051.181.340,00	0,00	5.051.181.340,00
DBH SDA Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00
DBH SDA Mineral dan Batu Bara	0,00	0,00	0,00
DBH SDA Kehutanan	5.051.181.340,00	0,00	5.051.181.340,00
DBH SDA Perikanan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.051.200.495,00	0,00	5.051.200.495,00

Tabel 5. 112 Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat

Jenis Piutang	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo
Saldo Awal	0,00	0,00	0,00
DBH Pajak Penghasilan	3.186.266.119,00	3.186.266.119,00	0,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	41.341.119.042,00	41.341.119.042,00	0,00
DBH CHT	19.155,00	0,00	19.155,00
DBH SDA Minyak dan Gas Bumi	5.134.842.805,00	5.134.842.805,00	19.155,00
DBH SDA Mineral dan Batu Bara	1.506.548.021,00	1.506.548.021,00	19.155,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DBH SDA Kehutanan	5.182.261.154,00	131.079.814,00	5.051.200.495,00
DBH SDA Perikanan	0,00	0,00	5.051.200.495,00
Jumlah	56.351.056.296,00	51.299.855.801,00	5.051.200.495,00

Piutang DBH Pusat mengalami perubahan yang disebabkan terbitnya PMK Nomor 127/PMK.07/2022 tanggal 14 September 2022 dan KMK Nomor 46/KM.07/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Periode Ketiga pada Tahun 2022, yang menjelaskan bahwa penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 secara non tunai dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Negara ke Rekening Treasury Deposit Facility (TDF).

e) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
33.829.083.722,51	11.352.317.619,51	22.476.766.103,00

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi disajikan berdasarkan saldo bagi hasil yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dari Pemerintah Provinsi Riau pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar dan Rp33.829.083.722,51 dan Rp11.352.317.619,51. Piutang ini merupakan Piutang Bagi Hasil dari Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 113 Rincian Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi

Jenis Piutang	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	10.955.683.727,00	3.380.306.947,00	7.575.376.780,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	5.648.471.437,51	3.442.814.587,51	2.205.656.850,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	17.039.047.646,00	4.347.243.458,00	12.691.804.188,00
Pajak Air Permukaan (Pajak AP)	95.118.380,00	91.190.095,00	3.928.285,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	86.712.532,00	86.712.532,00	0,00
Jumlah	33.829.083.722,51	11.352.317.619,51	22.476.766.103,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.829.083.722,51 berdasarkan rincian piutang dari Badan Pendapatan Daerah. Terdapat saldo awal sebesar Rp11.352.317.619,51, koreksi tambah Piutang per 02 Januari 2022 sebesar Rp3.843.582.268,00, pelunasan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.105.137.355,51,00 dan Penambahan Piutang 2022 sebesar Rp21.526.449.795,51 serta penambahan piutang Dana Bagi Hasil Pajak TW IV (Desember 2022) Berdasarkan SK GUBRI No. KPTS.467/III/2023 Tanggal 13 sebesar Rp. 12.211.871.395,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi berupa Retribusi Izin Usaha Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan, Pasal 26 dengan pembagian 70% Provinsi Riau dan 30% untuk Kabupaten/Kota.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi berupa Pendapatan Lainnya berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang Pengelolaan, Pendapatan dan pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kapal Kabupaten Bengkalis No 13/PK/III/2011 dan No 03/PJJ-HK/IV/2011 tanggal 23 Maret 2011 dengan pembagian Provinsi Riau 60% dan Kabupaten/Kota 40%.

f) Piutang Lainnya

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
12.781.757.258,24	11.803.187.344,24	978.569.914,00

Akun piutang lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 mempunyai saldo sebesar Rp12.781.757.258,24 dan Rp11.803.187.344,24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 114 Rincian Piutang Lainnya

Jenis Piutang Lainnya	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Belanja Penunjang Operasi Pimpinan DPRD	182.064.000,00	182.064.000,00	0,00
Tunjangan Komunikasi Insentif Anggota DPRD	1.375.373.000,00	1.375.373.000,00	0,00
Piutang dari PT BLJ atas Bagi Hasil Penyediaan Tenaga Listrik di Bengkalis dan Selat Panjang	490.180.223,00	490.180.223,00	0,00
Piutang pada PT Tenggana Mandiri	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Piutang Dana Bantuan Keuangan	1.287.853.607,00	309.277.893,00	978.575.714,00
Piutang pada Pihak Ketiga	7.446.286.428,24	7.446.286.428,24	0,00
Piutang Beban Lain-lain	0,00	5.800,00	(5.800,00)
Jumlah	12.781.757.258,24	11.803.187.344,24	978.569.914,00

Akun Piutang Lain-lain merupakan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp12.781.757.258,24 terdiri atas :

Belanja Penunjang Operasi Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis

Saldo awal piutang penunjang operasi pimpinan DPRD sebesar Rp265.608.000,00 pada Tahun Anggaran 2008. Atas piutang tersebut telah diangsur ke kas daerah TA 2010 sebesar Rp21.000.000,00, TA 2011 sebesar Rp62.544.000,00 sehingga sisanya Per 31 Desember 2013 sebesar Rp182.064.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tunjangan Komunikasi Insentif Anggota DPRD

Saldo awal sebesar Rp2.191.626.000,00 pada tahun anggaran 2008. Atas piutang tersebut telah diangsur ke kas daerah TA 2009 sebesar Rp576.168.000,00, TA 2011 sebesar Rp30.500.000,00, TA 2012 sebesar Rp109.295.000,00, TA 2013 sebesar Rp72.095.000,00, TA 2014 sebesar Rp28.195.000,00 sehingga sisanya Per 31 Desember 2014 sebesar Rp1.275.273.000,00.
Kewajiban Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD. Terhadap saldo tersebut telah sesuai dengan berita acara rekonsiliasi Piutang lain-lain khususnya pengembalian dana belanja operasional pimpinan dan tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis TA 2013 antara sub Bagian Keuangan pada Bagian umum sekretariat DPRD dengan sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bengkalis TA 2013 dan 2014.

Piutang Bagi Hasil dengan PT. Bumi Laksamana Jaya (BUMD) atas keuntungan pengelolaan Jual Beli Listrik dan Pengelolaan PKS dengan Rincian sebagai berikut:

Tahun anggaran 2008, PT BLJ berdasarkan perjanjian Kerjasama Nomor 07/PJJ-HK/VII/2007 dan atau nomor 002/PPJ-BLJ/LIST/IV/2008 tanggal 2 Januari 2008 antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT Bumi Laksamana Jaya (PT BLJ) tentang Bagi Hasil Pembelian/ Penyediaan (Jual Beli Daya) Tenaga Listrik di Bengkalis dan Selat Panjang. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berhak menerima pendapatan Bersih sebesar 70% dari hasil penjualan daya listrik yang diterima oleh PT BLJ dan harus dibayarkan oleh PT BLJ paling lambat tanggal 20 setiap bulannya melalui penyetoran langsung ke Kas Daerah. Saldo awal piutang bagi hasil kepada BUMD sebesar Rp1.601.755.223,00 dan telah diangsur sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp1.111.575.000,00 sehingga saldo piutang bagi hasil Per 31 Desember 2012 sebesar Rp490.180.223,00 sesuai berita acara rekonsiliasi realisasi pembayaran piutang lain-lain pada PT. Bumi Laksamana Jaya TA 2012 tanggal 10 Jan 2012 antara PT Bumi Laksamana Jaya dengan Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi Setda Kab. Bengkalis.

Piutang pada PT Tenganau Mandiri

Piutang Kabupaten Bengkalis pada Koperasi Tenganau Mandiri tercatat sebesar Rp2.000.000.000,00. Piutang tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 29 agustus 2005 sesuai perjanjian kerjasama.

Nomor : 573 /EK /93

Nomor : 21 / KOP-TM / VIII / 2005

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1125K/Pid.sus/2014 Tanggal 17 September 2014 JO putusan pengadilan tindak korupsi pada pengadilan tinggi Riau nomor 05/TIPIKOR/2014/PTR Tanggal 6 Mei 2014 jo putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 42/Pid.sus/TIPIKOR/2013/PN.pbr tanggal 4 Februari 2014, bahwa atas aset-aset pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS)Tenganau mandiri tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bengkalis.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

sehingga ketika Pemda Tidak mau lagi menambah Investasi maka Koperasi mencari kerja sama dengan pihak ketiga untuk menaikkan kapasitas PKS Koperasi menjadi 20 Ton TBS/Jam, maka pada tahun 2010 Koperasi Tengganau Mandiri membuat perjanjian kerja sama dengan PT Tengganau Mandiri Lestari atau disingkat PT TML. Tertuang dalam perjanjian kerja sama BOT (*Built Operational Transfer*) akte Nomor Akte : 04 Tanggal 05 Mei 2010, yang mana didalam perjanjian tersebut fisik Pabrik dikelola oleh PT TML dan akan memberikan laporan setiap bulan kepada Koperasi Tengganau Mandiri, mulai dari laporan Produksi hingga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Piutang Dana Transfer Bantuan Keuangan Khusus

-Sisa Dana BERMASA yang belum disetorkan ke Kas Daerah Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.287.853.607,00 dan terdapat pembayaran piutang P3ID tahun 2021 sebesar Rp310.396.893,00 dan Koreski Kurang Catat Piutang P3ID sebesar Rp1.119.000.

Piutang Pada Pihak Ketiga

Terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga (rekanan atau kontraktor) atas pelaksanaan kegiatan TA 2009 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan sebesar Rp7.446.286.428,24. Kelebihan ini timbul akibat adanya perbedaan penetapan hutang yang lebih rendah berdasarkan LHP BPK RI No.52/S/XVIII.PEK/02/2011 tanggal 21 Februari 2011 dengan SK Bupati Bengkulu No. 171/KPTS/V/2010 tanggal 03 Mei 2010.

10. Penyisihan Piutang

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
(79.581.794.870,19)	(74.229.823.209,38)	(5.351.971.660,81)

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang bisa direalisasikan selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan.

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp79.581.794.870,19 sebagai berikut:

Tabel 5. 115 Rincian Penyisihan Piutang per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	(438.351.510,00)	(2.447.732.490,00)	2.009.380.980,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	(683.248.267,00)	(304.445.528,25)	(378.802.738,75)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(7.446.286.428,24)	(7.446.286.428,24)	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	(3.517.300,00)	(3.517.300,00)	0,00
Dinas Perhubungan	(1.459.684.266,73)	(1.367.495.923,10)	(92.188.343,63)
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(426.426.125,00)	(426.426.125,00)	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(1.040.201.300,00)	(939.938.500,00)	(100.262.800,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(4.047.617.223,00)	(4.047.617.223,00)	0,00
Badan Pendapatan Daerah	(64.036.462.450,22)	(57.246.363.691,79)	(6.790.098.758,43)
Jumlah	(79.581.794.870,19)	(74.229.823.209,38)	(5.351.971.660,81)

Tabel 5. 116 Rincian Jenis Penyisihan Piutang per OPD

	Penyisihan Piutang			
	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis				
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	12.706.150,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	319.201.090,00	36.068.270,00	70.376.000,00
Total				438.351.510,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau				
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	283.062.928,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	365.377.430,00	27.379.000,00	7.428.909,00
Total				683.248.267,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.446.286.428,24
Total				7.446.286.428,24
Dinas Lingkungan Hidup				
Piutang Retribusi Limbah Cair	0,00	0,00	0,00	3.517.300,00
Total				3.517.300,00
Dinas Perhubungan				
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	490.000.000,00
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	106.726,73	651.684,00	4.289.350,00	770.156.006,00
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	480.500,00	23.900.000,00	67.000.000,00	103.100.000,00
Total				1.459.684.266,73
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Piutang Retribusi HO Golongan	0,00	0,00	0,00	426.426.125,00
Total				426.426.125,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian				
Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	136.050,00	5.915.000,00	35.070.000,00	991.525.500,00
Piutang Retribusi Jasa Pelayanan Pasar	9.750,00	245.000,00	0,00	7.300.000,00
Total				1.040.201.300,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.047.617.223,00
Total				4.047.617.223,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Pendapatan Daerah				
Piutang Pajak				
	38.285.112,29	1.690.494.928,80	11.241.913.860,47	48.489.966.728,16
Piutang Retribusi HO Golongan				
	0,00	0,00	0,00	2.575.801.820,50
Total				64.036.462.450,22
TOTAL PENYISIHAN PIUTANG				79.581.794.870,19

11. Beban Dibayar Dimuka

	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
	52.207.800,00	48.875.000,00	3.332.800,00

Akun Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran belanja tahun 2022 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2022 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Akun Beban dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2022 mempunyai saldo sebesar Rp52.207.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 117 Rincian Beban Dibayar Dimuka per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pemadam Kebakaran	28.875.000,00	28.875.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	23.332.800,00	20.000.000,00	3.332.800,00
Jumlah	52.207.800,00	48.875.000,00	3.332.800,00

Beban dibayar dimuka pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis merupakan pembayaran belanja sewa terhadap pemakaian gedung untuk UPT pada satu kecamatan, yaitu kecamatan Mandau terhitung mulai bulan Desember 2022. Jangka waktu sewa selama 12 (dua belas) bulan terhitung masa pembayaran.

Tabel 5. 118 Rincian Beban Dibayar Dimuka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkalis

Uraian	Nilai Belanja	Nilai Beban Sewa	Nilai Sewa di Bayar Dimuka
UPT Kecamatan Mandau (Masa Pembayaran Bulan Desember)	31.500.000,00	2.625.000,00	28.875.000,00
Jumlah	31.500.000,00	2.625.000,00	28.875.000,00

Beban dibayar dimuka pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan pembayaran belanja barang/jasa terhadap Sewa Ruko/Gudang Bagian Umum terhitung mulai bulan Mei 2021. Jangka waktu sewa selama 12 (dua belas) bulan terhitung masa pembayaran.

Tabel 5. 119 Rincian Beban Dibayar Dimuka Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

Uraian	Nilai Belanja	Nilai Beban Sewa	Nilai Sewa di Bayar Dimuka
Ruko/Gudang Bagian Umum (Masa Pembayaran Bulan Mei)	30.000.000,00	6.667.200,00	23.332.800,00
Jumlah	30.000.000,00	6.667.200,00	23.332.800,00

12. Persediaan

	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

75.022.236.839,49 83.548.085.289,04 (8.525.848.449,55)

Persediaan per tanggal 31 Desember 2022 sejumlah Rp75.022.236.839,49 terdiri dari persediaan obat sebesar Rp23.948.283.711,45 dan persediaan non obat sebesar Rp51.073.953.128,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 120 Rincian Persediaan

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Persediaan Obat	23.948.283.711,45	21.838.619.189,33	2.109.664.522,12
Persediaan Alat Kesehatan	11.117.394.791,58	13.733.132.449,31	(2.615.737.657,73)
Persediaan ATK	2.385.965.917,96	1.654.643.442,08	731.322.475,88
Persediaan Barang Cetak	1.013.890.549,33	1.338.427.816,91	(324.537.267,58)
Persediaan Alat Kebersihan	139.624.376,18	3.873.299.777,12	(3.733.675.400,94)
Persediaan Perlengkapan Listrik	103.421.887,00	166.003.040,14	(62.581.153,14)
Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.207.000,00	4.379.900,00	(2.172.900,00)
Persediaan Pupuk/ Pakan/ Benih	-	64.041.500,00	(64.041.500,00)
Persediaan Suku Cadang	520.419.767,78	258.615.542,67	261.804.225,11
Persediaan Bahan Bakar	935.000,00	2.280.000,00	(1.345.000,00)
Persediaan Bahan Kimia	2.623.233.866,45	2.626.928.749,37	(3.694.882,92)
Persediaan Hibah pada Pihak Ketiga/ Masyarakat	29.737.601.661,76	37.508.210.082,11	(7.770.608.420,35)
Persediaan Dalam proses	2.866.140.210,00	0,00	2.866.140.210,00
Persediaan Makanan Pokok	563.118.100,00	479.503.800,00	83.614.300,00
Jumlah	75.022.236.839,49	83.548.085.289,04	(8.525.848.449,55)

a) Persediaan Obat

Nilai persediaan obat per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.948.283.711,45 berada pada OPD:

Tabel 5. 121 Rincian Persediaan Obat per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	8.370.178.135,48	8.398.077.524,62	(27.899.389,14)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	6.589.212.147,00	6.629.860.935,00	(40.648.788,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	8.861.164.932,72	6.453.450.156,96	2.407.714.775,76
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	124.135.496,25	310.163.616,75	(186.028.120,50)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perikanan	3.593.000,00	4.720.000,00	(1.127.000,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	0,00	42.346.956,00	(42.346.956,00)
Jumlah	23.948.283.711,45	21.838.619.189,33	2.109.664.522,12

Terdapat Persediaan Vaksin Pada Dinas Kesehatan Berupa Vaksin Astrazenica @10 Dosis sebanyak 99 Vial, Coronavac @2 Dosis Sebanyak 2.110 Vial dan Moderna @10 Dosis sebanyak 375 Vial yang tidak memiliki nilai

b) Persediaan Alat Kesehatan

Nilai persediaan alat kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.117.394.791,58 berada pada OPD:

Tabel 5. 122 Rincian Persediaan Alat Kesehatan per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	10.823.559.246,43	13.733.132.449,31	(2.909.573.202,88)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	293.835.545,15	0,00	293.835.545,15
Jumlah	11.117.394.791,58	13.733.132.449,31	-2.615.737.657,73

c) Persediaan ATK

Nilai persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.385.965.917,96 berada pada OPD:

Tabel 5. 123 Rincian Persediaan ATK per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	0,00	232.000,00	(232.000,00)
Dinas Kesehatan	4.713.500,00	1.109.800,00	3.603.700,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	1.788.000,00	1.427.800,00	360.200,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	90.526.842,96	121.677.828,33	(31.150.985,37)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	927.000,00	4.438.400,00	(3.511.400,00)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	1.330.700,00	373.600,00	957.100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.588.700,00	787.600,00	801.100,00
Dinas Pemadam Kebakaran	732.700,00	690.000,00	42.700,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.158.700,00	2.134.700,00	(976.000,00)
Dinas Sosial	856.400,00	3.303.500,00	(2.447.100,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.894.100,00	5.307.300,00	(3.413.200,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	299.800,00	104.800,00	195.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	5.192.100,00	4.937.900,00	254.200,00
Dinas Lingkungan Hidup	525.000,00	525.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.179.997.500,00	1.402.036.550,00	777.960.950,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.439.400,00	2.904.300,00	535.100,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.188.000,00	1.105.900,00	82.100,00
Dinas Perhubungan	5.158.100,00	0,00	5.158.100,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.688.810,00	3.550.000,00	(861.190,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	504.600,00	579.600,00	(75.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	771.900,00	1.304.000,00	(532.100,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	720.000,00	1.292.400,00	(572.400,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.010.600,00	1.318.400,00	(307.800,00)
Dinas Perikanan	3.408.900,00	3.592.000,00	(183.100,00)
Dinas Perkebunan	26.521.950,00	18.839.260,00	7.682.690,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	8.102.048,00	8.200.651,00	(98.603,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	293.600,00	862.800,00	(569.200,00)
Sekretariat Daerah	3.045.865,00	3.472.272,75	(426.407,75)
Sekretariat DPRD	5.058.400,00	4.608.600,00	449.800,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.349.200,00	376.200,00	5.973.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	817.800,00	10.210.300,00	(9.392.500,00)
Badan Pendapatan Daerah	1.296.102,00	1.135.600,00	160.502,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	99.800,00	321.800,00	(222.000,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	5.322.000,00	11.711.100,00	(6.389.100,00)
Inspektorat	920.000,00	993.200,00	(73.200,00)
Kecamatan Bengkulu	140.000,00	12.000,00	128.000,00
Kecamatan Bantan	643.600,00	1.187.000,00	(543.400,00)
Kecamatan Bukit Batu	993.000,00	305.000,00	688.000,00
Kecamatan Siak Kecil	1.932.300,00	4.069.430,00	(2.137.130,00)
Kecamatan Bandar Laksamana	883.200,00	719.300,00	163.900,00
Kecamatan Rupa	423.300,00	312.000,00	111.300,00
Kecamatan Rupa Utara	2.072.200,00	3.582.000,00	(1.509.800,00)
Kecamatan Mandau	2.100.300,00	3.683.800,00	(1.583.500,00)
Kecamatan Pinggir	2.700.000,00	2.605.000,00	95.000,00
Kecamatan Bathin Solapan	4.960.200,00	4.394.100,00	566.100,00
Kecamatan Talang Muandau	390.500,00	5.436.100,00	(5.045.600,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	479.200,00	2.872.550,00	(2.393.350,00)
Jumlah	2.385.965.917,96	1.654.643.442,08	731.322.475,88



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

d) Persediaan Barang Cetakan

Nilai persediaan barang cetakan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.013.890.549,33 berada pada OPD:

Tabel 5. 124 Rincian Persediaan Barang Cetakan per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	0,00	150.000,00	(150.000,00)
Dinas Kesehatan	23.262.380,00	0,00	23.262.380,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	18.200.000,00	31.125.000,00	(12.925.000,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	121.015.084,33	165.709.035,91	(44.693.951,58)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	333.000,00	1.977.900,00	(1.644.900,00)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	826.000,00	675.000,00	151.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	223.500,00	(223.500,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	572.800,00	935.000,00	(362.200,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	1.254.500,00	1.234.000,00	20.500,00
Dinas Sosial	1.347.500,00	311.400,00	1.036.100,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.674.800,00	2.612.700,00	1.062.100,00
Dinas Lingkungan Hidup	515.000,00	515.000,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	709.978.150,00	551.823.600,00	158.154.550,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.074.600,00	1.515.000,00	(440.400,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	266.000,00	300.500,00	(34.500,00)
Dinas Perhubungan	116.955.860,00	554.971.060,00	(438.015.200,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	300.000,00	280.000,00	20.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	587.400,00	(587.400,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	819.500,00	608.300,00	211.200,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	262.400,00	500.000,00	(237.600,00)
Dinas Perkebunan	1.758.766,00	3.890.600,00	(2.131.834,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	1.363.309,00	7.733.721,00	(6.370.412,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	150.000,00	225.000,00	(75.000,00)
Sekretariat DPRD	1.008.200,00	1.286.700,00	(278.500,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	76.300,00	160.000,00	(83.700,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	566.900,00	0,00	566.900,00
Badan Pendapatan Daerah	1.354.200,00	1.724.200,00	(370.000,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	240.000,00	283.000,00	(43.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Inspektorat	1.398.400,00	1.370.400,00	28.000,00
Kecamatan Bantan	268.000,00	461.600,00	(193.600,00)
Kecamatan Bukit Batu	233.000,00	135.000,00	98.000,00
Kecamatan Siak Kecil	1.792.200,00	1.405.000,00	387.200,00
Kecamatan Rupat	11.100,00	13.500,00	(2.400,00)
Kecamatan Mandau	732.000,00	877.200,00	(145.200,00)
Kecamatan Talang Muandau	0,00	1.753.500,00	(1.753.500,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.280.600,00	1.054.000,00	1.226.600,00
Jumlah	1.013.890.549,33	1.338.427.816,91	(324.537.267,58)

e) Persediaan Alat Kebersihan

Nilai persediaan alat kebersihan per 31 Desember 2022 sebesar Rp139.624.376,18 berada pada OPD:

Tabel 5. 125 Rincian Persediaan Alat Kebersihan per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	6.276.500,00	10.065.500,00	(3.789.000,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	72.690.817,00	3.766.677.649,78	(3.693.986.832,78)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	923.000,00	2.391.000,00	(1.468.000,00)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	886.200,00	11.804.500,00	(10.918.300,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	326.000,00	327.000,00	(1.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	206.000,00	645.000,00	(439.000,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	168.000,00	220.000,00	(52.000,00)
Dinas Sosial	3.186.000,00	537.000,00	2.649.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.505.000,00	2.374.000,00	(869.000,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	253.200,00	(253.200,00)
Dinas Ketahanan Pangan	4.964.000,00	4.311.600,00	652.400,00
Dinas Lingkungan Hidup	18.000,00	18.000,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	169.300,00	169.300,00	0,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.206.000,00	6.709.000,00	(1.503.000,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	128.000,00	496.000,00	(368.000,00)
Dinas Perhubungan	0,00	18.564.900,00	(18.564.900,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	359.000,00	984.000,00	(625.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	190.000,00	305.000,00	(115.000,00)
Dinas Perikanan	1.219.000,00	805.000,00	414.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perkebunan	17.025.250,00	12.124.000,00	4.901.250,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	7.667.000,00	3.996.600,00	3.670.400,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	221.000,00	173.000,00	48.000,00
Sekretariat Daerah	4.648.909,18	5.130.927,34	(482.018,16)
Sekretariat DPRD	3.916.000,00	1.642.100,00	2.273.900,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	2.984.000,00	(2.984.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	418.200,00	80.000,00	338.200,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	204.000,00	104.000,00	100.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	1.335.000,00	3.996.000,00	(2.661.000,00)
Inspektorat	172.000,00	182.000,00	(10.000,00)
Kecamatan Bengkulu	46.000,00	66.000,00	(20.000,00)
Kecamatan Bantan	210.000,00	792.400,00	(582.400,00)
Kecamatan Bukit Batu	185.000,00	243.800,00	(58.800,00)
Kecamatan Siak Kecil	1.059.000,00	1.729.000,00	(670.000,00)
Kecamatan Bandar Laksamana	224.000,00	58.000,00	166.000,00
Kecamatan Rupal	151.000,00	266.000,00	(115.000,00)
Kecamatan Mandau	2.853.600,00	3.207.100,00	(353.500,00)
Kecamatan Bathin Solapan	475.000,00	162.000,00	313.000,00
Kecamatan Talang Muandau	0,00	7.122.000,00	(7.122.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	392.600,00	1.583.200,00	(1.190.600,00)
Jumlah	139.624.376,18	3.873.299.777,12	(3.733.675.400,94)

f) Persediaan Perlengkapan Listrik

Nilai persediaan perlengkapan listrik per 31 Desember 2022 sebesar Rp103.421.887,00 berada pada OPD:

Tabel 5. 126 Rincian Persediaan Perlengkapan Listrik per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	5.873.000,00	0,00	5.873.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	62.383.003,00	111.912.500,00	(49.529.497,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	434.000,00	0,00	434.000,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	0,00	15.739.000,00	(15.739.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	177.000,00	680.000,00	(503.000,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	139.000,00	309.000,00	(170.000,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	127.000,00	770.000,00	(643.000,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	210.000,00	0,00	210.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.286.000,00	3.615.000,00	(329.000,00)
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	825.000,00	(825.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	632.000,00	1.194.000,00	(562.000,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	122.500,00	122.500,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	693.600,00	0,00	693.600,00
Dinas Perkebunan	11.486.500,00	9.583.000,00	1.903.500,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	921.500,00	216.000,00	705.500,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	270.000,00	(270.000,00)
Sekretariat Daerah	5.812.284,00	4.581.740,14	1.230.543,86
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	516.000,00	604.000,00	(88.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.789.000,00	2.643.000,00	146.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	92.000,00	0,00	92.000,00
Inspektorat	0,00	42.000,00	(42.000,00)
Kecamatan Bantan	111.000,00	121.000,00	(10.000,00)
Kecamatan Siak Kecil	937.100,00	549.300,00	387.800,00
Kecamatan Mandau	2.385.000,00	3.979.000,00	(1.594.000,00)
Kecamatan Bathin Solapan	450.000,00	154.000,00	296.000,00
Kecamatan Talang Muandau	3.844.400,00	8.093.000,00	(4.248.600,00)
Jumlah	103.421.887,00	166.003.040,14	-62.581.153,14

g) Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Nilai persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.207.000,00 berada pada OPD:

Tabel 5. 127 Rincian Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	0,00	730.000,00	(730.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan	1.000.000,00	1.200.000,00	(200.000,00)
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	500.000,00	0,00	500.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	110.000,00	150.000,00	(40.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	60.000,00	40.000,00	20.000,00
Kecamatan Siak Kecil	187.000,00	90.000,00	97.000,00
Kecamatan Rupat Utara	150.000,00	120.000,00	30.000,00
Kecamatan Mandau	200.000,00	600.000,00	(400.000,00)
Kecamatan Talang Muandau	0,00	1.449.900,00	(1.449.900,00)
Jumlah	2.207.000,00	4.379.900,00	-2.172.900,00

h) Persediaan Pupuk/ Pakan/ Benih

Nilai persediaan pupuk/ pakan/ benih per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 berada pada OPD:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 128 Rincian Persediaan Pupuk/ Pakan/ Benih per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Perikanan	0,00	4.369.500,00	(4.369.500,00)
Dinas Perkebunan	0,00	59.672.000,00	(59.672.000,00)
Jumlah	0,00	64.041.500,00	-64.041.500,00

i) Persediaan Suku Cadang

Nilai persediaan suku cadang per 31 Desember 2022 sebesar Rp520.419.767,78 berada pada OPD:

Tabel 5. 129 Rincian Persediaan Suku Cadang per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	306.924.067,78	244.997.542,67	61.926.525,11
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	199.877.700,00	0,00	199.877.700,00
Dinas Perkebunan	13.618.000,00	13.618.000,00	0,00
Jumlah	520.419.767,78	258.615.542,67	261.804.225,11

j) Persediaan Bahan Bakar

Nilai persediaan bahan bakar per 31 Desember 2022 sebesar Rp935.000,00 berada pada OPD:

Tabel 5. 130 Rincian Persediaan Bahan Bakar per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
OPD	675.000,00	1.630.000,00	(955.000,00)
Kecamatan Rupat Utara	260.000,00	650.000,00	(390.000,00)
Jumlah	935.000,00	2.280.000,00	-1.345.000,00

k) Persediaan Bahan Kimia

Nilai persediaan bahan kimia per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.623.233.866,45 berada pada OPD:

Tabel 5. 131 Rincian Persediaan Bahan Kimia per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	797.576.697,00	779.493.027,00	18.083.670,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	1.737.540.829,45	1.788.635.722,37	(51.094.892,92)
Dinas Perumahan dan Pemukiman	83.000,00	0,00	83.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	241.000,00	0,00	241.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	312.000,00	0,00	312.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perikanan	640.000,00	0,00	640.000,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	86.580.340,00	58.800.000,00	27.780.340,00
Kecamatan Talang Muandau	260.000,00	0,00	260.000,00
Jumlah	2.623.233.866,45	2.626.928.749,37	-3.694.882,92

l) Persediaan Hibah

Nilai persediaan yang akan dihibahkan pada masyarakat per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.737.601.661,76 berada pada OPD:

Tabel 5. 132 Rincian Persediaan Hibah per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	0,00	7.850.497.699,81	(7.850.497.699,81)
Dinas Kesehatan	1.288.591.724,00	698.435.369,96	590.156.354,04
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.413.581.482,15	15.286.966.686,73	9.126.614.795,42
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	2.584.261.193,00	12.221.143.063,00	(9.636.881.870,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	635.403.828,00	635.403.828,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	815.763.434,61	815.763.434,61	0,00
Jumlah	29.737.601.661,76	37.508.210.082,11	-7.770.608.420,35

m) Persediaan Dalam Proses

Nilai persediaan alat kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.866.140.210,00 berada pada OPD:

Tabel 5. 133 Rincian Persediaan Dalam Proses per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.221.991.340,00	0,00	2.221.991.340,00
Dinas Lingkungan Hidup	644.148.870,00	0,00	644.148.870,00
Jumlah	2.866.140.210,00	0,00	2.866.140.210,00

n) Persediaan Makanan Pokok

Nilai persediaan makanan pokok per 31 Desember 2022 sebesar Rp563.118.100,00 Berada pada OPD:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 134 Rincian Persediaan Makanan Pokok per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Ketahanan Pangan	563.118.100,00	479.503.800,00	83.614.300,00
Jumlah	563.118.100,00	479.503.800,00	83.614.300,00

Rincian Persediaan Per OPD dapat dilihat pada:

[Lampiran Persediaan](#)

B. Investasi Jangka Panjang

1. Investasi Non Permanen

	31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi nonpermanen	31.385.302.136,00	31.547.255.555,00	(161.953.419,00)
Investasi nonpermanen diragukan tertagih	(31.086.802.136,00)	(31.189.055.555,00)	102.253.419,00
Nilai Bersih	298.500.000,00	358.200.000,00	(59.700.000,00)

Akun Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.385.302.136,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp31.547.255.555,00 merupakan pinjaman kepada masyarakat berupa Dana Bergulir, Pinjaman Lunak, Buffer Stock, Pinjaman Modal Usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyerahkan penagihan piutang terhadap investasi non permanen kepada KPKNL untuk diproses lebih lanjut, sampai dengan saat laporan keuangan dibuat investasi non permanen pada Dinas Perikanan sudah dilakukan proses penagihan kepada debitur.

Berdasarkan surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Riau Nomor SPnPPN-01/PUPNC.03.03/2016 perihal penolakan pengurusan Piutang Negara, proyek P3TP dan PUPR dikeluarkan dari investasi non permanen dikarenakan:

- 1) Tidak adanya kepastian ada dan besarnya piutang negara
- 2) Tidak adanya dokumen yang mendukung dan membuktikan sebagai piutang negara
- 3) Sesuai dengan surat nomor 5.24.3/DISTANNAK/XI/2015/135 tanggal 23 November 2015 terhadap dua proyek tersebut diatas telah dinyatakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Bahwa bukan Pinjaman bagi petani tetapi merupakan bantuan saprodi langsung habis pakai kepada petani.

Tabel 5. 135 Rincian Investasi Non Permanen per OPD

OPD	Nilai Kotor	Diragukan Tertagih	Nilai Bersih
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	19.366.324.140,00	(19.366.324.140,00)	0,00
Dinas Perikanan	2.164.704.910,00	(2.164.704.910,00)	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	4.285.161.400,00	(3.986.661.400,00)	298.500.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.369.111.686,00	(5.369.111.686,00)	0,00
Pabrik VCO Yayasan Melayu	200.000.000,00	(200.000.000,00)	0,00
Jumlah	31.385.302.136,00	(31.086.802.136,00)	298.500.000,00

a) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Investasi non permanen per 31 Desember 2022 pada Dinas Koperasi dan UKM rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 136 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi non permanen	19.366.324.140,00	19.392.687.773,00	(26.363.633,00)
Investasi non permanen diragukan tertagih	(19.366.324.140,00)	(19.392.687.773,00)	26.363.633,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

Perlu kami informasikan Dinas Koperasi dan UKM mempunyai 3 (tiga) rekening penampung yaitu: No.108-0321034, 108-0321046 dan 108-0307740. Saldo pada rekening penampung per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 pada rekening nomor 108-0321034, sebesar Rp0,00 pada rekening nomor 108-0321046 dan sebesar Rp0,00 pada rekening nomor 108-0307740.

Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi dan UKM berasal dari Proyek Penguatan Modal Usaha Koperasi dan UKM, Proyek Pengembangan Usaha Koperasi di Kecamatan Bantan dan Rangsang, Proyek Pembangunan Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis dan Kegiatan Pengembangan Koperasi Unggulan.

Investasi Non Permanen pada Dinas Koperasi dan UKM mengalami penurunan sebesar Rp26.363.633,00 disebabkan ada pembayaran/pengembalian terhadap pinjaman oleh

1 Pusat Koperasi Pegawai R.I (Drs. Hendra)	10.909.092,00
2 Koperasi Mutiara Bantan (Syamsuddin)	5.454.540,00
3 Koperasi Komite Melayu Bersatu Bengkalis (H. Usman Effendi)	10.000.001,00
JUMLAH	26.363.633,00

b) Dinas Perikanan

Investasi non permanen per 31 Desember 2022 pada Dinas Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 137 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Perikanan

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi non permanen	2.164.704.910,00	2.165.795.818,00	(1.090.908,00)
Investasi non permanen diragukan tertagih	(2.164.704.910,00)	(2.165.795.818,00)	1.090.908,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Perlu kami informasikan Dinas Perikanan mempunyai 1 (satu) rekening penampung dengan saldo per 31 Desember 2022 yaitu: No.108-2000231 sebesar Rp0,00.

Investasi Non Permanen pada Dinas Perikanan berasal dari kegiatan Proyek Pinjaman Lunak Untuk Percepatan Ekonomi Kerakyatan dan Kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Jaring. Investasi Non Permanen pada Dinas Perikanan mengalami penurunan sebesar Rp1.090.908,00 disebabkan ada pembayaran/pengembalian terhadap pinjaman di Tahun 2022 oleh Tambak Karya/khaidir selaku peminjam.

c) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan

Investasi non permanen per 31 Desember 2022 pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 138 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi Non Permanen	4.285.161.400,00	4.345.161.400,00	(60.000.000,00)
Investasi non permanen diragukan tertagih	(3.986.661.400,00)	(3.986.961.400,00)	300.000,00
Nilai bersih investasi non permanen	298.500.000,00	358.200.000,00	(59.700.000,00)

Perlu kami informasikan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan mempunyai 1 (satu) rekening penampung dengan No.10-80-32221-1 yang telah berstatus tidak aktif dan telah ditutup.

Investasi Non Permanen pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan berasal dari Proyek Pinjaman Lunak Percepatan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Bengkulu (PPL PEK) dan Proyek Pengembangan Tanaman Holtikultura Kabupaten Bengkulu (PPTH) Tahun 2002.

Perlu diinformasikan bahwa nilai investasi non permanen pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan senilai Rp1.995.699.900,- terdapat surat jaminan berupa Surat Sertifikat Tanah dan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sampai dengan saat ini masih tersimpan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perternakan Kabupaten Bengkulu.

Investasi Non Permanen pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan mengalami penurunan sebesar Rp60.000.000,00 disebabkan ada pembayaran/pengembalian terhadap pinjaman di Tahun 2022.

d) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Investasi non permanen per 31 Desember 2022 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 139 Rincian Investasi Non Permanen Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi non permanen	5.369.111.686,00	5.443.610.564,00	(74.498.878,00)
Investasi non permanen diragukan tertagih	(5.369.111.686,00)	(5.443.610.564,00)	74.498.878,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Perlu kami informasikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai 2 (dua) rekening penampung dengan saldo per 31 Desember 2022 yaitu: No.108-0317190 sebesar Rp205.705.035,00 dan pada Rekening nomor 108-0300571 sebesar Rp51.993.230,00.

Investasi non permanen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berasal dari kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kecil Kabupaten Bengkalis dan Proyek Peningkatan Pengembangan Perdagangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2001, Proyek Pinjaman Lunak untuk Percepatan Ekonomi Tahun 2005 dan Penguatan Modal Usaha Kecil Kec. Pinggir dan Mandau, Penguatan Modal Usaha Kec. Merbau, T. Tinggi dan T. Tinggi Barat, Penguatan Modal Usaha Kec. Bantan, Bengkalis, Bukit Batu, Siak Kecil, Rupat dan Rupat Utara.

Investasi Non Permanen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengalami penurunan sebesar Rp74.498.878,00 disebabkan ada pembayaran/pengembalian terhadap pinjaman tersebut di Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut

1 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Sapriyal Amir	Rp	1.818.182,00
2 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Ishak Sonot	Rp	454.545,00
3 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Bani Bin Badri	Rp	909.091,00
4 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Zulhelmi	Rp	4.545.455,00
5 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Zulhelmi	Rp	1.818.182,00
6 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Mulim Rozali, BAC	Rp	454.545,00
7 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Hambali	Rp	9.045.455,00
8 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Bani Bin Badri	Rp	1.818.182,00
9 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Zuhelmi	Rp	1.818.182,00
10 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Ayati (Ayang)	Rp	272.727,00
11 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Syuip	Rp	454.545,00
12 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Zailani	Rp	272.727,00
13 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Sopiah	Rp	454.545,00
14 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Bani Bin Badri	Rp	909.091,00
15 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Zuhelmi	Rp	1.818.182,00
16 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Sapriyal Amir	Rp	909.091,00
17 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Ayati (Ayang)	Rp	272.727,00
18 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Sopiah	Rp	454.545,00
19 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Murni	Rp	5.787.579,00
20 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Syuip	Rp	454.545,00
21 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Bani Bin Badri	Rp	1.818.182,00
22 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Zuhelmi	Rp	1.818.182,00
23 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Zailani	Rp	454.545,00
24 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Hambali	Rp	1.818.182,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

25 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Sukardiman	Rp	454.545,00
26 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Ayati Ayang	Rp	272.727,00
27 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Muslim Rozali,BAC	Rp	454.545,00
28 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Sopiah	Rp	454.545,00
29 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Zulhelmi	Rp	2.343.617,00
30 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Guruh Tri Abdillah	Rp	227.273,00
31 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Sapriyal Amir	Rp	909.091,00
32 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Hambali	Rp	2.640.413,00
33 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Aprianto MR	Rp	909.091,00
34 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Muslim Rozali BAC	Rp	636.364,00
35 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Ayati (Ayang)	Rp	272.727,00
36 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Bani Bin Badri	Rp	1.818.182,00
37 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Muslim Rozali BAC	Rp	454.545,00
38 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Sopiah	Rp	454.545,00
39 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Sapriyal Amir	Rp	909.091,00
40 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Syuip	Rp	272.727,00
41 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Ishak Sonot	Rp	909.091,00
42 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Apriyanto MR	Rp	909.091,00
43 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Akmar Hasan	Rp	272.727,00
44 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Ayati (Ayang)	Rp	272.727,00
45 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Bani Bin Badri	Rp	1.818.182,00
46 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Muslin Rozali,B.Ac	Rp	454.545,00
47 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Rizal	Rp	7.727.273,00
48 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Sopiah	Rp	909.091,00
49 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Muslim Rozali, BAC	Rp	454.545,00
50 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Bani Bin Badri	Rp	1.818.182,00
51 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Aprianto, MR	Rp	909.091,00
52 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Ayati (Ayang)	Rp	272.727,00
53 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Bani Bin Badri	Rp	1.818.182,00
54 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - Sapriyal Amir	Rp	1.818.182,00
JUMLAH	Rp	74.498.878,00

e) Pabrik VCO Yayasan Melayu

Berdasarkan hasil inventarisasi, Investasi non permanen per 31 Desember 2022 pada Pabrik VCO Yayasan Melayu dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 140 Rincian Investasi Non Permanen Pabrik VCO Yayasan Melayu

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Investasi non permanen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Investasi non permanen diragukan tertagih	(200.000.000,00)	(200.000.000,00)	0,00
Nilai bersih investasi non permanen	0,00	0,00	0,00

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
517.084.604.479,00	517.914.200.090,00	(829.595.611,00)

Akun investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan terdiri dari penyertaan modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 141 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Jenis Penyertaan	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Penyertaan Modal pada PDAM Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal pada PT. Riau Air Line	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri	131.606.200.000,00	131.606.200.000,00	0,00
Penyertaan Modal pada PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis	377.478.404.479,00	378.308.000.090,00	(829.595.611,00)
Penyertaan Modal pada PT. SJMT Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Jumlah	517.084.604.479,00	517.914.200.090,00	(829.595.611,00)

Penyertaan modal pemerintah daerah (PMP) dilakukan kepada 5 Badan Usaha dengan saldo Per 31 Desember 2022 sebesar Rp517.084.604.479,00.

Penyertaan awal Modal Pemerintah Daerah (PMP) Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada 5 Badan Usaha tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penyertaan Modal Pada PDAM Bengkulu

Pembentukan PDAM Bengkulu berdasarkan atas Perda Kabupaten Bengkulu No. 04 Tahun 1994 tanggal 20 Januari 1994. Pemerintah Kabupaten Bengkulu memiliki 100% kepemilikan atas PDAM Bengkulu. Jumlah penyertaan berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu di PDAM Bengkulu hingga akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp28.006.482.531,00. Berdasarkan laporan keuangan PDAM tahun 2022 (Unaudit) diketahui bahwa PDAM Kabupaten Bengkulu memperoleh laba sebesar Rp896.146.089,00. Sehingga laba tersebut mengurangi saldo laba ditahan tahun sebelumnya yang bernilai minus sebesar Rp64.136.001.168,94. menjadi sebesar Rp62.443.530.963,94. Konsisten dengan metode ekuitas, nilai PMPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada PDAM Kabupaten Bengkulu disajikan senilai Rp0,00 di karenakan Rugi PDAM masih belum melebihi penyertaan modal sebesar minus Rp62.443.530.963,94.

Hal tersebut didasarkan atas Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 6 Revisi Tahun 2016 tentang Akuntansi Investasi paragraf 47 yang menyatakan bahwa Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, maka penyertaan modal PT PDAM di sajikan Rp0,00 atau Nihil.

Tabel 5. 142 Rincian Penyertaan Modal Pada PDAM Bengkulu

Tahun	Jumlah
2000	350.000.000,00
2001	1.109.400.000,00
2002	1.000.000.000,00
2003	3.000.000.000,00
2004	3.187.500.000,00
2005	6.000.000.000,00
2006	6.000.000.000,00
2007	8.200.000.000,00
2012	(8.224.347.689,00)
2014	3.044.859.174,00
2016	4.339.071.046,00
Jumlah	28.006.482.531,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penyertaan Modal Pada PT Riau Airlines

Berdasarkan data/informasi yang tersedia, kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas saham Maskapai Penerbangan Riau Airlines adalah 5,5% dari keseluruhan modal PT Riau Airlines sesuai dengan Surat Pernyataan Penyertaan Modal tanggal 17 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Bupati Bengkalis atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Jumlah penyertaan berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis di PT Riau Airlines tercatat sebesar Rp8.000.000.000,00 yang terdiri dari 8.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- per lembar saham. Pada Tanggal 12 Juli 2012 PT Riau Air Line dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Medan No.03/PAILIT/2012/PN. Atas putusan pailit tersebut Gubernur Riau melakukan upaya hukum dalam rangka penyelamatan PT. RAL, sehingga status pailit PT RAL dinyatakan berakhir.

Penyertaan Modal Pada Bank Riau Kepri

PT Bank Riau merupakan perusahaan daerah di Provinsi Riau yang bergerak di bidang perbankan di mana sahamnya dimiliki oleh beberapa Pemerintah Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Sampai dengan 31 Desember 2022 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Bank Riau sebesar Rp131.606.200.000,00, persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas PT Bank Riau sebesar 11,81% untuk posisi Per 31 Desember 2022.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas Bank Riau Kepri tanggal 19 Agustus 2019, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepri dengan realisasi sebesar Rp10.000.000.000,00.

Tabel 5. 143 Rincian Penyertaan Modal Pada Riau Kepri

Tahun	Jumlah
2006	15.004.000.000,00
2007	25.000.000.000,00
2008	2.000.200.000,00
2009	50.000.000.000,00
2011	9.602.000.000,00
2012	20.000.000.000,00
2019	10.000.000.000,00
Jumlah	131.606.200.000,00

Penyertaan Modal Pada PT Bumi Laksamana Jaya

Pembentukan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No. 46 Tahun 2001 tanggal 24 Oktober 2001. Seluruh kepemilikan saham PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis ini dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bengkalis menambahkan penyertaan modal ke PT. Bumi Laksamana Jaya sebesar Rp300.000.000.000,-. Jumlah penyertaan berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis di PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkalis hingga akhir tahun 2012 sebesar Rp426.630.393.067,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Terhadap penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada PT. Bumi Laksamana Jaya sebesar Rp300.000.000.000,00 sudah terdapat Putusan Pengadilan yang sudah inkrah/inkrah yaitu Putusan Pengadilan Nomor: 263 K/Pid.Sus.TPKI/2016 tentang Daftar Aset Bergerak yang disita dan Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.Sus.TPK/2018 perihal Daftar Aset Tak Bergerak yang disita.

Berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor B-3284/L.4.13/Fu.1/11/2019 tentang Jawaban Permohonan Pengembalian Aset PT. Bumi Laksamana Jaya tanggal 25 November 2019, bahwa barang bukti berupa Aset PT. Bumi Laksamana Jaya telah di Lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 162/2017 tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp154.690.000,00 dan hasilnya telah disetor ke Kas Negara, serta barang bukti berupa Uang sebesar Rp2.750.973.000,00 yang telah ditransfer ke Kas Daerah Bank Riau Kepri dengan bukti setoran Bank BRI tanggal 19 September 2018 dan 14 Maret 2019. Terkait Pengurangan investasi belum dilakukan dalam laporan keuangan karena belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu

Berdasarkan laporan keuangan PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu per 31 Desember 2022 (Unaudit) diketahui bahwa PT. Bumi Laksamana Jaya Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp829.595.611, dengan metode ekuitas, nilai PMPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada PT. Bumi Laksamana Jaya Kabupaten Bengkulu disajikan senilai Rp377.478.404.479,00.

Tabel 5. 144 Rincian Penyertaan Modal Pada PT Bumi Laksamana Jaya

Tahun	Jumlah
2001	10.000.000.000,00
2002	2.000.000.000,00
2003	41.621.000.000,00
2004	11.150.000.000,00
2005	5.000.000.000,00
2007	7.500.000.000,00
2008	40.906.480.267,00
2009	8.452.912.800,00
2012	300.000.000.000,00
Jumlah	426.630.393.067,00

Penyertaan Modal Pada PT SJMT

Jumlah penyertaan modal berupa kas oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada PT. Sri Junjungan Media Televisi (PT SJMT) yang bergerak dalam bidang usaha penyiaran televisi hingga akhir tahun 2013 masih tercatat sebesar Rp8.236.000.000,00. PT SJMT sampai dengan laporan keuangan dibuat tidak beroperasi lagi. PT SJMT semula dikelola oleh PT BLJ namun dilatarbelakangi oleh telah berakhirnya KSO antara Pemkab. Bengkulu dan PT BLJ dalam pengelolaan PT. SJMT dan PT. BLJ tidak berhak melakukan Penyiaran televisi sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Melalui surat kepada Bupati Bengkulu No.133/BLJ-Dirut/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 hal rencana serah terima, PT BLJ berkeinginan untuk menyerahkan seluruh aset dan pengelolaan PT SJMT Seluruh Aset PT SJMT telah diserahkan dan dicatat sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 145 Rincian Penyertaan Modal Pada PT SJMT

Tahun	Jumlah
2005	1.236.000.000
2006	3.500.000.000
2007	3.500.000.000
Jumlah	8.236.000.000,00

Rincian Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilihat pada:

[Lampiran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah](#)

C. Aset Tetap

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
7.522.101.779.551,60	7.309.978.441.934,46	212.123.337.617,14

Jumlah Aset Tetap 31 Desember 2022 sebesar Rp7.522.101.779.551,60 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp7.309.978.441.934,46. Nilai aset tetap TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp212.123.337.617,14. Rincian aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 146 Rincian Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Tanah	1.098.122.150.466,64	1.113.920.111.347,51	(15.797.960.880,87)
Peralatan dan Mesin	2.022.886.133.980,48	1.840.891.216.160,18	181.994.917.820,30
Gedung dan Bangunan	3.424.396.606.618,38	3.278.033.677.342,66	146.362.929.275,72
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.952.564.463.988,55	9.327.286.533.125,75	625.277.930.862,80
Aset Tetap Lainnya	143.108.156.692,02	135.015.878.085,72	8.092.278.606,30
Konstruksi dalam Pengerjaan	346.374.070.478,02	355.705.505.591,46	(9.331.435.113,44)
Akumulasi Penyusutan	(9.465.349.802.672,49)	(8.740.874.479.718,82)	(724.475.322.953,67)
Jumlah	7.522.101.779.551,60	7.309.978.441.934,46	212.123.337.617,14

Rincian dan uraian per masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
1.098.122.150.466,64	1.113.920.111.347,51	(15.797.960.880,87)

Nilai aset tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.098.122.150.466,64 dan Rp1.113.920.111.347,51 maka terdapat penurunan dari periode sebelumnya sebesar Rp15.797.960.880,87.

Mutasi aset tetap tanah sebesar Rp1.098.122.150.466,64 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 (Audited)	1.113.920.111.347,51
Mutasi Tambah	
Pembelian (sesuai harga perolehan)	
Belanja modal Tanah	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Hutang Pihak Ketiga	0,00	
Transfer Masuk	0,00	
Koreksi BPK	0,00	
Koreksi Pencatatan	2.685.308.006,00	
Reklasifikasi	0,00	
Hibah	8.058.575.009,50	
Total Mutasi Tambah		10.743.883.015,50
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Penghapusan	0,00	
Koreksi Audited/BPK	26.541.843.896,37	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Kurang		26.541.843.896,37
Saldo aset tetap per 31 Desember 2022		1.098.122.150.466,64

Rincian aset tetap tanah sebesar Rp1.098.122.150.466,64 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 147 Rincian Aset Tetap Tanah

Jenis	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Tanah Persil			
Tanah Bangunan			
Perumahan/G.Tempat Tinggal	89.978.541.094,40	89.976.441.094,40	2.100.000,00
Tanah Untuk Bangunan			
Ged.Perdagangan/ Perusahaan	85.857.084.634,72	85.807.539.394,72	49.545.240,00
Tanah Untuk Bangunan Industri	20.490.951.100,00	20.490.951.100,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	454.719.483.699,48	480.777.649.520,85	(26.058.165.821,37)
Tanah Untuk Bangunan Gedung			
Sarana Olah Raga	24.668.278.789,07	24.668.278.789,07	0,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	5.423.717.490,00	5.423.717.490,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00
Tanah Non Persil			
Tanah Basah	13.851.048.000,00	13.851.048.000,00	0,00
Tanah Kering	7.246.155.731,00	6.180.798.800,00	1.065.356.931,00
Tanah Perkebunan	242.674.500,00	242.674.500,00	0,00
Tanah Hutan	8.060.679.600,00	6.799.979.600,00	1.260.700.000,00
Tanah Tandus	1.476.384.000,00	1.476.384.000,00	0,00
Tanah Pertanian	1.019.488.000,00	1.019.488.000,00	0,00
Lapangan			
Tanah Lapangan Olah Raga	23.552.993.570,00	22.324.993.570,00	1.228.000.000,00
Tanah Lapangan Penimbunan Barang	17.593.785.066,66	17.593.785.066,66	0,00
Tanah Lapangan Pemancar Dan Studio Alam	4.242.101.480,00	4.242.101.480,00	0,00
Tanah Untuk Jalan	239.158.130.466,84	239.158.130.466,84	0,00
Tanah Untuk Bangunan Air	36.788.722.364,97	36.788.722.364,97	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tanah Untuk Bangunan Instalasi	76.625.000,00	76.625.000,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Jaringan	3.070.279.000,00	3.070.279.000,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	6.563.908.000,00	59.900.000,00	6.504.008.000,00
Tanah Untuk Makam	26.940.318.719,50	26.789.823.950,00	150.494.769,50
Tanah Untuk Taman	14.957.693.160,00	14.957.693.160,00	0,00
Tanah Kampung	12.143.107.000,00	12.143.107.000,00	0,00
Jumlah	1.098.122.150.466,64	1.113.920.111.347,51	(15.797.960.880,87)

Kenaikan Penurunan Aset Tanah dapat di lihat pada:

[Lampiran Aset Tanah](#)

2. Peralatan dan Mesin

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
2.022.886.133.980,48	1.840.891.216.160,18	181.994.917.820,30

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.022.886.133.980,48 dan Rp1.840.891.216.160,18.

Mutasi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2.022.886.133.980,48 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 (Audited)	1.840.891.216.160,18
Mutasi Tambah	
Pembelian (sesuai harga perolehan)	
Belanja Barang dan Jasa	1.461.996.320,38
Belanja Tanah	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	193.737.293.078,20
Belanja Gedung dan Bangunan	741.877.187,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	446.870.995,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.145.119.408,00
Belanja Aset Lainnya	534.666.114,00
Koreksi BPK	1.393.544.225,05
Hutang Pihak Ketiga	187.317.500,00
Total Pembelian	199.648.684.827,63
Hibah	1.742.007.834,44
Transfer masuk	22.064.166.128,02
Koreksi Pencatatan	0,00
Reklasifikasi	0,00
Aset Covid-19	0,00
Koreksi BPK	0,00
Total Mutasi Tambah	23.806.173.962,46
Mutasi Kurang	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Transfer keluar	22.064.166.128,02	
Penghapusan	5.350.097.455,00	
Hibah	0,00	
Reklasifikasi	243.055.555,56	
Koreksi BPK	13.572.275.131,21	
Koreksi Pencatatan	230.346.700,00	
Total Mutasi Kurang		41.459.940.969,79
Saldo aset tetap per 31 Desember 2022		2.022.886.133.980,48

Rincian aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2.022.886.133.980,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 148 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Jenis	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	76.428.427.055,01	64.654.002.955,01	11.774.424.100,00
Alat Besar Apung	614.047.937,24	614.047.937,24	0,00
Alat Bantu	63.321.820.614,38	62.763.086.933,38	558.733.681,00
Alat Angkutan			0,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	333.716.124.271,93	285.418.268.585,49	48.297.855.686,44
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.218.481.629,35	2.093.388.029,35	125.093.600,00
Alat Angkutan Apung Bermotor	29.480.230.338,22	27.126.919.338,22	2.353.311.000,00
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	10.427.504.106,00	10.289.897.406,00	137.606.700,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	3.086.664.340,85	2.955.361.304,85	131.303.036,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	3.597.851.172,82	3.493.341.595,86	104.509.576,96
Alat Ukur	18.816.340.123,77	12.259.042.126,73	6.557.297.997,04
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	25.609.564.824,96	24.978.792.194,96	630.772.630,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	-	0,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	123.638.170.855,92	110.933.139.207,95	12.705.031.647,97
Alat Rumah Tangga	318.062.935.871,57	292.215.706.787,64	25.847.229.083,93
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	32.481.573.308,74	30.709.308.924,10	1.772.264.384,64
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	38.077.094.851,91	33.139.108.255,91	4.937.986.596,00
Alat Komunikasi	9.918.824.453,87	9.323.177.126,87	595.647.327,00
Peralatan Pemancar	20.598.887.135,41	20.405.909.216,62	192.977.918,79
Peralatan Komunikasi Navigasi	34.749.000,00	23.978.000,00	10.771.000,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	393.594.503.692,61	354.766.117.421,88	38.828.386.270,73



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Alat Kesehatan Umum	6.990.488.194,28	6.937.717.474,28	52.770.720,00
Alat Laboratorium			0,00
Unit Alat Laboratorium	183.980.409.760,74	185.858.700.558,87	(1.878.290.798,13)
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	4.069.814.193,00	1.991.673.970,00	2.078.140.223,00
Alat Peraga Praktek Sekolah	89.737.323.868,79	89.524.974.772,60	212.349.096,19
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	608.809.797,72	541.722.522,72	67.087.275,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	3.684.803.507,84	3.625.501.607,84	59.301.900,00
Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	5.972.500,00	2.397.500,00	3.575.000,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.674.521.147,93	3.678.954.864,93	(4.433.717,00)
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	3.715.012.283,92	3.728.730.068,92	(13.717.785,00)
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	781.071.846,00	752.427.742,00	28.644.104,00
Alat Persenjataan			
Senjata Api	263.766.527,00	263.766.527,00	0,00
Persenjataan Non Senjata Api	2.173.724.925,21	2.093.599.315,21	80.125.610,00
Senjata Sinar	9.772.458,00	9.772.458,00	0,00
Alat Khusus Kepolisian	1.148.161.615,00	942.794.221,00	205.367.394,00
Komputer			
Komputer Unit	135.742.491.897,21	118.160.232.171,75	17.582.259.725,46
Peralatan Komputer	51.384.397.107,86	45.313.908.574,58	6.070.488.533,28
Alat Eksplorasi			0,00
Alat Eksplorasi Geofisika	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian			0,00
Sumur	59.849.000,00	19.849.000,00	40.000.000,00
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	75.592.900,00	75.592.900,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	74.250.000,00	74.250.000,00	0,00
Alat Pelindung	4.885.041,00	4.885.041,00	0,00
Alat Sar	7.978.181.041,07	7.697.865.041,07	280.316.000,00
Alat Kerja Penerbangan	353.476.144,00	268.426.000,00	85.050.144,00
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.602.181.900,00	1.595.605.900,00	6.576.000,00
Peralatan Proses/Produksi			0,00
Unit Peralatan Proses/Produksi	40.412.140,00	29.667.140,00	10.745.000,00
Rambu-Rambu			



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	19.153.704.196,35	17.964.570.611,35	1.189.133.585,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	522.894.000,00	522.894.000,00	0,00
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	1.321.870.403,00	1.048.142.829,00	273.727.574,00
Jumlah	2.022.886.133.980,48	1.840.891.216.160,18	181.994.917.820,30

Kenaikan Penurunan Aset Peralatan dan Mesin dapat di lihat pada:
Lampiran Aset Peralatan dan Mesin

3. Gedung dan Bangunan

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
3.424.396.606.618,38	3.278.033.677.342,66	146.362.929.275,72

Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.424.396.606.618,38 dan Rp3.278.033.677.342,66.

Mutasi aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp3.424.396.606.618,38 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 (Audited) 3.278.033.677.342,66

Mutasi Tambah

Pembelian (sesuai harga perolehan)

Belanja Barang dan Jasa	37.573.991.196,88	
Belanja Tanah		
Belanja Peralatan dan Mesin	334.533.000,00	
Belanja Gedung dan Bangunan	131.943.047.117,00	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.396.557.415,00	
Belanja Aset Tetap Lainnya	803.471.328,00	
Hutang Pihak Ketiga		
Total Pembelian		174.051.600.056,88

Transfer masuk	68.300.461.580,43	
Aset Dari KDP	69.290.462.910,45	
Hibah	4.845.729.362,15	
Reklasifikasi	259.999.843,00	
Aset Covid-19	0,00	
Koreksi BPK	8.615.175.417,95	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Tambah		151.311.829.113,98

Mutasi Kurang

Transfer keluar	68.300.461.580,43	
Diserahkan Ke Pemda Lain	0,00	
Koreksi BPK	105.566.999.674,71	
Reklasifikasi	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penghapusan	5.132.799.640,00
Koreksi Pencatatan	239.000,00
Total Mutasi Kurang	179.000.499.895,14
Saldo aset tetap per 31 Desember 2022	3.424.396.606.618,38

Rincian aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp3.424.396.606.618,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 149 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.049.942.743.040,26	2.913.669.760.491,90	136.272.982.548,36
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	254.918.574.482,71	254.131.344.624,35	787.229.858,36
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	36.598.128.235,45	35.189.908.861,45	1.408.219.374,00
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	4.459.623.967,85	4.063.817.404,85	395.806.563,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Tugu/Tanda Batas	78.477.536.892,11	70.978.845.960,11	7.498.690.932,00
Jumlah	3.424.396.606.618,38	3.278.033.677.342,66	146.362.929.275,72

Pada Aset Gedung dan Bangunan tersebut terdapat Gedung Asrama yang berlokasi di jalan Taman Karya Kota Pekanbaru senilai Rp1.169.100.720,00 yang berdiri diatas tanah milik Kabupaten Siak.

Kenaikan Penurunan Aset Gedung dan Bangunan dapat di lihat pada:
Lampiran Gedung dan Bangunan

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
9.952.564.463.988,55	9.327.286.533.125,75	625.277.930.862,80

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp9.952.564.463.988,55 dan Rp9.327.286.533.125,75.

Mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.952.564.463.988,55 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 (Audited) 9.327.286.533.125,75

Mutasi Tambah

Pembelian (sesuai harga perolehan)

Belanja Barang dan Jasa	11.377.886.252,00
Belanja Tanah	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	3.886.175.057,00
Belanja Gedung dan Bangunan	11.533.081.198,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	540.090.017.952,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	
Hutang Kepada Pihak Ketiga	2.351.467.839,00	
Koreksi BPK	7.721.711.510,01	
Koreksi Pencatatan	-	
Total Pembelian		576.960.339.808,01
Transfer Masuk	123.301.278.948,68	
hibah	27.065.638.000,00	
Aset dari KDP	21.430.482.054,79	
Reklasifikasi	0,00	
Aset Covid-19	0,00	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Tambah		171.797.399.003,47
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	123.301.278.948,68	
Diserahkan Ke Pemda Lain	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Koreksi BPK	178.529.000,00	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Total Mutasi Kurang		123.479.807.948,68
Saldo aset tetap per 31 Desember 2022		9.952.564.463.988,55

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp9.952.564.463.988,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 150 Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Jalan dan Jembatan			
Jalan	7.208.146.672.289,03	6.783.860.734.354,04	424.285.937.934,99
Jembatan	531.991.520.465,78	530.651.221.100,76	1.340.299.365,02
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	344.805.250.782,34	341.850.486.128,34	2.954.764.654,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	16.157.732.819,96	15.671.828.933,96	485.903.886,00
Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	4.117.301.634,05	3.729.662.176,05	387.639.458,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	964.189.141.966,50	869.105.608.061,96	95.083.533.904,54
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	7.140.370.419,74	5.559.582.527,74	1.580.787.892,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	532.039.266.521,86	463.714.003.879,86	68.325.262.642,00
Bangunan Air Kotor	13.946.320.339,83	12.208.563.465,83	1.737.756.874,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Instalasi			
Instalasi Air Bersih / Air Baku	44.239.099.497,53	44.109.854.497,53	129.245.000,00
Instalasi Air Kotor	647.980.178,51	647.980.178,51	0,00
Instalasi Pengolahan Sampah	1.802.212.758,00	559.744.000,00	1.242.468.758,00
Instalasi Pembangkit Listrik	6.259.815.001,05	6.259.815.001,05	0,00
Instalasi Gardu Listrik	2.056.098.086,28	2.200.412.086,28	(144.314.000,00)
Instalasi Pertahanan	1.129.114.308,00	1.129.114.308,00	0,00
Instalasi Gas	388.540.793,10	388.540.793,10	0,00
Instalasi Pengaman	417.030.256,70	417.030.256,70	0,00
Jaringan			
Jaringan Air Minum	154.895.766.464,84	130.866.233.784,59	24.029.532.680,25
Jaringan Listrik	117.509.838.382,26	113.689.854.568,26	3.819.983.814,00
Jaringan Telepon	685.391.023,19	666.263.023,19	19.128.000,00
Jumlah	9.952.564.463.988,55	9.327.286.533.125,75	625.277.930.862,80

Kenaikan Penurunan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat di lihat pada:
Lampiran Jalan, Irigasi dan Jaringan

5. Aset Tetap Lainnya

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
143.108.156.692,02	135.015.878.085,72	8.092.278.606,30

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp143.108.156.692,02 dan Rp135.015.878.085,72.

Mutasi aset tetap lainnya sebesar Rp143.108.156.692,02 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 (Audited)	135.015.878.085,72
Mutasi Tambah	
Pembelian (sesuai harga perolehan)	
Belanja Barang dan Jasa	149.850.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	2.220.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.711.167.841,00
Hutang Kepada Pihak Ketiga	0,00
Total Pembelian	7.863.237.841,00
Transfer Masuk	2.112.006.065,00
hibah	243.887.133,30
Reklasifikasi	0,00
Total Mutasi Tambah	2.355.893.198,30
Mutasi Kurang	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Transfer Keluar	2.112.006.065,00
Reklasifikasi	0,00
Koreksi BPK	14.846.368,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Total Mutasi Kurang	2.126.852.433,00
Saldo aset tetap per 31 Desember 2022	143.108.156.692,02

Rincian aset tetap lainnya sebesar Rp143.108.156.692,02 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 151 Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/Penurunan
Bahan Perpustakaan			
Bahan Perpustakaan Tercetak	126.483.079.589,68	118.452.747.823,38	8.030.331.766,30
Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	125.427.840,00	125.427.840,00	0,00
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	4.340.101.681,00	4.337.881.681,00	2.220.000,00
Musik	152.943.000,00	118.023.500,00	34.919.500,00
Karya Grafika (Graphic Material)	13.212.500,00	13.662.500,00	(450.000,00)
Three Dimensional Artefacts And Realita	111.428.469,00	110.828.469,00	600.000,00
Tarscalt	0,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			
Barang Bercorak Kesenian	2.602.782.162,95	2.578.124.822,95	24.657.340,00
Alat Bercorak Kebudayaan	2.023.852.285,00	2.023.852.285,00	0,00
Tanda Penghargaan	30.966.700,00	30.966.700,00	0,00
Hewan			
Hewan Piaraan	0,00	0,00	0,00
Tanaman			
Tanaman	2.864.032.717,39	2.864.032.717,39	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Aset Tetap Dalam Renovasi	4.360.329.747,00	4.360.329.747,00	0,00
Jumlah	143.108.156.692,02	135.015.878.085,72	8.092.278.606,30

6. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
346.374.070.478,02	355.705.505.591,46	(9.331.435.113,44)

Nilai konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp346.374.070.478,02 dan Rp355.705.505.591,46.

Mutasi KDP sebesar Rp346.374.070.478,02 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Saldo awal 31 Desember 2021 (Audited)	355.705.505.591,46
Pembelian (sesuai harga perolehan)	
Belanja Barang dan Jasa	1.974.068.096,00
Belanja Tanah	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	0,00
Belanja Gedung dan Bangunan	1.707.838.701,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	88.838.070.616,00
Utang Pihak Ketiga	0,00
Total Pembelian	92.519.977.413,00
Transfer Masuk	138.038.908,00
Reklasifikasi	0,00
hibah	9.584.000,00
Koreksi BPK	5.020.137.299,81
Koreksi Pencatatan	0,00
Total Mutasi Tambah	5.167.760.207,81
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	138.038.908,00
Reklasifikasi	96.555.196.335,24
Aset di Serahkan Pemda Lain	0,00
Penghapusan	193.000.000,00
Koreksi BPK	7.721.710.510,01
Koreksi Pencatatan	2.411.226.981,00
Total Mutasi Kurang	107.019.172.734,25
Saldo aset tetap per 31 Desember 2022	346.374.070.478,02

Rincian aset tetap KDP per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 152 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	7.085.931.644,72	4.632.885.147,91	2.453.046.496,81
Dinas Kesehatan	949.707.467,00	8.690.307.209,45	(7.740.599.742,45)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	235.051.000,00	235.051.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	322.529.833.231,98	314.872.248.562,27	7.657.584.669,71
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	3.431.571.220,00	9.357.396.837,51	(5.925.825.617,51)
Dinas Sosial	2.095.198.645,51	2.095.198.645,51	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	38.427.425,00	38.427.425,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	652.264.908,00	514.226.000,00	138.038.908,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.712.000,00	148.696.309,00	(48.984.309,00)
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	39.968.000,00	39.968.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	1.481.353.734,00	7.292.981.553,00	(5.811.627.819,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	49.900.000,00	(49.900.000,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	0,00	199.800.000,00	(199.800.000,00)
Sekretariat Daerah	306.967.000,00	0,00	306.967.000,00
Sekretariat DPRD	99.396.000,00	99.396.000,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	172.224.000,00	172.224.000,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.785.343.104,81	6.785.343.104,81	0,00
Badan Pendapatan Daerah	200.769.797,00	200.769.797,00	0,00
Kecamatan Bandar Laksamana	20.868.000,00	181.186.000,00	(160.318.000,00)
Kecamatan Pinggir	49.983.300,00	0,00	49.983.300,00
Jumlah	346.374.070.478,02	355.705.505.591,46	-9.331.435.113,44

7. Akumulasi Penyusutan

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
(9.465.349.802.672,49)	(8.740.874.479.718,82)	(724.475.322.953,67)

Akumulasi Penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp9.465.349.802.672,49 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 153 Rincian Akumulasi Penyusutan

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.649.794.389.480,82)	(1.545.495.198.585,51)	(104.299.190.895,31)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.116.943.295.360,54)	(1.061.497.171.843,54)	(55.446.123.517,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(6.694.433.573.580,84)	(6.129.880.256.088,15)	(564.553.317.492,69)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(4.178.544.250,29)	(4.001.853.201,62)	(176.691.048,67)
Jumlah	(9.465.349.802.672,49)	(8.740.874.479.718,82)	(724.475.322.953,67)

Tabel 5. 154 Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	(672.649.169.685,74)	(617.608.058.692,35)	(55.041.110.993,39)
Dinas Kesehatan	(155.206.624.909,92)	(137.390.566.176,52)	(17.816.058.733,40)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	(243.053.813.471,73)	(215.453.593.870,29)	(27.600.219.601,44)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	(192.010.430.063,96)	(186.391.634.821,35)	(5.618.795.242,61)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(4.730.282.074.705,57)	(4.361.668.197.040,62)	(368.613.877.664,95)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	(1.422.683.119.038,96)	(1.359.940.964.402,66)	(62.742.154.636,30)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(10.832.659.390,92)	(8.457.915.200,92)	(2.374.744.190,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	(25.362.975.879,22)	(24.301.849.155,22)	(1.061.126.724,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	(9.432.171.840,40)	(9.034.699.673,40)	(397.472.167,00)
Dinas Sosial	(30.928.508.728,17)	(27.971.596.798,07)	(2.956.911.930,10)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(23.735.569.860,65)	(22.406.729.488,65)	(1.328.840.372,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(6.495.967.646,23)	(5.923.003.051,23)	(572.964.595,00)
Dinas Ketahanan Pangan	(7.950.724.672,89)	(7.699.370.531,89)	(251.354.141,00)
Dinas Lingkungan Hidup	(87.287.327.129,11)	(61.945.208.405,04)	(25.342.118.724,07)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(20.021.779.641,68)	(16.814.474.718,68)	(3.207.304.923,00)
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(12.950.165.538,83)	(22.088.152.403,83)	9.137.986.865,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(6.429.033.272,71)	(5.596.858.588,71)	(832.174.684,00)
Dinas Perhubungan	(508.756.031.295,48)	(406.506.192.428,47)	(102.249.838.867,01)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(12.788.196.472,04)	(9.002.113.637,04)	(3.786.082.835,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(9.865.994.095,12)	(9.389.188.130,12)	(476.805.965,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(9.658.907.472,09)	(9.118.663.926,09)	(540.243.546,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	(72.719.806.228,10)	(65.994.510.363,10)	(6.725.295.865,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(19.570.156.786,13)	(18.423.728.790,13)	(1.146.427.996,00)
Dinas Perikanan	(26.477.865.896,47)	(25.469.513.820,47)	(1.008.352.076,00)
Dinas Perkebunan	(1.880.569.918,00)	(836.489.023,00)	(1.044.080.895,00)
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	(72.811.039.713,38)	(68.009.228.813,38)	(4.801.810.900,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(74.780.309.446,30)	(71.110.673.663,88)	(3.669.635.782,42)
Sekretariat Daerah	(330.848.544.403,20)	(315.474.426.592,20)	(15.374.117.811,00)
Sekretariat DPRD	(65.904.307.653,57)	(61.353.399.174,57)	(4.550.908.479,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(13.612.224.511,24)	(12.880.833.449,24)	(731.391.062,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(273.773.652.659,61)	(286.173.331.215,91)	12.399.678.556,30
Badan Pendapatan Daerah	(20.411.971.061,82)	(18.676.339.938,82)	(1.735.631.123,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(20.518.120.165,85)	(20.336.911.905,85)	(181.208.260,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	(15.961.296.794,01)	(17.254.364.128,71)	1.293.067.334,70
Inspektorat	(8.812.965.874,25)	(8.454.633.281,25)	(358.332.593,00)
Kecamatan Bengkulu	(34.046.655.584,25)	(31.455.947.318,17)	(2.590.708.266,08)
Kecamatan Bantan	(19.827.758.228,74)	(18.525.981.588,73)	(1.301.776.640,01)
Kecamatan Bukit Batu	(21.363.294.924,00)	(20.971.567.342,00)	(391.727.582,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Siak Kecil	(16.548.337.908,31)	(15.542.865.265,28)	(1.005.472.643,03)
Kecamatan Bandar Laksamana	(3.120.494.728,00)	(1.846.278.724,00)	(1.274.216.004,00)
Kecamatan Rupat	(35.846.544.282,84)	(31.041.295.807,90)	(4.805.248.474,94)
Kecamatan Rupat Utara	(17.847.659.660,29)	(16.197.556.799,33)	(1.650.102.860,96)
Kecamatan Mandau	(63.864.777.132,77)	(57.429.685.287,54)	(6.435.091.845,23)
Kecamatan Pinggir	(25.003.662.535,91)	(23.232.304.717,18)	(1.771.357.818,73)
Kecamatan Bathin Solapan	(2.803.532.473,67)	(1.509.160.485,67)	(1.294.371.988,00)
Kecamatan Talang Muandau	(3.116.466.063,00)	(2.418.345.554,00)	(698.120.509,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(5.496.543.227,36)	(5.546.075.527,36)	49.532.300,00
Jumlah	(9.465.349.802.672,49)	(8.740.874.479.718,82)	(724.475.322.953,67)

D. Dana Cadangan

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
0,00	0,00	0,00

Akun Dana Cadangan per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 mempunyai saldo sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E. Aset Lainnya

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
565.828.910.235,70	202.533.572.495,04	363.295.337.740,66

Jumlah Aset lainnya sebesar Rp565.828.910.235,70 dan Rp202.533.572.495,04 merupakan aset yang tidak bisa dikategorikan sebagai aset tetap seperti: Tuntutan ganti rugi, aset tidak berwujud dan aset lain-lain, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 155 Rincian Aset Lainnya

Jenis Aset Tetap	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Tuntutan Ganti Rugi	6.306.966.250,66	6.306.966.250,66	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	488.750.000,00	488.750.000,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.226.553.925,51	2.382.272.002,28	(155.718.076,77)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility	279.720.241.835,00	-	279.720.241.835,00
Aset Lain-lain	277.086.398.224,53	193.355.584.242,10	83.730.813.982,43
Jumlah	565.828.910.235,70	202.533.572.495,04	363.295.337.740,66

1. Tuntutan Ganti Rugi

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
6.306.966.250,66	6.306.966.250,66	0,00

Rincian Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai Berikut:

Tabel 5. 156 Mutasi Tuntutan Ganti Rugi

Inisial	Saldo 01 Januari 2022	Mutasi 2022	Saldo 31 Desember 2022
---------	-----------------------	-------------	------------------------



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

I K	3.096.695.428,00	0,00	3.096.695.428,00
M K	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00
A S	799.783.820,00	0,00	799.783.820,00
F M		0,00	
E D	364.045.684,00	0,00	364.045.684,00
M N	663.828.068,00	0,00	663.828.068,00
K H	651.250.097,00	0,00	651.250.097,00
A L	447.454.860	0,00	447.454.860,00
BAPENDA	126.908.294	0,00	126.908.293,66
JUMLAH	6.306.966.250,66	0,00	6.306.966.250,66

Rincian Mutasi TGR per OPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 157 Rincian Tuntutan Ganti Rugi per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Satuan Polisi Pamong Praja	364.045.684,00	364.045.684,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	447.454.860,00	447.454.860,00	0,00
Dinas Perhubungan	651.250.097,00	651.250.097,00	0,00
Dinas Perwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	157.000.000,00	157.000.000,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	663.828.068,00	663.828.068,00	0,00
Sekretariat DPRD	3.096.695.428,00	3.096.695.428,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	126.908.293,66	126.908.293,66	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	799.783.820,00	799.783.820,00	0,00
Jumlah	6.306.966.250,66	6.306.966.250,66	0,00

Proses Hukum TGR dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk TGR pada Badan Penelitian dan Pengembangan telah melalui proses hukum serta telah dijatuhkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Petikan Putusan No. 18/Pid.Sus/Tipikor/2016/PN.Pbr.
2. Untuk TGR pada Sekretariat DPRD telah melalui proses hukum serta telah dijatuhkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Petikan Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

3. Untuk TGR pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melalui proses hukum serta telah dijatuhkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Petikan Putusan No. 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr.
3. Untuk TGR pada Dina Lingkungan Hidup telah melalui proses hukum serta telah dijatuhkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan Petikan Putusan No. 01/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Pbr.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
488.750.000,00	488.750.000,00	0,00

Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp488.750.000,00 berada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT Riau Angkasa Indah, surat perjanjian Nomor 01/PJJ-PSR/2000 tentang perjanjian kerjasama bagi tempat usaha dalam pembangunan pasar tradisional dan pusat pertokoan di Duri Kabupaten Bengkalis-Riau. Dalam kerjasama ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyediakan lahan senilai Rp488.750.000,00 untuk dibangun lokasi dagang dan kantor UPTD dengan rincian :

	450.000.000,00
1 unit kantor UPTD	<u>38.750.000,00</u>
	488.750.000,00

dimana sistem kerjasama adalah BOT (*Build Operate Transfer*) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ditambah 3 (tiga) tahun masa pembangunan pasar tradisional dan pusat pertokoan, terhitung bulan April 2000.

3. Aset Tidak Berwujud

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
2.226.553.925,51	2.382.272.002,28	(155.718.076,77)

Aset Tidak Berwujud disajikan sebesar nilai buku, yaitu nilai perolehan sebesar Rp23.474.604.992,57 setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp21.248.051.067,06. Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.226.553.925,51 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.382.272.002,28.

Mutasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp2.226.553.925,51 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 (Audited) 2.382.272.002,28

Mutasi Tambah

Pembelian (sesuai harga perolehan)

Belanja Barang dan Jasa	568.752.999,00
Belanja Peralatan dan Mesin	49.617.000,00
Belanja ATL	439.208.500,00
Koreksi Pencatatan	30.656.416,67
Hutang Pihak Ketiga	
Total Pembelian	1.088.234.915,67



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Transfer Masuk

Total Mutasi Tambah **0,00**

Mutasi Kurang

Transfer Keluar

Aset diserahkan ke Pemda lain

Amortisasi 2022 1.243.952.992,44

Koreksi Amortisasi 0,00

Koreksi Pencatatan

Total Mutasi Kurang **1.243.952.992,44**

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 **2.226.553.925,51**

Rincian Aset Tidak Berwujud berdasarkan Nilai Perolehan sebesar Rp23.474.604.992,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 158 Rincian Aset Tidak Berwujud per OPD

Nama ATB	Nilai Perolehan	Tahun Pembelian	Perusahaan
Dinas Pendidikan			
Perangkat Lunak Sistem Operasi	21.000.000,00	2011	CV. Adira
Software / Aplikasi Komputer	401.955.000,00	2013	CV. Putra Wijaya
Belanja Modal Software / Aplikasi Komputer	96.066.500,00	2014	CV. Panjera Jaya
Software / Aplikasi Komputer	63.520.000,00	2016	CV. Panjera Jaya
Aplikasi Komputer SDN. 16 Pangkalan Batang	1.724.317,00	2016	CV. Panjera Jaya
Alat Sistem Penilaian Sekolah Terintegrasi Sistem Database	989.642.048,00	2016	CV. Bintang Nurjaya Lestari
Sarana dan Prasarana Pendukung Kurikulum 2013 Jenjang SMP dan Sederajat Se-Kabupaten Bengkulu	936.232.000,00	2016	CV. Citra Gemilang
Sarana dan Prasarana Micro Teaching Jenjang SMP dan Sederajat	545.302.482,00	2016	CV. Gemilang Abadi
Media Pembelajaran Edukatif Berbasis Animasi Interaktif	374.741.813,00	2016	CV. Ade Liany
Media Pembelajaran Edukatif Berbasis Animasi Interaktif Untuk SMP dan Aplikasi Peningkatan Keterampilan TIK Berbasis Video Interaktif	1.582.578.486,00	2016	CV. Mifta Mafuh Mandiri
Alat Sistem Penilaian Sekolah Terintegrasi Sistem Database untuk Jenjang SMP	1.069.644.455,00	2016	CV. Ek Mandiri



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sumber Belajar Terpadu Berbasis IT	316.582.375,00	2016	UD. Putra Mas
Sarana dan Prasarana Pendukung Penerapan Kurikulum 2013 Jenjang SD dan Sederajat Se - Kabupaten Bengkulu	934.379.520,00	2016	CV. Prima Perkasa
Sarana dan Prasarana Micro Teaching Jenjang SD dan Sederajat	545.302.482,00	2016	CV. Surya Asyifa
Alat Peningkatan Mengajar Berbasis ICT	809.658.397,00	2016	CV. Riau Jaya
Komputer SDN. 35 Pematang Duku	1.729.240,00	2016	CV. Anugrah Persada
Perangkat Lunak Data Pendidikan dan Software Papan Informasi Pendidikan	122.898.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Perlengkapan Sarana Infrastruktur Sekolah Majalah Dinding Digital Interaktif Jenjang SD	607.951.341,00	2017	CV. Vibi Nabila
Alat Pembelajaran Terintegrasi Media Visual Interaktif Jenjang SD	639.222.473,00	2017	CV. Berkah Karya Mandiri
Alat Pembelajaran Terintegrasi Media Visual Interaktif	640.714.600,00	2017	CV. Megah Mandiri Sejahtera
Perlengkapan Sarana Infrastruktur Sekolah Majalah Dinding Digital Interaktif	618.807.004,00	2017	CV. Cahaya Anugerah
Alat Pembelajaran Berbasis Multimedia Animasi Interaktif Jenjang SMP	151.329.780,00	2018	CV. Putra Wijaya
Perangkat Lunak	173.910.000,00	2019	PT. Aditya Rama Daya Cipta
Aplikasi Master Bank Soal Tryout UN	76.335.900,00	2019	PT. Apsara Tiyasa Sambada
Microsoft (Windows Server STD CORE) WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic	181.800.000,00	2019	PT. Astragraphia Xprins Indonesia
Aplikasi Absensi Kepegawaian (e-Absen)	73.384.000,00	2021	CV. Ikrar Utama
Aplikasi Manajemen Kearsipan Surat (e-Arsip)	70.796.000,00	2021	CV. Ikrar Utama
Aplikasi SISAPRANA	74.203.500,00	2022	HANAFI / CV. IKRAR UTAMA
Jumlah	12.121.411.713,00		
Dinas Kesehatan			
Software Website (dinkes.bengkalisab.go.id)	86.661.400,00	2013	CV. Inti Media
Aplikasi Laporan Obat dan Perbekalan Kesehatan	95.219.196,00	2019	PT. Nuasa Cerah Informasi



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik	175.900.000,00	2020	PT. Nuasa Cerah Informasi
Software Website (corona.bengkaliskab.go.id)	39.567.000,00	2021	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah		397.347.596,00	
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau			
Aplikasi Komputer (Software Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG RSUD))	50.436.900,00	2014	CV. Mandiri Karya
Pengembangan SIM dan IT/ Pengembangan Website RSUD (www.rsudmandau.com)	28.820.000,00	2016	PT. Raja Sakti Telematika
Perlengkapan pendukung SIM RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)	9.459.000,00	2017	Toko Alfa Komputer
Jumlah		88.715.900,00	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Aplikasi Keuangan	34.850.000,00	2011	CV. Guna Dharma
Software Website (http://pupr.bengkaliskab.go.id/)	124.135.000,00	2015	PT. Hegar Daya
Aplikasi Surat Menyurat (Sistem Informasi Aplikasi Persuratan) (http://puprbengkalis.com/sipp/)	128.972.500,00	2019	CV.Mmw
Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat Berbasis WEB (http://simawar.puprbengkalis.com/)	131.613.500,00	2019	CV.Riau Cyber Teknologi
Aplikasi Kerusakan Jalan Kabupaten	99.744.000,00	2020	CV. Web Dragon
Sistem Informasi PUPR Kabupaten Bengkulu (pupr.bengkaliskab.com)	99.917.000,00	2021	CV.Mahputra
Jumlah		619.232.000,00	
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan			
Aplikasi Database Tanah Berbasis Website (eSigab Perkimtan Bengkulu) di Google Playstore	144.550.000,00	2019	CV. Indosoft Media
Jumlah		144.550.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Aplikasi Data Sistem Managemen Pemulihan dan Penanggulangan Bencana	48.058.200,00	2015	CV. Multi Jasa Technica
Software Website (bpbddamkar.bengkaliskab.go.id)	49.800.000,00	2016	CV. Ikrar Utama
Software Website Pusdatin (www.bpbddamkar.bengkaliskab.go.id)	49.720.000,00	2019	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah		147.578.200,00	
Dinas Pemadam Kebakaran			
Software Website (www.damkar.bengkaliskab.go.id)	39.024.000,00	2019	CV. Djitoe Pesisir
Software Website (https://damkar.bengkaliskab.go. id)	24.805.000,00	2021	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah		63.829.000,00	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Aplikasi E-Lapor	49.950.000,00	2022	PANJI RACHMAT SETIAWAN/CV.RAHMAT JAYA BERSAMA
Jumlah		49.950.000,00	
Dinas Ketahanan Pangan			
Aplikasi Sistem Informasi Harga Pasar	25.428.000,00	2013	CV. Media Jasa
Aplikasi Software Database Kelompok Tani pada Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Penyuluh	29.080.000,00	2013	Toko JC Computer
Software Website (www.dkp.bengkaliskab.go.id)	43.450.400,00	2016	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah		97.958.400,00	
Dinas Lingkungan Hidup			
Software Website Bank Sampah (http://Jakstradakabbengkaliskab.go.id)	74.778.000,00	2019	CV. Karya Anugrah Konsultan
Jumlah		74.778.000,00	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Software Website (http://sidupa.bengkaliskab.go.id/ login)	199.670.000,00	2019	CV. Quantum Solution
Windows Server Original dan License Key	49.617.000,00	2022	BUZANIR/ CV. REPINDO PERSADA
Jumlah		249.287.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Software	49.950.000,00	2022	PT. Mandau Jaya Perkasa
Aplikasi Biling Data Bumdes/Bumdes Syariah/ Bumdes Bersama	69.700.000,00	2022	CV. TIGA BINTANG
Jumlah		119.650.000,00	
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Software Website (www.disdalduk- kb.bengkaliskab.go.id)	39.500.000,00	2018	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah		39.500.000,00	
Dinas Perhubungan			
Software Website (www.dishubkominfo.bengkalisk ab.go.id)	44.979.000,00	2013	PT. Bumi Marna Indonusa
Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (Perangkat Lunak Sistem Operasi)	57.532.000,00	2018	CV. Hanin Tama
SIM PKB (Perangkat Lunak Sistem Operasi)	66.155.910,00	2019	CV. Hanin Tama
Aplikasi Pemeriksaan Tab dan Capture (Perangkat Lunak Sistem Operasi)	66.155.910,00	2019	CV. Hanin Tama
Aplikasi E-KIR Gadget	99.000.000,00	2020	CV. Yustini
Aplikasi SMS Gateway	38.500.000,00	2020	CV. Yustini
Modul Display	49.747.500,00	2021	CV. Baskhara
Modul Aplikasi Pengujian Keliling	93.390.000,00	2021	CV. Baskhara
Modul Software Aplikasi Uji Keliling	62.150.000,00	2021	CV. Baskhara
Aplikasi e Ticketing	254.023.499,00	2022	PT. AKSES DINAMIKA TEKNOLOGI (RIO OCTAVIANO)
Jumlah		831.633.819,00	
Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik			
Software Website Pemkab Bengkalis (www.bengkaliskab.go.id)	29.056.500,00	2013	CV. Citra Buana
Aplikasi Buku Tamu Elektronik	60.039.400,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (pesonabengkalis.id)	39.600.000,00	2020	CV. Putra Malay Corporation
Aplikasi SMS Gateaway	14.461.800,00	2021	CV. Cloud Code Indonesia
Jumlah		143.157.700,00	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Sistem Aplikasi Perizinan	96.078.702,00	2012	PT. Murfa Surya Mahardika
Software Website www.bpmp2t.co.id	38.821.000,00	2013	CV. Metco (Melayu Era Technology)
Sistem Informasi Manajemen (SKRD)	91.491.500,00	2013	CV. Junico Jaya
Sistem Informasi (PTSP)	282.381.000,00	2013	CV. Putra Malay Corporation



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

SIM PTSP	9.194.400,00	2014	CV. Wahana Mitra Intermedia
SIMPEG	85.302.300,00	2014	CV. Putra Malay Cooperation
Anjungan Informasi Mandiri	97.324.800,00	2014	CV. Wahana Mitra Intermedia
SIM PTSP	87.015.400,00	2015	CV. Putra Malay Cooperation
SIM SKRD	60.854.600,00	2015	CV. Wahana Mitra Intermedia
Sistem Layanan Antrian	48.317.500,00	2017	CV. Media Gema Mandiri
Arsipan Digital	49.052.400,00	2017	CV. Media Gema Mandiri
Sistem Informasi Berbasis IT	55.363.900,00	2017	CV. Tri Jaya Mutimedia
ePINTER DPMPSP BENGKALIS	37.400.000,00	2018	CV. Tri Jaya Mutimedia
warning system (e-PINTER)	31.300.000,00	2019	CV. Tri Jaya Mutimedia
Mobile layanan perizinan dan non perizinan	34.000.000,00	2019	CV. Media Gema Mandiri
Arsip digital	33.800.000,00	2019	CV. Media Gema Mandiri
Tanda Tangan Digital	41.800.000,00	2019	CV. Tri Jaya Mutimedia
Jumlah	1.179.497.502,00		
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
Komputer Server /Main Frame (Mikro Film) Perangkat Lunak NCI Book Man	122.300.000,00	2008	CV. Berkama Karya
Software Database Sistem Kearsipan	68.460.900,00	2011	CV. Defitra Konsultan
Aplikasi Untuk Pendataan Dan Pentaan Dokumen/Arsip Daerah (Digital Arsip)	33.733.483,00	2018	CV. Ladini
Jumlah	224.494.383,00		
Dinas Perikanan			
Software Website (www.dinaskelautan.bengkaliska b.go.id)(software codeIgniter3)	39.800.000,00	2018	CV. Ikrar Utama
Jumlah	39.800.000,00		
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan			
Aplikasi Data Keuangan & Administrasi Umum (Perencanaan)	49.950.000,00	2010	CV. De Fitra Konsultan
Aplikasi Pada Laptop (Citra Alus + Handling)	45.126.647,77	2011	CV. Tanjung Tipah
Software Website www.disbunhut.bengkaliskab.go.id	40.642.000,00	2016	CV. Panjera Jaya



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Software Website (www.distanbengkaliskab.go.id)	29.850.000,00	2016	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah			165.568.647,77
Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
Software Voip WEB based Voip Software	34.521.000,00	2013	CV. Indra Rukmana Karya Teknik
Server Xeon E3110 (3.0 Ghz, Fsb 1333 Mhz, Chace 6Mb)	9.862.850,00	2011	CV. Adira
Pembuatan Aplikasi Database IKM	49.940.000,00	2021	CV. Tuan Muda
Jumlah			94.323.850,00
Sekretariat Daerah			
Software/Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan	57.530.000,00	2011	CV. Adira
Website Dinamis dan Interaktif (bengkaliskab.go.id)	19.900.000,00	2011	CV. Liandino Utama
Software/Aplikasi SMS Gateway Berbasis Web	34.950.000,00	2011	CV. Liandino Utama
Software/Aplikasi SIMBADA	18.500.000,00	2011	CV. Gold Print
Software/Aplikasi Gaji	189.000.000,00	2012	CV. Ikrar Utama
Software/Aplikasi SIMPEG	97.800.000,00	2012	CV. Serantau Mandiri
Software OS Window Server	10.196.400,00	2013	CV. Ikrar Utama
Software/Aplikasi Operating System	21.243.000,00	2015	CV. Ikrar Utama
Software/ Aplikasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	73.194.000,00	2015	CV. Multi Jasa Technica
Software SIAP	61.899.000,00	2015	CV. Mahmudal Fata Akbar
Software/Aplikasi Data Rumah Ibadah	14.780.000,00	2015	CV. Multi Jasa Technica
Sistem dan Aplikasi Laporan Online untuk Bagian Penyusunan Program	49.398.000,00	2016	CV. Ikrar Utama
Software Sistem Informasi Manajemen Ruangn Setda dan Software Sistem Informasi Document Sharing Berbasis Cloud	147.666.000,00	2016	CV. Pratama Cipta
Software OS Window Server	10.500.000,00	2016	CV. Ikrar Utama
Aplikasi Dashboard Pengadaan Barang dan Jasa	74.855.000,00	2020	CV. Rishan Anugrah
Aplikasi Rumah Ibadah	49.995.000,00	2022	
Jumlah			931.406.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sekretariat DPRD			
Software Website (http://dprd-bengkalis.kab.go.id/admin/dprd)	300.580.000,00	2011	CV. Lialindo Utama
Software Website (www.DPRD.Bengkalis.kab.go.id)	58.711.700,00	2016	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.e-wartawan.bengkalis.kab.go.id/HumasSetwan/)	44.598.400,00	2017	CV. Putra Malay Cooperation
Software Website (www.SPPD.Bengkalis.kab.go.id)	47.960.000,00	2019	CV. Putra Malay Cooperation
Software Website (www.DPRD.bengkalis.kab.go.id/perpustakaan/)	54.000.000,00	2019	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah	505.850.100,00		
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Software Website (www.bappeda.bengkalis.kab.go.id)	17.618.183,00	2012	CV. Guna Dharma
Software E-Planning	194.150.000,00	2018	PT. Raja Sakti Telematika
Software E-Monev	187.000.000,00	2019	PT. Adityarama Daya Cipta
Aplikasi (Software) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	195.360.000,00	2022	RIANDY SATRIA PUTRA / PT ANKA BRATA INFORMATIKA
Jumlah	594.128.183,00		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
Software Website (www.dpk.bengkalis.kab.go.id)	34.320.000,00	2015	CV. Putra Malay Cooperation
Software Website (www.bpkad.bengkalis.kab.go.id)	49.000.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.bpkad.bengkalis.kab.go.id)	35.625.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.bpkad.bengkalis.kab.go.id)	36.000.000,00	2017	CV. Ikrar Utama
Software Website (www.bpp.bengkalis.kab.go.id)	41.100.000,00	2016	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah	196.045.000,00		
Badan Pendapatan Daerah			
Lisensi Software Database Aplikasi SIM PBB : SQLSvrStdCore 2012 SNGL OLP 2Lic NL Core Lic Qlfd	81.257.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Lisensi Software Database Aplikasi SIM PBB : SQLSvrStdCore 2012 ENG DiskKit MVL DVD	693.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Lisensi Sistem Operasi Aplikasi SIM PBB : WinSvrEssnts 2012 SNGL	14.410.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Lisensi Sistem Operasi Aplikasi SIM PBB : WinSvrEssnts 2012 64Bit	715.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Lisensi Software Pemetaan Aplikasi SIM PBB : Aplikasi Pemetaan Mapinfo Profesional V 11.5	51.315.000,00	2013	PT. Halcom Integrated Solution
Software Aplikasi Simpeg, Aplikasi Pajak Daerah dan Sistim Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (Simpeda)	650.570.000,00	2011	CV. Serantau Mandiri
Software/Aplikasi Sistem Informasi Manajemen PBB Online	261.118.205,80	2012	CV. Liandino Utama.
Software/Aplikasi Perjalanan Dinas dan Website Dispenda	69.025.000,00	2012	CV. Serantau Mandiri
Software/Aplikasi POS (Pay- ment Online System) untuk PBB- P2	198.800.000,00	2013	PT. Citra Media Interaktif.
Software/Aplikasi Komputer (Smart Map) untuk Pengelolaan PBB-P2	170.500.000,00	2014	PT. Global Aero Dinamika
Connector LAN - AMP Ori	750.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Kabel LAN - Belden Ori	2.810.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Anti Virus Komputer Desktop (3 user) - Kaspersky 2016	5.460.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Aplikasi Dashboard PBB-P2 - Anti Virus Karpersky - 1 Server 5 Client	4.000.000,00	2015	CV. Guna Dharma
Aplikasi Dashboard PBB-P2	126.500.000,00	2015	PT. Cartenz Technology International.
Software/Aplikasi Komputer Sistem Informasi PBB-P2	65.827.200,00	2016	PT. Elok Mitra Utama
Aplikasi Perhitungan Piutang PBB-P2	65.492.800,00	2016	PT. Bonion Mitra Utama
Software Aplikasi Komputer SMS Gateway	66.630.000,00	2016	PT. Cipta Pusaka Utama
Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah Self Assesment berupa iTax - Hotel Tax Application dan iTax- Restaurant Tax Application.	197.890.000,00	2017	PT. Cartenz Technology Indonesia.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pemeliharaan Aplikasi Komputer Pengelolaan PBB-P2	20.000.000,00	2017	PT. Mentari Kode Informatika
Aplikasi Imotax Pendataan Wajib Pajak	194.535.000,00	2018	PT. Mentari Kode Informatika
Sistem Aplikasi Informasi Manajemen Pajak Daerah Official Assesment dan Self Assesment	378.840.000,00	2018	PT. Cartenz Technology Indonesia
Windows Server	39.800.000,00	2019	CV. Dwi Mandiri
Aplikasi Informasi Pajak Daerah (Software Sistem Informasi Dashboard)	149.710.000,00	2019	PT. Cartenz Technology Indonesia.
Aplikasi E-SPTPD Untuk Penerapan pajak secara On-Line	194.590.000,00	2019	PT. Mentari Kode Informatika.
Aplikasi System Informasi Pembukuan Pajak Daerah	97.289.000,00	2019	PT. Geo Space Intimatika.
Aplikasi Pendataan Pajak Daerah Berbasis Mobile - Tax Survey	129.900.000,00	2021	PT. Cartenz Technology Indonesia
Aplikasi Pajak Daerah (SIPBUKAS)	199.900.000,00	2022	PT. Cartenz Technology Indonesia
Aplikasi Disposisi Elektronik (Bapenda E-Office)	64.879.500,00	2022	PT. Cartenz Technology Indonesia
Jumlah	3.503.206.705,80		
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
Software Sistem Aplikasi Kearsipan, Disposisi dan Pelayanan Kepegawaian	82.280.000,00	2012	CV. Masya
Jumlah	82.280.000,00		
Badan Penelitian dan Pengembangan			
Software /Aplikasi Elibrary/ fitur	21.158.313,00	2012	CV. Metco (Melayu Era Teknologi)
Software /Aplikasi Database berbasis WEB	20.993.313,00	2012	CV. Metco (Melayu Era Teknologi)
Visualisasi Website Ekomina Wisata Tasik Biospher (www.ecominawisatabiosphere.c om)	57.924.467,00	2012	CV. Mitra Utama Konsultan
Software Website (www.balitbang.bengkalis.kab.go. id)	31.185.000,00	2014	CV. Delapan Media Teknologi
Aplikasi sistem Keuangan	12.000.000,00	2014	CV. Putra Malay Cooperation
Aplikasi Penatausahaan Keuangan	13.500.000,00	2016	CV. Mahmudal Fata Akbar
Aplikasi sistem Keuangan	31.037.600,00	2017	CV. Mahmudal Fata Akbar
Optimalisasi Website	19.990.300,00	2017	CV. Putra Malay Cooperation
Jumlah	207.788.993,00		
Inspektorat			



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Software /perangkat komputer (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan - SIMHP)	53.067.500,00	2015	Toko New Visicom
Jumlah	53.067.500,00		
Kecamatan Bengkulu			
Software/Aplikasi dan Perangkat Aplikasi SI- KEL Kota Bengkulu. Alamat Lokal Server : 192.168.99.1/sikel	70.000.000,00	2017	CV. Panjera Jaya
Jumlah	70.000.000,00		
Kecamatan Bantan			
Software Website (https://camatbantan.bengkalisab.go.id)	15.000.000,00	2017	Toko Smart Com
Jumlah	15.000.000,00		
Kecamatan Siak Kecil			
Software Website Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Kecamatan Siak Kecil Kab. Bengkulu (siap.appsiakkecil.id)	15.000.000,00	2020	Toko Hendri Computer
Jumlah	15.000.000,00		
Kecamatan Bandar Laksamana			
Software Website (https://camatbandarlaksamana.web.id)	24.750.000,00	2020	PT. Azli Internet dan Teknologi Informasi
Jumlah	24.750.000,00		
Kecamatan Rupa Utara			
Software Website Kecamatan (http://camatrupautara.bengkalisab.go.id)	30.000.000,00	2017	CV. Putra Malay Corporation
Jumlah	30.000.000,00		
Kecamatan Mandau			
Software Website (https://camatmandau.bengkalisab.go.id)	27.182.500,00	2016	CV.Putra Malay Cooperation
Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (PATEN)	98.207.500,00	2018	CV. Annur Kegemilangan
Jaringan "SIMANTAP" (Pembuatan Aplikasi SIMANTAP)	149.728.400,00	2019	CV. Tyra Abadi Engeneering
Jumlah	275.118.400,00		
Kecamatan Talang Muandau			
Software Website (https://camattalangmuandau.bengkalisab.go.id/)	29.700.000,00	2020	CV. Ikrar Utama
Jumlah	29.700.000,00		



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Software Website (www.kesbangpol.bengkaliskab.go.id)	49.000.000,00	2014	CV. Delapan Media Teknologi
Jumlah	49.000.000,00		
Jumlah	23.474.604.992,57		23.474.604.992,57

Tabel 5. 159 Rincian Nilai Buku Aset Tidak Berwujud

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Aset Tidak Berwujud	23.474.604.992,57	22.417.026.493,57	1.057.578.499,00
Software	23.326.214.992,57	22.268.636.493,57	1.057.578.499,00
Lisensi	148.390.000,00	148.390.000,00	0,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(21.248.051.067,06)	(20.034.754.491,29)	(1.213.296.575,77)
Software	(21.129.339.067,06)	(19.916.042.491,29)	(1.213.296.575,77)
Lisensi	(118.712.000,00)	(118.712.000,00)	0,00
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	2.226.553.925,51	2.382.272.002,28	(155.718.076,77)

Tabel 5. 160 Rincian Nilai Buku Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 per OPD

OPD	Nilai Perolehan	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Nilai Buku
Dinas Pendidikan	12.121.411.713,00	(11.905.361.875,00)	216.049.838,00
Dinas Kesehatan	397.347.596,00	(275.856.965,58)	121.490.630,42
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	88.715.900,00	(88.715.900,00)	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	619.232.000,00	(454.985.791,67)	164.246.208,33
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	144.550.000,00	(111.423.958,00)	33.126.042,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	147.578.200,00	(137.219.866,67)	10.358.333,33
Dinas Pemadam Kebakaran	63.829.000,00	(39.238.020,83)	24.590.979,17
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49.950.000,00	(2.081.250,00)	47.868.750,00
Dinas Ketahanan Pangan	97.958.400,00	(97.958.400,00)	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	74.778.000,00	(68.546.500,00)	6.231.500,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	249.287.000,00	(155.979.666,67)	93.307.333,33
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	119.650.000,00	(18.078.125,00)	101.571.875,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.500.000,00	(39.500.000,00)	0,00
Dinas Perhubungan	831.633.819,00	(355.390.600,00)	476.243.219,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	143.157.700,00	(118.888.925,00)	24.268.775,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.179.497.502,00	(1.160.532.918,67)	18.964.583,33
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	224.494.383,00	(224.494.383,00)	0,00
Dinas Perikanan	39.800.000,00	(39.800.000,00)	0,00
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	165.568.647,77	(165.568.647,77)	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	94.323.850,00	(57.909.266,67)	36.414.583,33
Sekretariat Daerah	931.406.400,00	(854.917.460,00)	76.488.940,00
Sekretariat DPRD	505.850.100,00	(487.857.600,00)	17.992.500,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	594.128.183,00	(359.984.004,00)	234.144.179,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	196.045.000,00	(196.045.000,00)	0,00
Badan Pendapatan Daerah	3.503.206.705,80	(3.035.491.966,21)	467.714.739,59
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	82.280.000,00	(82.280.000,00)	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	207.788.993,00	(207.788.993,00)	0,00
Inspektorat	53.067.500,00	(53.067.500,00)	0,00
Kecamatan Bengkalis	70.000.000,00	(70.000.000,00)	0,00
Kecamatan Bantan	15.000.000,00	(15.000.000,00)	0,00
Kecamatan Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siak Kecil	15.000.000,00	(9.687.500,00)	5.312.500,00
Kecamatan Bandar Laksamana	24.750.000,00	(17.531.250,00)	7.218.750,00
Kecamatan Rupal	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupal Utara	30.000.000,00	(30.000.000,00)	0,00
Kecamatan Mandau	275.118.400,00	(243.924.983,33)	31.193.416,67
Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	29.700.000,00	(17.943.750,00)	11.756.250,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.000.000,00	(49.000.000,00)	0,00
Jumlah	23.474.604.992,57	(21.248.051.067,06)	2.226.553.925,51

Tabel 5. 161 Rincian Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	12.121.411.713,00	12.047.208.213,00	74.203.500,00
Dinas Kesehatan	397.347.596,00	397.347.596,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	88.715.900,00	88.715.900,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	619.232.000,00	619.232.000,00	0,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	144.550.000,00	144.550.000,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	147.578.200,00	147.578.200,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	63.829.000,00	63.829.000,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	97.958.400,00	97.958.400,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	74.778.000,00	74.778.000,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	249.287.000,00	199.670.000,00	49.617.000,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	119.650.000,00	0,00	119.650.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	831.633.819,00	577.610.320,00	254.023.499,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	143.157.700,00	143.157.700,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.179.497.502,00	1.179.497.502,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	224.494.383,00	224.494.383,00	0,00
Dinas Perikanan	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	165.568.647,77	165.568.647,77	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	94.323.850,00	94.323.850,00	0,00
Sekretariat Daerah	931.406.400,00	881.411.400,00	49.995.000,00
Sekretariat DPRD	505.850.100,00	505.850.100,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	594.128.183,00	398.768.183,00	195.360.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	196.045.000,00	196.045.000,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	3.503.206.705,80	3.238.427.205,80	264.779.500,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	82.280.000,00	82.280.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Penelitian dan Pengembangan	207.788.993,00	207.788.993,00	0,00
Inspektorat	53.067.500,00	53.067.500,00	0,00
Kecamatan Bengkalis	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
Kecamatan Bantan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Kecamatan Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siak Kecil	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
Kecamatan Bandar Laksamana	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00
Kecamatan Rupert	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupert Utara	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Kecamatan Mandau	275.118.400,00	275.118.400,00	0,00
Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
Jumlah	23.474.604.992,57	22.417.026.493,57	1.057.578.499,00

Tabel 5. 162 Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	(11.905.361.875,00)	(11.725.079.749,00)	(180.282.126,00)
Dinas Kesehatan	(275.856.965,58)	(238.632.165,58)	(37.224.800,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	(88.715.900,00)	(88.715.900,00)	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(454.985.791,67)	(339.924.041,67)	(115.061.750,00)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	(111.423.958,00)	(75.286.458,00)	(36.137.500,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(137.219.866,67)	(124.789.866,67)	(12.430.000,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	(39.238.020,83)	(23.280.770,83)	(15.957.250,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2.081.250,00)	0,00	(2.081.250,00)
Dinas Ketahanan Pangan	(97.958.400,00)	(97.958.400,00)	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	(68.546.500,00)	(49.852.000,00)	(18.694.500,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(155.979.666,67)	(103.994.791,67)	(51.984.875,00)
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(18.078.125,00)	0,00	(18.078.125,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(39.500.000,00)	(31.270.833,33)	(8.229.166,67)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perhubungan	(355.390.600,00)	(218.138.983,33)	(137.251.616,67)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(118.888.925,00)	(105.373.475,00)	(13.515.450,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1.160.532.918,67)	(1.122.970.418,67)	(37.562.500,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(224.494.383,00)	(216.763.822,90)	(7.730.560,10)
Dinas Perikanan	(39.800.000,00)	(31.508.333,33)	(8.291.666,67)
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	(165.568.647,77)	(165.568.647,77)	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(57.909.266,67)	(44.383.850,00)	(13.525.416,67)
Sekretariat Daerah	(854.917.460,00)	(826.829.700,00)	(28.087.760,00)
Sekretariat DPRD	(487.857.600,00)	(462.367.600,00)	(25.490.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(359.984.004,00)	(292.984.841,00)	(66.999.163,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(196.045.000,00)	(196.045.000,00)	0,00
Badan Pendapatan Daerah	(3.035.491.966,21)	(2.742.861.351,63)	(292.630.614,58)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(82.280.000,00)	(82.280.000,00)	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	(207.788.993,00)	(207.788.993,00)	0,00
Inspektorat	(53.067.500,00)	(53.067.500,00)	0,00
Kecamatan Bengkulu	(70.000.000,00)	(61.250.000,00)	(8.750.000,00)
Kecamatan Bantan	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)	0,00
Kecamatan Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Siak Kecil	(9.687.500,00)	(5.937.500,00)	(3.750.000,00)
Kecamatan Bandar Laksamana	(17.531.250,00)	(11.343.750,00)	(6.187.500,00)
Kecamatan Rupal	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupal Utara	(30.000.000,00)	(30.000.000,00)	0,00
Kecamatan Mandau	(243.924.983,33)	(183.986.997,91)	(59.937.985,42)
Kecamatan Pinggir	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	(17.943.750,00)	(10.518.750,00)	(7.425.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(49.000.000,00)	(49.000.000,00)	0,00
Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	(21.248.051.067,06)	(20.034.754.491,29)	(1.213.296.575,77)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

4. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
279.720.241.835,00	0,00	279.720.241.835,00

Saldo Dana Treasury Deposit Facility sebesar Rp 279.720.241.385,00 sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia, yang mana saldo dan besaran remunerasi atas pengelolaan TDF tiap-tiap Daerah ditetapkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dan Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum.

Berdasarkan Berita Acara (BA) rekonsiliasi tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki rekening di Bank Indonesia dengan Nomor: 519000235980 a.n. Rek Lain BI TDF TKD Kab. Bengkalis dengan saldo Pokok sebesar Rp279.720.241.835,00 dan nilai remunerasi sebesar Rp71.473.394,01 posisi per 31 Desember 2022.

Terkait pencatatan dan kebijakan akuntansi atas pengakuan Dana Treasury Deposit Facility (TDF) dituangkan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda tanggal 15 Maret 2023 hal Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF, yang didukung dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pemutakhiran Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Keuangan Daerah terkait Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) Pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO).
- 2 Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN. namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemda mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) Pada Pendapatan Bunga-lain-lain PAD Yang Sah atau akun sejenisnya (LO).

5. Aset Lain-lain

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
277.086.398.224,53	193.355.584.242,10	83.730.813.982,43

Aset lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp277.086.398.224,53 seluruhnya diperoleh dari hasil inventarisasi karena adanya reklasifikasi dari aset tetap yang tidak layak disajikan dalam aset tetap. Aset lain-lain disajikan sebesar nilai buku, yaitu nilai perolehan sebesar Rp381.526.943.600,17 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp104.440.545.375,64.

Saldo Aset lain-lain tersebut masih mencakup Aset Renovasi berupa renovasi atau rehabilitasi atas aset yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis berupa renovasi atas sarana ibadah, madrasah, dan pondok pesantren sebesar Rp3.157.188.370,00.

Rincian Aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 163 Rincian Aset Lain-lain

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Aset Lain-lain	381.526.943.600,17	243.608.911.002,97	137.918.032.597,20
Aset Rusak Berat	62.982.621.492,52	9.157.589.122,97	53.825.032.369,55



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Aset Tidak Ditemukan	17.680.728.608,34	36.802.652.454,03	(19.121.923.845,69)
Aset Lain-lainnya	300.863.593.499,31	197.648.669.425,97	103.214.924.073,34
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(104.440.545.375,64)	(50.253.326.760,87)	(54.187.218.614,77)
Aset Rusak Berat	(51.307.893.786,36)	(38.499.143.669,59)	(12.808.750.116,77)
Aset Tidak Ditemukan	(7.764.374.758,28)	(7.764.374.758,28)	0,00
Aset Lain-lainnya	(45.368.276.831,00)	(3.989.808.333,00)	(41.378.468.498,00)
Jumlah	277.086.398.224,53	193.355.584.242,10	83.730.813.982,43

Tabel 5. 164 Rincian Nilai Buku Aset Lain-lain per OPD

OPD	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Dinas Pendidikan	36.985.325.005,35	(3.989.808.333,00)	32.995.516.672,35
Dinas Kesehatan	3.966.208.610,00	(1.166.914.730,00)	2.799.293.880,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	9.077.385.754,33	(9.077.385.754,33)	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	16.172.096.381,74	(15.616.295.071,74)	555.801.310,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	137.737.367.721,88	(3.550.450.000,00)	134.186.917.721,88
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	154.656.990,00	(163.333,33)	154.493.656,67
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	370.246.379,15	(310.834.973,83)	59.411.405,32
Dinas Sosial	807.325.179,72	(684.093.151,13)	123.232.028,59
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	78.093.865,77	(69.328.056,00)	8.765.809,77
Dinas Ketahanan Pangan	588.551.448,46	(296.406.445,57)	292.145.002,89
Dinas Lingkungan Hidup	1.991.392.342,04	(1.129.904.059,00)	861.488.283,04
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.651.961.119,00	(1.602.976.810,00)	48.984.309,00
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25.856.536.385,70	(6.191.695.633,00)	19.664.840.752,70
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	8.752.357.932,80	(403.536.374,00)	8.348.821.558,80
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	177.725.582,13	(172.644.991,00)	5.080.591,13
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	256.086.151,00	(86.767.167,33)	169.318.983,67
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	5.810.963.463,00	(1.826.190.350,00)	3.984.773.113,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	371.849.100,00	(244.851.112,00)	126.997.988,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Perikanan	8.857.748.002,03	(1.979.274.198,59)	6.878.473.803,44
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	5.122.187.160,34	(1.946.426.226,67)	3.175.760.933,67
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.558.280.172,00	(4.506.828.578,53)	1.051.451.593,47
Sekretariat Daerah	1.878.285.866,00	(983.308.478,67)	894.977.387,33
Sekretariat DPRD	1.511.723.744,60	(1.400.669.516,95)	111.054.227,65
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.377.166.492,74	(1.373.382.805,00)	3.783.687,74
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	87.691.954.602,07	(33.337.873.150,74)	54.354.081.451,33
Badan Pendapatan Daerah	247.635.000,00	(247.635.000,00)	0,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.049.893.123,78	(979.376.023,00)	70.517.100,78
Badan Penelitian dan Pengembangan	867.285.127,00	(787.493.055,33)	79.792.071,67
Inspektorat	1.703.921.960,00	(1.689.254.376,00)	14.667.584,00
Kecamatan Bengkulu	1.862.700.393,97	(1.201.873.461,23)	660.826.932,74
Kecamatan Bantan	1.908.210.188,00	(1.352.278.502,00)	555.931.686,00
Kecamatan Bukit Batu	4.690.122.357,00	(2.004.562.174,00)	2.685.560.183,00
Kecamatan Siak Kecil	891.907.861,66	(420.187.416,99)	471.720.444,67
Kecamatan Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupal	42.025.000,00	(39.008.697,92)	3.016.302,08
Kecamatan Rupal Utara	291.180.581,81	(163.181.158,54)	127.999.423,27
Kecamatan Mandau	3.499.899.314,79	(2.256.478.247,79)	1.243.421.067,00
Kecamatan Pinggir	1.045.903.875,64	(781.045.970,00)	264.857.905,64
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	622.783.364,67	(570.161.992,43)	52.621.372,24
Jumlah	381.526.943.600,17	-104.440.545.375,64	277.086.398.224,53

5.3.2. Kewajiban

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
191.836.756.276,16	159.418.991.183,13	32.417.765.093,03

Jumlah Kewajiban sebesar Rp191.836.756.276,16 dan Rp159.418.991.183,13 merupakan nilai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 165 Rincian Kewajiban

Jenis Kewajiban	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Kewajiban Jangka Pendek	191.836.756.276,16	159.418.991.183,13	32.417.765.093,03
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	191.836.756.276,16	159.418.991.183,13	32.417.765.093,03



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

A. Kewajiban Jangka Pendek

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
191.836.756.276,16	159.418.991.183,13	32.417.765.093,03

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp191.836.756.276,16 dan Rp159.418.991.183,13 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 166 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
Utang Biaya Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	85.886.635.942,77	95.720.570.681,77	(9.833.934.739,00)
Utang Pihak Ketiga	101.823.744.460,39	60.699.149.905,36	41.124.594.555,03
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.126.375.873,00	2.999.270.596,00	1.127.105.277,00
Jumlah	191.836.756.276,16	159.418.991.183,13	32.417.765.093,03

1. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
0,00	0,00	0,00

Perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp0,00 merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti: PPh dan PPN.

2. Utang Biaya Pinjaman Luar Negeri

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
0,00	0,00	0,00

Saldo utang biaya pinjaman luar negeri per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00, pada tahun 2022 tidak mengalami kenaikan atau penurunan

3. Pendapatan Diterima Dimuka

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
85.886.635.942,77	95.720.570.681,77	(9.833.934.739,00)

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp85.886.635.942,77. Bila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp95.720.570.681,77, mengalami penurunan sebesar Rp9.833.934.739,00 dengan rincian :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 167 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per OPD

OPD	Pendapatan Diterima Dimuka	Saldo 2022	Saldo 2021
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	Sewa Lahan Bank Riau	11.666.666,76	46.666.666,76
	Sewa Lahan ATM Bank BRI	8.750.000,00	7.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	Sewa Lahan ATM Bank	26.666.666,67	73.166.666,67
Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Sewa Lahan Gardu Listrik	9.666.666,67	10.666.666,67
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Lebih Bayar DBH Pusat (Dana Perimbangan)	85.393.845.977,00	95.277.860.840,00
Badan Pendapatan Daerah	Pajak Reklame	436.039.965,67	305.209.841,67
Jumlah		85.886.635.942,77	95.720.570.681,77

4. Utang Pihak Ketiga

31 Des 2021	31 Des 2022	Kenaikan/(Penurunan)
101.823.744.460,39	60.699.149.905,36	41.124.594.555,03

Saldo utang pihak ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp101.823.744.460,39. Sedangkan saldo utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp60.699.149.905,36.

Rincian utang pihak ketiga sebesar Rp101.823.744.460,39. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 168 Rincian Utang Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Utang Belanja Pegawai	239.518.650,89	4.265.465.240,00	(4.025.946.589,11)
Utang Belanja Barang dan Jasa	24.910.262.724,00	25.707.756.840,92	(797.494.116,92)
Utang Bantuan Keuangan	66.584.096.471,00	0,00	66.584.096.471,00
Utang Belanja Hibah	811.447.734,00	298.483.028,01	512.964.705,99
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	392.984.850,00	2.733.853.918,00	(2.340.869.068,00)
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.802.010.091,50	12.386.674.391,47	(6.584.664.299,97)
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.083.423.939,00	15.306.916.486,96	(12.223.492.547,96)
Saldo	101.823.744.460,39	60.699.149.905,36	41.124.594.555,03

Tabel 5. 169 Mutasi Utang Pihak Ketiga

Utang Pihak Ketiga	APBD	BLUD	Jumlah
Saldo Awal Utang	46.174.487.702,36	14.524.662.203,00	60.699.149.905,36
Koreksi Utang	49.900.891.490,16	6.594.838.531,08	56.495.730.021,24
Utang 2020 di Bayar 2021	73.674.858.888,21	24.984.741.645,00	98.659.600.533,21
Penambahan Tahun 2021	70.048.505.555,00	13.239.959.512,00	83.288.465.067,00
Saldo	92.449.025.859,31	9.374.718.601,08	101.823.744.460,39



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 170 Rincian Utang Pihak Ketiga per OPD

Utang Pihak Ketiga	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	141.258.650,89	12.807.450.838,21	(12.666.192.187,32)
Dinas Kesehatan	0,00	1.246.296.943,00	(1.246.296.943,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu	13.668.579.281,00	25.221.388.863,92	(11.552.809.582,92)
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	6.990.538.453,00	587.672.472,00	6.402.865.981,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.515.560.381,50	7.118.453.724,23	(1.602.893.342,73)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	3.478.071.673,00	3.999.875.580,00	(521.803.907,00)
Dinas Perhubungan	0,00	4.280.347.284,00	(4.280.347.284,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	7.975.350,00	0,00	7.975.350,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	71.961.402.671,00	5.377.306.200,00	66.584.096.471,00
Badan Pendapatan Daerah	10.408.000,00	10.408.000,00	0,00
Jumlah	101.823.744.460,39	60.699.149.905,36	41.124.594.555,03

Pada nilai utang pihak ketiga sebesar Rp101.823.744.460,69, terdapat utang ADD kurang salur tahun 2017 kepada Desa sebesar Rp65.386.230.012,00 yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2017. Atas nilai utang tersebut telah dilakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan BA Hasil Konsultasi pada tanggal 1 Februari 2023 dengan hasil diskusi bahwa pengeluaran atas pengakuan utang terhadap tunda bayar ADD harus memiliki dasar hukum yang melandasi. Penyajian nilai utang ini dilandaskan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu. Kemudian di Rincian Hutang Pihak Ketiga dapat dilihat pada:

[Lampiran Hutang Pihak Ketiga](#)

5. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
4.126.375.873,00	2.999.270.596,00	1.127.105.277,00

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.126.375.873,00. Saldo utang mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.999.270.596,00.

Rincian utang jangka pendek lainnya sebesar Rp4.126.375.873,00, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 171 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per OPD

OPD	Saldo 2022	Saldo 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	6.692.153,00	1.790.500,00	4.901.653,00
Dinas Kesehatan	47.301.179,00	33.454.715,00	13.846.464,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	161.201.400,00	150.967.300,00	10.234.100,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	175.459.200,00	148.011.600,00	27.447.600,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28.577.869,00	23.176.640,00	5.401.229,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	15.920.861,00	27.601.581,00	(11.680.720,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	294.000,00	7.765.800,00	(7.471.800,00)
Dinas Pemadam Kebakaran	15.458.034,00	13.278.000,00	2.180.034,00
Satuan Polisi Pamong Praja	6.816.219,00	6.068.892,00	747.327,00
Dinas Sosial	18.761.880,00	14.096.536,00	4.665.344,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.197.778,00	18.124.035,00	(2.926.257,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.710.864,00	8.353.140,00	1.357.724,00
Dinas Ketahanan Pangan	9.974.253,00	8.282.401,00	1.691.852,00
Dinas Lingkungan Hidup	21.650.230,00	17.124.434,00	4.525.796,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.793.604,00	29.119.117,00	(14.325.513,00)
Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa	11.093.869,00	10.048.479,00	1.045.390,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.134.693,00	10.943.361,00	191.332,00
Dinas Perhubungan	2.824.833.048,00	1.806.947.849,00	1.017.885.199,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12.550.121,00	11.468.001,00	1.082.120,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.590.997,00	15.227.150,00	4.363.847,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.459.799,00	16.139.554,00	2.320.245,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	50.035.642,00	21.861.846,00	28.173.796,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.316.036,00	13.042.558,00	(726.522,00)
Dinas Perikanan	21.619.009,00	18.267.790,00	3.351.219,00
Dinas Perkebunan	13.346.583,00	0,00	13.346.583,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	3.843.087,00	16.854.524,00	(13.011.437,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	40.804.878,00	53.778.289,00	(12.973.411,00)
Sekretariat Daerah	273.254.338,00	301.526.017,00	(28.271.679,00)
Sekretariat DPRD	3.265.500,00	2.512.500,00	753.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.411.390,00	24.590.793,00	(4.179.403,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	34.675.862,00	29.052.392,00	5.623.470,00
Badan Pendapatan Daerah	37.352.989,00	32.344.365,00	5.008.624,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	20.815.345,00	15.719.874,00	5.095.471,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	10.590.145,00	11.052.394,00	(462.249,00)
Inspektorat	23.281.071,00	9.748.663,00	13.532.408,00
Kecamatan Bengkulu	18.560.955,00	16.106.816,00	2.454.139,00
Kecamatan Bantan	6.968.233,00	0,00	6.968.233,00
Kecamatan Bukit Batu	12.510.403,00	9.436.952,00	3.073.451,00
Kecamatan Siak Kecil	4.838.614,00	4.196.780,00	641.834,00
Kecamatan Bandar Laksamana	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Rupal	5.688.120,00	13.370.500,00	(7.682.380,00)
Kecamatan Rupal Utara	3.961.705,00	2.233.367,00	1.728.338,00
Kecamatan Mandau	45.189.323,00	14.164.612,00	31.024.711,00
Kecamatan Pinggir	5.467.590,00	5.911.911,00	(444.321,00)
Kecamatan Bathin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Talang Muandau	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.107.004,00	5.508.568,00	6.598.436,00
Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.126.375.873,00	2.999.270.596,00	1.127.105.277,00

5.3.3. Ekuitas

31 Des 2022	31 Des 2021	Kenaikan/(Penurunan)
8.862.898.371.238,90	9.199.249.753.033,92	(336.351.381.795,02)

Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.862.898.371.238,90 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.199.249.753.033,92.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5. 2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5. 2. 1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar Rp1.179.959.349.062,91, mengalami kenaikan sebesar Rp1.028.947.775.256,36 atau 681,37% jika dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp151.011.573.806,55.

5. 2. 2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.

Tahun 2022, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp1.179.959.349.062,91 mengalami kenaikan sebesar Rp1.028.947.775.256,36 atau 681,37,00% jika dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp151.011.573.806,55.

5. 2. 3. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA selama TA 2022 sebesar Rp293.268.675.966,33 mengalami penurunan sebesar Rp886.690.673.096,58 atau 75,15 % jika dibandingkan TA 2021 sebesar Rp1.179.959.349.062,91.

5. 2. 4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya.

Untuk Tahun 2022 tidak terdapat koreksi.

5. 2. 5. Saldo Anggaran Lebih selama TA 2022 sebesar Rp293.010.168.743,18 terdiri dari :

Tabel 5. 73 Rincian Saldo Anggaran Lebih

	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
	Rp	Rp	%
Kas di BUD	277.994.694.649,52	1.168.554.249.066,37	(76,21)
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.540.999.407,00	1.581.400,00	223.815,48
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	6.308,00	(100,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	1.179.559,00	1.758.070,00	(32,91)
Kas di Bendahara BLUD	11.452.247.027,66	11.349.091.889,54	0,91
Kas di Bendahara BOS	21.048.100,00	52.662.329,00	(60,03)
Kas Lainnya	258.507.223,15	0,00	0,00
Jumlah	293.268.675.966,33	1.179.959.349.062,91	223.606,36



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp1.180.379.182.064,91.
 Penerimaan SAL TA 2022 terdiri dari :

Tabel 5.74 Rincian Penerimaan SAL

	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Tren
Pendapatan Asli Daerah	349.634.385.373,15	284.235.094.573,72	23,01
Pendapatan Transfer	2.979.779.293.522,00	3.955.128.583.880,00	(24,66)
Lain-lain Pendapatan yang Sah	808.958,15	82.544.910.000,00	(100,00)
Jumlah	3.329.414.487.853,30	4.321.908.588.453,72	(22,96)
Belanja Operasi	2.598.560.224.108,88	2.199.493.917.121,94	18,14
Belanja Modal	1.109.714.993.117,00	679.492.555.913,42	63,32
Belanja Tidak Terduga	0,00	9.655.040,00	(100,00)
Transfer	508.249.776.726,00	413.964.685.122,00	22,78
Jumlah	4.216.524.993.951,88	3.292.960.813.197,36	28,05
Penerimaan Pembiayaan	1.180.379.182.064,91	151.011.573.806,55	681,65
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.180.379.182.064,91	151.011.573.806,55	681,65

Tabel 5.75 Rincian SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	Tahun 2022	Tahun 2021	Tren
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	1.179.959.349.062,91	151.011.573.806,55	681,37
Pendapatan	3.329.414.487.853,30	4.321.908.588.453,72	(22,96)
Belanja dan Transfer	4.216.524.993.951,88	3.292.960.813.197,36	28,05
Penerimaan Pembiayaan	1.180.379.182.064,91	151.011.573.806,55	681,65
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	293.268.675.966,33	1.179.959.349.062,91	(75,15)

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2022 berasal dari:

Tabel 5.76 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

	Tahun 2022	Tahun 2021	Tren
Realisasi Pendapatan	3.329.414.487.853,30	4.321.908.588.453,72	(22,96)
Realisasi Belanja dan Transfer	4.216.524.993.951,88	3.292.960.813.197,36	28,05
Penerimaan Pembiayaan	1.180.379.182.064,91	151.011.573.806,55	681,65
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
SILPA	293.268.675.966,33	1.179.959.349.062,91	(75,15)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

**BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan entitas pelaporan yang melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana peraturan yang berlaku. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 disusun dengan mengkonsolidasi Laporan Keuangan setiap entitas akuntansi dalam hal ini adalah SKPD dan PPKD (BUD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkalis sebelum disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu direviu oleh Pengawas internal yakni Inspektorat Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 Nomor 700/ITDA-SET/III/2023/246.

Jumlah Entitas Akuntansi yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun Anggaran 2022 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk 47 SKPD menyampaikan Laporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Setiap entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan pada SKPD masing-masing, kemudian disampaikan ke Bupati Bengkalis (entitas pelaporan) melalui Bagian Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4.2 BASIS AKUNTANSI

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 menggunakan Basis Akrual dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Bengkalis. Basis Akrual digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer dan Pembiayaan menggunakan basis kas.

4.3 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) khusus Lampiran I yang mengatur pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di seluruh Indonesia. Kabupaten Bengkalis dalam menyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 mengacu pada standar tersebut. Sebagai implementasi dari peraturan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan perubahan keempat atas Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Didalam Kebijakan Akuntansi Nomor 93 Tahun 2020 tersebut telah mengakomodir basis akrual sebagaimana yang



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

diamanahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.

Tanggal 1 sampai dengan 3 Desember 2015 Kementerian Dalam Negeri mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, yang diterbitkan tanggal 18 November 2015. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tersebut tentunya akan berpengaruh pada kebijakan akuntansi yang telah disusun. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis merevisi kebijakan akuntansi dengan mencabut kebijakan akuntansi yang sebelumnya. Perubahan kebijakan tersebut dikarenakan adanya beberapa perubahan terhadap kebijakan akuntansi seperti kebijakan tentang aset tetap, investasi non permanen (dana bergulir) dan lainnya. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat selama ini guna menciptakan laporan keuangan yang memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selanjutnya pada tahun 2016, kembali dilakukan perubahan terhadap Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016. Perubahan ini untuk mengakomodir Perubahan Pencatatan terhadap Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah dari Pendapatan Pajak Tipe B yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*Self Assesement*) menjadi Pendapatan Pajak Tipe A yang merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah), kemudian pada tahun 2018 dilakukan lagi perubahan terhadap kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018. Perubahan ini untuk mengakomodir temuan atas LHP BPK mengenai waktu perhitungan Amortisasi Aset Tak Berwujud dan juga penghapusan piutang tak tertagih. Selanjutnya untuk mengakomodir adanya perubahan masa manfaat dan perubahan kodifikasi barang miik daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang pengelompokan dan kodifikasi barang milik daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis kembali melakukan perubahan melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 93 Tahun 2020.

Tanggung jawab penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berada pada entitas pelaporan yakni Bupati Bengkalis, dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari setiap entitas akuntansi atau SKPD termasuk laporan keuangan PPKD.

Komponen-komponen yang harus disusun dan disajikan oleh setiap entitas akuntansi (SKPD dan SKPKD) dalam satu set Laporan Keuangan Pokok adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen yang harus disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan (Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis) dalam satu Laporan Keuangan Pokok adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan SKPKD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan Keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dan informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi.

Setiap komponen Laporan Keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Disamping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a. Nama SKPD/SKPKD/Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu;
- b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
- c. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- d. Mata uang pelaporan adalah rupiah; dan
- e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu berupaya untuk menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang lebih baik.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyusun laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 berupaya menerapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan terutama dalam penyusunan laporan keuangan yang baik sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 terdiri dari 22 kebijakan. Berikut ini dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan tentang pengakuan, pengukuran, pencatatan/penyajian dan pengungkapan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

4.3.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 01 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/defisit-LRA;
- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan pada Entitas Pelaporan yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. LP-SAL memberikan informasi tentang kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun pelaporan sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Disamping itu suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas;
- 2) Investasi jangka pendek;
- 3) Piutang pajak dan bukan pajak;
- 4) Persediaan;
- 5) Investasi jangka panjang;
- 6) Aset tetap;
- 7) Kewajiban jangka pendek;
- 8) Kewajiban jangka panjang; dan
- 9) Ekuitas.

Informasi yang disajikan dalam Neraca mengungkapkan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas disusun oleh entitas pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktifitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas transitoris.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

e. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada;
- 4) Pos luar biasa, bila ada; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar; dan
- 4) Ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

- 1) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 2) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- 3) Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Daerah; dan
- 4) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

h. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- 1) Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- 2) Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
- 3) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

4.3.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tujuan kebijakan Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding ditingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

Pernyataan Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Pernyataan Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan pemerintahan daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi/entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran dalam beberapa format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis selaku entitas pelaporan menyajikan laporan keuangan konsolidasian.

4.3.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 03 TENTANG LAPORAN ARUS KAS

Tujuan kebijakan Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis menyusun dan menyajikan laporan arus kas sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Informasi tersebut juga dapat



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

Penggunaan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi memiliki keuntungan sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
- b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Pencatatan investasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya. Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, dimana keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pendanaan. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pendanaan.

Entitas pelaporan mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:

- a. Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
- b. Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;
- c. Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
- d. Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi,



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

pendanaan, transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah.

Untuk transaksi bukan kas, transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

4.3.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04 TENTANG CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi.

Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi aktual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Termasuk pula dalam Catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan.

Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi dapat menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

dan sebelumnya tidak material. Selain itu perlu diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan akuntansi yang sudah ada. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang. Catatan atas laporan keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- a. Penggantian struktur organisasi dan fungsi selama tahun berjalan;
- b. Kesalahan struktur organisasi dan fungsi terdahulu yang telah dikoreksi oleh yang baru;
- c. Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- d. Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
- e. Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya; dan
- d. Kebijakan akuntansi yang penting:
 - 1) Entitas akuntansi/pelaporan;
 - 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan
 - 5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- a. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - 1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - 2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- b. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

4.3.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 05 TENTANG PENDAPATAN-LO

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi Pendapatan-LO yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Klasifikasi Pendapatan-LO pada level PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Klasifikasi Pendapatan-LO pada level SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan Pendapatan-LO dapat terjadi di PPKD dan SKPD.

Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

- b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Pendapatan transfer diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan transfer tersebut atau terdapat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Pada PPKD, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya,



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui saat Naskah Perjanjiannya telah ditandatangani.

Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi.

d. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non Lancar) telah diterima.

Pengakuan Pendapatan-LO pada level SKPD:

a. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu:

1) Pendapatan Pajak Tipe A

Merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

2) Pendapatan Pajak Tipe B

Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.

3) Pendapatan Pajak Tipe C

Pajak tipe ini merupakan kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan.

4) Pendapatan Retribusi Tipe A

Untuk pendapatan retribusi tipe A, pembayaran diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan.

5) Pendapatan Retribusi Tipe B

Pembayaran retribusi ini dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi (SKR) terbit. Contoh pendapatan retribusi tipe B adalah retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Pendapatan-



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4.3.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 06 TENTANG PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA terdiri dari Pendapatan-LRA untuk PPKD dan Pendapatan-LRA untuk SKPD. Pendapatan-LRA di PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Pendapatan-LRA di SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh SKPD; atau
- c. Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah lain atas nama BUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat diajarkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 07 TENTANG BEBAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi beban yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas, antara lain meliputi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer dan beban tak terduga.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
- b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah; dan
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Apabila terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Pengakuan Beban di PPKD terdiri dari:

- a. Beban Bunga



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah pemerintah yang diterima pemerintah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban Bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo. Beban Bunga diakui saat timbulnya kewajiban. Meskipun demikian Beban Bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sesuai dengan kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

b. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan negara/daerah, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi dan mengimpor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

Beban Subsidi meliputi Beban Subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Beban Subsidi kepada Perusahaan. Beban Subsidi diakui saat ketika SP2D atas beban ini sudah diterbitkan. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

c. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Hibah meliputi Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah kepada Pemerintahan Desa, Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah, Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan, Beban Hibah kepada Satuan Pendidikan Dasar.

Beban Hibah diakui saat timbulnya kewajiban artinya kewajiban Pemerintah Daerah timbul karena adanya perikatan. Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang/barang atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya nota perjanjian hibah.

d. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial meliputi Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, dan Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat. Beban Bantuan Sosial diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah untuk



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

memberikan bantuan sosial. Secara teknis kewajiban Pemerintah Daerah timbul setelah Pemda secara formal mengakuinya.

e. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun, dilakukan pencatatan akan beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki Pemda.

f. **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer meliputi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

Beban Transfer diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah yaitu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Daerah.

Pengakuan Beban pada SKPD terdiri dari:

a. **Beban Pegawai**

Beban Pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Biaya Pemungutan Pajak Daerah, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, dan Beban Pegawai BLUD. Beban Pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Dalam konteks beban pegawai dengan mekanisme LS, akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan demikian, beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dana dari Kas Daerah langsung diterima oleh pegawai.

Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (Bukti Pembayaran Honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika Daftar Gaji telah terbit dan diterima oleh PPK.

b. **Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa terdiri atas Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Penyusutan dan Beban Perjalanan Dinas. Beban Barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban Barang diakui ketika timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Metode pencatatan persediaan yaitu metode perpetual dan periodik. Metode perpetual menuntut dilakukannya pemutakhiran setiap terjadi perubahan posisi akun persediaan. Metode periodik tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian persediaan, jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode.

c. Hibah dan Bantuan Sosial

Beban Hibah dan Bantuan SKPD dalam bentuk barang diakui pada saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat penyerahan kepada penerima hibah/bantuan sosial.

Beban Hibah dan Bantuan Sosial menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan Beban dan pendekatan Aset.

4.3.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 08 TENTANG BELANJA

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD; dan
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Rincian belanja per SKPD;
- b. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- c. Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

4.3.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 09 TENTANG PEMBIAYAAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan hanya dapat dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dengan demikian akuntansi pembiayaan tidak diperlukan di SKPD.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pemerintah daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi penerimaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, sangat dianjurkan untuk diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 10 TENTANG KAS DAN SETARA KAS

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kas yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca awal. Saldo simpanan di bank yang dapat dikategorikan sebagai kas adalah saldo simpanan atau rekening di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Kas pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, missal Bendahara Pengeluaran.

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah; dan
- c. Uang tunai di Bendahara Umum Daerah.

Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
- b. Kas di Bendahara Penerimaan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, yang termasuk di dalamnya adalah kas yang berasal dari pajak yang dipungut tetapi belum disetorkan. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam neraca pemerintah daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari Bendahara Penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya para Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.

Kas diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh Bendahara/Rekening Kas Umum Daerah. Kas dijurnal di sebelah debit jika bertambah dan dijurnal di sebelah kredit jika berkurang.

Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas di Catatan atas Laporan Keuangan harus menunjukkan posisi kas pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal usul kas.

4.3.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 11 TENTANG PIUTANG

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi piutang yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Piutang pemerintah daerah karena pungutan adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piutang yang termasuk dalam piutang yang timbul karena peristiwa pungutan adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

a. Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten terdiri:

- 1) Pajak hotel;
- 2) Pajak restoran;
- 3) Pajak hiburan;
- 4) Pajak reklame;
- 5) Pajak penerangan jalan;
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- 7) Pajak parkir;
- 8) Pajak air tanah;
- 9) Sarang burung walet;
- 10) PBB pedesaan dan perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode belum dibayar/dilunasi.

b. Piutang Retribusi

Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian izin atau jasa atau badan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Jasa umum;
- 2) Jasa usaha; dan
- 3) Perizinan tertentu.

c. Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Piutang PAD lainnya terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya.

Piutang yang berasal dari pungutan diakui pada saat munculnya klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Secara umum, pengakuan piutang yang berasal dari pungutan diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Piutang dapat diakui ketika:

- a. Diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan/atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pengakuan pendapatan pajak yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding; atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.

Piutang yang timbul karena peristiwa perikatan terdiri atas:

- a. Piutang karena Pemberian Pinjaman
Piutang pemerintah daerah karena pemberian pinjaman adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak lain kepada pemerintah daerah karena pemerintah daerah telah memberikan pinjaman kepada pihak tersebut. Contoh piutang ini adalah piutang kepada BUMD karena BUMD meminjam sejumlah uang kepada Pemda. Rencana realisasi penerimaan kas atas piutang ini dianggarkan pada bagian penerimaan pembiayaan (bukan pendapatan) dalam APBD. Dengan demikian, jika piutang ini direalisasikan akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan (bukan pendapatan).
- b. Piutang karena Penjualan
Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik daerah antara lain melalui penjualan. Penjualan barang ada yang dilakukan secara tunai dan ada yang dilakukan secara cicilan atau angsuran. Apabila penjualan dilakukan secara kredit atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran.
- c. Piutang karena Kemitraan
Pemerintah daerah dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini antara lain Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama. Piutang yang timbul diakui sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d. Piutang karena Pemberian Fasilitas
Piutang pemerintah daerah juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak lain, misalnya penyewaan gedung kantor, rumah dinas dan alat-alat berat.

Pengakuan piutang karena perikatan dilakukan bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan yang berasal dari perikatan. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang berasal dari perikatan seperti pemberian pinjaman,



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan adalah sebagai berikut:

a. Pemberian Pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian Fasilitas/Jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Transfer dana bagi hasil dari provinsi dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan yang akan dibagihasilkan. Apabila alokasi definitive telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah suatu perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

Tuntutan ganti rugi (TGR) adalah suatu tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung pemerintah daerah menderita kerugian.

Kerugian pemerintah daerah adalah berkurangnya kekayaan pemerintah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara atau pegawai bukan bendahara dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian pemerintah daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, hasil pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung, hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi, dan informasi dari media massa dan media elektronik.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/SK Pembebanan/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan).

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)/SK Pembebanan/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan diatas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Tidak semua piutang pemerintah daerah dapat direalisasikan karena belum tentu semua wajib bayar dapat melunasi kewajibannya kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengantisipasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang dengan membuat penyisihan atas piutang tidak tertagih.

Pada prinsipnya, semakin lama umur piutang maka semakin besar pula kemungkinan tidak tertagihnya. Dengan demikian, semakin lama umur piutang maka semakin besar pula penyisihan piutang tidak tertagih yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar;
- b. Kualitas Kurang Lancar;
- c. Kualitas Diragukan;
- d. Kualitas Macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assesment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Denda Pajak dapat dipilah berdasarkan karakter sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 2 tahun;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus Retribusi dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
- Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Denda Retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
- Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan kualitas Piutang Lain-lain PAD yang sah dikelompokkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 sampai dengan 3 bulan;
- Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Besarnya penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Besaran Penyisihan Piutang Setiap Tahun

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0.5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Piutang pemerintah daerah yang tidak tertagih dapat dihapus, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsure pengurang dari piutang yang bersangkutan. Setelah disajikan di Neraca, informasi mengenai piutang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut harus menjelaskan posisi piutang pada tanggal laporan keuangan dan menunjukkan asal-usul piutang.

4.3.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 12 TENTANG BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi Beban Dibayar Dimuka yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Beban Dibayar Dimuka adalah piutang yang timbul akibat Pemerintah Daerah telah melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada pihak ketiga tetapi barang/jasa dari pihak ketiga tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima atau dinikati oleh Pemerintah Daerah.

Klasifikasi Beban Dibayar Dimuka dapat berbentuk pembayaran atas gaji dan tunjangan dibayar dimuka, pembayaran jasa atau sewa dibayar dimuka, atau pembayaran biaya pemeliharaan yang dibayar dimuka.

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat terjadi pengeluaran kas terhadap belanja yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Pada saat penyusunan laporan keuangan (akhir tahun anggaran atau semesteran), dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran belanja yang dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka. Penyesuaian harus dilakukan untuk mengakui besarnya biaya yang menjadi beban tahun pelaporan yang dihitung dari sejak pengeluaran belanja sampai dengan tanggal pembuatan laporan keuangan (cut off).

Beban Dibayar Dimuka diukur sebesar nilai nominal belanja yang dikeluarkan dari kas.

Beban Dibayar Dimuka disajikan pada kelompok aset sebagai bagian dari Aset Lancar.

4.3.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 13 TENTANG PERSEDIAAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:

- a. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
- b. Instrumen keuangan.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, misalnya barang pakai habis seperti Alat Tulis



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas seperti komponen bekas.

- b. Branga atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan dan bibit tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. Harga pokok produk siapa bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dinilai dengan menggunakan:

- a. Metode sistematis berupa FIFO (*First In First Out* – Masuk Pertama Keluar Pertama);



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Pencatatan beban persediaan dilakukan dengan metode perpetual dan metode periodik.

Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Metode Perpetual ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di DinasPertanian.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname), yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Metode Periodik digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di SKPD.

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Di dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan: kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.3.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.14 TENTANG INVESTASI

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi pemerintah daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:

- a. Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
- b. Investasi dalam perusahaan asosiasi;
- c. Kerja sama operasi; dan
- d. Investasi dalam properti.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrument ekuitas.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c. Berisiko rendah.

Dengan memperhatikan kriteria tersebut, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi pemerintah, karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- a. Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- b. Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
- c. Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Penggolongan kriteria kualitas dana bergulir terdiri atas:

- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - 2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - 3) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- 4) Penerima dana kooperatif.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Penerimaan dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Penerimaan dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - 2) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - 3) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - 4) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*)

Besaran penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- a. Kualitas Lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- b. Kualitas Kurang Lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- c. Kualitas Diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan;
- d. Kualitas Macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet.

Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam property dan kerja sama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek).
 - 1) Dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - 2) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

- a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- b. Investasi non permanen:
 - 1) Investasi dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - 2) Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan;
 - 3) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait;

b. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap;

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh diakhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

Investasi jangka panjang disajikan sebagai akun Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

4.3.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 15 TENTANG ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pengakuan aset tetap harus memenuhi kriteria bahwa suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Sedangkan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Untuk biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Apabila dalam pembelian terdapat potongan dagang dan rabat maka setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Jika aktiva tetap diperoleh secara gabungan, biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisii seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Kapitalisasi biaya ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria seperti pada paragraph diatas dan dengan suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Pengadaan aset tetap pada tahun berjalan sudah dilakukan penyusutan sejak aset tetap tersebut dicatat ke dalam Pencatatan Barang Milik Daerah maupun ke dalam pencatatan akuntansi. Terhadap aset tetap tersebut dilakukan proses penyusutan dihitung sebulan penuh. Penyajian laporan penyusutan dilakukan tiap semester dan tahunan.

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

- a. Peralatan dan Mesin;
- b. Gedung dan Bangunan;
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
- d. Aset Tetap Lainnya berupa Buku/Barang Perpustakaan dan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan kecuali benda-benda bersejarah.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam Neraca berupa Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tetap *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk diproses TGR;
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- c. Aset Tetap berupa Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, hewan ternak dan tumbuhan serta barang bercorak kesenian/kebudayaan berupa benda-benda bersejarah.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud di atas:

- a. Direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya;
- b. Tetap dicantumkan dalam Laporan Pengelola Barang/Laporan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Laporan Barang Pengguna, Laporan BMD, dan Necara; dan
- c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal proses penghapusan telah selesai, maka aset tersebut dihapus dari aset lainnya.

Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan proses TGR telah selesai, namun dikemudian hari ditemukan kembali dan setelah diproses ternyata masih diperlukan oleh Pemerintah Daerah, maka terhadap aset tersebut:

- a. Ditambahkan ke dalam Aset Tetap; dan
- b. Disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud diatas, nilai akumulasi penyusutannya disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke aset lainnya sampai saat aset tersebut ditemukan.

Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2021 merupakan nilai perolehan yang dapat disusutkan.

Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud diatas tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik dibawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca Pemerintah Daerah. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

- c. Informasi penyusutan, meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tariff penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
- e. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap.
- f. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.
- g. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

4.3.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 16 TENTANG KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bias kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Ketentuan-ketentuan dalam standard ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. Uang muka kerja yang diberikan;
- e. Retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

4.3.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 17 TENTANG DANA CADANGAN

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Klasifikasi dana cadangan berdasarkan tujuan pembentukannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari rekening Kas Daerah ke rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Dana cadangan dicatat sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk berdasarkan nilai yang dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti rekening Koran bank dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan atau dikapitalisasi ke dana cadangan, seperti: bunga deposito. Sebaliknya seluruh biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan, seperti: biaya administrasi deposito. Hasil pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar hukum pembentukan dana cadangan;
- b. Tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. Sumber dana cadangan;
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.3.18 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 18 TENTANG ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tidak Berwujud;
- e. Aset Lain-lain.

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau sebesar daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- a. Bangun, Kelola, Serah (BKS);
- b. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Daerah. Kalaupun disertai pembayaran oleh Pemerintah Daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerja sama.

Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Catatan:

Pada saat perolehan awal (pencatatan pertama kali) Aset Lain-lain BKS dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap yang dikerjasamakan. Pada akhir masa konsesi, nilai BKS dicatat sebesar nilai wajar pada saat penyerahan terjadi.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Catatan:

Pada saat perolehan awal (pencatatan pertama kali) Aset Lain-lain BSK dicatat sebesar nilai tercatat aset tetap yang dikerjasamakan. Pada saat bangunan diserahkan dari pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah maka nilai BSK dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

a. *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

b. *Lisensi* dan *franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) dibidang teknologi, yang untuk selama



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

4.3.19 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 19 TENTANG KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancer utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman kewajiban perbankan dan kewajiban jangka panjang lainnya.

Kewajiban pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik mengenai kewajiban pemerintah.

Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo, Tunggakan, Restrukturisasi dan Penghapusan Kewajiban akan diatur dalam regulasi tersendiri. Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timba balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain dimasa depan.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Dalam hal ini, hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada diluar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge*)

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Pengukuran untuk kewajiban jangka pendek sebagai berikut:

a. Utang Pihak Ketiga

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang atau jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Contoh pembangunan fasilitas atau peralatan oleh kontraktor sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, maka jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Utang Bunga

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

f. Kewajiban Lancar Lainnya

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai.

Pengukuran untuk kewajiban jangka panjang:

a. Utang Pemerintah yang Tidak Diperjualbelikan

Nilai nominal atas utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

b. Utang Pemerintah yang Dapat Diperjualbelikan

Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo, sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
- b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya.
- c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
- d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
- e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman.
 - 2) Modifikasi persyaratan utang.
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman.
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman.
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman.
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

4.3.20 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 20 TENTANG KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun Saldo Ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang;
- b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Perlakuan terhadap kesalahan tidak berulang:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan regulasi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- Fungsi tersebut tetap ada.
- Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

4.3.21 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 21 TENTANG LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Laporan keuangan konsolidasian pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Laporan keuangan konsolidasian disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali:

- a. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- b. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.

Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

Badan Layanan Umum (BLU) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam BLU antara lain adalah rumah sakit.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD), BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.

Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan kebijakan akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi

4.3.22 KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 22 TENTANG LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsure pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional,



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b. Cakupan entitas pelaporan;
- c. Periode yang dicakup;
- d. Mata uang pelaporan; dan
- e. Satuan angka yang digunakan.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan berlaku untuk pemerintah daerah.

Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban;
- b. Terjadinya konsumsi aset;
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Metode garis lurus (*straight line method*);
- b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*);
- c. Metode unit produksi (*unit of production method*).

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Surplus/Defisit dari operasi
- d. Kegiatan non operasional
- e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
- f. Pos Luar Biasa
- g. Surplus/Defisit-LO

Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB V
PENJELASAN ATAS POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

5.1.1. Pendapatan

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
3.347.978.859.591,00	3.329.414.487.853,30	99,45	4.321.908.588.453,72	(992.494.100.600,42)

Sumber Pendapatan Kabupaten Bengkalis terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer Pusat (Dana Perimbangan), Pendapatan Transfer Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan anggaran dan Realisasi 2022 serta realisasi TA 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pendapatan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Asli Daerah	344.413.626.080,00	349.634.385.373,15	101,52	284.235.094.573,72	65.399.290.799,43
Pendapatan Transfer					
Pusat Dana Perimbangan	2.730.252.613.000,00	2.701.274.490.590,00	98,94	3.643.215.136.775,00	(941.940.646.185,00)
Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	127.460.843.000,00	127.024.597.939,00	99,66	165.099.615.167,00	(38.075.017.228,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	145.851.777.511,00	151.480.204.993,00	103,86	146.813.831.938,00	4.666.373.055,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00	808.958,15	0,00	82.544.910.000,00	(82.544.101.041,85)
Jumlah	3.347.978.859.591,00	3.329.414.487.853,30	99,45	4.321.908.588.453,72	(992.494.100.600,42)

Realisasi Pendapatan Kabupaten Bengkalis TA 2022 adalah sebesar Rp3.329.414.487.853,30 atau 99,45% dari nilai anggaran sebesar Rp3.347.978.859.591,00. Jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4.321.908.588.453,72 mengalami penurunan sebesar Rp992.494.100.600,42 atau 22,96%.

Masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
344.413.626.080,00	349.634.385.373,15	101,52	284.235.094.573,72	65.399.290.799,43

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis TA 2022 adalah sebesar Rp349.634.385.373,15 atau 101,52% dari nilai anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2021 sebesar Rp284.235.094.573,72 mengalami kenaikan sebesar Rp65.399.290.799,43 atau 23,01%.

Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Pajak Daerah	89.252.000.000,00	94.213.069.616,00	105,56	82.355.513.611,00	11.857.556.005,00
Pendapatan Retribusi Daerah	20.989.071.318,00	11.711.114.828,00	55,80	10.329.501.238,00	1.381.613.590,00
Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	32.392.209.969,00	27.311.794.580,00	84,32	33.292.209.969,00	(5.980.415.389,00)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	201.780.344.793,00	216.398.406.349,15	107,24	158.257.869.756,72	58.140.536.593,43
Jumlah	344.413.626.080,00	349.634.385.373,15	101,52	284.235.094.573,72	65.399.290.799,43

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2022 dan TA 2021 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Pajak Daerah

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
89.252.000.000,00	94.213.069.616,00	105,56	82.355.513.611,00	11.857.556.005,00

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkalis. Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2022 serta realisasi TA 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.3 Pendapatan Pajak Daerah

Jenis Pajak	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pajak Hotel	3.165.000.000,00	3.622.970.810,00	114,47	2.771.752.685,00	851.218.125,00
Pajak Restoran	12.535.000.000,00	15.094.975.589,00	120,42	11.220.797.099,00	3.874.178.490,00
Pajak Hiburan	1.800.000.000,00	1.631.703.647,00	90,65	490.353.540,00	1.141.350.107,00
Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.302.150.406,00	86,81	768.097.825,00	534.052.581,00
Pajak Penerangan Jalan	32.250.000.000,00	32.856.985.614,00	101,88	37.354.844.432,00	(4.497.858.818,00)
Pajak Parkir	432.500.000,00	386.354.005,00	89,33	312.335.167,00	74.018.838,00
Pajak Air Tanah	1.450.000.000,00	1.304.374.066,00	89,96	607.489.510,00	696.884.556,00
Pajak Sarang Burung Walet	600.000.000,00	567.110.748,00	94,52	497.533.239,00	69.577.509,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.650.000.000,00	6.924.910.650,00	104,13	4.178.288.650,00	2.746.622.000,00
Pajak Bagi Hasil dan PBB P2	23.600.000.000,00	24.356.482.448,00	103,21	19.844.933.613,00	4.511.548.835,00
Pajak BPHTB	5.269.500.000,00	6.165.051.633,00	117,00	4.309.087.851,00	1.855.963.782,00
Jumlah	89.252.000.000,00	94.213.069.616,00	105,56	82.355.513.611,00	11.857.556.005,00

Dengan melihat tabel diatas menunjukkan Penerimaan pajak daerah TA 2022 adalah sebesar Rp94.213.069.616,00 atau 105,56% dari anggaran. Sedangkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp82.355.513.611,00 penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp11.857.556.005,00 atau 14,40%. Pendapatan Pajak Daerah ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pajak Reklame, Pajak Bagi Hasil dari PBB P2 dan Pajak Air bawah tanah menggunakan metode Official Assesment sedangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN, Pajak Pengambilan Bahan Galian C, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak BPHTB menggunakan metode Self Assesment sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 11 tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 1 tahun 2019 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 02 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiakan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
20.989.071.318,00	11.711.114.828,00	55,80	10.329.501.238,00	1.381.613.590,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dipungut berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi serta diatur pada Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum, Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Realisasi Pendapatan retribusi sampai dengan TA 2022 sebesar Rp11.711.114.828,00 atau 55,80% dari anggaran sebesar Rp20.989.071.318,00. Jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp10.329.501.238,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp1.381.613.590,00 atau 13,38% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.4 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Jasa Umum	6.502.810.000,00	4.607.397.500,00	70,85	4.527.496.700,00	79.900.800,00
Jasa Usaha	12.131.261.318,00	5.341.267.347,00	44,03	4.793.186.263,00	548.082.084,00
Perizinan Tertentu	2.355.000.000,00	1.762.449.981,00	74,84	1.008.819.275,00	753.630.706,00
Jumlah	20.989.071.318,00	11.711.114.828,00	55,80	10.329.501.238,00	1.381.613.590,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2022 :

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa umum dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.5 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	557.204.700,00	(557.204.700,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.500.000.000,00	1.317.525.000,00	87,84	1.137.056.000,00	180.469.000,00
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	1.450.000.000,00	687.400.000,00	47,41	627.250.000,00	60.150.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	350.000.000,00	368.835.000,00	102,52	0,00	368.835.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.492.810.000,00	1.419.738.500,00	56,95	1.448.109.500,00	(28.371.000,00)
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	55.000.000,00	44.276.000,00	80,50	38.627.500,00	5.648.500,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	120.000.000,00	180.883.000,00	150,74	168.056.000,00	12.827.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	535.000.000,00	598.740.000,00	111,91	551.193.000,00	47.547.000,00
Jumlah	6.502.810.000,00	4.607.397.500,00	70,85	4.527.496.700,00	79.900.800,00

Anggaran pendapatan retribusi jasa umum selama TA 2022 sebesar Rp6.502.810.000,00 terealisasi sebesar Rp4.607.397.500,00 atau 70,85%.

Retribusi tidak mencapai 50% dari target anggaran tahun 2022 sebagai berikut :

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Disebabkan oleh situasi yang belum normal akibat faktor alam, adanya oknum-oknum ilegal yang terdaftar oleh pengelola sehingga kutipan retribusi parkir tidak mencapai target dan target yang ditetapkan didalam perjanjian kerja sangat tinggi nominalnya.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha merupakan PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.6 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	1.036.261.318,00	423.950.000,00	40,91	349.035.000,00	74.915.000,00
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/Perdagangan	245.000.000,00	177.370.000,00	72,40	469.062.000,00	(291.692.000,00)
Retribusi Terminal	35.000.000,00	8.021.000,00	22,92	7.899.000,00	122.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa	370.000.000,00	239.185.000,00	64,64	148.340.000,00	90.845.000,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Polong Hewan	25.000.000,00	11.080.000,00	44,32	11.915.000,00	(835.000,00)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000.000,00	4.212.463.347,00	42,12	3.619.944.263,00	592.519.084,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000,00	171.274.000,00	57,09	9.150.000,00	162.124.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	100.000.000,00	97.924.000,00	97,92	0,00	97.924.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	177.840.000,00	(177.840.000,00)
Jumlah	12.131.261.318,00	5.341.267.347,00	44,03	4.793.185.263,00	548.082.084,00

Anggaran pendapatan retribusi jasa usaha TA 2022 sebesar Rp12.131.261.318,00 terealisasi sebesar Rp5.341.267.347,00 atau 44,03%.

Retribusi tidak mencapai 50% dari target anggaran tahun 2022 sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah

Hal ini dikarenakan adanya kasus virus Covid 19 yang berdampak pada kurangnya pemasukan pendapatan baik pada pemasukan retribusi pemakaian kekayaan daerah maupun retribusi tempat penginapan/pesangarahsan /vila. Dan target yang ditetapkan pada tahun 2022 cukup tinggi.

2. Tidak tercapainya Retribusi Terminal dikarenakan :

Dari beberapa potensi pungutan retribusi yang ada di terminal, hanya retribusi dari angkot/oplet yang keluar/masuk terminal yang memberikan sumbangsih kepada PAD. Sementara dari sumber -sumber lain tidak ada realisasi pungutan. Hal ini dikarenakan kurang representatifnya potensi/ letak terminal dengan pusat kegiatan ekonomi, sehingga tidak ada pihak-pihak yang mau memakai ruang, gedung ataupun tempat pada bagian terminal yang bisa dipungut retribusinya.

3. Tidak tercapainya Retribusi Tempat Khusus Parkir dikarenakan :

Dikarenakan pengendara kendaraan bermotor lebih memilih memarkirkan kendaraannya ditepi jalan, dibandingkan parkir ditempat khusus parkir. Dikarenakan lebih dekat dengan tempat berbelanja.

4. Tidak tercapainya Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan dikarenakan :

Adanya Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak (Sapi dan Babi), menyebabkan hewan ternak (Sapi dan Babi) terinfeksi dan Mati. Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan ternak ini juga menyebabkan lalu lintas hewan ternak (pemasukan dan pengeluaran hewan ternak) berkurang dengan adanya persyaratan lalu lintas hewan ternak yang ketat, sapi dari luar Bengkalis tidak diperbolehkan masuk. Hal tersebut diatas menyebabkan pemotongan sapi di Kecamatan Bengkalis berkurang dari semestinya.

5. Tidak tercapainya Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dikarenakan :

Realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan belum optimal dikarenakan aktivitas pelayaran untuk pelabuhan Bandar Sri Laksamana (BSL) pada tahun 2022 sudah mulai normal pasca pandemi covid-19. Namun untuk Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja (BSSR) dioperasikan kembali pada bulan Juli tahun 2022 pasca menurunnya pandemi Covid-19 secara global.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu berhubungan dengan fungsi pemerintah daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan izin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perizinan Tertentu dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.7 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi izin mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.008.819.275,00	(1.008.819.275,00)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	350.000.000,00	301.822.600,00	86,24	0,00	301.822.600,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	1.460.627.381,00	73,03	0,00	1.460.627.381,00
Jumlah	2.355.000.000,00	1.762.449.981,00	74,84	1.008.819.275,00	753.630.706,00

Anggaran pendapatan retribusi perizinan tertentu TA 2022 sebesar Rp2.355.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.762.449.981,00 atau 74,84%. Retribusi perizinan tertentu yang tidak mencapai target anggaran TA 2022 adalah Retribusi Izin Trayek Karena disepanjang tahun anggaran 2022 belum ada perusahaan angkutan umum yang mengajukan pengurusan perizinan trayek melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan OPD yang mengelola Pendapatan Retribusi adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.8 Rincian Retribusi per OPD

OPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	557.204.700,00	(557.204.700,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.230.000.000,00	1.726.267.381,00	77,41	1.258.139.275,00	468.128.106,00
Dinas Pemadam Kebakaran	60.000.000,00	44.876.000,00	74,79	38.627.500,00	6.248.500,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.500.000.000,00	1.317.525.000,00	87,84	1.137.056.000,00	180.469.000,00
Dinas Perhubungan	14.002.810.000,00	6.327.622.847,00	45,19	5.703.202.763,00	624.420.084,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	535.000.000,00	598.740.000,00	111,91	551.193.000,00	47.547.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	300.000.000,00	171.274.000,00	57,09	9.150.000,00	162.124.000,00
Dinas Perikanan	450.000.000,00	399.746.600,00	88,83	177.840.000,00	221.906.600,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	25.000.000,00	11.080.000,00	44,32	11.915.000,00	(835.000,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	715.000.000,00	717.088.000,00	100,29	637.118.000,00	79.970.000,00
Sekretariat Daerah	1.131.261.318,00	368.385.000,00	32,56	235.790.000,00	132.595.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	40.000.000,00	28.510.000,00	71,28	12.265.000,00	16.245.000,00
Jumlah	20.989.071.318,00	11.711.114.828,00	55,80	10.329.501.238,00	1.381.613.590,00

Realisasi akun pendapatan retribusi per OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

Tabel 5.9 Rincian Retribusi Dinas Kesehatan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	557.204.700,00	(557.204.700,00)
Jumlah	0,00	0,00	0,00	557.204.700,00	(557.204.700,00)

Dana Non Kapitasi adalah besaran dana yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang memberikan pelayanan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan tarif non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama). Dana Non Kapitasi pada UPT Puskesmas bersumber dari Pelayanan Kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan diluar dana kapitasi.

Dan Tarif Non Kapitasi merupakan besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan Kesehatan yang diberikan. Untuk Dana Non Kapitasi tidak dicantumkan aturan secara tertulis baik itu didalam Peraturan Bupati Bengkalis maupun didalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Bahwa dana non kapitasi ini masuk ke Dana Retribusi. Sehingga dana non kapitasi ini tidak dianggarkan sebagai dana retribusi sebelum ada aturan yang sah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 5.10 Rincian Retribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	230.000.000,00	265.640.000,00	115,50	239.390.000,00	26.250.000,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000.000,00	1.460.627.381,00	73,03	1.018.749.275,00	441.878.106,00
Jumlah	2.230.000.000,00	1.726.267.381,00	77,41	1.258.139.275,00	468.128.106,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pemadam Kebakaran

Tabel 5.11 Rincian Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	55.000.000,00	44.276.000,00	80,50	38.627.500,00	5.648.500,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	600.000,00	12,00	0,00	600.000,00
Jumlah	60.000.000,00	44.876.000,00	74,79	38.627.500,00	6.248.500,00

Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 5.12 Rincian Retribusi Dinas Lingkungan Hidup

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1.500.000.000,00	1.317.525.000,00	87,84	1.137.056.000,00	180.469.000,00
Jumlah	1.500.000.000,00	1.317.525.000,00	87,84	1.137.056.000,00	180.469.000,00

Dinas Perhubungan

Tabel 5.13 Rincian Retribusi Dinas Perhubungan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum	1.450.000.000,00	687.400.000,00	47,41	627.250.000,00	60.150.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.492.810.000,00	1.419.738.500,00	56,95	1.448.109.500,00	(28.371.000,00)
Retribusi Terminal	35.000.000,00	8.021.000,00	22,92	7.899.000,00	122.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	10.000.000.000,00	4.212.463.347,00	42,12	3.619.944.263,00	592.519.084,00
Retribusi izin Trayek	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	14.002.810.000,00	6.327.622.847,00	45,19	5.703.202.763,00	624.420.084,00

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tabel 5.14 Rincian Retribusi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	535.000.000,00	598.740.000,00	111,91	551.193.000,00	47.547.000,00
Jumlah	535.000.000,00	598.740.000,00	111,91	551.193.000,00	47.547.000,00

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 5.15 Rincian Retribusi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	300.000.000,00	171.274.000,00	57,09	9.150.000,00	162.124.000,00
Jumlah	300.000.000,00	171.274.000,00	57,09	9.150.000,00	162.124.000,00

Dinas Perikanan

Tabel 5.16 Rincian Retribusi Dinas Perikanan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	100.000.000,00	97.924.000,00	97,92	0,00	97.924.000,00
Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan	350.000.000,00	301.822.600,00	86,24	177.840.000,00	123.982.600,00
Jumlah	450.000.000,00	399.746.600,00	88,83	177.840.000,00	221.906.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan

Tabel 5.17 Rincian Retribusi Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	25.000.000,00	11.080.000,00	44,32	11.915.000,00	(835.000,00)
Jumlah	25.000.000,00	11.080.000,00	44,32	11.915.000,00	(835.000,00)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 5.18 Rincian Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi Pelayanan Pasar	350.000.000,00	358.835.000,00	102,52	0,00	358.835.000,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	120.000.000,00	180.883.000,00	150,74	168.056.000,00	12.827.000,00
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	245.000.000,00	177.370.000,00	72,40	469.062.000,00	(291.692.000,00)
Jumlah	715.000.000,00	717.088.000,00	100,29	637.118.000,00	79.970.000,00

Sekretariat Daerah

Tabel 5.19 Rincian Retribusi Sekretariat Daerah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah	781.261.318,00	138.210.000,00	17,69	96.715.000,00	41.495.000,00
Retribusi jasa usaha tempat penginapan/ pesangrahan/ villa	350.000.000,00	230.175.000,00	65,76	139.075.000,00	91.100.000,00
Jumlah	1.131.261.318,00	368.385.000,00	32,56	235.790.000,00	132.595.000,00

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.20 Rincian Retribusi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50	3.000.000,00	16.500.000,00
Retribusi jasa usaha tempat penginapan/ pesangrahan/ villa	20.000.000,00	9.010.000,00	45,05	9.265.000,00	(255.000,00)
Jumlah	40.000.000,00	28.510.000,00	71,28	12.265.000,00	16.245.000,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenalkan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
32.392.209.969,00	27.311.794.580,00	84,32	33.292.209.969,00	(5.980.415.389,00)

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari dividen sebesar Rp27.311.794.580,00 dari anggaran sebesar Rp32.392.209.969,00 atau 84,32% yang dibagikan oleh PT Bank Riau Kepri. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sd TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.21 Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
PT Bank Riau	32.392.209.969,00	27.311.794.580,00	84,32	33.292.209.969,00	(5.980.415.389,00)
Jumlah	32.392.209.969,00	27.311.794.580,00	84,32	33.292.209.969,00	(5.980.415.389,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Penerimaan pendapatan dari hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama TA 2022 adalah sebesar Rp27.311.794.580,00 atau 84,32% dari anggaran sebesar Rp32.392.209.969,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp33.292.209.969,00 menunjukkan adanya penurunan penerimaan sebesar Rp5.980.415.389,00 atau 17,96%. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dikelola oleh BPKAD Kabupaten Bengkulu.

Pendapatan deviden sebesar Rp27.311.794.580,00 Rapat RUPS Tahun Buku 2021 dilaksanakan pada tanggal 23 April 2022 dan Surat Bank Riau Kepri Nomor:473/TS.05/OPS/DIR/2022 tanggal 17 Mei 2022 hal pembagian Dividen PT. Bank Riau Kepri Tahun Buku 2021.

4. Lain-lain PAD yang sah

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
201.780.344.793,00	216.398.406.349,15	107,24	158.257.869.755,720	58.140.536.593,43

Realisasi Lain-lain PAD yang sah TA 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.000.000.000,00	955.544.021,00	95,55	0,00	955.544.021,00
Hasil Penjualan BMD Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	11.660.000,000	(11.660.000,00)
Jasa Giro Kas Daerah	14.095.000.000,00	16.842.971.640,00	119,50	9.534.038.489,000	7.308.933.151,00
Jasa Giro Pemegang Kas	900.493.500,00	483.922.532,00	53,74	580.952.906,000	(97.030.374,00)
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00	0,00	0,00	1.636.362,00	(1.636.362,00)
Pendapatan Bunga Penerimaan Komisi	2.000.000.000,00	0,00	0,00	13.659.531.694,00	(13.659.531.694,00)
Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)
Pendapatan Denda Pajak	242.340.000,00	328.161.551,00	135,41	228.740.417,00	99.421.134,00
Hasil Eksekusi Jaminan	0,00	24.944.402.619,00	0,00	52.621.357,00	24.891.781.262,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	50.000.000,00	69.156.368,00	138,31	337.689.399,00	(268.533.031,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	8.037.477.364,00	6.162.683.332,15	76,67	9.054.842.068,72	(2.892.158.736,57)
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	0,00	310.396.893,00	0,00	0,00	310.396.893,00
Pendapatan BLUD	175.155.033.929,00	166.301.167.393,00	94,95	110.382.472.561,000	55.918.694.832,00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	14.287.755.300,000	(14.287.755.300,00)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	121.529.202,000	(121.529.202,00)
Jumlah	201.780.344.793,00	216.398.406.349,15	107,24	158.257.869.755,72	58.140.536.593,43

Penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp216.398.406.349,15 atau 107,24% dari nilai anggaran sebesar Rp201.780.344.793,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp158.257.869.755,72 menunjukkan adanya kenaikan sebesar Rp58.140.536.593,43 atau 36,74%. Pendapatan lain-lain PAD ini dikelola oleh beberapa OPD sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

a) Badan Pendapatan Daerah

Tabel 5.23 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Denda Pajak Hotel	7.900.000,00	4.864.045,00	61,57	2.853.304,000	2.010.741,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	63.000.000,00	69.751.533,00	110,72	26.226.125,000	43.525.408,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	4.640.000,00	6.967.282,00	150,16	1.576.764,000	5.390.518,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	3.000.000,00	25.902.650,00	863,42	3.037.798,000	22.864.852,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	18.700.000,00	161.779,00	0,87	303.724,000	(141.945,00)
Pendapatan Denda Pajak Parkir	3.000.000,00	540.640,00	18,02	69.376,00	471.264,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	6.200.000,00	12.911.805,00	208,25	6.932.688,00	5.979.117,00
Pendapatan Denda Pajak Watet	3.800.000,00	15.998.588,00	421,02	17.636.622,000	(1.638.034,00)
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9.000.000,00	0,00	0,00	285.950,00	(285.950,00)
Pendapatan Denda PBB P2	120.000.000,00	191.063.229,00	159,22	169.818.066,000	21.245.163,00
Pendapatan Denda BPHTP	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	242.340.000,00	328.161.551,00	135,41	228.740.417,00	99.421.134,00

b) Dinas Kesehatan

Tabel 5.24 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Kesehatan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.059.033.929,00	16.992.771.928,00	84,71	14.287.755.300,00	2.705.016.628,00
Jumlah	20.059.033.929,00	16.992.771.928,00	84,71	14.287.755.300,00	2.705.016.628,00

c) RSUD Bengkalis

Tabel 5.25 Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Bengkalis

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan BLUD	70.096.000.000,00	72.031.428.172,00	102,76	50.085.046.757,00	21.946.381.415,00
Jumlah	70.096.000.000,00	72.031.428.172,00	102,76	50.085.046.757,00	21.946.381.415,00

Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Bengkalis TA 2022 sebesar Rp72.031.428.172,00 atau 102,76% dari anggaran sebesar Rp70.096.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

* Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp	67.782.618.939,00
* Pendapatan Hasil Kerjasama	Rp	155.232.082,00
* Pendapatan Hibah	Rp	3.994.863.134,00
* Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	98.714.017,00 +
Jumlah	Rp	<u>72.031.428.172,00</u>

d) RSUD Kecamatan Mandau

Tabel 5.26 Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Kecamatan Mandau

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan BLUD	85.000.000.000,00	77.276.967.293,00	90,91	60.297.425.804,00	16.979.541.489,00
Jumlah	85.000.000.000,00	77.276.967.293,00	90,91	60.297.425.804,00	16.979.541.489,00

Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Kecamatan Mandau TA 2022 sebesar Rp77.276.967.293,00 atau 90,91% dari anggaran sebesar Rp85.000.000.000,00 dgn rincian sebagai berikut:

* Pendapatan Jasa Layanan Umum	Rp	77.117.681.588,00
* Pendapatan Hasil Kerjasama	Rp	0,00
* Pendapatan Hibah	Rp	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

* Lain-lain Pendapatan yang sah
Jumlah Rp 159.285.705,00 +
Rp 77.276.967.293,00

e) Dinas Perikanan

Tabel 5.27 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Perikanan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	11.660.000,00	(11.660.000,00)
Hasil Pengelolaan Dana Berputar Lainnya	1.500.000,00	0,00	0,00	1.636.362,00	(1.636.362,00)
Jumlah	1.500.000,00	0,00	0,00	13.296.362,00	(13.296.362,00)

f) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 5.28 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Pengelolaan Dana Berputar	100.000.000,00	0,00	0,00	28.590.906,00	(28.590.906,00)
Jumlah	100.000.000,00	0,00	0,00	28.590.906,00	(28.590.906,00)

g) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan

Tabel 5.29 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Pengelolaan Dana Berputar	80.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)
Jumlah	80.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)

h) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 5.30 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Pengelolaan Dana Berputar	118.500.000,00	0,00	0,00	32.938.296,00	(32.938.296,00)
Jumlah	118.500.000,00	0,00	0,00	32.938.296,00	(32.938.296,00)

i) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 5.31 Realisasi Lain-Lain PAD yang sah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	1.000.000.000,00	955.544.021,00	95,55	0,00	955.544.021,00
Jasa Giro Kas Daerah	14.095.000.000,00	16.842.971.640,00	119,50	9.534.038.489,00	7.308.933.151,00
Jasa Giro Pemegang Kas	900.493.500,00	483.922.532,00	53,74	580.952.906,00	(97.030.374,00)
Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00	0,00	0,00	13.659.531.694,00	(13.659.531.694,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)
Hasil Eksekusi Jaminan	0,00	24.944.402.619,00	0,00	52.621.357,00	24.891.781.262,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	50.000.000,00	69.156.368,00	138,31	337.689.399,00	(268.533.031,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	8.037.477.364,00	6.162.683.332,15	76,67	9.054.842.068,72	(2.892.158.736,57)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	310.396.893,00	0,00	0,00	310.396.893,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	26.082.970.864,00	49.769.077.405,15	190,81	33.224.075.913,72	16.545.001.491,43

B. Pendapatan Transfer

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
3.003.565.233.511,00	2.979.779.293.522,00	99,21	3.955.128.583.880,00	(975.349.290.358,00)

Pendapatan transfer merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pembagian hasil pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Realisasi pendapatan transfer TA 2022 adalah sebesar Rp2.979.779.293.522,00 atau 99,21% dari anggaran sebesar Rp3.003.565.233.511,00, sementara realisasi pendapatan transfer TA. 2021 sebesar Rp3.955.128.583.880,00.

Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat-dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat-lainnya serta transfer pemerintah provinsi.

Rincian realisasi pendapatan transfer selama TA 2022 dan Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.32 Pendapatan Transfer

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.730.252.613.000,00	2.701.274.490.590,00	98,94	3.643.215.136.775,00	(941.940.646.185,00)
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	127.460.843.000,00	127.024.597.939,00	99,66	165.099.615.167,00	(38.075.017.228,00)
Transfer Pemerintah Provinsi	145.851.777.511,00	151.480.204.993,00	103,86	146.813.831.938,00	4.666.373.055,00
Jumlah	3.003.565.233.511,00	2.979.779.293.522,00	99,21	3.955.128.583.880,00	(975.349.290.358,00)

Berdasarkan Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Simtrada) bahwa Pemerintah Pusat telah menyalurkan dana transfer umum dan dana desa ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp3.145.863.448.935,00. Dari jumlah tersebut terdapat pemotongan penyaluran TKD untuk DBH dan DAU sebesar Rp303.118.490.790,00 yang disebabkan adanya kelebihan penyaluran TKD pada tahun-tahun sebelumnya, serta Dana Bos Reguler untuk sekolah swasta yang penyalurannya langsung kerekening sekolah sebesar Rp14.445.869.616,00.

Jadi selama TA 2022 realisasi transfer pemerintah pusat (Dana Perimbangan dan Lainnya) ke Rekening Kas Umum Daerah adalah sebesar Rp2.828.299.088.529,00 atau 98,97% dari anggaran sebesar Rp2.857.713.456.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2021 sebesar Rp3.808.314.751.942,00 terdapat penurunan sejumlah Rp980.015.663.413,00 atau 25,73%, dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	PENYALURAN DARI PUSAT	POTONGAN	REALISASI	KETERANGAN
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.372.933.931.802,00	295.727.463.763,00	2.077.206.468.039,00	Pemotongan dari Pusat untuk Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil berdasarkan KMK Nomor 29/KM.7/2022 sebesar Rp12.256.354.744,00.
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.751.682.472.948,00	224.590.875.304,00	1.527.091.597.644,00	Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil berdasarkan KMK Nomor 37/KM.7/2022 pada TA 2022 sebesar Rp3.750.867.184,00 dan Treasury Deposit Facility sebesar Rp279.720.241.835,00
DBH PPh Pasal 21	58.270.564.665,00	8.568.056.665,00	49.712.508.000,00	
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPO/PDN	1.683.113.294,00	877.319.294,00	805.794.000,00	
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	195.680,00	32.285,00	163.395,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	525.505.697.235,00	51.278.445.235,00	474.227.252.000,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi Dana Bagi Hasil (DBH)	9.561.705.711,00	5.566.812.711,00	3.994.893.000,00	
Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	5.618.822.338,00	2.726.392.338,00	2.892.430.000,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	18.441.295.720,00	1.917.776.720,00	16.523.519.000,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.170.064.211,00	211.753.211,00	1.958.311.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Alokasi Umum	338.312.985.000,00	2.585.357.000,00	335.727.628.000,00
Dana Transfer			
Khusus-Dana Alokasi	77.629.486.104,00	0,00	77.629.486.104,00
Khusus (DAK) Fisik			
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	661.931.147,00	0,00	661.931.147,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.291.743.454,00	0,00	10.291.743.454,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	18.847.958.697,00	0,00	18.847.958.697,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	5.661.355.510,00	0,00	5.661.355.510,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Perugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.223.232.246,00	0,00	2.223.232.246,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Perediaan Rumah Swadaya	799.880.000,00	0,00	799.880.000,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Perugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar	0,00	0,00	0,00
Pembangunan Pertanian			
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Perugasan			
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	12.524.336.282,00	0,00	12.524.336.282,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Perugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.350.954.854,00	0,00	7.350.954.854,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Perugasan	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.304.445.000,00	0,00	4.304.445.000,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Perugasan	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	149.782.500,00	0,00	149.782.500,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Reguler	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Perugasan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Perugasan	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	11.653.421.114,00	0,00	11.653.421.114,00	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	857.054.100,00	0,00	857.054.100,00	
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	2.303.391.200,00	0,00	2.303.391.200,00	
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	229.962.448.090,00	19.251.539.643,00	210.710.908.447,00	
DAK Non Fisik-BOS Reguler	96.048.745.130,00	14.445.869.616,00	81.602.875.514,00	BOS Reguler Swasta yang tidak di catat sebagai pendapatan Pemda
DAK Non Fisik-BOS Afirma	0,00	0,00	0,00	
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	
DAK Non Fisik-TPG PINSO	104.271.442.960,00	0,00	104.271.442.960,00	
DAK Non Fisik-Tamsil Sura PINSO	2.411.750.000,00	0,00	2.411.750.000,00	
DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.678.030.000,00	0,00	6.678.030.000,00	
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	773.400.000,00	0,00	773.400.000,00	
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.117.492.000,00	3.576.729.490,00	7.540.762.510,00	Pemotongan langsung dari Pusat
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	406.876.000,00	
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	992.540.000,00	0,00	992.540.000,00	
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.325.680.000,00	1.048.271.402,00	4.277.408.598,00	
DAK Non Fisik-PK2UKM	400.800.000,00	50.519.400,00	350.280.600,00	
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	417.092.000,00	38.140.700,00	378.951.300,00	
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	89.039.035,00	362.760.965,00	
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	666.800.000,00	2.970.000,00	663.830.000,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	3.018.838.850.996,00	317.564.360.406,00	2.701.274.490.590,00	
Dana Desa	127.024.597.939,00	0,00	127.024.597.939,00	
Dana Desa	127.024.597.939,00	0,00	127.024.597.939,00	
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	3.145.863.448.935,00	317.564.360.406,00	2.828.299.088.529,00	

Penyaluran dari Pusat sebesar Rp3.145.863.448.935 dipotong sebesar Rp317.564.360.406 dan transfer BOS Reguler Swasta yang tidak di catat sebagai pendapatan Pemda sebesar Rp14.445.869.616,00 sehingga realisasi transfer yang masuk ke rekening kas daerah tercatat sebesar Rp2.828.299.088.529,00.



**PEREMINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

I. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
2.730.252.613.000,00	2.701.274.490.590,00	98,94	3.643.215.136.775,00	(941.940.646.185,00)

Realisasi transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp2.701.274.490.590,00 atau 98,94% dari anggaran sebesar Rp2.730.252.613.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi selama tahun 2021 sebesar Rp3.643.215.136.775,00 terdapat penurunan sejumlah Rp941.940.646.185,00 atau 25,85%, dengan rincian sebagai berikut:

Berikut ini adalah rincian realisasi transfer pemerintah pusat-dana perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis TA 2022 dan TA. 2021 :

Tabel 5.33 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dana Bagi Hasil Pajak	1.572.274.159.000,00	1.577.609.899.644,00	100,34	2.658.352.990.601,00	(1.080.743.090.957,00)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)	499.596.666.000,00	499.596.568.395,00	100,00	408.123.076.992,00	91.473.491.403,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	338.312.985.000,00	335.727.628.000,00	99,24	336.787.052.000,00	(1.059.624.000,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	320.068.803.000,00	288.340.394.551,00	90,09	239.952.017.182,00	48.388.377.369,00
Jumlah	2.730.252.613.000,00	2.701.274.490.590,00	98,94	3.643.215.136.775,00	(941.940.646.185,00)

a) Dana Bagi Hasil

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
1.572.274.159.000,00	1.577.609.899.644,00	100,34	2.658.352.990.601,00	(1.080.743.090.957,00)

Realisasi Bagi Hasil Pajak selama TA.2022 sebesar Rp1.577.609.899.644,00 atau 100,34% dari anggaran sebesar Rp1.572.274.159.000,00 dan jika dibandingkan TA. 2021 sebesar Rp2.658.352.990.601,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp1.080.743.090.957,00 atau 40,65%. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis berasal dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBB Pertambangan, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29 dan Wajib Pajak Orang Pribadi, PBB Perkebunan, PBB Perhutanan, PBB Bag. Pemerintah Pusat Bagi Rata, serta Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34 Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Bagi Hasil dari PBB	1.521.755.857.000,00	1.527.091.597.644,00	100,35	2.602.448.020.701,00	(1.075.356.423.057,00)
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	49.712.508.000,00	49.712.508.000,00	100,00	54.927.302.100,00	(5.214.794.100,00)
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29	805.794.000,00	805.794.000,00	100,00	977.667.800,00	(171.873.800,00)
Lainnya	1.572.274.159.000,00	1.577.609.899.644,00	100,34	2.658.352.990.601,00	(1.080.743.090.957,00)

Tabel 5.35 Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Realisasi berdasarkan Alokasi TA 2022	Kurang Bayar	Total
a	b	c	d= b+c
Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	49.712.508.000,00	0,00	49.712.508.000,00
DBH PPh, Triwulan ke 1 TA 2022	9.617.877.000,00	0,00	9.617.877.000,00
DBH PPh, Triwulan ke 2 TA 2022	9.617.877.000,00	0,00	9.617.877.000,00
DBH PPh, Triwulan ke 3 TA 2022	9.942.501.600,00	0,00	9.942.501.600,00
DBH PPh, Triwulan ke 4 TA 2022	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan dan Potongan Berdasarkan KMK Nomor 35/KM.7/2022, Triwulan ke-4 TA 2022 => 611111 DBH PPh Pasal 21 (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	20.534.252.400,00	0,00	20.534.252.400,00
Bagi Hasil DBH Pajak Pasal 25/29	805.794.000,00	0,00	805.794.000,00
DBH PPh, Triwulan ke 1 TA 2022	155.561.000,00	0,00	155.561.000,00
DBH PPh, Triwulan ke 2 TA 2022	155.561.000,00	0,00	155.561.000,00
DBH PPh, Triwulan ke 3 TA 2022	161.158.800,00	0,00	161.158.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DBH PPh, Triwulan ke-4 TA 2022	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan dan Potongan Berdasarkan KMK Nomor 35/KM.7/2022, Triwulan ke-4 TA 2022 => 611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP (Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	333.513.200,00	0,00	333.513.200,00
Bagi Hasil dari PBB	1.521.755.857.000,00	5.335.740.644,00	1.527.091.597.644,00
DBH PBB Migas, Triwulan ke 1 TA 2022 => 611212	273.004.615.200,00	0,00	273.004.615.200,00
DBH PBB Bagian Daerah			
DBH PBB Migas, Triwulan ke 1 TA 2022 => 611214	9.100.153.800,00	0,00	9.100.153.800,00
DBH PBB Biaya Pemungutan			
DBH PBB Migas, Triwulan ke 2 TA 2022 => 611212	341.255.769.000,00	0,00	341.255.769.000,00
DBH PBB Bagian Daerah			
DBH PBB Migas, Triwulan ke 2 TA 2022 => 611214	11.375.192.250,00	0,00	11.375.192.250,00
DBH PBB Biaya Pemungutan			
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi, Triwulan ke-3 TA. 2022 => 611212	507.500.633.500,00	0,00	507.500.633.500,00
DBH PBB Bagian Daerah			
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi, Triwulan ke-3 TA. 2022 => 611214	16.917.541.550,00	0,00	16.917.541.550,00
DBH PBB Biaya Pemungutan			
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil berdasarkan KMK Nomor 29/KM.7/2022 pada TA. 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	0,00	4.085.451.582,00	4.085.451.582,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi, Triwulan ke-4 TA. 2022 => 611212	328.240.792.300,00	0,00	328.240.792.300,00
DBH PBB Bagian Daerah			
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi, Triwulan ke-4 TA. 2022 => 611214	10.942.945.400,00	0,00	10.942.945.400,00
DBH PBB Biaya Pemungutan			
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil berdasarkan KMK Nomor 37/KM.7/2022 pada TA. 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	0,00	1.250.289.062,00	1.250.289.062,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata, Tahap ke 1 TA. 2022 => 611215 DBH PBB Bagi Rata	1.082.032.500,00	0,00	1.082.032.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata, Tahap ke-2 TA 2022 => 611215 DBH PBB Bagi Rata	1.910.291.500,00	0,00	1.910.291.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata, Tahap ke-3 TA. 2022 => 611215 DBH PBB Bagi Rata	828.259.000,00	0,00	828.259.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-1 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-1 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-2 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-2 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-3 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-3 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-4 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-4 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-5 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-5 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-6 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-6 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-7 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-7 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-8 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-8 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-9 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-9 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-10 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-10 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-11 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-11 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-12 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-12 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-13 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-13 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-14 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-14 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-15 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-15 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-16 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-16 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-17 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	585.822.000,00	0,00	585.822.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-17 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	26.036.150,00	0,00	26.036.150,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-18 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	1.757.466.000,00	0,00	1.757.466.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Minggu ke-18 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	78.108.450,00	0,00	78.108.450,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-1 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-1 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-2 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-2 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-3 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-3 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-4 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-4 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-5 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-5 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-6 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-6 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-7 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-7 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-8 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-8 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-9 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-9 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-10 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-10 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-11 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-11 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-12 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-12 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-13 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-13 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-14 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-14 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-15 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-15 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-16 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-16 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-17 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	4.994.650,00	0,00	4.994.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-17 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	166.500,00	0,00	166.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-18 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	14.983.950,00	0,00	14.983.950,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya, Minggu ke-18 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	499.500,00	0,00	499.500,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-1 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-1 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-2 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-2 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-3 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-3 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-4 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-4 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-5 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-5 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-6 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-6 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-7 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-7 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-8 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-8 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-9 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-9 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-10 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-10 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-11 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-11 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-12 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-12 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-13 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-13 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-14 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-14 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-15 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-15 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-16 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-16 TA 2022 => 611214 DBH PBB Biaya Pemungutan	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-17 TA 2022 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah	349.279.600,00	0,00	349.279.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-17 TA 2022 => 611214 DBH	13.582.650,00	0,00	13.582.650,00
PBB Biaya Pemungutan			
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-18 TA 2022 => 611212 DBH	1.047.838.800,00	0,00	1.047.838.800,00
PBB Bagian Daerah			
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan, Minggu ke-18 TA 2022 => 611214 DBH	40.747.950,00	0,00	40.747.950,00
PBB Biaya Pemungutan			
Total	1.572.274.159.000,00	5.335.740.644,00	1.577.609.899.644,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak selama TA 2022 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- Bagi Hasil PPh 21, 25 dan 29

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp50.518.302.000,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp805.794.000,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp49.712.508.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH Pajak Penghasilan tahun anggaran 2021 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 sebesar Rp3.186.266.119,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp777.642.642,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp2.408.623.477,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Penyaluran Kurang Bayar DBH pada TA 2021 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 sebesar Rp3.186.266.119,-,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp777.642.642,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp2.408.623.477,00

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Penyelesaian Lebih Bayar DBH yang Diperhitungkan Dalam Penyaluran Kurang Bayar DBH Pajak Penghasilan TA 2021 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 sebesar Rp3.186.266.119,-,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp777.642.642,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp2.408.623.477,00

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

- Bagi Hasil PBB dan PBB Pertambangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Lampiran rincian DBH PBB, Bagi Rata sebesar Rp3.820.583.000,- Bagian Daerah sebesar Rp1.468.803.735.000,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp11.716.440.000,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp6.985.592.000,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp1.450.001.810.000,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp99.893.000,00. Biaya Pemungutan sebesar Rp49.131.539.000,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp520.723.000,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp271.653.000,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp48.335.833.000,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp3.330.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Sektor Bagi Hasil sebesar Rp803.667.166,00, Sektor Perkebunan Rp5.758.609.106,00, Sektor Perhutanan sebesar Rp1.692.889.290,00, Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp31.635.556.290,00, Pertambangan Minerba sebesar Rp10.909.728,00, Sektor Lainnya sebesar Rp60.807.157,00 dan Biaya Pemungutan sebesar Rp1.378.608.305,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Penyaluran Kurang Bayar DBH pada TA 2021 PBB sebesar Rp13.155.540.207,00 dengan dengan penyaluran KB DBH PBB Bagi Rata sebesar Rp803.667.166,00, Sektor Pertambangan Migas Rp12.351.873.041,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Penyelesaian Lebih Bayar DBH yang Diperhitungkan dalam Penyaluran Kurang Bayar DBH PBB TA 2021 sebesar Rp9.070.088.625,00 dengan rincian DBH PBB Bagi Rata sebesar Rp803.667.166,00, Sektor Pertambangan Migas Rp8.266.421.459,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Sisa Kurang Bayar DBH PBB TA 2021 sebesar Rp28.185.578.835,00 dengan rincian DBH PBB sektor Perkebunan sebesar Rp5.758.609.106,00, Sektor Perhutanan Rp1.692.889.290,00, Pertambangan Migas Rp19.283.683.249,00, Sektor Pertambangan Lainnya sebesar Rp10.909.728,00 Sektor Lainnya sebesar Rp60.807.157 dan Upah Pemungutan sebesar Rp1.378.680.305,00.

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

Lampiran Kertas kerja PMK

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
499.596.666.000,00	499.596.568.395,00	100,00	408.123.076.992,00	91.473.491.403

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2022 adalah sebesar Rp499.596.568.395,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp499.596.666.000,00. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ini merupakan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti: Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasaan Hutan, Bagi Hasil dari Dana Reboisasi, Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp408.123.076.992,00 mengalami kenaikan sebesar Rp91.473.491.403,00 atau 22,41%.

Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah sebagai berikut:

Tabel 5.36 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas	478.222.145.000,00	478.222.145.000,00	100,00	378.598.933.710,00	99.623.211.290,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba	2.892.430.000,00	2.892.430.000,00	100,00	2.071.794.136,00	820.635.864,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	16.523.519.000,00	16.523.519.000,00	100,00	25.777.841.891,00	(9.254.322.891,00)
Cukai Hasil Tembakau	261.000,00	163.395,00	62,60	7.105,00	156.290,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00	283.810.850,00
Jumlah	499.596.666.000,00	499.596.568.395,00	100,00	408.123.076.992,00	91.473.491.403,00

Tabel 5.37 Rekapitulasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

Uraian	Realisasi berdasarkan Alokasi TA 2022	Kurang Bayar	Total
a	b	c	d= b+c
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi	474.227.252.000,00	0,00	474.227.252.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Triwulan ke 1 TA. 2022 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15%	87.936.455.800,00	0,00	87.936.455.800,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Triwulan ke 1 TA. 2022 => 612112 DBH SDA Minyak Bumi 0,5%	2.931.215.200,00	0,00	2.931.215.200,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Triwulan ke 2 TA. 2022 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15%	109.920.569.750,00	0,00	109.920.569.750,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Triwulan ke 2 TA. 2022 => 612112 DBH SDA Minyak Bumi 0,5%	3.664.019.000,00	0,00	3.664.019.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Triwulan ke-3 TA. 2022 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15%	160.625.230.500,00	0,00	160.625.230.500,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Triwulan ke-3 TA. 2022 => 612112 DBH SDA Minyak Bumi 0,5%	5.354.307.700,00	0,00	5.354.307.700,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Triwulan ke-4 TA. 2022 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15%	100.446.973.950,00	0,00	100.446.973.950,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Triwulan ke-4 TA. 2022 => 612112 DBH SDA Minyak Bumi 0,5%	3.348.480.100,00	0,00	3.348.480.100,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi	3.994.893.000,00	0,00	3.994.893.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi, Triwulan ke 1 TA. 2022	756.767.600,00	0,00	756.767.600,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi, Triwulan ke 1 TA. 2022 => 612212 DBH SDA Gas Bumi 0,5%	12.612.800,00	0,00	12.612.800,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi, Triwulan ke 2 TA. 2022 => 612211 DBH SDA Gas Bumi 30%	945.959.500,00	0,00	945.959.500,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi, Triwulan ke 2 TA. 2022	15.766.000,00	0,00	15.766.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi, Triwulan ke-3 TA. 2022	1.375.285.450,00	0,00	1.375.285.450,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi, Triwulan ke-3 TA. 2022	22.927.100,00	0,00	22.927.100,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi, Triwulan ke-4 TA. 2022	851.374.450,00	0,00	851.374.450,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi, Triwulan ke-4 TA. 2022	14.200.100,00	0,00	14.200.100,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba	2.892.430.000,00	0,00	2.892.430.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, Triwulan ke 1 TA. 2022	300.723.200,00	0,00	300.723.200,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, Triwulan ke 2 TA. 2022	375.904.000,00	0,00	375.904.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, Triwulan ke-3 TA. 2022	1.012.350.500,00	0,00	1.012.350.500,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, Triwulan ke-4 TA. 2022	1.203.452.300,00	0,00	1.203.452.300,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.958.311.000,00	0,00	1.958.311.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Triwulan ke 1 TA. 2022	287.823.900,00	0,00	287.823.900,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Triwulan ke 2 TA. 2022	287.823.900,00	0,00	287.823.900,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Triwulan ke-3 TA. 2022	685.408.850,00	0,00	685.408.850,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, Triwulan ke-4 TA. 2022	697.254.350,00	0,00	697.254.350,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	16.523.519.000,00	0,00	16.523.519.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Triwulan ke 1 TA. 2022 => 612512 DBH SDA Kehutanan - PSDH	2.475.098.400,00	0,00	2.475.098.400,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Triwulan ke-2 TA 2022 => 612512 DBH SDA Kehutanan - PSDH	2.475.098.400,00	0,00	2.475.098.400,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Triwulan ke-3 TA 2022 => 612512 DBH SDA Kehutanan - PSDH	5.783.231.650,00	0,00	5.783.231.650,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Triwulan ke-4 TA 2022 => 612512 DBH SDA Kehutanan - PSDH	5.790.090.550,00	0,00	5.790.090.550,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	163.395,00	0,00	163.395,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Triwulan ke-1 TA 2022 => 613111 DBH Cukai Hasil Tembakau	42.840,00	0,00	42.840,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Triwulan ke-3 TA 2022 => 613111 DBH Cukai Hasil Tembakau	66.555,00	0,00	66.555,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Triwulan ke-4 TA 2022 => 613111 DBH Cukai Hasil Tembakau	54.000,00	0,00	54.000,00
Total	499.596.568.395,00	0,00	499.596.568.395,00

Realisasi Dana Bagi Hasil bukan Pajak selama TA 2022 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp478.222.145.000,00 dengan rincian Minyak Bumi sebesar Rp474.227.252,00 dan Gas Bumi sebesar Rp3.994.893.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Lebih Bayar DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021, Minyak Bumi sebesar Rp6.107.428.161,00 dan Gas Bumi sebesar Rp.5.134.842.805,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Lebih Bayar DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020, Minyak Bumi sebesar Rp95.120.166.820,00 dan Gas Bumi sebesar Rp0,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Sisa Kurang Bayar Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2021 sebesar Rp5.134.842.805 dari Gas Bumi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Sisa Kurang Bayar Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2020 sebesar Rp82.863.812.076,00 dari Minyak Bumi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Penyelesaian Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2020 sebesar Rp12.256.354.744 dari Minyak Bumi.

- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp2.892.430.000,00 dengan Rincian Royalti sebesar Rp2.892.430.000.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp1.506.548.021,00 dengan rincian Iuran Tetap sebesar Rp162.122.823,00 dan Royalti sebesar Rp1.344.425.198,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Sisa Kurang Bayar Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara TA 2021 sebesar Rp1.506.548.021,00, dengan rincian Iuran Tetap sebesar Rp162.122.823,00 dan Royalti sebesar Rp. 1.344.425.198,00 .

- Bagi Hasil SDA Perikanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp1.958.311.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp157.694.020,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.778.904,00.

- Bagi Hasil SDA Kehutanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp16.523.519.000,00 dengan Rincian IUUPH sebesar Rp0,00, PSDH sebesar Rp16.523.519.000,00 dan DR sebesar Rp0,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam kehutanan sebesar Rp5.182.261.154,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Sisa Kurang Bayar Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2021 sebesar Rp5.182.261.154,00.

- Bagi Hasil SDA Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp261.000,-

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Alokasi Kurang Bayar Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.155,00

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Sisa Kurang Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2021 sebesar Rp19.155.

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan PMK dengan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
338.312.985.000,00	335.727.628.000,00	99,24	336.787.052.000,00	(1.059.424.000,00)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, tentang Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota sebesar Rp338.312.985.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama TA. 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.38 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dana Alokasi Umum	338.312.985.000,00	335.727.628.000,00	99,24	336.787.052.000,00	(1.059.424.000,00)
Jumlah	338.312.985.000,00	335.727.628.000,00	99,24	336.787.052.000,00	(1.059.424.000,00)

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	e=b-d
DAK Fisik	80.873.440.000,00	77.629.486.104,00	95,99	93.311.533.266,00	(15.682.047.162,00)
DAK Non Fisik	239.195.363.000,00	210.710.908.447,00	88,09	146.640.483.916,00	64.070.424.531,00
Jumlah	320.068.803.000,00	288.340.394.551,00	90,09	239.952.017.182,00	48.388.377.369,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp288.340.394.551 atau sekitar 90,09 dari anggaran sebesar Rp320.068.803.000,- dikarenakan sbb:

1. DAK Fisik terealisasi sebesar 95,99 % dari anggaran karna penyaluran sesuai kontrak pekerjaan.
2. DAK Non Fisik terealisasi sebesar 88,09 % dari anggaran karna masih terdapat sisa anggaran tahun sebelum nya di RKUD, dan Pemerintah Pusat melakukan pemotongan sebesar sisa dana tersebut sesuai laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum pada pasal 34

i). Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota sebesar Rp80.873.440.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama TA. 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.39 Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik

DAK Fisik	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
DAK Pendidikan Bidang	31.106.381.000,00	29.801.633.298,00	95,81	32.354.346.087,00	(2.552.712.789,00)
DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	24.412.173.000,00	22.848.236.670,00	93,59	24.724.290.403,000	(1.876.053.733,00)
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler	806.898.000,00	799.880.000,00	99,13	0,00	799.880.000,00
DAK Bidang Pertanian Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.972.898.568,00	(1.972.898.568,00)
DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.082.312.360,00	(1.082.312.360,00)
DAK Bidang Jalan Reguler	12.741.071.000,00	12.524.336.282,00	98,30	14.535.552.962,00	(2.011.216.680,00)
DAK Fisik Bidang Jalan Penugasan	0,00	0,00	0,00	4.556.432.300,00	(4.556.432.300,00)
DAK Bidang Air Minum Reguler	7.484.016.000,00	7.350.954.854,00	98,22	0,00	7.350.954.854,00
DAK Bidang Air Minum Penugasan	0,00	0,00	0,00	5.279.878.806,00	(5.279.878.806,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DAK Bidang Sanitasi	4.322.901.000,00	4.304.445.000,00	99,57	0,00	4.304.445.000,00
Reguler					
DAK Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	2.632.652.000,00	(2.632.652.000,00)
Perugasan					
DAK Fisik-Bidang					
Kesehatan dan KB-					
Reguler-Peningkatan	0,00	0,00	0,00	299.903.960,00	(299.903.960,00)
Kesiapan Sistem					
Kesehatan					
DAK Bidang					
Transportasi Laut	0,00	0,00	0,00	3.222.095.169,00	(3.222.095.169,00)
Reguler					
DAK Fisik-Bidang					
Transportasi Perdesaan	0,00	0,00	0,00	1.104.368.651,00	(1.104.368.651,00)
Reguler					
DAK Fisik-Bidang					
Kesehatan dan KB-	0,00	0,00	0,00	397.882.000,00	(397.882.000,00)
Penugasan-Keluarga					
Belanja					
DAK Bidang					
Perumahan dan	0,00	0,00	0,00	1.148.920.000,00	(1.148.920.000,00)
Kawasan Pemukiman					
Jumlah	80.873.440.000,00	77.629.486.104,00	95,99	93.311.533.266,00	(15.682.047.162,00)

ii). Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota sebesar Rp239.195.363.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu selama TA. 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40 Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik

DAK Non Fisik	Menurut Surat Ketetapan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
DAK Non Fisik-BOS	100.428.500.000,00	81.602.875.514,00	81,25	0,00	81.602.875.514,00
Reguler					
DAK Non Fisik-BOS	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	(240.000.000,00)
Afirmasi					
DAK Non Fisik-BOS	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	(240.000.000,00)
Kinerja					
Tunjangan Profesi Guru	107.984.483.000,00	104.271.442.960,00	96,56	112.812.546.000,00	(8.541.103.040,00)
PNSD					
Dana Tambahan	2.619.000.000,00	2.411.750.000,00	92,09	993.000.000,00	1.418.750.000,00
Penghasilan Guru					
DAK Non Fisik-Bantuan					
Operasional	7.549.800.000,00	6.678.030.000,00	88,45	7.089.600.000,00	(411.570.000,00)
Penyelenggaraan					
PAUD					
DAK Non Fisik-BOP	834.500.000,00	773.400.000,00	92,68	1.126.300.000,00	(352.900.000,00)
Pendidikan Kesetaraan					
DAK Non Fisik-BOKKB-	1.845.821.000,00	8.940.178.510,00	484,35	18.252.050.145,00	(9.311.871.635,00)
BOKB					
DAK Non Fisik-BOKKB-	406.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengawasan Obat dan					
Makanan					
DAK Non Fisik-BOKKB-	9.271.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akreditasi Puskesmas					
DAK Non Fisik-BOKKB-	992.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaminan Persalinan					
DAK Non Fisik-BOKKB-	5.325.680.000,00	4.277.408.598,00	80,32	2.769.822.625,00	1.507.585.973,00
BOKB					
DAK Non Fisik-	400.800.000,00	350.280.600,00	87,40	390.304.000,00	(40.023.400,00)
PKZUKM					
DAK Non Fisik-Dana					
Pelayanan Administrasi	0,00	0,00	0,00	1.991.251.146,00	(1.991.251.146,00)
Kependudukan					
DAK Non Fisik Dana					
Fasilitasi Penanaman	417.092.000,00	378.951.300,00	90,86	326.122.000,00	52.829.300,00
Modal					
DAK Non Fisik - Dana					
Pelayanan	451.800.000,00	362.760.965,00	80,29	187.488.000,00	175.272.965,00
Perlindungan					
Perempuan dan Anak					
DAK Non Fisik- Dana					
Ketahanan Pangan Dan	666.800.000,00	663.830.000,00	99,55	222.000.000,00	441.830.000,00
Pertanian					
Jumlah	239.195.363.000,00	210.710.908.447,00	88,09	146.640.483.916,00	64.070.424.531,00

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
127.460.843.000,00	127.024.597.939,00	99,66	165.099.615.167,00	(38.075.017.228,00)

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan berdasarkan ketetapan sebagai berikut:

Tabel 5.41 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Menurut Surat Ketetapan	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	31.134.698.000,00	(31.134.698.000,00)
Dana Desa	127.460.843.000,00	127.024.597.939,00	99,66	133.964.917.167,00	(6.940.319.228,00)
Jumlah	127.460.843.000,00	127.024.597.939,00	99,66	165.099.615.167,00	(38.075.017.228,00)

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2022 adalah Transfer Dana Desa sebesar Rp127.024.597.939,00 mengalami penurunan sebesar Rp38.075.017.228,00 atau 23,06% bila dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp165.099.615.167,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

3. Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
145.851.777.511,00	151.480.204.993,00	103,86	146.813.831.938,00	4.666.373.055,00

Realisasi transfer Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis TA 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a). Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
131.899.031.211,00	138.522.362.493,00	105,02	129.050.630.338,00	9.471.732.155,00

Penerimaan yang berasal dari transfer Pemerintah Provinsi TA 2022 adalah sebesar Rp138.522.362.493,00 atau 105,02% dari anggaran sebesar Rp131.899.031.211,00, mengalami kenaikan sebesar Rp9.471.732.155 atau 7,34% bila dibandingkan realisasi tahun 2021 yang berjumlah Rp129.050.630.338,00

Tabel 5.42 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Transfer Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pajak Kendaraan Bermotor	33.802.156.378,00	29.967.419.478,00	88,66	38.126.230.282,51	(8.158.810.804,51)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.139.125.223,00	30.785.220.348,00	117,77	22.117.233.130,49	8.667.987.217,51
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	44.070.884.801,00	45.364.296.738,00	102,93	41.675.574.344,00	3.688.722.394,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	1.641.798.034,00	1.082.953.355,00	65,96	1.070.056.597,00	12.896.758,00
Pajak Rokok	26.245.066.775,00	31.322.472.574,00	119,35	26.061.535.984,00	5.260.936.590,00
Jumlah	131.899.031.211,00	138.522.362.493,00	105,02	129.050.630.338,00	9.471.732.155,00

Realisasi dana bagi hasil dari selama TA 2022 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut:

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 809 / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.614.750.203,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.941.863.153,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp12.052.712.291,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp219.838.888,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 868 / V / 2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I tahun 2022 untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.068.437.566,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1137/VII/2022 tanggal 18 Juli April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.392.262.275,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.405.622.688,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp13.666.764.456,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp300.563.964,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1220 / VIII / 2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II tahun 2022 untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.005.231.079,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1526/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.580.100.053,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.036.239.786,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp15.297.576.233,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp274.706.206,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1658 / XI / 2022 tanggal 8 November 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III tahun 2022 untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.662.837.699,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1801 / XII / 2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.221.933.934,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.833.325.863,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.429.870.132,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp196.654.202,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1851 /XII/ 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Oktober-November) tahun 2022 untuk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp5.742.383.962,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.756/IV/ 2022 tanggal 8 April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.380.306.947,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.667.114.843,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.347.243.458,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp91.190.095,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 867 /V/ 2021 tanggal 20 Mei 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) tahun 2021 untuk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp3.843.582.268,00.

b). Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiakan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
13.952.746.300,00	12.957.842.500,00	92,87	17.763.201.600,00	(4.805.359.100,00)

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi TA 2022 adalah sebesar Rp12.957.842.500,00 atau 92,87% dari anggarannya sebesar Rp13.952.746.300,00

Tabel 5.43 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiakan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	13.952.746.300,00	12.957.842.500,00	92,87	17.763.201.600,00	(4.805.359.100,00)
Jumlah	13.952.746.300,00	12.957.842.500,00	92,87	17.763.201.600,00	(4.805.359.100,00)

Pengalokasian Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Bengkalis ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau No: KPTS.2/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, Berupa Gaji Guru Bantu sebesar Rp.6.936.000.000,- , Bantuan Kecamatan sebesar Rp1.100.000.000,-, Rumah Layak Huni sebesar Rp5.390.000.000,-

Dalam keputusan tersebut ditetapkan Alokasi Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2022 adalah sebesar Rp13.952.746.300,00 dan telah terealisasi sebesar Rp12.957.842.500,00 atau 92,87% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.44 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan per OPD

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiakan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	13.952.746.300,00	12.957.842.500,00	92,87	17.763.201.160,00	(4.805.358.660,00)
Jumlah	13.952.746.300,00	12.957.842.500,00	92,87	17.763.201.160,00	(4.805.358.660,00)

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiakan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
0,00	808.958,15	0,00	82.544.910.000,00	(82.544.101.041,85)

Lain-lain Pendapatan yang Sah selama TA 2022 adalah sebesar Rp808.958,15 dari anggaran sebesar Rp0,00 dan realisasi tahun 2021 yang berjumlah Rp82.544.910.000,0.

Pada tahun ini lain-lain Pendapatan yang sah teralisasi sebesar Rp808.958,15 merupakan sisa kegiatan Penganggaran Tuberkulosis Proyek Dana Hibah GF ATM Komponen TB pada Dinas Kesehatan yang bersumber dari dana hibah pusat tahun 2010.

Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.45 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiakan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Hibah	0,00	808.958,15	0,00	82.544.910.000,00	(82.544.101.041,85)
Jumlah	0,00	808.958,15	0,00	82.544.910.000,00	(82.544.101.041,85)

5.1.2. Belanja

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiakan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
4.001.934.877.521,00	3.708.275.217.225,88	92,66	2.878.996.128.075,36	829.279.089.150,52

Realisasi Belanja Kabupaten Bengkalis TA 2022 adalah sebesar Rp3.708.275.217.225,88 atau 92,66% dari nilai anggaran sebesar Rp4.001.934.877.521,00. Jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2.878.996.128.075,36 mengalami kenaikan sebesar Rp829.279.089.150,52 atau 28,80% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46 Belanja dan Transfer

Belanja	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiakan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Operasi	2.799.554.077.247,00	2.598.560.224.108,88	92,82	2.199.493.917.121,94	399.066.306.986,94
Belanja Modal	1.186.441.773.748,00	1.109.714.993.117,00	93,53	679.492.555.913,42	430.222.437.203,58



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Tidak Terduga	15.939.026.526,00	0,00	0,00	9.655.040,00	(9.655.040,00)
Jumlah	4.001.934.877.521,00	3.708.275.217.225,88	92,66	2.878.996.128.075,36	829.279.089.150,52

A. Belanja Operasi

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
2.799.554.077.247,00	2.598.560.224.108,88	92,82	2.199.493.917.121,94	399.066.306.986,94

Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Bengkalis TA 2022 adalah sebesar Rp2.598.560.224.108,88 atau 92,82% dari nilai anggaran sebesar Rp2.799.554.077.247,00. Jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2.199.493.917.121,94 mengalami kenaikan sebesar Rp399.066.306.986,94 atau 18,14% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Pegawai	1.130.148.366.379,00	1.052.966.396.064,00	93,17	1.018.335.441.328,20	34.630.954.735,80
Belanja Barang dan Jasa	1.498.605.866.678,00	1.381.017.141.616,88	92,15	1.097.486.691.596,15	283.530.450.020,73
Belanja Subsidi	23.976.650.000,00	23.970.315.000,00	99,97	10.642.584.920,00	13.327.730.080,00
Belanja Hibah	115.220.345.690,00	109.378.573.578,00	94,93	35.834.828.114,59	73.543.745.463,41
Belanja Bantuan Sosial	31.602.848.500,00	31.227.797.850,00	98,81	37.194.371.163,00	(5.966.573.313,00)
Jumlah	2.799.554.077.247,00	2.598.560.224.108,88	92,82	2.199.493.917.121,94	399.066.306.986,94

I. Belanja Pegawai

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
1.130.148.366.379,00	1.052.966.396.064,00	93,17	1.018.335.441.328,20	34.630.954.735,80

Realisasi belanja pegawai selama TA 2022 sebesar Rp1.052.966.396.064,00 atau 93,17% dari anggaran sebesar Rp1.130.148.366.379,00. Jika dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp1.018.335.441.328,20 maka mengalami kenaikan sebesar Rp34.630.954.735,80 atau 3,40%.

Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 5.48 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Gaji dan Tunjangan	519.958.190.497,00	471.315.147.447,00	90,64	464.155.385.419,00	7.159.762.028,00
Belanja Gaji Pokok ASN	371.548.459.668,00	344.653.518.886,00	92,76	339.929.339.408,00	4.724.179.478,00
Tunjangan Keluarga ASN	44.623.668.199,00	34.970.565.164,00	78,37	34.265.572.645,00	704.992.519,00
Tunjangan Jabatan ASN	9.173.548.141,00	7.710.483.911,00	84,05	8.983.952.950,00	(1.273.469.039,00)
Tunjangan Fungsional ASN	27.601.719.130,00	24.374.331.984,00	88,31	22.233.244.600,00	2.141.087.384,00
Tunjangan Fungsional ASN	6.815.263.090,00	5.416.604.260,00	79,48	4.785.897.420,00	630.706.840,00
Tunjangan Beras ASN	25.131.357.868,00	21.783.428.705,00	86,68	21.335.607.640,00	447.821.065,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.162.424.843,00	1.498.468.063,00	69,30	1.435.068.383,00	63.399.680,00
Pembulatan Gaji ASN	9.628.220,00	5.074.853,00	52,71	5.013.938,00	60.915,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	29.334.764.980,00	28.068.731.256,00	95,68	28.391.016.353,00	(322.285.097,00)
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja ASN	922.395.201,00	710.415.115,00	77,02	697.668.017,00	12.747.098,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.634.961.157,00	2.123.525.250,00	80,59	2.093.004.065,00	30.521.185,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	425.067.509.162,00	403.573.234.938,00	94,94	375.135.529.001	28.437.705.937,80
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	166.586.518.724,00	157.715.395.003,00	94,67	134.066.405.222,70	23.648.989.780,30
Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas	3.555.200.000,00	3.003.429.500,00	84,48	796.687.500,00	2.206.742.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	7.008.388.155,00	6.544.586.634,00	93,38	9.074.157.243,30	(2.529.570.609,30)
Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	7.357.264.549,00	6.892.797.394,00	93,69	6.717.966.235,00	174.831.159,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	240.560.137.734,00	229.417.026.408,00	95,37	224.480.312.800,20	4.936.713.607,80
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	148.230.808.786,00	141.843.256.423,00	95,69	141.969.956.413,00	(126.699.990,00)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.829.250.000,00	3.709.009.344,00	96,86	4.369.853.748,00	(660.844.404,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	692.365.000,00	344.840.000,00	49,81	252.352.500,00	92.487.500,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)	107.984.483.000,00	107.984.483.000,00	100,00	112.449.017.460,00	(4.464.534.460,00)
PNSD					
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.619.000.000,00	2.490.140.000,00	95,08	987.750.000,00	1.502.390.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	200.000.000,00	151.934.998,00	75,97	30.726.122,00	121.208.876,00
Belanja Honorarium	32.880.510.786,00	27.137.649.081,00	82,53	23.855.056.583,00	3.282.592.498,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	25.200.000,00	0,00
Gaji dan Tunjangan DPRD	33.177.048.520,00	32.751.649.267,00	98,72	31.152.168.193,00	1.599.481.074,00
Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	1.004.010.000,00	0,00
Tunjangan Keluarga DPRD	142.451.400,00	104.099.100,00	73,08	98.460.600,00	5.638.500,00
Tunjangan Beras DPRD	183.946.800,00	142.594.980,00	77,52	138.901.560,00	3.693.420,00
Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	86.058.000,00	0,00
Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	100,00	1.455.814.500,00	0,00
Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	148.717.800,00	132.640.200,00	89,19	133.873.425,00	(1.233.225,00)
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00	7.938.000.000,00	0,00
Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.969.800.000,00	99,26	1.955.100.000,00	14.700.000,00
Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	595.904.044,00	570.305.607,00	95,70	109.819.788,00	460.485.819,00
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.120.215.976,00	9.016.326.880,00	98,86	8.988.130.320,00	28.196.560,00
Tunjangan Transportasi DPRD	10.374.000.000,00	10.332.000.000,00	99,60	9.244.000.000,00	1.088.000.000,00
Uang Jasa Pengabdian DPRD	143.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	181.137.414,00	169.317.988,00	93,47	149.937.302,00	19.380.686,00
Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	54.600.000,00	0,00
Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00	4.116.000,00	52,53	4.032.000,00	84.000,00
Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	84.240.000,00	14.040.000,00
Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.274.596,00	4.345.200,00	59,73	5.069.400,00	(724.200,00)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.787.232,00	2.142.868,00	76,88	1.993.942,00	148.926,00
Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.758,00	1.920,00	69,62	1.960,00	(40,00)
Belanja luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	6.075.216,00	5.382.720,00	88,60	0,00	5.382.720,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00	112.320,00	97,56	0,00	112.320,00
Belanja luran Jaminan Kematian Kerja KDH/WKDH	345.384,00	336.960,00	97,56	0,00	336.960,00
Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.870.320.000,00	1.870.320.000,00	100,00	1.758.620.000,00	111.700.000,00
Dana Operasional Pimpinan DPRD	450.720.000,00	450.720.000,00	100,00	469.920.000,00	(19.200.000,00)
Dana Operasional KDH/WKDH	1.419.600.000,00	1.419.600.000,00	100,00	1.288.700.000,00	130.900.000,00
Belanja Pegawai BLUD	1.663.352.000,00	1.443.470.000,00	86,78	4.013.845.000,00	(2.570.375.000,00)
Jumlah	1.130.148.366.379,00	1.052.966.396.064,00	93,17	1.018.335.441.328,20	34.630.954.735,80

Rincian Belanja Pegawai berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.49 Rincian Belanja Pegawai Per OPD

OPD	Anggaran 2022	Realisasi TA 2022	%	Realisasi 2021	Kenalkan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	551.480.134.094,00	525.728.867.864,00	95,33	513.255.081.724,00	12.473.786.140,00
Dinas Kesehatan	94.305.812.116,00	93.043.359.269,00	98,04	83.649.483.970,00	9.393.875.299,00
RSUD Bengkalis	39.140.130.368,00	37.674.969.703,00	96,26	34.074.917.106,00	3.600.052.597,00
RSUD Kecamatan Mandau	32.778.028.032,00	32.219.540.706,00	98,30	34.572.257.435,00	(2.352.716.729,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.978.915.315,00	14.230.815.141,00	95,01	12.237.703.828,00	1.993.111.313,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	9.331.685.179,00	7.821.842.322,00	83,82	7.533.116.828,00	288.725.494,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.013.261.375,00	4.860.417.432,00	96,95	4.422.741.242,00	437.676.190,00
Dinas Pemadam Kebakaran	6.334.067.869,00	5.862.602.439,00	92,56	5.361.068.662,00	501.533.777,00
Satuan Polisi Pamong Praja	11.836.970.857,00	11.039.797.567,00	93,27	9.760.492.931,00	1.279.304.636,00



PERMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Sosial	8.790.714.352,00	7.891.323.913,00	89,77	7.391.377.490,00	499.946.423,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.624.296.137,00	6.104.293.195,00	92,15	6.036.820.784,00	67.472.411,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.238.588.540,00	6.654.370.288,00	91,93	5.903.657.997,00	750.712.291,00
Dinas Ketahanan Pangan	5.056.786.257,00	4.879.743.816,00	96,50	4.563.650.974,00	316.092.842,00
Dinas Lingkungan Hidup	11.197.099.618,00	7.947.434.654,00	70,98	8.246.245.854,20	(298.811.200,20)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.011.600.736,00	9.647.197.501,00	96,36	9.230.026.426,00	417.171.075,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.066.856.392,00	5.217.502.484,00	86,00	7.076.868.764,00	(1.859.396.280,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.443.906.642,00	5.620.191.905,00	75,50	5.391.187.339,00	229.004.566,00
Dinas Perhubungan	15.732.966.955,00	12.358.967.653,00	78,55	12.040.903.780,00	318.063.873,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan	6.449.327.718,00	5.846.244.515,00	90,65	5.150.670.236,00	695.574.279,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.250.065.535,00	6.233.845.632,00	85,98	6.265.701.792,00	(31.856.160,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	9.027.855.855,00	8.849.872.545,00	98,03	8.777.665.408,00	72.207.137,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	8.872.902.893,00	8.387.284.527,00	94,53	8.009.006.507,00	378.278.020,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	9.151.198.575,00	8.995.998.469,00	98,30	8.035.420.046,00	960.578.423,00
Dinas Perikanan	9.064.697.388,00	7.421.328.308,00	81,87	7.124.915.824,00	296.412.484,00
Dinas Perkebunan	7.555.122.988,00	7.266.529.862,00	96,18	5.333.002.934,00	1.933.526.928,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan	17.107.090.945,00	16.766.974.440,00	98,01	14.109.175.606,00	2.657.798.834,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9.318.426.523,00	8.106.075.342,00	86,99	7.978.995.305,00	127.080.037,00
Sekretariat Daerah	34.684.689.719,00	30.014.948.865,00	86,54	30.070.650.052,00	(55.701.187,00)
Sekretariat DPRD	43.512.163.809,00	40.767.406.081,00	93,69	39.096.272.018,00	1.671.134.063,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.597.327.918,00	7.791.757.787,00	90,63	8.860.454.460,00	(1.068.696.673,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.110.984.650,00	9.882.759.395,00	70,04	12.999.602.298,00	(3.116.842.903,00)
Badan Pendapatan Daerah	20.308.966.541,00	16.306.537.683,00	80,29	17.034.367.623,00	(727.829.940,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.954.226.670,00	7.490.280.965,00	94,17	7.004.695.458,00	485.585.507,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	4.849.301.335,00	4.489.004.047,00	92,57	3.917.537.469,00	571.466.578,00
Inspektoral	8.849.585.537,00	8.018.462.890,00	90,61	6.929.416.088,00	1.089.046.802,00
Kecamatan Bengkalis	7.556.655.377,00	6.723.031.245,00	88,97	6.725.346.907,00	(2.315.662,00)
Kecamatan Bantan	3.530.825.319,00	3.123.382.461,00	88,46	3.046.174.756,00	77.207.705,00
Kecamatan Bukit Batu	3.968.179.575,00	3.829.369.488,00	96,50	3.494.623.642,00	334.745.846,00
Kecamatan Siak Kecil	3.706.672.466,00	3.583.315.689,00	96,67	3.163.096.911,00	420.218.776,00
Kecamatan Bandar Laksamana	2.714.646.383,00	2.429.866.061,00	89,51	2.192.426.192,00	237.439.869,00
Kecamatan Rupal	5.649.865.757,00	4.994.032.158,00	88,39	4.802.399.200,00	191.632.958,00
Kecamatan Rupal Utara	4.189.599.826,00	3.308.868.300,00	78,98	3.530.250.668,00	(221.382.368,00)
Kecamatan Mandau	12.445.899.060,00	9.985.277.119,00	80,23	11.287.185.874,00	(1.301.908.755,00)
Kecamatan Pinggir	4.950.498.773,00	4.143.143.470,00	83,69	4.021.837.330,00	121.306.140,00
Kecamatan Bathin Solapan	2.712.593.356,00	2.614.103.502,00	96,37	2.378.105.492,00	235.998.010,00
Kecamatan Talang Muandau	2.430.024.562,00	2.068.731.481,00	85,13	1.672.285.852,00	396.445.629,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.667.150.492,00	4.724.725.885,00	83,37	4.576.556.246,00	148.169.639,00
Jumlah	1.130.148.366.379,00	1.052.966.396.064,00	93,17	1.018.335.441.328,20	34.630.954.735,80

2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
1.498.605.866.678,00	1.381.017.141.616,88	92,15	1.097.486.691.596,15	283.530.450.020,73

Realisasi belanja barang dan Jasa selama TA 2022 sebesar Rp1.381.017.141.616,88 atau 92,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.498.605.866.678,00, jika dibandingkan TA 2021 sebesar Rp1.097.486.691.596,15 mengalami kenaikan Rp283.530.450.020,73 atau 25,83%.

Belanja barang dan jasa merupakan pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan/dimanfaatkan kurang dari 12 (dua belas) bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah yang terdiri dari belanja barang habis pakai, bahan material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, biaya cetak, penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan, makanan dan minuman, pakaian dinas dan kelengkapan pakaian dinas serta perjalanan dinas dan lain-lain. Rincian realisasi belanja barang dan jasa sebagai berikut :

Tabel 5.50 Belanja Barang dan Jasa



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Bahan Habis Pakai	218.516.498.183,00	202.570.073.685,00	92,70	172.319.444.112,41	30.250.629.572,59
Belanja Barang Tak Habis Pakai	61.216.000,00	61.175.000,00	99,93	189.058.000,00	(127.883.000,00)
Belanja Jasa Kantor	496.286.765.227,00	467.529.980.189,00	94,21	464.489.590.651,00	3.040.389.538,00
Belanja Premi Asuransi	46.894.625.914,00	43.677.997.179,00	93,14	25.225.920.306,00	18.452.076.873,00
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.456.382.200,00	7.553.360.748,00	79,88	3.805.180.910,00	3.748.179.838,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	11.595.635.000,00	10.228.848.700,00	88,21	5.197.805.794,00	5.031.042.906,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	25.600.000,00	22.000.000,00	85,94	25.650.000,00	(3.650.000,00)
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	233.700.000,00	203.650.000,00	87,14	30.600.000,00	173.050.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	22.117.389.990,00	20.625.697.611,00	93,26	9.906.278.061,60	10.719.419.549,40
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.220.546.300,00	4.504.486.821,00	86,28	1.835.284.660,00	2.669.202.161,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	86.465.000,00	80.265.000,00	92,83	374.140.000,00	(293.875.000,00)
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	505.000.000,00	367.500.000,00	72,77	255.000.000,00	112.500.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan Sosial isasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	24.223.166.000,00	23.056.337.050,00	95,18	12.088.450.000,00	10.967.887.050,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	412.500.000,00	397.960.507,00	96,48	356.664.000,00	41.296.507,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	346.000.000,00	345.451.000,00	99,84	215.985.000,00	129.466.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.439.370.724,00	36.462.244.229,00	90,17	24.497.671.748,00	11.964.572.481,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.935.999.317,00	34.846.724.255,00	96,97	22.484.944.729,14	12.361.779.525,86
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.020.500.000,00	3.010.399.521,00	99,67	7.407.370.190,00	(4.386.970.669,00)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	178.875.000,00	105.490.000,00	58,97	56.280.000,00	49.210.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	279.538.166.241,00	243.970.292.340,00	87,28	158.044.322.928,00	85.925.969.412,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	33.553.713.000,00	26.086.650.997,00	77,75	14.725.149.800,00	11.361.501.197,00
Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	29.763.402.566,00	28.485.390.538,00	95,71	15.120.368.065,00	13.365.022.473,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	81.424.574.001,00	72.366.483.844,00	88,88	64.463.165.184,00	7.903.318.660,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	158.769.776.015,00	154.458.682.402,88	97,28	94.312.367.457,00	60.146.314.945,88
Jumlah	1.498.605.666.678,00	1.381.017.141.616,88	92,15	1.097.486.691.596,15	283.530.450.020,73

Rincian Belanja Barang dan Jasa berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.51 Rincian Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	222.595.293.701,00	204.995.567.451,00	92,09	189.372.487.577,56	15.623.079.873,44
Dinas Kesehatan	156.428.524.434,00	142.681.029.805,00	91,21	126.300.798.496,00	16.380.231.309,00
RSUD Bengkalis	108.691.943.027,00	105.598.591.808,00	97,15	88.786.067.858,00	16.812.523.950,00
RSUD Kecamatan Mandau	121.924.284.112,00	116.833.774.328,88	95,82	90.307.991.998,57	26.525.782.330,31
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.847.967.084,00	47.929.240.010,00	96,15	33.517.154.207,00	14.412.085.803,00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perlindungan	29.428.909.500,00	23.420.191.147,00	79,58	45.526.782.121,00	(22.106.590.974,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.889.010.426,00	11.950.861.091,00	92,72	11.578.545.346,00	372.315.745,00
Dinas Pemadam Kebakaran	15.855.211.056,00	15.555.648.435,00	98,11	14.924.125.377,00	631.523.058,00
Satuan Polisi Pamong Praja	15.440.703.460,00	13.520.024.941,00	87,56	10.552.446.868,00	2.967.578.072,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.791.520.449,00	9.039.339.224,00	92,32	5.348.873.471,20	3.690.466.752,80
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.233.690.519,00	10.588.751.526,00	94,26	5.807.386.068,00	4.781.365.458,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.230.323.951,00	4.120.239.183,00	97,40	5.014.588.810,00	(894.349.627,00)
Dinas Lingkungan Hidup	41.474.165.209,00	40.886.819.583,00	98,58	31.263.148.876,00	9.623.670.707,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.577.487.036,00	15.936.378.632,00	90,66	12.963.922.289,00	2.982.456.343,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33.144.019.220,00	31.908.615.498,00	96,27	24.637.415.635,00	7.271.199.863,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.549.113.648,00	12.814.092.524,00	82,41	6.508.447.758,00	6.305.644.766,00
Dinas Perhubungan	56.635.742.185,00	53.042.160.910,00	93,65	19.342.730.873,27	33.699.430.036,73
Dinas Komunikasi, Informatika dan	10.564.784.226,00	9.836.609.336,00	93,11	6.196.446.161,00	3.640.163.175,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.813.325.849,00	9.104.392.235,00	92,78	7.293.144.281,00	1.811.247.954,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	6.191.116.296,00	5.864.809.505,00	94,73	3.886.542.526,00	1.978.266.979,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	32.253.524.054,00	30.256.573.410,00	93,81	14.658.815.473,00	15.597.757.937,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	6.713.905.786,00	6.577.411.538,00	97,97	4.712.513.641,00	1.864.897.897,00
Dinas Perikanan	12.786.253.058,00	11.746.078.217,00	91,86	7.073.259.804,00	4.672.818.413,00
Dinas Perkebunan	13.432.339.544,00	11.395.808.271,00	84,84	3.935.897.628,00	7.459.910.643,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	14.062.500.447,00	13.276.935.421,00	94,41	11.560.862.015,00	1.716.073.406,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	21.774.790.460,00	20.468.586.214,00	94,00	14.416.017.861,00	6.052.568.353,00
Sekretariat Daerah	129.178.594.459,00	106.008.577.758,00	82,06	80.305.756.767,00	25.702.820.991,00
Sekretariat DPRD	79.403.101.278,00	76.139.730.610,00	95,89	58.132.137.450,00	18.007.593.160,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19.594.181.499,00	16.945.239.788,00	86,48	12.460.105.073,00	4.485.134.715,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	49.426.955.232,00	42.788.793.340,00	86,57	39.793.546.002,00	2.995.247.338,00
Badan Pendapatan Daerah	26.708.213.042,00	24.996.322.771,00	93,59	15.541.568.659,15	9.454.754.111,85
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	13.185.924.273,00	9.129.822.103,00	69,24	7.151.120.760,00	1.978.701.343,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	6.253.669.141,00	5.907.523.580,00	94,46	4.670.927.735,00	1.236.595.845,00
Inspektorat	9.417.745.273,00	8.346.784.208,00	88,63	5.111.204.086,00	3.235.580.122,00
Kecamatan Bengkulu	7.975.870.858,00	7.743.911.598,00	97,09	5.354.525.982,00	2.389.585.636,00
Kecamatan Bantan	4.399.366.093,00	4.359.891.877,00	99,10	3.296.931.405,00	1.062.960.472,00
Kecamatan Bukit Batu	6.074.592.363,00	5.989.046.890,00	98,59	4.052.177.836,00	1.936.869.054,00
Kecamatan Siak Kecil	4.472.243.282,00	4.315.195.982,00	96,49	2.666.950.761,00	1.648.245.221,00
Kecamatan Bandar Laksamana	4.599.718.553,00	4.336.609.655,00	94,28	3.648.916.252,00	687.693.403,00
Kecamatan Rupal	11.317.655.210,00	11.168.159.935,00	98,68	8.068.069.138,00	3.100.090.797,00
Kecamatan Rupal Utara	5.464.789.391,00	5.109.875.010,00	93,51	3.813.000.850,00	1.296.874.160,00
Kecamatan Mandau	33.541.914.626,00	33.221.574.393,00	99,04	23.523.819.545,40	9.697.754.847,60
Kecamatan Pinggir	7.748.836.886,00	7.524.888.774,00	97,11	5.075.803.558,00	2.449.085.216,00
Kecamatan Bathin Solapan	6.542.447.836,00	6.532.642.083,00	99,85	3.985.034.506,00	2.547.607.577,00
Kecamatan Talang Muandau	5.048.476.640,00	4.882.244.432,00	96,71	3.395.795.525,00	1.486.448.907,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.094.777.462,00	4.111.179.334,00	80,69	2.205.158.903,00	1.906.020.431,00
Jumlah	1.498.605.866.678,00	1.381.017.141.616,88	92,15	1.097.486.691.596,15	283.530.540.020,73

3. Belanja Subsidi

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
23.976.650.000,00	23.970.315.000,00	99,97	10.642.584.920,00	13.327.730.080,00

Realisasi belanja subsidi selama TA 2022 adalah sebesar Rp23.970.315.000,00 atau 99,97% dari anggaran sebesar Rp23.976.650.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.327.730.080,00 atau 125,23% dibandingkan realisasi TA 2021 yang berjumlah Rp10.642.584.920,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52 Belanja Subsidi

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00	10.642.584.920,00	1.357.415.080,00
Belanja Subsidi Kepada BUMN	11.976.650.000,00	11.970.315.000,00	99,95	0,00	11.970.315.000,00
Jumlah	23.976.650.000,00	23.970.315.000,00	99,97	10.642.584.920,00	13.327.730.080,00

Pemerintah Kabupaten Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalokasikan dana subsidi kepada Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terbuk Kabupaten Bengkulu untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Mekanisme Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terbuk Kabupaten Bengkulu.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dalam Rangka Mengendalikan Inflasi dan Membantu Meringankan Beban Masyarakat Kurang Mampu/ Rumah Tangga Miskin, Pemerintah Kabupaten Bengkalis Melaksanakan Kegiatan Pasar Murah dalam Bentuk Penyaluran Kebutuhan Pokok Masyarakat yang disubsidi. Penetapan Jumlah Rumah Tangga Penerima Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat, Jenis dan Jumlah Komoditi serta Besaran Harga yang dibayar Perpaket pada Kegiatan Pasar Murah di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022.

4. Belanja Hibah

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
115.220.345.690,00	109.378.573.578,00	94,93	35.834.828.114,59	73.543.745.463,41

Realisasi belanja hibah selama TA 2022 adalah sebesar Rp109.378.573.578,00 atau 94,93% dari anggaran sebesar Rp115.220.345.690,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp73.543.745.463,41 atau 205,23% dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp35.834.828.114,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.53 Belanja Hibah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	113.633.364.690,00	107.791.592.578,00	94,86	34.177.755.114,59	73.613.837.463,41
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.586.981.000,00	1.586.981.000,00	100,00	1.657.073.000,00	(70.092.000,00)
Jumlah	115.220.345.690,00	109.378.573.578,00	94,93	35.834.828.114,59	73.543.745.463,41

Rincian Belanja Hibah berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.54 Rincian Belanja Hibah Berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	17.628.440.000,00	16.333.898.406,00	92,66	9.332.804.951,87	7.001.093.454,13
Dinas Kesehatan	510.000.000,00	496.135.899,00	97,28	428.873.196,00	67.262.703,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.301.551.271,00	18.362.835.501,00	90,45	10.147.920.907,72	8.214.914.593,28
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	29.074.000.000,00	27.266.259.579,00	93,78	0,00	27.266.259.579,00
Dinas Sosial	1.054.042.000,00	1.052.582.220,00	99,86	598.238.272,00	454.343.948,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	24.719.350.000,00	24.628.690.455,00	99,63	6.414.577.277,00	18.214.113.178,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	300.000.000,00
Dinas Perikanan	400.000.000,00	399.251.185,00	99,81	1.099.164.360,00	(699.913.175,00)
Sekretariat Daerah	19.335.981.419,00	18.667.674.333,00	96,49	6.156.176.150,00	12.501.498.183,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.896.981.000,00	1.881.246.000,00	99,17	1.657.073.000,00	224.173.000,00
Jumlah	115.220.345.690,00	109.378.573.578,00	94,93	35.834.828.114,59	73.543.745.463,41

5. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
31.602.848.500,00	31.227.797.850,00	98,81	37.194.371.163,00	(5.966.573.313,00)

Realisasi belanja bantuan sosial selama TA 2022 adalah sebesar Rp31.227.797.850,00 atau 98,81% dari anggaran sebesar Rp31.602.848.500,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp5.966.573.313,00 dari realisasi TA 2021 berjumlah Rp37.194.371.163,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.745.548.500,00	4.420.249.700,00	93,15	6.292.659.161,00	(1.872.409.461,00)
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	24.406.200.000,00	24.366.448.150,00	99,84	29.249.772.002,00	(4.883.323.852,00)
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.351.100.000,00	2.341.100.000,00	99,57	1.626.940.000,00	714.160.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	25.000.000,00	75.000.000,00
Jumlah	31.602.848.500,00	31.227.797.850,00	98,81	37.194.371.163,00	(5.966.573.313,00)

Tabel 5.56 Rincian Belanja Bantuan Sosial Berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	106.400.000,00	106.390.000,00	99,99	0,00	106.390.000,00
Dinas Sosial	31.496.448.500,00	31.121.407.850,00	98,81	37.189.231.163,00	(6.067.823.313,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	640.000,00	(640.000,00)
Kecamatan Mandau	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)
Jumlah	31.602.848.500,00	31.227.797.850,00	98,81	37.194.371.163,00	(5.966.573.313,00)

B. Belanja Modal

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
1.186.441.773.748,00	1.109.714.993.117,00	93,53	679.492.555.913,42	430.222.437.203,58

Realisasi belanja modal TA 2022 sebesar Rp1.109.714.993.117,00 atau 93,53% dari anggaran sebesar Rp1.186.441.773.748,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp430.222.437.203,58 atau 63,32% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp679.492.555.913,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57 Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	412.940.853,70	(412.940.853,70)
Belanja Peralatan dan Mesin	233.963.570.598,00	214.056.580.897,00	91,49	121.410.901.246,66	92.645.679.650,34
Belanja Gedung dan Bangunan	169.666.429.267,00	163.846.016.961,00	96,57	131.209.405.612,36	32.636.611.348,64
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	760.944.518.882,00	720.331.145.069,00	94,66	415.733.389.785,70	304.597.755.283,30
Belanja Aset Tetap Lainnya	20.533.139.800,00	10.867.289.576,00	52,93	10.725.918.415,00	141.371.161,00
Belanja Aset Lainnya	1.334.115.201,00	613.960.614,00	46,02	0,00	613.960.614,00
Jumlah	1.186.441.773.748,00	1.109.714.993.117,00	93,53	679.492.555.913,42	430.222.437.203,58

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Rincian realisasi modal berdasarkan jenis aset tetap dan hak kepemilikannya Tahun Anggaran 2022. Adapun realisasi belanja modal selama TA 2022 dan TA 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja Tanah

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
0,00	0,00	0,00	412.940.853,70	(412.940.853,70)

Realisasi belanja modal tanah selama TA 2022 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp412.940.853,70 atau 100,00% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp412.940.853,70.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
233.963.570.598,00	214.056.580.897,00	91,49	121.410.901.246,66	92.645.679.650,34

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin selama TA 2022 sebesar Rp214.056.580.897,00 atau 91,49% dari anggaran sebesar Rp233.963.570.598,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp92.645.679.650,34 atau 76,31% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp121.410.901.246,66.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp214.056.580.897,00 merupakan belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Modal Alet Besar	19.829.810.000,00	17.303.069.159,00	87,26	9.013.312.173,56	8.289.756.985,44
Belanja Modal Alet Kecil	63.768.889.700,00	57.386.841.100,00	89,99	7.713.261.164,00	49.673.579.936,00
Belanja Modal Alet Ukur	1.261.829.000,00	247.875.155,00	19,64	157.631.700,00	90.243.455,00
Belanja Modal Alet Pertanian	461.136.900,00	449.595.900,00	97,50	416.617.000,00	32.978.900,00
Belanja Modal Alet Kantor dan Rumah Tangga	34.087.444.771,00	32.817.984.809,00	96,28	28.486.579.569,00	4.331.405.240,00
Belanja Modal Alet Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.233.942.000,00	4.473.609.667,00	85,47	3.171.221.200,00	1.302.388.467,00
Belanja Modal Alet Kedokteran dan Kesehatan	59.012.060.962,00	56.318.225.218,00	95,44	36.587.272.011,00	19.730.953.207,00
Belanja Modal Alet Kesehatan	2.594.171.200,00	2.511.780.775,00	96,82	1.089.849.430,00	1.421.931.345,00
Belanja Modal Alet Laboratorium	20.959.177.352,00	20.498.833.735,00	97,80	19.716.295.555,10	782.538.179,90
Belanja Modal Alet Pengadaan Komputer					



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Modal Alat	350.000.000,00	349.650.000,00	99,90	131.246.000,00	218.404.000,00
Eksplorasi					
Belanja Modal Alat	260.000.000,00	259.245.575,00	99,71	44.349.000,00	214.896.575,00
Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian					
Belanja Modal Alat	369.340.000,00	293.825.000,00	79,55	205.417.000,00	88.408.000,00
Bantu Eksplorasi					
Belanja Modal Alat	118.891.000,00	107.700.000,00	90,59	35.690.000,00	72.010.000,00
Keselamatan Kerja					
Belanja Modal Alat	21.418.000,00	21.318.000,00	99,53	206.059.950,00	(184.741.950,00)
Peraga					
Belanja Modal Rambu-	2.421.640.000,00	2.404.616.998,00	99,30	1.951.797.450,00	452.819.548,00
Rambu					
Belanja Modal	380.000.000,00	179.701.674,00	47,29	1.010.435.100,00	(830.733.426,00)
Peralatan Olahraga					
Belanja Modal	10.920.668.000,00	9.995.830.437,00	91,53	10.507.583.201,00	(511.752.764,00)
Peralatan dan Mesin					
BOS					
Belanja Modal	11.913.151.713,00	8.436.877.705,00	70,82	966.283.743,00	7.470.593.962,00
Peralatan dan Mesin					
BLUD					
Jumlah	233.963.570.598,00	214.056.580.897,00	91,49	121.410.901.246,66	92.645.679.650,34

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.59 Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
	a	b	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	19.326.991.000,00	18.626.316.494,00	94,48	19.941.679.506,10	(1.115.361.012,10)
Dinas Kesehatan	19.591.875.405,00	18.463.357.901,00	94,24	13.551.781.495,00	4.911.576.406,00
RSUD Bengkalis	21.484.126.545,00	19.690.443.838,00	91,65	22.261.500.053,56	(2.571.056.215,56)
RSUD Kecamatan	41.649.500.000,00	37.950.366.510,00	91,12	10.699.045.105,00	27.251.321.405,00
Mandau					
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.784.790.000,00	16.062.594.038,00	81,19	4.222.115.400,00	11.840.478.638,00
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	1.191.979.000,00	1.036.694.100,00	86,97	59.160.000,00	977.534.100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.119.536.250,00	1.091.579.150,00	97,50	325.478.000,00	766.101.150,00
Dinas Pemadam Kebakaran	1.243.876.250,00	1.174.003.615,00	94,38	997.953.000,00	176.050.615,00
Satuan Polisi Pamong Praja	33.839.000,00	33.839.000,00	100,00	122.300.000,00	(88.461.000,00)
Dinas Sosial	2.407.451.000,00	2.213.218.660,00	91,93	1.064.190.900,00	1.149.027.760,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	579.963.100,00	563.531.405,00	97,17	147.767.900,00	415.763.505,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	393.274.000,00	389.132.700,00	98,95	232.573.500,00	156.559.200,00
Dinas Ketahanan Pangan	315.825.000,00	315.147.000,00	99,79	163.451.000,00	151.696.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.141.827.000,00	2.129.118.800,00	99,41	916.571.830,00	1.212.546.970,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.319.971.652,00	6.578.087.190,00	89,86	2.042.302.000,00	4.535.785.190,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	435.127.496,00	411.021.400,00	94,46	36.565.400,00	374.456.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	610.165.000,00	575.429.905,00	94,31	330.203.000,00	245.226.905,00
Dinas Perhubungan	10.086.201.000,00	9.730.714.882,00	96,48	3.895.053.750,00	5.835.661.132,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan	503.314.000,00	489.815.600,00	97,32	1.226.312.400,00	(736.496.800,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	346.127.000,00	343.282.476,00	99,18	426.300.000,00	(83.017.524,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	251.802.000,00	251.369.000,00	99,83	192.269.000,00	59.100.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.738.157.000,00	1.533.539.795,00	88,23	1.551.944.200,00	(18.404.405,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	11.155.000,00	11.155.000,00	100,00	685.646.000,00	(674.491.000,00)
Dinas Perikanan	1.913.112.000,00	1.885.994.000,00	98,58	437.201.500,00	1.448.792.500,00
Dinas Perkebunan	1.236.160.400,00	1.069.084.900,00	86,48	1.380.632.400,00	(311.547.500,00)
Dinas Tanaman dan Peternakan	2.209.962.900,00	2.031.879.250,00	91,94	1.225.707.000,00	806.172.250,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	883.631.000,00	879.408.800,00	99,52	1.060.635.350,00	(181.226.550,00)
Sekretariat Daerah	10.506.495.800,00	9.622.704.730,00	91,59	7.964.461.400,00	1.658.243.330,00
Sekretariat DPRD	1.342.729.000,00	1.322.289.470,00	98,48	4.029.884.975,00	(2.707.595.505,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.791.973.000,00	1.745.367.200,00	97,40	1.845.582.800,00	(100.215.600,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	48.089.331.000,00	43.460.237.500,00	90,37	9.235.859.000,00	34.224.378.500,00
Badan Pendapatan Daerah	2.690.463.000,00	2.653.743.803,00	98,64	1.894.576.720,00	759.167.083,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	938.542.800,00	837.033.000,00	89,18	280.117.200,00	556.915.800,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	180.984.000,00	180.288.000,00	99,62	309.050.000,00	(128.762.000,00)
Inspektorat	1.070.457.000,00	776.088.600,00	72,50	616.205.000,00	159.883.600,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Bengkalis	461.354.000,00	455.924.700,00	98,82	44.423.800,00	411.500.900,00
Kecamatan Bantan	201.608.000,00	199.424.000,00	98,92	176.266.000,00	23.158.000,00
Kecamatan Bukit Batu	437.458.000,00	432.949.400,00	98,97	442.077.900,00	(9.128.500,00)
Kecamatan Siak Kecil	153.688.900,00	142.035.900,00	92,42	171.438.300,00	(29.402.400,00)
Kecamatan Bandar Laksamana	835.373.500,00	833.994.100,00	99,83	840.141.262,00	(6.147.162,00)
Kecamatan Rupat	1.269.406.300,00	1.267.274.750,00	99,83	743.760.400,00	523.514.350,00
Kecamatan Rupat Ujung	280.920.000,00	271.188.000,00	96,54	275.605.000,00	(4.417.000,00)
Kecamatan Mandau	2.292.981.300,00	2.135.593.145,00	93,14	2.176.267.500,00	(40.674.355,00)
Kecamatan Pinggir	373.316.000,00	372.774.000,00	99,85	93.848.000,00	278.926.000,00
Kecamatan Bathin	949.342.000,00	940.375.100,00	99,06	670.311.900,00	270.063.200,00
Kecamatan Talang	558.423.000,00	554.267.000,00	99,26	359.349.400,00	194.917.600,00
Kecamatan Muandau	128.984.000,00	122.901.090,00	95,28	45.335.000,00	77.566.090,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
Jumlah	233.963.570.598,00	214.056.580.897,00	91,49	121.410.901.246,66	92.645.679.650,34

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
169.666.429.267,00	163.846.016.961,00	96,57	131.209.405.612,36	32.636.611.348,64

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan selama TA 2022 sebesar Rp163.846.016.961,00 atau 96,57% dari anggaran sebesar Rp169.666.429.267,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp32.636.611.348,64 atau 24,87% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp131.209.405.612,36.

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp163.846.016.961,00 merupakan belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja modal					
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	159.889.141.392,00	154.232.157.497,00	96,46	117.275.395.942,64	36.956.761.554,36
Belanja modal					
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.539.121.920,00	1.515.515.663,00	98,47	4.601.227.462,67	(3.085.711.799,67)
Belanja modal					
Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasir	6.963.526.955,00	6.952.195.684,00	99,84	7.749.712.207,05	(797.516.523,05)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.274.639.000,00	1.146.148.117,00	89,92	1.583.070.000,00	(436.921.883,00)
Jumlah	169.666.429.267,00	163.846.016.961,00	96,57	131.209.405.612,36	32.636.611.348,64

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.61 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	63.214.885.774,00	61.651.495.136,00	97,53	47.937.730.125,83	13.713.765.010,17
Dinas Kesehatan	33.551.290.771,00	32.109.360.218,00	95,70	15.535.364.481,01	16.573.995.736,99
RSUD Bengkalis	871.637.000,00	744.132.000,00	85,37	5.329.656.804,85	(4.585.524.804,85)
RSUD Kecamatan Mandau	600.000.000,00	598.696.117,00	99,78	1.644.787.612,09	(1.046.091.495,09)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.529.330.138,00	14.279.168.948,00	98,28	26.895.036.459,35	(12.615.867.511,35)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	574.860.000,00	566.824.000,00	98,60	783.071.800,00	(216.247.800,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	400.000.000,00	398.773.160,00	99,69	207.546.940,00	191.226.220,00
Dinas Pemadam Kebakaran	50.821.150,00	50.703.769,00	99,77	470.426.500,00	(419.722.731,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	1.489.500.500,00	1.481.852.145,00	99,49	1.257.076.090,00	224.776.055,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	283.650.000,00	280.482.313,00	98,88	796.206.766,16	(515.724.453,16)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	349.201.000,00	340.136.270,00	97,40	459.327.000,00	(119.190.730,00)
Dinas Lingkungan Hidup	461.140.000,00	456.596.550,00	99,01	204.693.000,00	251.903.550,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	455.500.000,00	440.088.416,00	96,62	1.391.635.000,00	(951.546.584,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.229.500.000,00	3.189.800.340,00	98,77	3.366.451.414,00	(176.651.074,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	762.030.000,00	750.434.996,00	98,48	998.737.826,00	(248.302.830,00)
Dinas Perhubungan	19.265.497.284,00	17.635.133.752,00	91,54	2.096.597.213,55	15.538.536.538,45
Dinas Komunikasi, Informatika dan	300.000.000,00	299.434.000,00	99,81	0,00	299.434.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	1.192.000.000,00	1.167.482.800,00	97,94	109.772.000,00	1.057.710.800,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	4.903.500.000,00	4.791.801.436,00	97,72	2.876.878.760,00	1.914.922.676,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	0,00	0,00	0,00	891.266.160,22	(891.266.160,22)
Dinas Perikanan	1.199.000.000,00	1.196.782.973,00	99,82	476.961.000,00	719.821.973,00
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	995.000.000,00	989.676.852,00	99,47	1.448.151.239,00	(458.474.387,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.569.400.000,00	3.523.487.308,00	98,71	7.022.319.633,13	(3.498.832.325,13)
Sekretariat Daerah	855.000.000,00	827.916.000,00	96,83	1.741.388.000,00	(913.472.000,00)
Sekretariat DPRD	1.226.000.000,00	1.222.667.355,00	99,73	1.314.147.134,80	(91.479.779,80)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.150.000.000,00	2.144.420.614,00	99,74	2.006.260.600,00	138.160.014,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.719.400.000,00	2.380.902.812,00	87,55	0,00	2.380.902.812,00
Badan Pendapatan Daerah	735.000.000,00	733.460.900,00	99,79	284.608.609,41	448.852.290,59
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	315.650.000,00	305.845.227,00	96,89	128.312.000,00	177.533.227,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	600.000.000,00	597.767.175,00	99,63	821.707.000,00	(223.939.825,00)
Inspektoriat	469.000.000,00	465.989.000,00	99,36	0,00	465.989.000,00
Kecamatan Bengkalis	500.000.000,00	495.544.000,00	99,11	494.989.400,00	554.600,00
Kecamatan Bantan	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	208.322.732,00	(188.822.732,00)
Kecamatan Bukit Batu	703.700.000,00	702.110.415,00	99,77	144.277.000,00	557.833.415,00
Kecamatan Siak Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bandar Laksamana	1.590.000.000,00	1.543.551.930,00	97,08	370.586.110,64	1.172.965.819,36
Kecamatan Rupat	520.160.650,00	519.575.600,00	99,89	511.699.500,00	7.876.100,00
Kecamatan Rupat Utara	300.000.000,00	299.236.000,00	99,75	85.950.000,00	213.286.000,00
Kecamatan Mandau	699.275.000,00	694.935.879,00	99,38	872.548.700,32	(177.612.821,32)
Kecamatan Pinnang	954.000.000,00	953.675.857,00	99,97	0,00	953.675.857,00
Kecamatan Bathin	1.570.000.000,00	1.545.608.167,00	98,45	0,00	1.545.608.167,00
Kecamatan Solapan	1.492.000.000,00	1.450.966.531,00	97,25	0,00	1.450.966.531,00
Kecamatan Muandau	0,00	0,00	0,00	24.915.000,00	(24.915.000,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	169.666.429.267,00	163.846.016.961,00	96,57	131.209.405.612,36	32.636.611.348,64

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
760.944.518.882,00	720.331.145.069,00	94,66	415.733.389.785,70	304.597.755.283,30

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan Jaringan selama TA 2022 sebesar Rp720.331.145.069,00 atau 94,66% dari anggaran sebesar Rp760.944.518.882,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp304.597.755.283,30 atau 73,27% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp415.733.389.785,70 .

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp720.331.145.069,00 merupakan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja modal					
Pengadaan Jalan	568.041.114.178,00	540.217.825.580,00	95,10	310.137.253.416,94	230.080.572.163,06
Belanja Modal	17.952.347.071,00	13.611.866.586,00	75,82	2.662.314.063,00	10.949.552.523,00
Jembalan					
Belanja modal					
Pengadaan Bangunan	10.671.778.095,00	10.604.018.023,00	99,37	6.486.552.331,74	4.117.465.691,26
Air Irigasi					
Belanja Modal	21.972.724.420,00	21.794.342.933,00	99,19	9.080.444.402,93	12.713.898.530,07
Bangunan Pengairan					
Pasang Sump					
Belanja modal					
Pengadaan Bangunan	21.366.823.593,00	20.128.512.964,00	94,20	14.407.400.698,80	5.721.112.265,20
Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam					
Belanja Modal					
Bangunan					
Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	1.670.560.759,00	1.474.720.551,00	88,28	0,00	1.474.720.551,00
Belanja modal					
Pengadaan Bangunan	617.561.900,00	616.515.230,00	99,83	358.243.892,96	258.271.337,04
Air Bersih Baku					
Belanja modal					
Pengadaan Bangunan	65.728.351.980,00	59.232.843.021,00	90,12	24.657.925.233,05	34.574.917.787,95
Air Kotor					



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	28.547.688.000,00	28.547.688.000,00	100,00	21.733.223.637,45	6.814.464.362,55
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.468.660.000,00	1.468.260.000,00	99,97	992.228.845,00	476.031.155,00
Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	395.664.000,00	(395.664.000,00)
Belanja Modal Jaringan Air Minum	17.196.095.858,00	17.096.400.621,00	99,42	18.012.199.825,74	(915.799.204,74)
Belanja Modal Jaringan Listrik	5.402.163.028,00	5.331.515.495,00	98,69	5.936.255.938,09	(604.740.443,09)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	200.000.000,00	98.873.416,00	49,44	873.683.500,00	(774.810.084,00)
Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	108.650.000,00	107.762.649,00	99,18	0,00	107.762.649,00
Jumlah	760.944.518.882,00	720.331.145.069,00	94,66	415.733.389.785,70	304.597.755.283,30

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.63 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	288.259.902,00	288.259.902,00	100,00	0,00	288.259.902,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD Bengkulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RSUD Kecamatan Mandau	350.000.000,00	248.756.416,00	71,07	873.683.500,00	(624.927.084,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	588.135.829.692,00	552.974.105.302,00	94,02	287.668.463.551,75	265.305.641.750,25
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	129.823.554.448,00	125.354.893.356,00	96,56	109.499.050.863,20	15.855.842.492,80
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	384.000.000,00	382.028.313,00	99,49	221.004.785,00	161.023.528,00
Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	69.571.000,00	(69.571.000,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	179.814.892,96	(179.814.892,96)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	58.450.000,00	58.446.384,00	99,99	0,00	58.446.384,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.025.660.000,00	2.024.597.000,00	99,95	774.619.000,00	1.249.978.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	227.634.000,00	(227.634.000,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	38.250.000,00	38.249.000,00	100,00	0,00	38.249.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	4.111.000.000,00	4.035.047.954,00	98,15	3.198.052.671,17	836.995.282,83
Dinas Komunikasi, Informatika dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	25.000.000,00	24.000.000,00	96,00	0,00	24.000.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu PINTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	674.189.000,00	(674.189.000,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	1.462.000.000,00	1.452.356.169,00	99,34	646.600.000,00	805.756.169,00
Dinas Perkebunan	14.441.900.000,00	14.184.222.039,00	98,22	3.444.191.685,71	10.740.030.353,29
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan	8.824.058.000,00	8.614.071.903,00	97,62	4.770.487.993,00	3.843.583.910,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	696.297.731,66	(696.297.731,66)
Sekretariat Daerah	1.188.650.000,00	944.262.000,00	79,44	337.238.000,00	607.024.000,00
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	166.914.000,00	(166.914.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	150.000.000,00	130.591.500,00	87,06	0,00	130.591.500,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	199.290.000,00	(199.290.000,00)
Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bengkulu	1.735.801.260,00	1.726.853.030,00	99,48	414.146.000,00	1.312.707.030,00
Kecamatan Bantan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bukit Batu	438.299.000,00	436.633.593,00	99,62	28.235.000,00	408.398.593,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Siak Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Bandar Laksamana	48.000.000,00	47.950.000,00	99,90	0,00	47.950.000,00
Kecamatan Rupat	2.547.625.000,00	2.540.329.000,00	99,71	521.793.000,00	2.018.536.000,00
Kecamatan Rupat Utara	207.119.000,00	206.617.000,00	99,76	0,00	206.617.000,00
Kecamatan Mandau	3.322.123.000,00	3.282.195.948,00	98,80	928.013.111,25	2.354.182.836,75
Kecamatan Pinggir	1.174.700.000,00	1.172.798.860,00	99,84	185.350.000,00	987.448.860,00
Kecamatan Bathin Solapan	164.239.580,00	163.880.400,00	99,78	8.750.000,00	155.130.400,00
Kecamatan Talang Muandau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	760.944.518.882,00	720.331.145.069,00	94,66	415.733.389.785,70	304.597.755.283,30

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
20.533.139.800,00	10.867.289.576,00	52,93	10.725.918.415,00	141.371.161,00

Realisasi belanja modal Aset tetap lainnya selama TA 2022 sebesar Rp10.867.289.576,00 atau 52,93% dari anggaran sebesar Rp20.533.139.800,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp141.371.161,00 atau 1,32% dari realisasi TA 2021 sebesar Rp10.725.918.415,00.

Realisasi belanja modal Aset tetap lainnya sebesar Rp10.867.289.576,00 merupakan belanja modal Aset Tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64 Belanja Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Modal Bahan Perustakaan Tercekap	289.200.000,00	278.630.000,00	96,35	233.402.265,00	45.227.735,00
Belanja Modal Bahan Perustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	66.500.000,00	65.385.500,00	98,32	10.450.000,00	54.935.500,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	35.741.800,00	25.241.800,00	70,62	1.022.809.800,00	(987.068.000,00)
Belanja Modal Alat Bercorak kebudayaan	1.146.890.000,00	1.119.076.328,00	97,57	1.041.769.700,00	77.306.628,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.934.500.000,00	1.897.101.907,00	98,07	279.100.000,00	1.618.001.907,00
Belanja Modal Aset tetap lainnya Dana BOS	17.060.308.000,00	7.481.854.041,00	43,86	8.138.386.650,00	(656.532.609,00)
Jumlah	20.533.139.800,00	10.867.289.576,00	52,93	10.725.918.415,00	141.371.161,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.65 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaiikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Pendidikan	17.147.588.000,00	7.559.537.541,00	44,09	8.521.246.450,00	(961.708.909,00)
Dinas Kesehatan	30.000.000,00	29.803.500,00	99,35	19.000.000,00	10.803.500,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	500.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	41.636.700,00	(41.636.700,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	120.000.000,00	119.650.000,00	99,71	0,00	119.650.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	280.000.000,00	271.750.000,00	97,05	153.163.265,00	118.586.735,00
Dinas Perhubungan	1.400.000.000,00	1.392.642.907,00	99,47	0,00	1.392.642.907,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	831.000.000,00	803.471.328,00	96,69	625.387.200,00	178.084.128,00
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	6.475.000,00	(6.475.000,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	73.450.000,00	(73.450.000,00)
Sekretariat Daerah	457.490.000,00	456.032.500,00	99,68	780.143.000,00	(324.110.500,00)
Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	83.100.000,00	(83.100.000,00)
Badan pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	99.500.000,00	(99.500.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000,00	195.360.000,00	97,68	0,00	195.360.000,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	20.700.000,00	5.500.000,00	26,57	0,00	5.500.000,00
Kecamatan Bengkalis	20.741.800,00	10.241.800,00	49,38	241.800,00	10.000.000,00
Kecamatan Bukit Batu	0,00	0,00	0,00	37.567.000,00	(37.567.000,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kecamatan Mandaue	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bandar Laksamana	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	900.000,00	400.000,00
Kecamatan Rupat	0,00	0,00	0,00	282.600.000,00	(282.600.000,00)
Kecamatan Pinggir	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00	0,00	21.500.000,00
Kecamatan Talang Muandau	0,00	0,00	0,00	1.508.000,00	(1.508.000,00)
Jumlah	20.533.139.800,00	10.867.289.576,00	52,93	10.725.918.415,00	141.371.161,00

6. Belanja Aset Lainnya

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
1.334.115.201,00	613.960.614,00	46,02	0,00	613.960.614,00

Realisasi belanja modal Aset lainnya pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp613.960.614,00 atau 46,02% dari anggaran sebesar Rp1.334.115.201,00 mengalami kenaikan sebesar Rp613.960.614,00 dari Tahun Anggaran 2021.

C. Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
15.939.026.526,00	0,00	0,00	9.655.040,00	(9.655.040,00)

Realisasi Belanja Tidak Terduga selama TA 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggarannya sebesar Rp15.939.026.526,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.655.040,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp9.655.040,00.

5.1.3. Transfer

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
516.003.331.132,00	508.249.776.726,00	98,50	413.964.685.122,00	94.285.091.604,00

Realisasi Transfer Kabupaten Bengkulu Selatan tahun selama 2022 adalah sebesar Rp508.249.776.726,00 atau 98,50% dari nilai anggaran sebesar Rp516.003.331.132,00. Jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp413.964.685.122,00 mengalami kenaikan sebesar Rp94.285.091.604,00 atau 22,78% dengan rincian

Tabel 5.66 Transfer

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	11.024.107.132,00	11.024.106.888,00	100,00	11.265.978.968,00	(241.872.080,00)
Transfer Bantuan Keuangan	504.979.224.000,00	497.225.669.838,00	98,46	402.698.706.154,00	94.526.963.684,00
Jumlah	516.003.331.132,00	508.249.776.726,00	98,50	413.964.685.122,00	94.285.091.604,00

A. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
11.024.107.132,00	11.024.106.888,00	100,00	11.265.978.968,00	(241.872.080,00)

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan selama TA 2022 adalah sebesar Rp11.024.106.888,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp11.024.107.132,00 mengalami penurunan sebesar Rp241.872.080,00 atau 2,15% dibandingkan realisasi TA 2021 yang berjumlah Rp11.265.978.968,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	8.925.200.000,00	8.925.199.999,00	100,00	9.306.096.195,00	(380.896.196,00)
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.098.907.132,00	2.098.906.889,00	100,00	1.959.882.773,00	139.024.116,00
Jumlah	11.024.107.132,00	11.024.106.888,00	100,00	11.265.978.968,00	(241.872.080,00)

Transfer Bagi hasil pajak daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 60 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bengkulu Nomor 15 Tahun 2022 tentang pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022.

B. Transfer Bantuan Keuangan

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
504.979.224.000,00	497.225.669.838,00	98,46	402.698.706.154,00	94.526.963.684,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan selama TA 2022 adalah sebesar Rp497.225.669.838,00 atau 98,46% dari anggaran sebesar Rp504.979.224.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp94.526.963.684,00 atau 23,47% dibandingkan realisasi TA 2021 yang berjumlah Rp402.698.706.154,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68 Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	368.479.224.000,00	366.845.112.480,00	99,56	375.634.217.396,00	(8.789.104.916,00)
kepada Desa					
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	136.500.000.000,00	130.380.557.358,00	95,52	27.064.488.758,00	103.316.068.600,00
kepada Desa					
Jumlah	504.979.224.000,00	497.225.669.838,00	98,46	402.698.706.154,00	94.526.963.684,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - ADD Se-Kabupaten Bengkulu Selatan terealisasi sebesar Rp366.845.112.480,00 berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022.

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp130.380.557.358,00 berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 163/KPTS/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Program Desa Bermasalah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2022.

5.1.4. Surplus (Defisit)

Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
(1.169.959.349.062,00)	(887.110.506.098,58)	75,82	1.028.947.775.256,36	(1.916.058.281.354,94)

Jumlah Surplus (Defisit) sebesar Rp887.110.506.098,58 tersebut merupakan defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun Anggaran 2022 dimana jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan lebih kecil dari jumlah belanja daerah dan transfer. Total realisasi pendapatan daerah TA 2022 sebesar Rp3.329.414.487.853,30 sementara total realisasi belanja daerah dan transfer TA 2022 sebesar Rp4.216.524.993.951,88.

5.1.5. Pembiayaan

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
1.179.959.349.062,00	1.180.379.182.064,91	100,04	151.011.573.806,55	1.029.367.608.258,36

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan selama TA 2022 sebesar Rp1.180.379.182.064,91 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLIPA) tahun lalu atau akhir tahun 2021 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

Tabel 5.69 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Penggunaan SLIPA Tahun Lalu	1.179.959.349.062,00	1.179.959.349.062,91	100,00	151.011.573.806,55	1.028.947.775.256,36
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	419.833.002,00	0,00	0,00	419.833.002,00
Jumlah	1.179.959.349.062,00	1.180.379.182.064,91	100,04	151.011.573.806,55	1.029.367.608.258,36

Tabel 5.70 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman berdasarkan OPD

OPD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	26.363.633,00	0,00	0,00	26.363.633,00
Dinas Perikanan	0,00	1.090.908,00	0,00	0,00	1.090.908,00
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	0,00	332.378.461,00	0,00	0,00	332.378.461,00
Jumlah	0,00	419.833.002,00	0,00	0,00	419.833.002,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp419.833.002,00 merupakan pengembalian pokok atas Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan selama TA 2022 adalah sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.71 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.6. SILPA

Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c=b/a	d	e=b-d
0,00	293.268.675.966,33	0,00	1.179.959.349.062,91	(886.690.673.096,58)

Jumlah SILPA sebesar Rp293.268.675.966,33 tersebut merupakan selisih lebih anggaran untuk tahun Anggaran 2022 dimana jumlah pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan secara keseluruhan lebih besar dari jumlah belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan. Total realisasi penerimaan TA 2022 sebesar Rp4.509.793.669.918,21 sementara total realisasi pengeluaran TA 2022 sebesar Rp4.216.524.993.951,88.

Tabel 5.72 SILPA

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
a	b	c	d=c/b	e	f=c-e
Pendapatan Daerah	3.347.978.859.591,00	3.329.414.487.853,30	99,45	4.321.908.588.453,72	(992.494.100.600,42)
Belanja dan Transfer Daerah	4.517.938.208.653,00	4.216.524.993.951,88	93,33	3.292.960.813.197,36	923.564.180.754,52
Surplus/ (Defisit): 1-2	(1.169.959.349.062,00)	(887.110.506.098,58)	75,82	1.028.947.775.256,36	(1.916.058.281.354,94)
Penerimaan Pembiayaan	1.179.959.349.062,00	1.180.379.182.064,91	100,04	151.011.573.806,55	1.029.367.608.258,36
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto : 4-5	1.169.959.349.062,00	1.180.379.182.064,91	100,89	151.011.573.806,55	1.029.367.608.258,36
SILPA (SIKPA) 3+6	0,00	293.268.675.966,33	0,00	1.179.959.349.062,91	(886.690.673.096,58)

Jumlah SILPA selama TA 2022 sebesar Rp293.268.675.966,33 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp886.690.673.096,58 atau 75,15% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.179.959.349.062,91. Realisasi SILPA tahun 2022 sebesar 24,85 dibandingkan dengan SILPA 2021 dapat dirincikan sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Kas di BUD	277.994.694.649,52	1.168.554.249.066,37	420,35
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.540.999.407,00	1.581.400,00	0,04
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	6.308,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	1.179.559,00	1.758.070,00	149,04
Kas di Bendahara BLUD	11.452.247.027,66	11.349.091.889,54	99,10
Kas di Bendahara BOS	21.048.100,00	52.662.329,00	250,20
Kas Lainnya	258.507.223,15	0,00	0,00
Jumlah	293.268.675.966,33	1.179.959.349.062,91	24,85

Dari Tabel diatas dapat juga dijelaskan bahwa kas di BUD masih terdapat sisa dana DAK sebesar Rp13.848.012.989,00 yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp5.150.267.708,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp8.697.745.281,00

Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan sudah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2023.

Terdapat sisa dana pada Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp11.452.247.027,66 dan Kas di Bendahara BOS sebesar Rp21.048.100,00 yang bersifat terikat.

Sedangkan Kas lainnya merupakan dana yang berada di bendahara SKPD pada tahun-tahun sebelumnya yakni pada Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp257.698.265,00 merupakan dana investasi non permanen dan pada bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan sebesar Rp808.958,15 merupakan dana kegiatan hibah, dan telah disetor ke Kas Daerah pada tahun 2023.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4. PENJELASAN POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan laporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit-LO Kabupaten Bengkalis.

5.4.1. Pendapatan - LO

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
3.497.177.060.292,47	2.948.007.230.812,48	549.169.829.479,99

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Bengkalis sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp3.497.177.060.292,47 dan tahun 2021 sebesar Rp2.948.007.230.812,48 telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.172 Realisasi Pendapatan LO

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	337.901.425.973,30	309.000.920.742,05	28.900.505.231,25
Pendapatan Transfer	3.108.364.057.380,00	2.546.731.688.130,00	561.632.369.250,00
Lain-lain Pendapatan yang sah	50.911.576.939,17	92.274.621.940,43	(41.363.045.001,26)
Jumlah	3.497.177.060.292,47	2.948.007.230.812,48	549.169.829.479,99

5.4.1.A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
337.901.425.973,30	309.000.920.742,05	28.900.505.231,25

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional sampai dengan 31 Desember untuk periode Tahun Anggaran 2022. Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp337.901.425.973,30 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.173 Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Pajak Daerah	99.514.522.267,14	90.021.270.953,33	9.493.251.313,81
Pendapatan Retribusi Daerah	12.355.100.054,00	10.399.361.138,00	1.955.738.916,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pendapatan Hasil			
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang			
Dipisahkan			
Lain-lain PAD yang Sah	198.720.009.072,16	175.288.078.681,72	23.431.930.390,44
Jumlah	337.901.425.973,30	309.000.920.742,05	28.900.505.231,25

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci dan di jelaskan sebagai berikut :

5.4.1.A.1 Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
99.514.522.267,14	90.021.270.953,33	9.493.251.313,81

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2022 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (OPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (OPDKB) yang ditetapkan tahun 2022.

Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.174 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Pajak Hotel	3.435.634.577,14	2.452.029.349,00	983.605.228,14
Pajak Restoran	15.062.067.269,00	11.206.353.269,00	3.855.714.000,00
Pajak Hiburan	1.631.703.647,00	488.053.480,00	1.143.650.167,00
Pajak Reklame	1.119.086.882,00	626.270.708,33	492.816.173,67
Pajak Penerangan Jalan PLN	26.560.888.150,00	21.135.785.611,00	5.425.102.539,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	6.186.068.440,00	16.219.058.821,00	(10.032.990.381,00)
Pajak Parkir	386.354.005,00	312.335.167,00	74.018.838,00
Pajak Air Tanah	1.111.330.286,00	700.493.288,00	410.836.998,00
Pajak Sarang Burung Walet	567.110.748,00	496.653.239,00	70.457.509,00
Pajak Bahan Galian Golongan "C" (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	6.924.910.650,00	4.178.288.650,00	2.746.622.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	30.364.315.980,00	27.896.861.520,00	2.467.454.460,00
Pajak BPHTB	6.165.051.633,00	4.309.087.851,00	1.855.963.782,00
Jumlah	<b align="right">99.514.522.267,14	<b align="right">90.021.270.953,33	<b align="right">9.493.251.313,81



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.175 Selisih Realisasi LRA dan LO Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Pajak Hotel	3.622.970.810,00	3.435.634.577,14	187.336.232,86
			Pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp 187.336.232,86 pada Dinas bapenda
Pajak Restoran	15.094.975.589,00	15.062.067.269,00	32.908.320,00
			Pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp 32.908.320,00 pada Dinas bapenda
Pajak Hiburan	1.631.703.647,00	1.631.703.647,00	0,00
Pajak Reklame	1.302.150.406,00	1.119.086.882,00	183.063.524,00
			Pendapatan diterima dimuka tahun sebelumnya sebesar Rp183.063.524,00 pada dinas Bapenda
			Pendapatan diterima dimuka tahun berjalan (2022) sebesar Rp436.039.965,67 pada Bapenda
			pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp (94.359.300) pada Dinas bapenda
			Piutang Tahun 2021 sebesar Rp 42.125.900,00 pada Bapenda
Pajak Penerangan Jalan PLN dan Non PLN	32.856.985.614,00	32.746.956.590,00	110.029.024,00
			Pembayaran piutang tahun sebelumnya pada Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp 110.029.024,00
Pajak Parkir	386.354.005,00	386.354.005,00	0,00
Pajak Air Tanah	1.304.374.066,00	1.111.330.286,00	193.043.780,00
			pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp (202.822.110,00) pada Dinas bapenda
			Penambahan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp 9.778.330,00 pada Bapenda



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pajak Sarang Burung Walet	567.110.748,00	567.110.748,00	0,00
Pajak Bahan Galian Golongan "C" (Mineral Bukan Logam dan Batuan)	6.924.910.650,00	6.924.910.650,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	24.357.060.959,00	30.364.315.980,00	(6.007.255.021,00)
			Penerimaan Pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp(2.385.229.534,00)
			Penerimaan Pembayaran atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp7.605.118.228,00
Pajak BPHTB-Pemindahan Hak	6.165.051.633,00	6.165.051.633,00	0,00
Jumlah	94.213.648.127,00	99.514.522.267,14	(5.300.874.140,14)

5.4.1.A.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
12.355.100.054,00	10.399.361.138,00	1.955.738.916,00

Masing – masing realisasi pendapatan retribusi pada pendapatan LO tahun 2022 menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut.

Retribusi Jasa Umum

Tabel 5.176 Rincian Realisasi Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.317.525.000,00	1.137.056.000,00	180.469.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.156.500.000,00	627.250.000,00	529.250.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	519.835.000,00	222.380.000,00	297.455.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.419.738.500,00	1.448.109.500,00	(28.371.000,00)
Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	44.276.000,00	38.627.500,00	5.648.500,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	598.740.000,00	551.193.000,00	47.547.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	557.204.700,00	(557.204.700,00)
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	180.883.000,00	168.056.000,00	12.827.000,00
Jumlah	5.237.497.500,00	4.749.876.700,00	487.620.800,00

Retribusi Jasa Usaha

Tabel 5.177 Rincian Realisasi Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	423.950.000,00	349.035.000,00	74.915.000,00
Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	177.370.000,00	301.382.000,00	(124.012.000,00)
Retribusi Terminal	8.021.000,00	7.899.000,00	122.000,00
Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan /Villa	239.185.000,00	148.340.000,00	90.845.000,00
Retribusi Tempat/Rumah Potong Hewan	11.080.000,00	11.915.000,00	(835.000,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	171.274.000,00	9.150.000,00	162.124.000,00
Retribusi Jasa Kepelabuhanan	4.226.348.573,00	3.635.104.163,00	591.244.410,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	97.924.000,00	0,00	97.924.000,00
Jumlah	5.355.152.573,00	4.462.825.163,00	892.327.410,00

Retribusi Perizinan Tertentu

Tabel 5.178 Rincian Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.460.627.381,00	1.008.819.275,00	451.808.106,00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO)	0,00	0,00	0,00
Retribusi Izin Trayek/Kartu Pengawasan (KP)	0,00	0,00	0,00
Retribusi izin Usaha Perikanan	301.822.600,00	177.840.000,00	123.982.600,00
Jumlah	1.762.449.981,00	1.186.659.275,00	575.790.706,00

Realisasi akun pendapatan retribusi per OPD dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

a) Sekretariat Daerah

Tabel 5.179 Realisasi Pendapatan Retribusi Sekretariat Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	138.210.000,00	96.715.000,00	41.495.000,00
Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan /Villa	230.175.000,00	139.075.000,00	91.100.000,00
Jumlah	368.385.000,00	235.790.000,00	132.595.000,00

b) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tabel 5.180 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	598.740.000,00	551.193.000,00	47.547.000,00
Jumlah	598.740.000,00	551.193.000,00	47.547.000,00

c) Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 5.181 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Kelautan dan Perikanan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi izin Usaha Perikanan	301.822.600,00	177.840.000,00	123.982.600,00
Jumlah	301.822.600,00	177.840.000,00	123.982.600,00

d) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 5.182 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Tempat Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	171.274.000,00	9.150.000,00	162.124.000,00
Jumlah	171.274.000,00	9.150.000,00	162.124.000,00

e) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 5.183 Realisasi Pendapatan Retribusi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	19.500.000,00	3.000.000,00	16.500.000,00
Retribusi Tempat Penginapan /Pesangrahan /Villa	9.010.000,00	9.265.000,00	(255.000,00)
Jumlah	28.510.000,00	12.265.000,00	16.245.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

f) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 5.184 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	519.835.000,00	222.380.000,00	297.455.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	180.883.000,00	168.056.000,00	12.827.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	177.370.000,00	301.382.000,00	(124.012.000,00)
Jumlah	878.088.000,00	691.818.000,00	186.270.000,00

g) Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 5.185 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Lingkungan Hidup

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.317.525.000,00	1.137.056.000,00	180.469.000,00
Jumlah	1.317.525.000,00	1.137.056.000,00	180.469.000,00

h) Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertenakan

Tabel 5.186 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertenakan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	11.080.000,00	11.915.000,00	(835.000,00)
Jumlah	11.080.000,00	11.915.000,00	(835.000,00)

i) Dinas Perhubungan

Tabel 5.187 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Perhubungan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.156.500.000,00	627.250.000,00	529.250.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.419.738.500,00	1.448.109.500,00	(28.371.000,00)
Retribusi Terminal	8.021.000,00	7.899.000,00	122.000,00
Retribusi Jasa Kepelabuhanan	4.226.348.573,00	3.635.104.163,00	591.244.410,00
Retribusi Izin Trayek/Kartu Pengawasan (KP)	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.810.608.073,00	5.718.362.663,00	1.092.245.410,00

j) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 5.188 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
--------	----------------	----------------	----------------------



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	265.640.000,00	249.320.000,00	16.320.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.460.627.381,00	1.008.819.275,00	451.808.106,00
Jumlah	1.726.267.381,00	1.258.139.275,00	468.128.106,00

k) Dinas Pemadam Kebakaran

Tabel 5.189 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Pemadam Kebakaran

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	44.276.000,00	38.627.500,00	5.648.500,00
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	600.000,00	0,00	600.000,00
Jumlah	44.876.000,00	38.627.500,00	6.248.500,00

l) Dinas Kesehatan

Tabel 5.190 Realisasi Pendapatan Retribusi Dinas Kesehatan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	557.204.700,00	(557.204.700,00)
Jumlah	0,00	557.204.700,00	(557.204.700,00)

Retribusi Daerah Kabupaten Bengkulu tahun 2022 dipungut berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi serta diatur pada Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum, Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Retribusi Daerah - LO sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp12.355.100.054,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.191 Realisasi Pendapatan Retribusi Per OPD

OPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Sekretariat Daerah	368.385.000,00	235.790.000,00	132.595.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	557.204.700,00	(557.204.700,00)
Dinas Kelautan dan Perikanan	399.746.600,00	177.840.000,00	221.906.600,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	171.274.000,00	9.150.000,00	162.124.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	28.510.000,00	12.265.000,00	16.245.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	878.088.000,00	691.818.000,00	186.270.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.317.525.000,00	1.137.056.000,00	180.469.000,00
Dinas Pertanian	11.080.000,00	11.915.000,00	(835.000,00)
Dinas Perhubungan	6.810.608.073,00	5.718.362.663,00	1.092.245.410,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.726.267.381,00	1.258.139.275,00	468.128.106,00
Dinas Pemadam Kebakaran	44.876.000,00	38.627.500,00	6.248.500,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	598.740.000,00	551.193.000,00	47.547.000,00
Jumlah	12.355.100.054,00	10.399.361.138,00	1.955.738.916,00

Tabel 5.192 Selisih Realisasi LRA dan LO Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.317.525.000,00	1.317.525.000,00	0,00
Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	687.400.000,00	1.156.500.000,00	(469.100.000,00)
			Penambahan Piutang Baru 2022 Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan
Retribusi Pelayanan Pasar	358.835.000,00	519.835.000,00	(161.000.000,00)
			Pembayaran Piutang dan Pengakuan Piutang tahun berjalan Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.419.738.500,00	1.419.738.500,00	0,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	44.276.000,00	44.276.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	180.883.000,00	180.883.000,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	598.740.000,00	598.740.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	423.950.000,00	423.950.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	177.370.000,00	177.370.000,00	0,00
Retribusi Terminal	8.021.000,00	8.021.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/Prasangrahan/Villa	239.185.000,00	239.185.000,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	11.080.000,00	11.080.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.212.463.347,00	4.226.348.573,00	(13.885.226,00)
			Selisih antara pendapatan yang terealisasi dengan pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp21.202.380 dikurangi dengan pendapatan yang belum terealisasi sebesar Rp22.685.670.
Hasil Penjualan Perikanan	97.924.000,00	97.924.000,00	0,00
Retribusi izin Usaha Perikanan	301.822.600,00	301.822.600,00	0,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.460.627.381,00	1.460.627.381,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	171.274.000,00	171.274.000,00	0,00
	11.711.114.828,00	12.355.100.054,00	(643.985.226,00)

5.4.1.A.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
27.311.794.580,00	33.292.209.969,00	(5.980.415.389,00)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah).

5.4.1.A.4 Lain-lain PAD yang sah

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
198.720.009.072,16	175.288.078.681,72	23.431.930.390,44



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang sah untuk 31 Desember tahun anggaran 2022 sebesar Rp198.720.009.072,16 di rincikan sebagai berikut:

Tabel 5.193 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Per OPD

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Kesehatan	16.992.771.928,00	14.287.755.300,00	2.705.016.628,00
Badan Pendapatan Daerah	328.161.551,00	228.740.417,00	99.421.134,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Dinas Perikanan	0,00	11.660.000,00	(11.660.000,00)
RSUD Bengkalis	51.933.179.960,00	67.369.951.330,00	(15.436.771.370,00)
RSUD Kec. Mandau	80.890.285.748,00	60.222.617.678,00	20.667.668.070,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	48.574.609.885,16	33.166.353.956,72	15.408.255.928,44
Jumlah	198.720.009.072,16	175.288.078.681,72	23.431.930.390,44

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut jenisnya adalah :

Tabel 5.194 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

Lain- lain PAD yang Sah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Hasil Penjualan Perikanan	0,00	11.660.000,00	(11.660.000,00)
Penerimaan Jasa Giro Daerah	16.842.971.640,00	9.534.038.489,00	7.308.933.151,00
Penerimaan Jasa Giro Bendahara	483.922.532,00	580.952.906,00	(97.030.374,00)
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	0,00	13.659.531.694,00	(13.659.531.694,00)
Pendapatan Denda Pajak	328.161.551,00	228.740.417,00	99.421.134,00
Pendapatan dari Denda Keterlambatan bidang Pekerjaan Umum	0,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	24.944.402.619,00	57.721.957,00	24.886.680.662,00
Pendapatan dari Pengembalian	6.231.839.700,15	9.387.430.867,72	(3.155.591.167,57)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	127.426.970.143,00	(127.426.970.143,00)
Pendapatan Kerja Sama BLUD	149.816.237.636,00	8.624.908,00	149.807.612.728,00
Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	0,00	99.252.000,00	(99.252.000,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	14.287.755.300,00	(14.287.755.300,00)
Pendapatan Bunga	71.473.394,01	0,00	71.473.394,01
Jumlah	198.720.009.072,16	175.288.078.681,72	23.431.930.390,44

Tabel 5.195 Selisih Realisasi LRA dan LO Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Hasil Penjualan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	955.544.021,00	0,00	955.544.021,00 Merupakan hasil penjualan aset, di LO masuk ke penjualan surplus non operasional
Penerimaan Jasa Giro Daerah	16.842.971.640,00	16.842.971.640,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro Bendahara	483.922.532,00	483.922.532,00	0,00
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	328.161.551,00	328.161.551,00	0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	24.944.402.619,00	24.944.402.619,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	6.542.236.593,15	6.231.839.700,15	310.396.893,00 Merupakan Pembayaran Piutang Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp 310.396.893,00
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan daerah Sewa	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00) Pendapatan sewa dibayar dimuka setahun Rp1000.000 pada Dispora
Pendapatan Bunga	0,00	71.473.394,01	(71.473.394,01) Merupakan pendapatan Remunerasi TDF Pada DBH sebesar Rp 71.473.394,01 pada BPKAD
Pendapatan BLUD	166.301.167.393,00	149.816.237.636,00	16.484.929.757,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

			Pembayaran Piutang TA 2021 Rp19.400.782.497,00 dan Piutang tahun 2022 Sebesar Rp3.264.147.419,00 Pendapatan diterima dimuka Rp33.250.000 pindah ke rekening pendapatan Hibah 3.994.863.134 pada RSUD Bengkalis
			Pendapatan sewa diterima dimuka 2021 RSUD Mandau sebesar Rp46.500.000,00
			Pembayaran Piutang 2022 Jamkesda siak Rp(3.581.818.455,00) dan Pembayarab Piutang BLUD tahun 2021 Sebesar Rp15.000.000,00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	162.134.737,00	0,00	162.134.737,00
			Realisasi Hasil Pengelolaan dana Bergulir atau penerimaan pendapatan investasi non permanen untuk LRA dikelompokkan kedalam lain-lain PAD yang sah lainnya, dan untuk LO tidak terealisasi karena masuk ke dalam pendapatan lainnya.
Jumlah	216.560.541.086,15	198.720.009.072,16	17.840.532.013,99

Realisasi akun lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah per OPD dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Dinas Kesehatan

Tabel 5.196 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Dinas Kesehatan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Kerja Sama BLUD	16.992.771.928,00	0,00	16.992.771.928,00
Jumlah	16.992.771.928,00	0,00	16.992.771.928,00

b) Badan Pendapatan Daerah

Tabel 5.197 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Denda Pajak	328.161.551,00	228.740.417,00	99.421.134,00
Jumlah	328.161.551,00	228.740.417,00	99.421.134,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

c) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

Tabel 5.198 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Jumlah	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

d) Dinas Perikanan

Tabel 5.199 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Dinas Kelautan dan Perikanan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Hasil Penjualan Perikanan	0,00	11.660.000,00	(11.660.000,00)
Jumlah	0,00	11.660.000,00	(11.660.000,00)

e) RSUD Bengkulu

Tabel 5.200 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah RSUD Bengkulu

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	67.369.951.330,00	(67.369.951.330,00)
Pendapatan Kerja sama BLUD	51.933.179.960,00	0,00	51.933.179.960,00
Pendapatan Jasa Giro BLUD	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	51.933.179.960,00	67.369.951.330,00	(15.436.771.370,00)

f) RSUD Kec. Mandau

Tabel 5.201 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah RSUD Kec. Mandau

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	60.057.018.813,00	(60.057.018.813,00)
Pendapatan Jasa Giro BLUD	80.890.285.748,00	8.624.908,00	80.881.660.840,00
Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	0,00	99.252.000,00	(99.252.000,00)
Jumlah	80.890.285.748,00	60.164.895.721,00	20.725.390.027,00

g) BPKAD

Tabel 5.202 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah PPKD

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Penerimaan Jasa Giro Daerah	16.842.971.640,00	9.534.038.489,00	7.308.933.151,00
Penerimaan Jasa Giro Bendahara	483.922.532,00	580.952.906,00	(97.030.374,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pendapatan dari Denda Keterlambatan bidang Pekerjaan Umum	0,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)
Pendapatan dari Pengembalian	6.231.839.700,15	336.785.799,00	5.895.053.901,15
Pendapatan Bunga Deposito Bank Riau	0,00	13.659.531.694,00	(13.659.531.694,00)
Pendapatan Bunga	71.473.394,01	0,00	71.473.394,01
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	24.944.402.619,00	0,00	24.944.402.619,00
Pendapatan dari Pengembalian Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.050.645.068,72	(9.050.645.068,72)
Jumlah	48.574.609.885,16	33.166.353.956,72	15.408.255.928,44

5.4.1.B. Pendapatan Transfer

	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
	3.108.364.057.380,00	2.546.731.688.130,00	561.632.369.250,00

Pendapatan Transfer-LO merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pembagian hasil pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.108.364.057.380,00.

Pendapatan Transfer-LO terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya serta Transfer Pemerintah Provinsi. Rincian realisasi pendapatan transfer per 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.203 Realisasi Pendapatan Transfer

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.938.250.668.552,00	2.374.411.278.182,00	563.839.390.370,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	31.134.698.000,00	(31.134.698.000,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	170.113.388.828,00	141.185.711.948,00	28.927.676.880,00
Jumlah	3.108.364.057.380,00	2.546.731.688.130,00	561.632.369.250,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.204 Selisih Realisasi LRA dan LO Pendapatan Transfer

Uraian	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Transfer Pemerintah			
Pusat-Dana	2.701.274.490.590,00	2.938.250.668.552,00	(236.976.177.962,00)
Perimbangan			
			Pembayaran Piutang Dana Perimbangan DBH Pusat
Transfer Pemerintah			
Pusat Lainnya	127.024.597.939,00	0,00	127.024.597.939,00
			Pendapatan Dana Desa yang tidak dicatat di LO sebesar Rp127.024.597.939,00
Transfer Pemerintah			
Provinsi	151.480.204.993,00	170.113.388.828,00	(18.633.183.835,00)
			Merupakan total pembayaran piutang tahun lalu sebesar Rp15.105.137.355,51 dan penambahan piutang sebesar Rp21.526.449.795,51
Jumlah	2.979.779.293.522,00	3.108.364.057.380,00	(128.584.763.858,00)

5.4.1.B.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
2.938.250.668.552,00	2.374.411.278.182,00	563.839.390.370,00

Berikut ini adalah rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2022:

Tabel 5.205 Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Bagi Hasil Pajak	1.767.108.765.746,00	1.797.672.209.000,00	(30.563.443.254,00)
Bagi Hasil Bukan Pajak	554.525.310.255,00	336.787.052.000,00	217.738.258.255,00
Dana Alokasi Umum	335.727.628.000,00	93.311.533.266	242.416.094.734,00
Dana Alokasi Khusus	280.888.964.551,00	146.640.483.916,00	134.248.480.635,00
Jumlah	2.938.250.668.552,00	2.374.411.278.182,00	563.839.390.370,00

Tahun 2022 realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah sebesar Rp2.938.250.668.552,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1.B.1.a Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
1.767.108.765.746,00	1.427.001.102.000,00	340.107.663.746,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.767.108.765.746,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu berasal dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Non Migas, Sektor



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pertambangan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29, Bagi Hasil Bagian Pemerintah Pusat bagi Rata serta bagi Hasil PBB Sektor lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.206 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Bagi Hasil PBB	1.710.341.353.906,00	1.383.717.917.000,00	326.623.436.906,00
Bagi Hasil dari PBB			
Sektor Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil dari PBB			
Sektor Perhutanan	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil PPh 21, 25 & 29	55.861.941.188,00	43.283.185.000,00	12.578.756.188,00
Bagi Hasil PBB Sektor lainnya	905.470.652,00	0,00	905.470.652,00
Jumlah	1.767.108.765.746,00	1.427.001.102.000,00	340.107.663.746,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak 31 Desember TA 2022 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

Bagi Hasil PBB dan PBB Pertambangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Lampiran rincian DBH PBB, Bagi Rata sebesar Rp3.820.583.000,00 Bagian Daerah sebesar Rp1.468.803.735.000,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp11.716.440.000,00 Sektor Perhutanan sebesar Rp6.985.592.000,00 Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp1.450.001.810.000,00, dan Sektor Lainnya sebesar Rp99.893.000,00. Biaya Pemungutan sebesar Rp49.131.539.000,00 dengan rincian Sektor Perkebunan sebesar Rp520.723.000,00 Sektor Perhutanan sebesar Rp271.653.000,00 Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp48.335.833.000,00 dan Sektor Lainnya sebesar Rp3.330.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Kurang Bayar DBH Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Sektor Bagi Hasil sebesar Rp803.667.166,00 Sektor Perkebunan Rp5.758.609.106,00 Sektor Perhutanan sebesar Rp1.692.889.290,00 Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp31.635.556.290,00 Pertambangan Minerba sebesar Rp10.909.728,00 Sektor Lainnya sebesar Rp60.807.157,00 dan Biaya Pemungutan sebesar Rp1.378.608.305,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021, Rincian Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada TA 2021 PBB Kurang Bayar Defenitif TA 2020 sebesar Rp877.413.210.338,00 dengan dengan penyaluran KB DBH sementara TA 2020 sebesar Rp76.695.965.800,00 dan KB TA 2020 yang belum diselesaikan sebesar Rp800.717.244538,00

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Penyaluran Kurang Bayar DBH pada TA 2021 PBB sebesar Rp13.155.540.207,00 dengan dengan penyaluran KB DBH PBB Bagi Rata sebesar Rp803.667.166,00 Sektor Pertambangan Migas Rp12.351.873.041,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Penyelesaian Lebih Bayar DBH yang Diperhitungkan dalam Penyaluran Kurang Bayar DBH PBB TA 2021 sebesar Rp9.070.088.625,00 dengan rincian DBH PBB Bagi Rata sebesar Rp803.667.166,00, Sektor Pertambangan Migas Rp8.266.421.459,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Sisa Kurang Bayar DBH PBB TA 2021 sebesar Rp28.185.578.835,00 dengan rincian DBH PBB sektor Perkebunan sebesar Rp5.758.609.106,00 Sektor Perhutanan Rp1.692.889.290,00 Pertambangan Migas Rp19.283.683.249,00 Sektor Pertambangan Lainnya sebesar Rp10.909.728,00 Sektor Lainnya sebesar Rp60.807.157,00 dan Upah Pemungutan sebesar Rp1.378.680.305,00.

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

Bagi Hasil PPh 21, 25 dan 29

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp50.518.302.000,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp805.794.000,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp49.712.508.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Alokasi Kurang Bayar DBH Pajak Penghasilan tahun anggaran 2021 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 sebesar Rp3.186.266.119,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp777.642.642,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp2.408.623.477,00. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.07/2021 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021 tanggal 16 September 2021, Rincian Alokasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada TA 2021 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 Kurang Bayar Defenitif TA 2020 sebesar Rp10.581.581.834,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp861.420.186,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp9.720.161.648,00 dengan penyaluran KB DBH sementara TA 2020 PPh Pasal 25/29 sebesar Rp221.747.800,00 dan PPH Pasal 21 sebesar Rp12.400.037.100,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Penyaluran Kurang Bayar DBH pada TA 2021 Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 sebesar Rp3.186.266.119,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp777.642.642,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp2.408.623.477,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Penyelesaian Lebih Bayar DBH yang Diperhitungkan Dalam Penyaluran Kurang Bayar DBH Pajak Penghasilan TA 2021 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 25/29 sebesar Rp3.186.266.119,00 dengan rincian PPh 25/29 sebesar Rp777.642.642,00 dan Dana Bagi Hasil Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp2.408.623.477,00

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

5.4.1.B.1.b Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
554.525.310.255,00	370.671.107.000,00	183.854.203.255,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajakper 31 Desember tahun 2022 adalah sebesar Rp554.525.310.255,00. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ini merupakan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti: Bagi hasil dari provinsi sumber daya hutan, bagi hasil dari dana reboisasi, bagi hasil dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti), bagi hasil dari pungutan perikanan, bagi hasil dari pertambangan minyak bumi, bagi hasil dari pertambangan gas bumi.

Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.207 Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Bagi Hasil dari Provinsi	0,00	0,00	0,00
Sumber Daya Hutan			
Bagi Hasil Iuran			
Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	4.112.274.317,00	1.701.039.000,00	2.411.235.317,00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusaha Perikanan	2.170.064.211,00	1.128.319.000,00	1.041.745.211,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	525.505.697.235,00	357.136.294.000,00	168.369.403.235,00
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	195.680,00	0,00	195.680,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	4.426.862.906,00	1.401.534.000,00	3.025.328.906,00
Bagi Hasil dari Iuran Hak Penguasa Hutan	18.310.215.906,00	9.303.921.000,00	9.006.294.906,00
Jumlah	554.525.310.255,00	370.671.107.000,00	183.854.203.255,00

Realisasi Dana Bagi Hasil bukan Pajak per 31 Desember TA 2022 dicatat berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan sebagai berikut :

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp2.892.430.000,00 dengan Rincian Royalti sebesar Rp2.892.430.000.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebesar Rp1.506.548.021,00 dengan rincian Iuran Tetap sebesar Rp162.122.823,00 dan Royalti sebesar Rp1.344.425.198,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Sisa Kurang Bayar Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara TA 2021 sebesar Rp1.506.548.021,00, dengan rincian Iuran Tetap sebesar Rp162.122.823,00 dan Royalti sebesar Rp 1.344.425.198,00 .



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Bagi Hasil SDA Perikanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp1.958.311.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp157.694.020,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp15.778.904,00.

Bagi Hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp478.222.145.000,00 dengan rincian Minyak Bumi sebesar Rp474.227.252,00 dan Gas Bumi sebesar Rp3.994.893.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Lebih Bayar DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021, Minyak Bumi sebesar Rp6.107.428.161,00 dan Gas Bumi sebesar Rp5.134.842.805,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Lebih Bayar DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020, Minyak Bumi sebesar Rp95.120.166.820,00 dan Gas Bumi sebesar Rp0,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Sisa Kurang Bayar Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2021 sebesar Rp5.134.842.805,00 dari Gas Bumi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Sisa Kurang Bayar Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2020 sebesar Rp82.863.812.076,00 dari Minyak Bumi.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Penyelesaian Lebih Bayar DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2020 sebesar Rp12.256.354.744,00 dari Minyak Bumi.

Bagi Hasil SDA Kehutanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp16.523.519.000,00 dengan Rincian IIUPH sebesar Rp0,00 PSDH sebesar Rp16.523.519.000,00 dan DR sebesar Rp0,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam kehutanan sebesar Rp5.182.261.154,00

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Sisa Kurang Bayar Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2021 sebesar Rp5.182.261.154,00.

Bagi Hasil SDA Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp261.000,00.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2022 Tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022, Rincian Alokasi Kurang Bayar Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.155,00

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KM.07/2022 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022 tanggal 14 September 2022, Rincian Sisa Kurang Bayar DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2021 sebesar Rp19.155,00.

Masih terdapat perbedaan antara Ketetapan sesuai dengan Perpres dan PMK dengan realisasi penerimaan yang masuk ke Kas Daerah (Kurang Salur/Lebih Salur).

5.4.1.B.1.c Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
335.727.628.000,00	336.787.052.000,00	(1.059.424.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pemerintah Kabupaten Bengkulu menerima Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2022 dicatat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Lampiran V.10, tentang Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota sebesar Rp335.727.628.000,00. Jumlah realisasi Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu sampai dengan 31 Desember TA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.208 Rincian Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Dana Alokasi Umum (DAU)	335.727.628.000,00	336.787.052.000,00	(1.059.424.000,00)
Jumlah	335.727.628.000,00	336.787.052.000,00	(1.059.424.000,00)

5.4.1.b.1.d Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
280.888.964.551,00	239.952.017.182,00	40.936.947.369,00

Dana Alokasi Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik adalah sebagai berikut :

i). Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Pemerintah Kabupaten Bengkulu menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik selama per 31 Desember 2022 dicatat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 . Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.629.486.104,00.

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 5.209 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
DAK Reguler Bidang Jalan (221)	0,00	14.535.552.962,00	(14.535.552.962,00)
DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	22.848.236.670,00	397.882.000,00	22.450.354.670,00
DAK Reguler Bidang Perumahan,Air Minum dan Sanitasi	0,00	0,00	0,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	1.082.312.360,00	(1.082.312.360,00)
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kelautan	0,00	0,00	0,00
DAK Bidang Pertanian	0,00	1.972.898.568,00	(1.972.898.568,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DAK Reguler Bidang Pendidikan	29.801.633.298,00	32.354.346.087,00	(2.552.712.789,00)
DAK Affirmasi Bidang Kesehatan	0,00	1.078.238.626,00	(1.078.238.626,00)
DAK Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	799.880.000,00	1.148.920.000,00	(349.040.000,00)
Dak Penugasan Bidang Air Minum	7.350.954.854,00	5.279.878.806,00	2.071.076.048,00
DAK Penugasan Bidang Sanitasi	4.304.445.000,00	2.632.652.000,00	1.671.793.000,00
DAK Penugasan Bidang Jalan	12.524.336.282,00	4.556.432.300,00	7.967.903.982,00
DAK Affirmasi Bidang Transportasi (224)	0,00	4.326.463.820,00	(4.326.463.820,00)
DAK Reguler Bid. Kesehatan dan KB (Dinas Kesehatan, KB & RSUD Mandau) (212)	0,00	3.112.910.400,00	(3.112.910.400,00)
DAK Penugasan Bidang Kesehatan (229)	0,00	20.833.045.337,00	(20.833.045.337,00)
DAK Affirmasi Bidang Kesehatan / Bidang Penguatan Puskesmas DTPK (222)	0,00	0,00	0,00
Jumlah	77.629.486.104,00	93.311.533.266,00	(15.682.047.162,00)

ii). Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp203.259.478.447,00

Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.210 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Tunjangan Profesi Guru PNSD	104.271.442.960,00	112.812.546.000,00	(8.541.103.040,00)
Dana Tambahan Penghasilan Guru	2.411.750.000,00	993.000.000,00	1.418.750.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggara- raan PAUD	0,00	7.089.600.000,00	(7.089.600.000,00)
Bantuan Operasional Kesehatan	4.277.408.598,00	18.252.050.145,00	(13.974.641.547,00)
Bantuan Operasional KB	7.540.762.510,00	2.769.822.625,00	4.770.939.885,00
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keselajaran	0,00	1.126.300.000,00	(1.126.300.000,00)
Jaminan Persalinan	992.540.000,00	0,00	992.540.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	406.876.000,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	1.991.251.146,00	(1.991.251.146,00)
Pendapatan Dana BOS - Reguler	81.602.875.514,00	480.000.000,00	81.122.875.514,00
Dana Ketahanan pangan dan pertanian	663.830.000,00	222.000.000,00	441.830.000,00
Dana fasilitasi penanaman modal	378.951.300,00	326.122.000,00	52.829.300,00
Dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak	362.760.965,00	187.488.000,00	175.272.965,00
PK2UKM	350.280.600,00	390.304.000,00	(40.023.400,00)
Jumlah	203.259.478.447,00	146.640.483.916,00	56.618.994.531,00

5.4.1.B.2 Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya

5.4.1.B.2.a Dana Penyesuaian

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
0,00	31.134.698.000,00	(31.134.698.000,00)

Penerimaan yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya per 31 Desember pada tahun 2022 sebesar Rp0,00.

5.4.1.B.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
170.113.388.828,00	141.185.711.948,00	28.927.676.880,00

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis per 31 Desember 2022 sebesar Rp170.113.388.828,00. Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1.B.3.a Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Tabel 5.211 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Pajak Kendaraan Bermotor	37.542.796.258,00	34.062.921.318,00	3.479.874.940,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	32.990.877.198,00	24.248.061.215,00	8.742.815.983,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	58.056.100.926,00	41.388.580.007,00	16.667.520.919,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.086.881.640,00	1.085.899.877,00	981.763,00
Pajak Rokok	27.478.890.306,00	22.637.047.931,00	4.841.842.375,00
Jumlah	157.155.546.328,00	123.422.510.348,00	33.733.035.980,00

Realisasi dana bagi hasil dari TA 2022 dicatat berdasarkan ketetapan peraturan-peraturan sebagai berikut :

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 809 / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan I untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.614.750.203,00 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.941.863.153,00 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp12.052.712.291,00 dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp219.838.888,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 868 / V / 2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I tahun 2022 untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.068.437.566,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.1137/VII/2022 tanggal 18 Juli April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan II untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.392.262.275,00 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.405.622.688,00 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp13.666.764.456,00 dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp300.563.964,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1220 / VIII / 2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II tahun 2022 untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.005.231.079,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1526/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.580.100.053,00 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.036.239.786,00 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp15.297.576.233,00 dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp274.706.206,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1141 / X / 2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan III untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp8.686.784.617,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.660.318.667,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp10.461.520.491,00, dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp316.231.988,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1658 / XI / 2022 tanggal 8 November 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III tahun 2022 untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.662.837.699,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1801 / XII / 2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Oktober-November) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp7.221.933.934,00 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.833.325.863,00 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.429.870.132,00 dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp196.654.202,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1851 /XII/ 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Oktober-November) tahun 2022 untuk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp5.742.383.962,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.756/IV/ 2022 tanggal 8 April 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember) untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.380.306.947,00 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.667.114.843,00 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.347.243.458,00 dan Pajak Air Permukaan sebesar Rp91.190.095,00.

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 867 /V/ 2021 tanggal 20 Mei 2022 tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) tahun 2021 untuk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp3.843.582.268,00.

5.4.1.B.3.b Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kab./ Kota Lainnya

Penerimaan yang berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.957.842.500,00 yang berasal dari PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Bengkalis dengan rincian sebagai berikut :



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.212 Realisasi Bantaun Keuangan Provinsi

Bantuan Keuangan Provinsi	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	12.957.842.500,00	17.763.201.600,00	(4.805.359.100,00)
Jumlah	12.957.842.500,00	17.763.201.600,00	(4.805.359.100,00)

Pengalokasian Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Bengkalis ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Riau No: KPTS.2/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022, Berupa Gaji Guru Bantu sebesar Rp6.936.000.000,00 Bantuan Kecamatan sebesar Rp1.100.000.000,00 Rumah Layak Huni sebesar Rp5.390.000.000,00.

Dalam keputusan tersebut ditetapkan Alokasi Bantuan Keuangan untuk Kabupaten Bengkalis tahun 2022 adalah sebesar Rp13.952.746.300,00 dan telah terealisasi sebesar Rp12.957.842.500,00 atau 92,87%.

5.4.1.C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
	50.911.576.939,17	92.274.621.940,43	(41.363.045.001,26)

Lain-lain Pendapatan yang Sah per 31 Desember pada tahun 2022 adalah sebesar Rp50.911.576.939,17 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.213 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Pendapatan Hibah	48.772.395.362,43	92.028.271.351,96	(43.255.875.989,53)
Pendapatan Lainnya	2.139.181.576,74	246.350.588,47	1.892.830.988,27
Jumlah	50.911.576.939,17	92.274.621.940,43	(41.363.045.001,26)

Tabel 5.214 Selisih Realisasi LRA dan LO Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah	LRA	LO	Selisih dan Keterangan
Pendapatan Hibah	808.958,15	48.772.395.362,43	(48.771.586.404,28)
Pendapatan Lainnya	0,00	2.139.181.576,74	(2.139.181.576,74)
Jumlah	808.958,15	50.911.576.939,17	(50.910.767.981,02)

5.4.1.C.1 Pendapatan Hibah

	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
	48.772.395.362,43	92.028.271.351,96	(43.255.875.989,53)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Berikut adalah OPD yang menerima Hibah dari Pemerintah pusat, Kementerian, Masyarakat dan Organisasi Lainnya serta keterangan Aset yang diterima adalah sebagai berikut :

Tabel 5.215 Realisasi Pendapatan Hibah Per OPD

OPD	Realisasi 2022	Keterangan
Dinas kesehatan	1.817.608.482,15	Hibah dari Pemerintah Pusat untuk Dinas Kesehatan berupa BHP APBN (Persediaan)
Dinas Pendidikan	6.607.025.540,78	Hibah dari Kemendikbud Ristek berupa Barang Peralatan Pendidikan
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan	20.592.000,00	Hibah dari Kementerian Pertanian berupa Computer Personal dan Peralatan Jaringan (Modem) senilai Rp59.961.000 diakui sebagai pendapatan LO
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	612.046.950,00	Hibah dari BKKBN berupa Alat Obat Kontrasepsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	394.674.000,00	Penerimaan Hibah dari Kota Dumai
RSUD Kabupaten Bengkalis	3.994.863.134,00	Penerimaan Pendapatan berupa uang dari Kementerian Kesehatan
	255.616.246,00	Penerimaan Pendapatan berupa aset dan BMHP (Obat-obatan) dari Dinas Kesehatan Provinsi
Kecamatan Bandar Laksamana	26.170.000,00	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO (Alat Pemadam Kebakaran)
Dinas Pemadam Kebakaran	2.940.000,00	Menerima Hibah tanah dari Desa Tenggayun Kec. Bandar Laksamana untuk membangun Pos Jaga Damkar
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	35.000.000,00	Menerima Hibah tanah dari Desa Hutan Ayu Kecamatan Rupert untuk membangun Tower
Dinas Perhubungan	26.670.964.000,00	Menerima Hibah dari Kementerian Perhubungan berbentuk Dermaga Penerbangan di Sungai Selari Kec. Bukit Batu
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	7.945.635.009,50	Menerima Hibah dari Masyarakat berupa tanah untuk olahraga, budaya dan makam bersejarah
RSUD Kecamatan Mandau	389.260.000,00	Hibah dari Organisasi atau Badan berupa Peralatan dan Mesin
Jumlah	48.772.395.362,43	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4.1.C.2 Pendapatan Lainnya

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
2.139.181.576,74	246.350.588,47	1.892.830.988,27

Pendapatan Lainnya merupakan pendapatan yang bukan merupakan Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Lain-lain PAD yang Sah, Pendapatan Transfer, maupun Pendapatan Hibah. Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp2.139.181.576,74 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.216 Realisasi Pendapatan Lainnya Per OPD

OPD	Realisasi 2022	Keterangan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26.363.633,00	Penyisihan Investasi non permanen
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.090.908,00	Penyisihan Investasi non permanen
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	74.680.196,00	Penyisihan Investasi non permanen
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan	300.000,00	Penyisihan Investasi non permanen
Badan Pendapatan Daerah	27.726.619,74	Piutang Pajak
RSUD Kabupaten Bengkulu	2.009.020.220,00	Penyisihan Piutang BLUD
Jumlah	2.139.181.576,74	

5.4.2. Beban - LO

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
3.837.364.443.753,93	3.382.599.344.416,23	454.765.099.337,70

Beban LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berjalan, dengan realisasi Beban Kabupaten Bengkulu 31 Desember tahun 2022 adalah sebesar Rp3.837.364.443.753,93. Beban LO dibagi menjadi Beban Operasi dan Beban Transfer dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2.A. Beban Operasi

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
3.456.229.252.114,93	3.102.808.854.354,23	353.420.397.760,70



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban Operasi merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berjalan, dengan realisasi Beban Operasi Kabupaten Bengkalis 31 Desember tahun 2022 adalah sebesar Rp3.456.229.252.114,93. Rincian dan realisasi Beban Operasi dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.217 Rincian Realisasi Beban Operasi

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Pegawai	1.050.523.285.576,00	1.017.081.423.128,20	33.441.862.447,80
Beban Persediaan	279.510.071.373,28	208.811.591.511,32	70.698.479.861,96
Beban Jasa	708.725.207.438,56	631.426.922.790,00	77.298.284.648,56
Beban Pemeliharaan	142.043.212.605,74	100.416.766.337,90	41.626.446.267,84
Beban Perjalanan Dinas	238.533.506.012,00	153.646.382.311,50	84.887.123.700,50
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	23.970.315.000,00	10.642.584.920,00	13.327.730.080,00
Beban Hibah	104.167.621.636,99	65.868.005.997,87	38.299.615.639,12
Beban Bantuan Sosial	31.227.797.850,00	37.194.371.163,00	(5.966.573.313,00)
Beban Penyusutan	805.798.577.142,77	838.152.774.546,60	(32.354.197.403,83)
Beban Amortisasi	1.243.952.992,44	1.924.210.417,75	(680.257.425,31)
Beban Penyisihan Piutang	7.394.947.953,15	9.204.270.253,09	(1.809.322.299,94)
Beban Hibah Aset	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	63.090.756.534,00	28.439.550.977,00	34.651.205.557,00
Beban Dana BOS	0,00	0,00	-
Jumlah	3.456.229.252.114,93	3.102.808.854.354,23	353.420.397.760,70

5.4.2.A.a Beban Pegawai

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
1.050.523.285.576,00	1.017.081.423.128,20	33.441.862.447,80

Beban Pegawai menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.218 Rincian dan Realisasi Beban Pegawai

Beban Pegawai	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Gaji dan Tunjangan	471.455.265.608,00	461.517.364.190,00
Tambahan Penghasilan PNS	411.020.754.639,00	375.342.947.234,20
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	131.714.248.074,00	143.146.541.209,00
Belanja Pegawai BLUD	1.541.730.000,00	4.013.845.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.403.322.387,00	13.069.975.175,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.039.637.988,00	1.758.620.000,00
Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	19.348.326.880,00	18.232.130.320,00
Jumlah	1.050.523.285.576,00	1.017.081.423.128,20



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (bukti pembayaran honor) telah diverifikasi oleh PPK dan disahkan PA/KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban pegawai diakui ketika daftar gaji telah diterbitkan dan diterima PPK. Realisasi Beban Pegawai 31 Desember 2022 sebesar Rp1.050.523.285.576,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.219 Rincian Realisasi Beban Pegawai Per OPD

OPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	525.868.986.025,00	513.254.481.724,00	12.614.504.301,00
Dinas Kesehatan	93.043.359.269,00	83.614.083.970,00	9.429.275.299,00
RSUD Bengkalis	37.773.229.703,00	34.074.917.106,00	3.698.312.597,00
RSUD Kecamatan Mandau	32.207.140.706,00	34.572.257.435,00	(2.365.116.729,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.869.432.341,00	11.164.369.628,00	705.062.713,00
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	7.577.936.473,00	7.416.516.828,00	161.419.645,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.859.217.432,00	4.422.141.242,00	437.076.190,00
Dinas Pemadam Kebakaran	5.861.202.439,00	5.358.068.662,00	503.133.777,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	11.039.797.567,00	9.760.492.931,00	1.279.304.636,00
Dinas Sosial	7.891.323.913,00	7.391.377.490,00	499.946.423,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.103.893.195,00	6.036.820.784,00	67.072.411,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.654.370.288,00	5.903.657.997,00	750.712.291,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.879.743.816,00	4.563.650.974,00	316.092.842,00
Dinas Lingkungan Hidup	7.941.634.654,00	8.246.245.854,20	(304.611.200,20)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	9.647.197.501,00	9.230.026.426,00	417.171.075,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.217.502.484,00	7.076.868.764,00	(1.859.366.280,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.620.191.905,00	5.391.187.339,00	229.004.566,00
Dinas Perhubungan	12.358.967.653,00	12.040.903.780,00	318.063.873,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	5.846.244.515,00	5.150.670.236,00	695.574.279,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	6.233.845.632,00	6.264.081.792,00	(30.236.160,00)
Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	8.843.072.545,00	8.775.865.408,00	67.207.137,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	8.387.284.527,00	8.009.006.507,00	378.278.020,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.995.998.469,00	8.032.020.046,00	963.978.423,00
Dinas Perikanan	7.421.328.308,00	7.124.915.824,00	296.412.484,00
Dinas Perkebunan	7.266.529.862,00	5333002934,00	1.933.526.928,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertenakan	16.766.574.440,00	14108175606,00	2.658.398.834,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.106.075.342,00	7.978.995.305,00	127.080.037,00
Sekretariat Daerah	30.001.748.865,00	30.066.086.052,00	(64.337.187,00)
Sekretariat DPRD	40.767.406.081,00	39.096.272.018,00	1.671.134.063,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.791.757.787,00	8.860.454.460,00	(1.068.696.673,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.882.759.395,00	12.999.602.298,00	(3.116.842.903,00)
Badan Pendapatan Daerah	16.303.537.683,00	17.032.167.623,00	(728.629.940,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7.489.680.965,00	7.004.695.458,00	484.985.507,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	4.487.204.047,00	3.917.537.469,00	569.666.578,00
Inspektorat	8.018.462.890,00	6.929.416.088,00	1.089.046.802,00
Kantor Camat Bengkalis	6.723.031.245,00	6.725.346.907,00	(2.315.662,00)
Kantor Camat Bantan	3.123.382.461,00	3.046.174.756,00	77.207.705,00
Kantor Camat Bukit Batu	3.829.369.488,00	3.494.623.642,00	334.745.846,00
Kantor Camat Siak Kecil	3.582.715.689,00	3.163.096.911,00	419.618.778,00
Kantor Camat Bandar Laksmana	2.429.866.061,00	2.192.626.192,00	237.239.869,00
Kantor Camat Rupal	4.994.032.158,00	4.802.399.200,00	191.632.958,00
Kantor Camat Rupal Utara	3.308.868.300,00	3.530.250.668,00	(221.382.368,00)
Kantor Camat Mandau	9.956.677.119,00	11.277.285.874,00	(1.320.608.755,00)
Kantor Camat Pinggir	4.143.143.470,00	4.021.637.330,00	121.506.140,00
Kantor Camat Bathin Solapan	2.614.103.502,00	2.378.105.492,00	235.998.010,00
Kantor Camat Talang Muandau	2.068.731.481,00	1.672.285.852,00	396.445.629,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.724.725.885,00	4.576.556.246,00	148.169.639,00
Jumlah	1.050.523.285.576,00	1.017.081.423.128,20	33.441.862.447,80

5.4.2.A.b Beban Persediaan

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
279.510.071.373,28	208.811.591.511,32	70.698.479.861,96



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban Persediaan menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.220 Rincian Realisasi Beban Persediaan

Beban Persediaan	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Beban Bahan Pakai Habis	235.051.826.492,96	81.975.326.473,86
Beban Persediaan Bahan/Material	41.448.940,71	76.698.569.727,81
Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	768.696.300,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00
Beban Pakaian Kerja	0,00	447.171.500,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00
Beban Persediaan BOS	44.416.795.939,61	0,00
Beban Persediaan BLUD	0,00	48.921.827.509,65
Jumlah	279.510.071.373,28	208.811.591.511,32

Pencatatan persediaan Kabupaten Bengkulu Tengah menggunakan pendekatan beban, dimana pada saat pembelian bahan pakai habis akan dicatat sebagai beban persediaan, hingga pada akhir periode, beban persediaan yang masih menjadi persediaan akan disesuaikan dan dikeluarkan dari beban operasional. Realisasi beban persediaan periode 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp279.510.071.373,28 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.221 Rincian Realisasi Beban Persediaan Per OPD

OPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	29.070.757.610,00	4.485.215.100,00	24.585.542.510,00
Dinas Kesehatan	22.106.880.683,30	19.889.003.236,25	2.217.877.447,05
RSUD Bengkulu	26.721.189.520,00	35.306.255.166,92	(8.585.065.646,92)
RSUD Kecamatan Mandau	36.920.868.789,23	33.207.738.177,90	3.713.130.611,33
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.991.383.362,00	1.521.046.671,00	470.336.691,00
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	9.949.534.418,00	2.855.268.593,00	7.094.265.825,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.876.093.100,00	1.293.626.600,00	582.466.500,00
Dinas Pemadam Kebakaran	942.095.760,00	1.019.906.820,00	(77.811.060,00)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	558.951.400,00	758.617.000,00	(199.665.600,00)
Dinas Sosial	1.983.275.550,00	1.422.388.500,00	560.887.050,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.034.739.853,00	1.167.138.215,00	867.601.638,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.589.002.988,00	1.126.977.949,00	462.025.039,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.083.078.391,00	1.025.428.742,00	57.649.649,00
Dinas Lingkungan Hidup	7.655.664.885,00	5.213.739.296,00	2.441.925.589,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.581.394.144,00	3.167.456.177,00	413.937.967,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2.750.294.700,00	2.308.015.500,00	442.279.200,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.822.763.793,50	1.824.113.738,25	998.650.055,25
Dinas Perhubungan	3.694.964.838,00	2.361.159.134,00	1.333.805.704,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	972.875.508,00	716.479.300,00	256.396.208,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.287.816.600,00	1.006.817.100,00	280.999.500,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	776.455.200,00	623.163.600,00	153.291.600,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	5.313.310.510,20	2.665.624.700,00	2.647.685.810,20
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	742.471.050,00	620.079.759,00	122.391.291,00
Dinas Perikanan	3.813.091.233,00	1.154.859.787,00	2.658.231.446,00
Dinas Perkebunan	4.126.826.042,00	590.952.840,00	3.535.873.202,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan	3.102.819.163,00	2.000.321.380,00	1.102.497.783,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.697.792.007,00	2.350.296.933,00	1.347.495.074,00
Sekretariat Daerah	25.003.468.720,05	24.077.997.567,00	925.471.153,05
Sekretariat DPRD	25.147.940.030,00	18.815.727.600,00	6.332.212.430,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.848.236.830,00	2.664.947.812,00	183.289.018,00
Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.678.765.151,00	10.547.376.070,00	131.389.081,00
Badan Pendapatan Daerah	3.860.857.748,00	2.423.323.868,00	1.437.533.880,00
Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.151.185.450,00	840.569.600,00	310.615.850,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	912.802.400,00	732.865.300,00	179.937.100,00
Inspektorat	1.296.057.066,00	926.424.153,00	369.632.913,00
Kantor Camat Bengkalis	1.989.478.475,00	1.323.285.100,00	666.193.375,00
Kantor Camat Bantan	1.704.360.000,00	1.265.595.035,00	438.764.965,00
Kantor Camat Bukit Batu	1.594.972.828,00	922.362.000,00	672.610.828,00
Kantor Camat Siak Kecil	1.000.179.030,00	629.111.770,00	371.067.260,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Bandar Laksmana	1.120.974.700,00	950.479.500,00	170.495.200,00
Kantor Camat Rupat	3.199.808.752,00	1.729.996.100,00	1.469.812.652,00
Kantor Camat Rupat Utara	1.380.095.000,00	979.107.400,00	400.987.600,00
Kantor Camat Mandau	9.754.030.991,00	5.315.479.500,00	4.438.551.491,00
Kantor Camat Pinggir	1.680.043.204,00	815.812.300,00	864.230.904,00
Kantor Camat Batin Solapan	2.238.413.350,00	1.226.576.100,00	1.011.837.250,00
Kantor Camat Talang Muandau	978.060.000,00	582.280.300,00	395.779.700,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	803.950.550,00	360.584.421,00	443.366.129,00
Jumlah	279.510.071.373,28	208.811.591.511,32	70.698.479.861,96

5.4.2.A.c Beban Jasa

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
708.725.207.438,56	631.426.922.790,00	77.298.284.648,56

Beban Jasa menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.222 Rincian Realisasi Beban Jasa

Beban Jasa	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Jasa Kantor	512.845.338.136,68	460.741.902.778,00	52.103.435.358,68
Premi Asuransi	42.885.068.855,00	27.089.161.105,00	15.795.907.750,00
Sewa Peralatan dan Mesin	7.559.678.828,00	3.929.557.910,00	3.630.120.918,00
Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.845.653.900,00	5.234.971.694,00	4.610.682.206,00
Sewa Sarana Mobilitas	215.150.000,00	0,00	215.150.000,00
Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00
Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00
Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00
Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00	0,00
Jasa Konsultasi	15.176.109.210,00	5.998.909.002,00	9.177.200.208,00
Beasiswa Pendidikan PNS	367.500.000,00	255.000.000,00	112.500.000,00
Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	23.056.337.050,00	11.584.481.400,00	11.471.855.650,00
Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis Non PNS	0,00	899.818.600,00	(899.818.600,00)
Belanja Jasa Keahlian / Profesional	0,00	0,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	96.774.371.458,88	51.229.955.117,00	45.544.416.341,88
Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00
Honorarium Pengelolaan Dana BOS	0,00	0,00	0,00
Beban Pegawai Dana BOS-LO	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Dana BOS	0,00	64.463.165.184,00	(64.463.165.184,00)
Jasa Petugas Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa kesehatan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	708.725.207.438,56	631.426.922.790,00	77.298.284.648,56

Beban Jasa merupakan Beban Jasa sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp708.725.207.438,56 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.223 Rincian Realisasi Beban Jasa Per OPD

OPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	152.357.565.348,00	169.604.731.690,00	(17.247.166.342,00)
Dinas Kesehatan	88.379.079.773,68	85.903.411.920,00	2.475.667.853,68
RSUD Bengkalis	65.618.578.441,00	60.623.189.456,00	4.995.388.985,00
RSUD Kecamatan Mandau	80.857.082.253,88	53.325.123.024,00	27.531.959.229,88
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.917.240.247,00	9.512.340.478,00	3.404.899.769,00
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	5.899.288.765,00	25.576.435.953,00	(19.677.147.188,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.345.070.269,00	4.739.952.262,00	605.118.007,00
Dinas Pemadam Kebakaran	8.389.589.018,00	8.098.539.784,00	291.049.234,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	12.549.515.390,00	11.302.953.077,00	1.246.562.313,00
Dinas Sosial	6.378.893.015,00	6.054.990.518,00	323.902.497,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.019.126.876,00	2.456.212.809,00	1.562.914.067,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.138.687.159,00	2.731.955.070,00	1.406.732.089,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.165.257.523,00	1.094.567.250,00	70.690.273,00
Dinas Lingkungan Hidup	25.871.592.683,00	21.019.037.297,00	4.852.555.386,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.626.233.267,00	6.028.437.577,00	1.597.795.690,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	22.181.619.919,00	16.251.916.968,00	5.929.702.951,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.308.530.022,00	2.541.147.448,00	1.767.382.574,00
Dinas Perhubungan	36.198.764.758,00	10.534.330.177,00	25.664.434.581,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	4.466.803.083,00	3.045.081.284,00	1.421.721.799,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2.647.101.128,00	2.058.162.204,00	588.938.924,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	2.238.629.589,00	1.742.589.386,00	496.040.203,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	12.713.842.628,00	8.160.688.718,00	4.553.153.910,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.194.906.062,00	2.786.756.024,00	408.150.038,00
Dinas Perikanan	3.552.790.068,00	3.143.680.581,00	409.109.487,00
Dinas Perkebunan	2.091.755.778,00	1050452705,00	1.041.303.073,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertenakan	4.460.996.378,00	5.191.601.531,00	(730.605.153,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.969.410.452,00	7.305.280.879,00	1.664.129.573,00
Sekretariat Daerah	28.268.888.753,00	25.186.761.078,00	3.082.127.675,00
Sekretariat DPRD	14.840.291.671,00	11.808.997.425,00	3.031.294.246,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.387.497.947,00	3.635.243.547,00	1.752.254.400,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	15.731.571.397,00	15.867.875.253,00	(136.303.856,00)
Badan Pendapatan Daerah	6.710.300.227,00	4.478.432.186,00	2.231.868.041,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.810.921.878,00	3.903.503.035,00	(92.581.157,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	2.172.979.416,00	1.710.902.965,00	462.076.451,00
Inspektorat	1.546.752.540,00	1.146.491.494,00	400.261.046,00
Kantor Camat Bengkulu	3.716.321.388,00	2.994.265.973,00	722.055.415,00
Kantor Camat Bantan	1.423.403.605,00	1.165.755.000,00	257.648.605,00
Kantor Camat Bukit Batu	2.520.889.275,00	1.985.625.508,00	535.263.767,00
Kantor Camat Siak Kecil	1.359.926.316,00	1.021.222.562,00	338.703.754,00
Kantor Camat Bandar Laksmas	1.566.729.624,00	1.401.052.767,00	165.676.857,00
Kantor Camat Rupal	4.562.616.173,00	3.676.748.537,00	885.867.636,00
Kantor Camat Rupal Utara	1.583.505.748,00	1.277.279.982,00	306.225.766,00
Kantor Camat Mandau	15.277.447.825,00	11.634.910.608,00	3.642.537.217,00
Kantor Camat Pinggir	3.610.363.660,00	2.781.886.076,00	828.477.584,00
Kantor Camat Batin Solapan	2.597.233.644,00	1.486.792.805,00	1.110.440.839,00
Kantor Camat Talang Muandau	1.974.923.975,00	1.436.616.670,00	538.307.305,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.524.692.483,00	942.993.249,00	581.699.234,00
Jumlah	708.725.207.438,56	631.426.922.790,00	77.298.284.648,56

5.4.2.A.d Beban Pemeliharaan

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
142.043.212.605,74	100.416.766.337,90	41.626.446.267,84

Beban Pemeliharaan menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.224 Rincian Realisasi Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.392.789.541,00	30.785.810.813,00	7.606.978.728,00
Beban Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	19.105.886.360,74	8.535.160.718,97	10.570.725.641,77
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	83.412.550.457,00	59.489.005.544,93	23.923.544.912,07
Beban Pemeliharaan Jalan	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jembatan	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan Gedung	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Tanah	85.763.000,00	78.485.000,00	7.278.000,00
Beban pemeliharaan peralatan/perengkapan gedung kantor-LO	0,00	0,00	0,00
Beban service peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan keamanan-LO	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan BLUD	867.575.247,00	1.499.524.261,00	(631.949.014,00)
Beban Pemeliharaan Aset lainnya	178.648.000,00	28.780.000,00	149.868.000,00
Jumlah	142.043.212.605,74	100.416.766.337,90	41.626.446.267,84

Tabel 5.225 Rincian Realisasi Beban Pemeliharaan Per OPD

OPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	11.263.468.618,00	2.572.281.172,00	8.691.187.446,00
Dinas Kesehatan	1.406.896.316,00	1.946.206.350,00	(539.310.034,00)
RSUD Bengkulu	1.611.931.770,00	1.355.931.438,00	256.000.332,00
RSUD Kecamatan Mandau	297.551.867,00	1.034.931.890,00	(737.380.023,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79.197.041.860,00	58.728.477.997,93	20.468.563.862,07
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	1.185.844.207,00	2.374.254.900,00	(1.188.410.693,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah	976.092.125,00	450.732.300,00	525.359.825,00
Dinas Pemadam Kebakaran	922.070.031,00	817.927.826,00	104.142.205,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	245.700.000,00	124.980.000,00	120.720.000,00
Dinas Sosial	579.341.933,00	359.924.623,00	219.417.310,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	203.245.000,00	219.641.100,00	(16.396.100,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	164.790.295,00	132.975.200,00	31.815.095,00
Dinas Ketahanan Pangan	339.322.168,00	346.510.070,00	(7.187.902,00)
Dinas Lingkungan Hidup	3.551.531.742,00	1.989.606.358,00	1.561.925.384,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	467.354.000,00	405.220.950,00	62.133.050,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	725.477.993,00	586.429.955,00	139.048.038,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	437.100.245,74	343.912.730,00	93.187.515,74
Dinas Perhubungan	9.903.138.019,00	4.221.898.050,00	5.681.239.969,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	491.449.721,00	914.840.299,50	(423.390.578,50)
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	536.502.564,00	451.034.836,00	85.467.728,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	480.815.863,00	503.540.865,00	(22.725.002,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	602.411.360,00	732.013.260,00	(129.601.900,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.214.609.270,00	333.678.141,00	880.931.129,00
Dinas Perikanan	601.067.852,00	507.663.701,00	93.404.151,00
Dinas Perkebunan	2.931.767.863,00	239.671.028,00	2.692.096.835,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertenakan	863.312.900,00	1.320.371.755,00	(457.058.855,00)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	208.023.675,00	218.795.050,00	(10.771.375,00)
Sekretariat Daerah	8.975.345.665,00	7.939.396.495,00	1.035.949.170,00
Sekretariat DPRD	2.054.520.115,00	1.887.569.748,32	166.950.366,68
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	678.103.617,00	550.786.081,00	127.317.536,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	2.344.540.796,00	2.237.418.862,00	107.121.934,00
Daerah			
Badan Pendapatan Daerah	2.309.616.763,00	1.109.564.760,15	1.200.052.002,85
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	478.043.884,00	391.402.300,00	86.641.584,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	423.438.825,00	432.001.100,00	(8.562.275,00)
Inspektorat	217.383.069,00	363.387.906,00	(146.004.837,00)
Kantor Camat Bengkalis	349.417.800,00	133.325.600,00	216.092.200,00
Kantor Camat Bantan	22.440.000,00	11.250.000,00	11.190.000,00
Kantor Camat Bukit Batu	123.536.798,00	210.426.113,00	(86.889.315,00)
Kantor Camat Siak Kecil	90.890.500,00	83.971.750,00	6.918.750,00
Kantor Camat Bandar Laksmana	378.449.998,00	225.402.185,00	153.047.813,00
Kantor Camat Rupal	518.355.625,00	345.599.650,00	172.755.975,00
Kantor Camat Rupal Utara	252.304.750,00	202.482.850,00	49.821.900,00
Kantor Camat Mandau	754.036.491,00	652.650.000,00	101.386.491,00
Kantor Camat Pinggir	195.080.000,00	69.740.000,00	125.340.000,00
Kantor Camat Batin Solapan	71.693.289,00	81.599.201,00	(9.905.912,00)
Kantor Camat Talang Muandau	116.270.000,00	74.257.848,00	42.012.152,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	281.885.363,00	181.082.043,00	100.803.320,00
Jumlah	142.043.212.605,74	100.416.766.337,90	41.626.446.267,84

5.4.2.A.e Beban Perjalanan Dinas

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
238.533.506.012,00	153.646.382.311,50	84.887.123.700,50

Rincian Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.226 Rincian Realisasi Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	111.684.322.375,00	83.262.777.078,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa	126.849.183.637,00	68.634.848.662,50
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	1.748.756.571,00
Jumlah	238.533.506.012,00	153.646.382.311,50

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas periode 31 Desember tahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp238.533.506.012,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.227 Rincian Realisasi Beban Perjalanan Dinas Per OPD

OPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	8.959.821.954,00	6.914.615.585,00	2.045.206.369,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Kesehatan	20.056.814.638,00	13.850.861.404,00	6.205.953.234,00
RSUD Bengkalis	1.139.477.746,00	544.897.194,00	594.580.552,00
RSUD Kecamatan Mandau	1.224.849.169,00	613.398.980,00	611.450.189,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.818.877.786,00	3.467.196.026,00	5.351.681.760,00
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	4.495.582.438,00	1.431.524.305,00	3.064.058.133,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.553.616.733,00	2.139.013.660,00	1.414.603.073,00
Dinas Pemadam kebakaran	1.734.116.662,00	977.012.103,00	757.104.559,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.203.406.472,00	2.735.016.913,00	(531.610.441,00)
Dinas Sosial	3.745.058.247,00	2.290.577.015,00	1.454.481.232,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.598.544.057,00	1.118.067.319,00	1.480.476.738,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.766.301.002,00	1.733.910.285,00	2.032.390.717,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.777.361.223,00	1.712.559.585,00	64.801.638,00
Dinas Lingkungan Hidup	4.387.694.682,00	3.025.875.045,00	1.361.819.637,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	3.219.561.598,00	2.048.437.962,00	1.171.123.636,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	6.046.417.576,00	4.592.789.690,00	1.453.627.886,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.552.583.911,00	1.482.225.548,00	2.070.358.363,00
Dinas Perhubungan	3.205.884.799,00	1.953.265.198,00	1.252.619.601,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	3.832.472.134,00	1.477.017.844,50	2.355.454.289,50
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	4.634.410.790,00	3.691.088.483,00	943.322.307,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	2.256.180.538,00	1.019.609.808,00	1.236.570.730,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga	5.542.540.168,00	2.498.915.791,00	3.043.624.377,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.377.522.034,00	895.864.857,00	481.657.177,00
Dinas Perikanan	3.389.883.391,00	2.237.017.521,00	1.152.865.870,00
Dinas Perkebunan	4.571.082.648,00	205.173.195,00	2.519.350.453,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan	3.195.721.274,00	284.679.662,00	348.924.651,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.527.132.869,00	3.781.020.639,00	2.746.112.230,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sekretariat Daerah	29.104.689.076,00	18.390.775.603,00	10.713.913.473,00
Sekretariat DPRD	33.088.677.254,00	24.842.914.353,00	8.245.762.901,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.584.255.405,00	5.346.981.503,00	2.237.273.902,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.137.286.166,00	9.449.234.188,00	4.688.051.978,00
Badan Pendapatan Daerah	11.757.248.455,00	7.431.895.260,00	4.325.353.195,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.685.839.362,00	2.000.710.135,00	1.685.129.227,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	2.144.269.915,00	1.607.532.365,00	536.737.550,00
Inspektorat	4.888.045.141,00	2.676.487.594,00	2.211.557.547,00
Kantor Camat Bengkalis	845.227.874,00	499.350.041,00	345.877.833,00
Kantor Camat Bantan	498.275.905,00	394.996.000,00	103.279.905,00
Kantor Camat Bukit Batu	724.187.565,00	417.939.695,00	306.247.870,00
Kantor Camat Siak Kecil	753.300.000,00	458.620.244,00	294.679.756,00
Kantor Camat Bandar Laksmana	707.267.468,00	632.936.800,00	74.330.668,00
Kantor Camat Rupal	1.336.359.072,00	1.132.173.461,00	204.185.611,00
Kantor Camat Rupal Utara	1.081.417.650,00	673.358.000,00	408.059.650,00
Kantor Camat Mandau	1.903.192.069,00	1.577.343.280,00	325.848.789,00
Kantor Camat Pinggir	942.105.385,00	587.096.000,00	355.009.385,00
Kantor Camat Batin Solapan	997.570.700,00	760.249.800,00	237.320.900,00
Kantor Camat Talang Muandau	1.151.760.878,00	896.825.207,00	254.935.671,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.389.614.133,00	738.655.204,00	650.958.929,00
Jumlah	238.533.506.012,00	153.646.382.311,50	84.887.123.700,50

5.4.2.A.f Beban Subsidi

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/Penurunan
23.970.315.000,00	10.642.584.920,00	13.327.730.080,00

Beban Subsidi merupakan Beban yang dikeluarkan dan dikelola melalui PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Kabupaten Bengkalis dengan realisasi periode 31 Desember Tahun anggaran 2022 sebesar Rp23.970.315.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.228 Rincian Realisasi Beban Subsidi

Beban Subsidi	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Subsidi kepada Perusahaan/ Lembaga (PDAM)	23.970.315.000,00	10.642.584.920,00	13.327.730.080,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Jumlah	23.970.315.000,00	10.642.584.920,00	13.327.730.080,00
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

5.4.2.A.g Beban Hibah

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
104.167.621.636,99	65.868.005.997,87	38.299.615.639,12

Rincian Beban Hibah per 31 Desember 2022 terdiri dari:

Tabel 5.229 Rincian Realisasi Beban Hibah

Beban Hibah	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Beban Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada OPD	104.167.621.636,99	64.281.024.966,87
Beban Hibah dana BOS	0,00	0,00
Beban Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta	0,00	0,00
Beban Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00
Beban Hibah kepada kelompok/anggota Masyarakat	0,00	0,00
Beban Hibah kepada Pemerintah	0,00	0,00
Partai Politik	0,00	1.586.981.031,00
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	0,00	0,00
Jumlah	104.167.621.636,99	65.868.005.997,87

Realisasi Beban hibah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp104.167.621.636,99 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.230 Rincian Realisasi Beban Hibah Per OPD

OPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	9.675.808.138,41	9.425.194.951,87	250.613.186,54
Dinas Kesehatan	496.135.899,00	428.873.196,00	67.262.703,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.671.183.938,58	39.256.027.352,00	(20.584.843.413,42)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	27.340.440.313,00	0,00	27.340.440.313,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Sosial	1.052.582.220,00	598.238.272,00	454.343.948,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.838.000,00	0,00	21.838.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	24.628.690.455,00	6.647.749.777,00	17.980.940.678,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
Dinas Perikanan	399.251.185,00	1.099.164.360,00	(699.913.175,00)
Sekretariat Daerah	19.461.606.813,00	6.549.664.850,00	12.911.941.963,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertenakan	19.900.000,00	276.112.208,00	(256.212.208,00)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.881.246.000,00	1.586.981.031,00	294.264.969,00
Kecamatan Mandau	218.938.675,00	0,00	218.938.675,00
Jumlah	104.167.621.636,99	65.868.005.997,87	38.299.615.639,12

5.4.2.A.h Beban Bantuan Sosial

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
31.227.797.850,00	37.194.371.163,00	(5.966.573.313,00)

Rincian Beban Bantuan Sosial menurut jenisnya sebagai berikut:

Tabel 5.231 Realisasi Beban bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Beban Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat pada OPD	31.227.797.850,00	37.194.371.163,00
Jumlah	31.227.797.850,00	37.194.371.163,00

Realisasi Beban bantuan sosial per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp31.227.797.850,00 dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.232 Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial Per OPD

OPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	640.000,00	(640.000,00)
Kecamatan Mandau	0,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)
Dinas Sosial	31.227.797.850,00	37.189.231.163,00	(5.961.433.313,00)
PPKD	0,00	0,00	0,00
Jumlah	31.227.797.850,00	37.194.371.163,00	(5.966.573.313,00)

5.4.2.A.i Beban Penyusutan

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
805.798.577.142,77	838.152.774.546,60	(32.354.197.403,83)

Beban Penyusutan menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.233 Rincian Realisasi Beban Penyusutan

Beban Penyusutan	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	125.330.246.074,17	120.043.650.638,20
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	110.837.786.949,00	94.245.796.640,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	569.463.741.883,93	623.584.472.076,73
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	166.802.235,67	278.855.191,67
Jumlah	805.798.577.142,77	838.152.774.546,60

Beban Penyusutan adalah Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan sebelum Tahun Anggaran 2022 dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dilakukan penyusutan pada posisi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp805.798.577.142,77 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.234 Rincian Realisasi Beban Penyusutan Per OPD

OPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	56.075.043.674,39	52.455.418.238,11	3.619.625.436,28
Dinas Kesehatan	17.849.767.167,40	15.541.041.576,00	2.308.725.591,40
RSUD Bengkalis	27.843.275.828,00	26.632.187.525,95	1.211.088.302,05
RSUD Kecamatan Mandau	18.018.501.303,82	19.270.728.008,00	(1.252.226.704,18)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	370.802.124.851,51	445.885.308.308,44	(75.083.183.456,93)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pemukiman, Perumahan dan pertanahan	122.310.043.699,17	136.750.007.498,96	(14.439.963.799,79)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.249.267.555,00	953.422.524,00	295.845.031,00
Dinas Pemadam Kebakaran	1.064.082.063,00	989.173.224,00	74.908.839,00
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	472.672.167,00	575.734.489,00	(103.062.322,00)
Dinas Sosial	2.966.872.458,10	2.911.056.693,00	55.815.765,10
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.328.840.372,00	1.300.884.037,00	27.956.335,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	372.316.993,00	400.247.775,00	(27.930.782,00)
Dinas Ketahanan Pangan	251.354.141,00	286.275.891,00	(34.921.750,00)
Dinas Lingkungan Hidup	21.778.957.491,07	4.895.173.961,15	16.883.783.529,92
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.985.154.031,00	2.543.660.064,00	441.493.967,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	935.973.589,00	1.753.846.881,00	(817.873.292,00)
Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	832.174.684,00	706.294.074,00	125.880.610,00
Dinas Perhubungan	62.572.369.696,00	28.934.353.306,00	33.638.016.390,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	2.316.376.892,00	1.817.071.598,00	499.305.294,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	641.270.549,00	636.426.764,00	4.843.785,00
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu	540.243.546,00	533.032.264,00	7.211.282,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	6.797.602.449,00	7.353.985.711,00	(556.383.262,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.123.611.639,00	1.017.575.692,49	106.035.946,51
Dinas Perikanan	1.294.993.373,00	1.209.056.287,14	85.937.085,86
Dinas Perkebunan	1.032.256.013,00	118907523,00	913.348.490,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertenakan	6.096.548.531,00	5641375835,00	455.172.696,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.256.204.824,33	5.485.686.441,00	(229.481.616,67)
Sekretariat Daerah	13.521.635.224,00	14.565.416.836,19	(1.043.781.612,19)
Sekretariat DPRD	5.400.485.279,00	5.477.986.988,74	(77.501.709,74)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.774.863.500,00	1.461.598.511,00	313.264.989,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.090.134.896,00	20.693.912.120,00	(1.603.777.224,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Pendapatan Daerah	1.764.319.794,00	1.522.501.989,00	241.817.805,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	717.901.260,00	582.231.323,00	135.669.937,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	803.555.249,00	385.067.376,00	418.487.873,00
Inspektorat	358.332.593,00	220.183.008,00	138.149.585,00
Kantor Camat Bengkalis	3.135.340.756,08	3.246.285.698,00	(110.944.941,92)
Kantor Camat Bantan	1.757.807.271,01	1.779.468.378,00	(21.661.106,99)
Kantor Camat Bukit Batu	2.222.115.088,00	2.405.189.883,00	(183.074.795,00)
Kantor Camat Siak Kecil	1.150.425.997,03	1.385.289.908,00	(234.863.910,97)
Kantor Camat Bandar Laksamana	1.273.908.810,00	502.708.631,00	771.200.179,00
Kantor Camat Rupat	4.687.287.235,94	4.382.208.286,00	305.078.949,94
Kantor Camat Rupat Utara	1.800.848.101,96	1.982.111.718,43	(181.263.616,47)
Kantor Camat Mandau	6.856.826.719,23	6.798.670.982,00	58.155.737,23
Kantor Camat Pinggir	2.573.066.084,73	2.912.234.075,00	(339.167.990,27)
Kantor Camat Batin Solapan	1.294.371.988,00	462.102.746,00	832.269.242,00
Kantor Camat Talang Muandau	698.120.509,00	669.711.073,00	28.409.436,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	109.331.206,00	119.962.826,00	(10.631.620,00)
Jumlah	805.798.577.142,77	838.152.774.546,60	(32.354.197.403,83)

5.4.2.A.j Beban Amortisasi

	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
	1.243.952.992,44	1.924.210.417,75	(680.257.425,31)

Sedangkan Beban Amortisasi menurut jenisnya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.235 Rincian Realisasi Beban Amortisasi

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Amortisasi Goodwill	1.229.113.992,44	0,00	1.229.113.992,44
Beban Amortisasi Lisensi dan franchise-LO	14.839.000,00	0,00	14.839.000,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	1.924.210.417,75	(1.924.210.417,75)
Jumlah	1.243.952.992,44	1.924.210.417,75	(680.257.425,31)

Beban Amortisasi adalah Beban Amortisasi yang berasal dari Belanja Aset Tidak Berwujud Perolehan sebelum Tahun Anggaran 2022. Beban Amortisasi periode 31 Desember tahun 2022 adalah sebesar Rp1.243.952.992,44 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.236 Rincian Realisasi Beban Amortisasi Per OPD

OPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	180.282.126,00	784.504.082,00	(604.221.956,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Kesehatan	77.671.600,00	111.523.900,00	(33.852.300,00)
RSUD Bengkalis	0,00	0,00	0,00
RSUD Kecamatan Mandau	0,00	2.167.687,50	(2.167.687,50)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	115.061.750,00	92.164.104,17	22.897.645,83
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	36.137.500,00	36.137.500,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.430.000,00	12.430.000,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	15.957.250,00	10.272.770,83	5.684.479,17
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.081.250,00	0,00	2.081.250,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	18.694.500,00	18.694.500,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	51.984.875,00	49.917.500,00	2.067.375,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	18.078.125,00	0,00	18.078.125,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.229.166,67	9.875.000,00	(1.645.833,33)
Dinas Perhubungan	137.251.600,00	90.389.700,00	46.861.900,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	13.515.450,00	18.007.500,00	(4.492.050,00)
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	37.562.500,00	62.381.820,83	(24.819.320,83)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.730.560,10	8.433.371,00	(702.810,90)
Dinas Perikanan	8.291.666,67	9.950.000,00	(1.658.333,33)
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.485.000,00	0,00	12.485.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Sekretariat Daerah	28.087.810,00	18.713.800,00	9.374.010,00
Sekretariat DPRD	25.490.000,00	32.923.066,67	(7.433.066,67)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	66.999.163,00	84.213.329,33	(17.214.166,33)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	23.375.000,00	(23.375.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	292.630.614,58	335.708.750,00	(43.078.135,42)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	0,00	11.693.893,75	(11.693.893,75)
Inspektorat	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Bengkulu	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Bantan	0,00	3.437.500,00	(3.437.500,00)
Kantor Camat Bukit Batu	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Siak Kecil	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
Kantor Camat Bandar Laksmana	6.187.500,00	6.187.500,00	0,00
Kantor Camat Rupal	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Rupal Utara	0,00	6.875.000,00	(6.875.000,00)
Kantor Camat Mandau	59.937.985,42	61.983.975,00	(2.045.989,58)
Kantor Camat Pinggir	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Batin Solapan	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Talang Muandau	7.425.000,00	7.425.000,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00
PPKD	0,00	0,00	0,00
Dinas Pertanian	0,00	11.074.166,67	(11.074.166,67)
Jumlah	1.243.952.992,44	1.924.210.417,75	(680.257.425,31)

5.4.2.A.k Beban Penyisihan Piutang

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
7.394.947.953,15	9.204.270.253,09	(1.809.322.299,94)

Beban Penyisihan Piutang dapat di rincikan sebagai berikut :

Tabel 5.237 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	7.202.496.809,52	6.956.500.915,09
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	192.451.143,63	169.978.688,00
Beban Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang Sah	0,00	2.077.790.650,00
Jumlah	7.394.947.953,15	9.204.270.253,09



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Beban Penyisihan Piutang adalah Beban Penyisihan Piutang yang berasal dari Piutang sebelum Tahun Anggaran 2022 dan pada Tahun Anggaran 2022 yang disisihkan sesuai dengan kualitas umur piutang yang ditentukan pada Peraturan Bupati. Beban Penyisihan Piutang periode 31 Desember tahun 2022 adalah sebesar Rp7.394.947.953,15 dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.238 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang Per OPD

OPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
RSUD Bengkalis	0,00	2.077.790.650,00	(2.077.790.650,00)
RSUD Kecamatan Mandau	378.802.738,75	0,00	378.802.738,75
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	6.823.694.070,77	6.956.500.915,09	(132.806.844,32)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	100.262.800,00	150.608.500,00	(50.345.700,00)
Dinas Perhubungan	92.188.343,63	19.370.188,00	72.818.155,63
Jumlah	7.394.947.953,15	9.204.270.253,09	(1.809.322.299,94)

5.4.2.A.1 Beban Lain-lain

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
63.090.756.534,00	28.439.550.977,00	34.651.205.557,00

Beban Lain-lain menurut Jenisnya dapat di rincikan sebagai berikut :

Tabel 5.239 Rincian Realisasi Beban Lain-lain

Beban Lain-lain	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	62.261.160.923,00	27.799.947.265,00
Beban Tidak Terduga	0,00	9.655.040,00
Beban yang Berasal dari Belanja Modal yang Tidak Menjadi Aset	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00
Pengurangan Nilai Investasi	829.595.611,00	629.948.672,00
Aset Covid	0,00	0,00
Jumlah	63.090.756.534,00	28.439.550.977,00

Tabel 5.240 Penjelasan OPD Beban Lain-lain

Penjelasan untuk Uang yang Diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat sebagai berikut:		
Dinas Pendidikan	4.924.651.811,00	Hadiah perlombaan sebesar Rp 393.500.000 dan penghargaan suatu prestasi sebesar Rp 46.885.811,00. Beasiswa sebesar Rp 3.373.856.000 dan Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp 1.110.410.000,00
Dinas Kesehatan	11.338.603.091,00	Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp 11.211.103.091 dan Hadiah perlombaan sebesar Rp 127.500.000



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	10.565.862.000,00	Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp 720.000.000, Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp 115.862.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp 9.730.000.000
Badan penanggulangan Bencana Daerah	197.075.000,00	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 197.075.000 dan Bantuan Sosial kepada Individu Rp 106.390.000
Dinas Pemadam Kebakaran	4.500.000,00	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 4.500.000,00
Dinas Sosial	710.778.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 683.453.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 27.325.000
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	335.200.000,00	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 335.200.000
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	251.682.900,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 113.793.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 137.889.900
Dinas Ketahanan Pangan	41.870.000,00	Belanja transfer keuangan daerah dan Desa (TKDD) di Kecamatan Bantan dan Kec. Siak kecil sebesar Rp 665.000.000. dan Rp 110.000.00. Bantuan uang saku peserta kegiatan Rp 3.650.000 dan hadiah perlombaan sbesar Rp 9.000.000
Dinas Lingkungan Hidup	965.030.788,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 42.750.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 32.625.000
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	125.120.000,00	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 125.120.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	366.500.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 276.500.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 90.000.000
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.624.002.125,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 57.500.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 1.566.502.125
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	30.000.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 30.000.000
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	27.000.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 27.000.000



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	27.300.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp11.500.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 15.800.000
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	5.870.656.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp5.815.356.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 55.300.000
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47.410.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 34.810.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 12.600.000
Dinas Perikanan	226.000.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp70.400.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp155.600.000
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertenakan	1.691.207.000,00	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 1.691.207.000
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.067.800.000,00	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 1.067.800.000
Sekretariat Daerah	9.790.839.208,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 6.870.449.186 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 2.920.390.022
Sekretariat DPRD	10.500.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 10.500.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	829.595.611,00	Kerugian penyertaan modal pada PT. BLJ
Badan Pendapatan Daerah	35.900.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 28.500.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 7.400.000
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	9.000.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 9.000.000
Badan Penelitian dan Pengembangan	321.150.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 171.150.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 150.000.000
Kantor Camat Bengkulu	920.940.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 385.290.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 538.150.000
Kantor Camat Bantan	593.550.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 282.000.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp311.550.000
Kantor Camat Bukit Batu	918.325.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp462.250.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 456.075.000



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Siak Kecil	515.340.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 247.640.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 272.700.000
Kantor Camat Bandar Laksmana	578.050.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 247.950.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 330.100.000
Kantor Camat Rupat	1.284.376.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 470.676.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 813.700.000
Kantor Camat Rupat Utara	782.100.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 494.100.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 288.000.000
Kantor Camat Mandau	3.955.720.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 980.420.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 2.975.300.000
Kantor Camat Pinggir	932.750.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 301.350.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 631.400.000
Kantor Camat Batin Solapan	656.250.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 203.050.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 453.200.000
Kantor Camat Talang Muandau	476.122.000,00	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 162.522.000 dan Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 313.600.000
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42.000.000,00	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 42.000.000,00
Jumlah	63.090.756.534,00	

Realisasi Beban Lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp63.090.756.534,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.241 Rincian Realisasi Beban Lain-lain Per OPD

OPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Dinas Pendidikan	4.924.651.811,00	4.587.419.000,00	337.232.811,00
Dinas Kesehatan	11.338.603.091,00	236.964.800,00	11.101.638.291,00
RSUD Bengkalis	0,00	0,00	0,00
RSUD Kecamatan Mandau	0,00	0,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	55.800.000,00	(55.800.000,00)
Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pertanahan	10.565.862.000,00	1.109.975.000,00	9.455.887.000,00
Badan penanggulangan Bencana Daerah	197.075.000,00	1.158.220.000,00	(961.145.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Dinas Pemadam Kebakaran	4.500.000,00	13.150.000,00	(8.650.000,00)
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial	710.778.000,00	410.695.000,00	300.083.000,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	335.200.000,00	82.000.000,00	253.200.000,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	251.682.900,00	118.921.465,00	132.761.435,00
Dinas Ketahanan Pangan	41.870.000,00	787.650.000,00	(745.780.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	965.030.788,00	83.250.000,00	881.780.788,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	125.120.000,00	0,00	125.120.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	366.500.000,00	914.325.000,00	(547.825.000,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.624.002.125,00	1.390.907.000,00	233.095.125,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	27.000.000,00	96.825.000,00	(69.825.000,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	5.870.656.000,00	829.350.000,00	5.041.306.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	47.410.000,00	34.230.000,00	13.180.000,00
Dinas Perikanan	226.000.000,00	13.600.000,00	212.400.000,00
Dinas Perkebunan	0,00	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertenakan	1.691.207.000,00	74.550.000,00	1.616.657.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.067.800.000,00	764.104.000,00	303.696.000,00
Sekretariat Daerah	9.790.839.208,00	4.510.915.000,00	5.279.924.208,00
Sekretariat DPRD	10.500.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	829.595.611,00	639.603.712,00	189.991.899,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Badan Pendapatan Daerah	35.900.000,00	0,00	35.900.000,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	9.000.000,00	15.000.000,00	(6.000.000,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	321.150.000,00	160.130.000,00	161.020.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	0,00
Kantor Camat Bengkalis	920.940.000,00	448.030.000,00	472.910.000,00
Kantor Camat Bantan	593.550.000,00	470.850.000,00	122.700.000,00
Kantor Camat Bukit Batu	918.325.000,00	538.400.000,00	379.925.000,00
Kantor Camat Siak Kecil	515.340.000,00	488.675.000,00	26.665.000,00
Kantor Camat Bandar Laksmana	578.050.000,00	503.000.000,00	75.050.000,00
Kantor Camat Rupal	1.284.376.000,00	1.223.800.000,00	60.576.000,00
Kantor Camat Rupal Utara	782.100.000,00	714.500.000,00	67.600.000,00
Kantor Camat Mandau	3.955.720.000,00	4.366.366.000,00	(410.646.000,00)
Kantor Camat Pinggir	932.750.000,00	812.720.000,00	120.030.000,00
Kantor Camat Batin Solapan	656.250.000,00	398.650.000,00	257.600.000,00
Kantor Camat Talang Muandau	476.122.000,00	365.225.000,00	110.897.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42.000.000,00	15.750.000,00	26.250.000,00
Jumlah	63.090.756.534,00	28.439.550.977,00	34.651.205.557,00

5.4.2.B. Beban Transfer

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
381.135.191.639,00	279.790.490.062,00	101.344.701.577,00

Beban Transfer merupakan Beban yang dikeluarkan dan dikelola melalui PPKD Kabupaten Bengkalis untuk realisasi tahun anggaran 2022. Realisasi Beban Transfer 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp381.135.191.639,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.4.2.B.a Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
8.925.199.999,00	9.306.096.195,00	(380.896.196,00)

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan Beban yang dikeluarkan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

Tabel 5.242 Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Transfer	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	8.925.199.999,00	9.306.096.195,00	(380.896.196,00)
Jumlah	8.925.199.999,00	9.306.096.195,00	(380.896.196,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.4.2.B.b Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
2.098.906.889,00	1.959.882.773,00	139.024.116,00

Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah ini merupakan Beban yang dikeluarkan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

Tabel 5.243 Rincian Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Beban Transfer	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	2.098.906.889,00	1.959.882.773,00	139.024.116,00
Jumlah	2.098.906.889,00	1.959.882.773,00	139.024.116,00

5.4.2.B.c Beban Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
370.111.084.751,00	268.524.511.094,00	101.586.573.657,00

Beban Bantuan Keuangan merupakan Beban yang dikeluarkan dan dikelola melalui PPKD Kabupaten Bengkalis dengan realisasi periode 31 Desember Tahun anggaran 2022 sebesar Rp370.111.084.751,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.244 Rincian Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa - ADD Se-Kabupaten Bengkalis	241.018.381.000,00	241.669.300.229,00	(650.919.229,00)
Beban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa (BERMASA)	129.092.703.751,00	0,00	129.092.703.751
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa - UED/K-SP Se-Kabupaten Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Kepada Desa - INBUP-PPIP Se-Kabupaten Bengkalis	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - P3ID Se-Kabupaten Bengkalis	0,00	26.855.210.865,00	(26.855.210.865,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa - Bantuan Pilkades Se- Kabupaten Bengkalis	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Jumlah	370.111.084.751,00	268.524.511.094,00	101.586.573.657,00
---------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

5.4.3 Surplus Non Operasional

5.4.3.a Surplus dari Kegiatan Non Operasional

	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
	955.544.021,00	0,00	955.544.021,00

Tabel 5.245 Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional per OPD

OPD	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/(Penurunan)
RSUD Kabupaten Bengkalis	12.099.999,00	0,00	12.099.999,00
Satuan Polisi Pamong Praja	90.920.344,00	0,00	90.920.344,00
Perempuan dan Perlindungan Anak	12.768.700,00	0,00	12.768.700,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	11.879.100,00	0,00	11.879.100,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81.164.847,00	0,00	81.164.847,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.828.282,00	0,00	12.828.282,00
Dinas Perikanan	28.853.332,00	0,00	28.853.332,00
Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertenakan	153.245.022,00	0,00	153.245.022,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	89.000.000,00	0,00	89.000.000,00
Sekretariat DPRD	41.623.999,00	0,00	41.623.999,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	43.134.502,00	0,00	43.134.502,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	324.092.227,00	0,00	324.092.227,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	20.699.100,00	0,00	20.699.100,00
Kecamatan Pinggir	21.234.567,00	0,00	21.234.567,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Jumlah	955.544.021,00	0,00	955.544.021,00
--------	----------------	------	----------------

5.4.4. Defisit Non Operasional

5.4.4.a Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
0,00	0,00	0,00

5.4.5. Surplus/Defisit - LO

Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
(339.231.839.440,46)	(434.592.113.603,75)	95.360.274.163,29

Jumlah Defisit sebesar Rp339.231.839.440,46 tersebut merupakan Surplus/Defisit-LO Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 31 Desember tahun anggaran 2022 dimana jumlah pendapatan-LO secara keseluruhan lebih kecil dari jumlah Beban. Total Pendapatan-LO selama periode 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp3.497.177.060.292,47 sementara total Beban selama periode 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp3.837.364.443.753,93 serta Surplus/Defisit Penjualan sebelum Pos luar biasa periode 31 Desember tahun 2022 sebesar Rp955.544.021,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5. 5. Penjelasan Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris. Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan selama TA 2022 dan TA 2021 terdiri atas:

Tabel 5. 247 Rincian Arus Kas

Arus Kas	Tahun 2022	Tahun 2021
Aktivitas Operasi	221.648.942.997,42	1.708.440.331.169,78
Aktivitas Investasi	(1.108.759.449.096,00)	(679.492.555.913,42)
Aktivitas Pendanaan	419.833.002,00	0,00
Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Jumlah	(886.690.673.096,58)	1.028.947.775.256,36

Realisasi Arus Kas Bersih selama TA 2022 terjadi defisit sebesar Rp886.690.673.096,58 sedangkan realisasi TA 2021 terjadi surplus sebesar Rp1.028.947.775.256,36 Realisasi kas bersih dapat dirinci sebagai berikut:

5. 5. 1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Tahun 2022	Tahun 2021
	221.648.942.997,42	1.708.440.331.169,78

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama satu periode akuntansi.

Tabel 5. 248 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas	3.328.458.943.832,30	4.321.908.588.453,72
Arus Kas Keluar	3.106.810.000.834,88	2.613.468.257.283,94
Jumlah	221.648.942.997,42	1.708.440.331.169,78

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama TA 2022 sebesar Rp221.648.942.997,42 sedangkan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.708.440.331.169,78 . Adapun rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

A. Arus Masuk Kas

Realisasi Arus Masuk Kas sejumlah Rp3.328.458.943.832,30 merupakan Arus Masuk Kas atas Aktivitas Operasi yang berasal dari :

a. Penerimaan Pajak Daerah

Saldo Penerimaan Pajak Daerah sejumlah Rp94.213.069.616,00 merupakan Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah selama TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 249 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021
Pajak Hotel	3.622.970.810,00	2.771.752.685,00
Pajak Restoran	15.094.975.589,00	11.220.797.099,00
Pajak Hiburan	1.631.703.647,00	490.353.540,00
Pajak Reklame	1.302.150.406,00	768.097.825,00
Pajak Penerangan Jalan	32.856.985.614,00	37.354.844.432,00
Pajak Parkir	386.354.005,00	312.335.167,00
Pajak Air Tanah	1.304.374.066,00	607.489.510,00
Pajak Sarang Burung Walet	567.110.748,00	497.533.239,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.924.910.650,00	4.178.288.650,00
Pajak Bagi Hasil dari PBB P2	24.356.482.448,00	19.844.933.613,00
Pajak BPHTB	6.165.051.633,00	4.309.087.851,00
Jumlah	94.213.069.616,00	82.355.513.611,00

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah sejumlah Rp11.711.114.828,00 merupakan Saldo Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah selama TA 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 250 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021
Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	557.204.700,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.317.525.000,00	1.137.056.000,00
Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum	687.400.000,00	627.250.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.419.738.500,00	1.448.109.500,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	44.276.000,00	38.627.500,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	180.883.000,00	168.056.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	358.835.000,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	598.740.000,00	551.193.000,00
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	423.950.000,00	349.035.000,00
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/ Pertokoan	177.370.000,00	469.062.000,00
Retribusi Terminal	8.021.000,00	7.899.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa	239.185.000,00	148.340.000,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rumah Potong Hewan	11.080.000,00	11.915.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	4.212.463.347,00	3.619.944.263,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	171.274.000,00	9.150.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	97.924.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Retribusi Izin Usaha Perikanan	301.822.600,00	177.840.000,00
Retribusi izin mendirikan Bangunan	0,00	1.008.819.275,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.460.627.381,00	0,00
Jumlah	11.711.114.828,00	10.329.501.238,00

c. **Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan deviden dari PT. Bank Riau Kepri selama TA 2022 dan 2021 sebesar Rp27.311.794.580,00 dan Rp33.292.209.969,00 yang berasal dari :

Tabel 5. 251 Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2022	Tahun 2021
PT. Bank Riau	27.311.794.580,00	33.292.209.969,00
Jumlah	27.311.794.580,00	33.292.209.969,00

d. **Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah**

Penerimaan Lain – lain PAD yang Sah adalah penerimaan diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Bengkalis selama TA 2022 dan 2021 sebesar Rp215.442.862.328,15 dan Rp158.257.869.755,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 252 Rincian Arus Masuk Kas Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2022	Tahun 2021
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Hasil Penjualan BMD Tidak Dipisahkan	0,00	11.660.000,00
Jasa Giro Kas Daerah	16.842.971.640,00	9.534.038.489,00
Jasa Giro Pemegang Kas	483.922.532,00	580.952.906,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	1.636.362,00
Pendapatan Bunga	0,00	13.659.531.694,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	4.400.000,00
Pendapatan Denda Pajak	328.161.551,00	228.740.417,00
Hasil Eksekusi Jaminan	24.944.402.619,00	52.621.357,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	69.156.368,00	337.689.399,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	6.162.683.332,15	9.054.842.068,72
Pendapatan BLUD	166.301.167.393,00	110.382.472.561,00
Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	14.287.755.300,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	121.529.202,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	310.396.893,00	0,00
Jumlah	215.442.862.328,15	158.257.869.755,72



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

e. Penerimaan Dana Bagi Hasil

Keasasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Bengkulu terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (SDA) TA 2022 dan 2021 sejumlah Rp2.077.206.468.039,00 dan Rp3.066.476.067.593,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 253 Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil

Penerimaan Dana Bagi Hasil	Tahun 2022	Tahun 2021
Dana Bagi Hasil Pajak	1.577.609.899.644,00	2.658.352.990.601,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)	499.596.568.395,00	408.123.076.992,00
Jumlah	2.077.206.468.039,00	3.066.476.067.593,00

Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Bengkulu untuk periode selama TA 2022 dan 2021 sejumlah Rp1.577.609.899.644,00 dan Rp2.658.352.990.601,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 254 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	Tahun 2022	Tahun 2021
Bagi Hasil dari PBB	1.527.091.597.644,00	2.602.448.020.701,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	49.712.508.000,00	54.927.302.100,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29	805.794.000,00	977.667.800,00
Jumlah	1.577.609.899.644,00	2.658.352.990.601,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu untuk periode selama TA 2022 dan 2021 Rp499.596.568.395,00 dan sebesar Rp408.123.076.992,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 255 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Bagi Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Tahun 2022	Tahun 2021
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas	478.222.145.000,00	378.598.933.710,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minerba	2.892.430.000,00	2.071.794.136,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	16.523.519.000,00	25.777.841.891,00
Cukai Hasil Tembakau	163.395,00	7.105,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.958.311.000,00	1.674.500.150,00
Jumlah	499.596.568.395,00	408.123.076.992,00

f. Penerimaan Dana Alokasi Umum

Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu selama TA 2022 dan 2021 sebesar Rp335.727.628.000,00 dan Rp336.787.052.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 256 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Alokasi Umum

Penerimaan Dana Alokasi Umum	Tahun 2022	Tahun 2021
Dana Alokasi Umum	335.727.628.000,00	336.787.052.000,00
Jumlah	335.727.628.000,00	336.787.052.000,00

h. Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik Kabupaten Bengkulu Selatan selama TA 2022 dan 2021 sebesar Rp77.629.486.104,00 dan Rp93.311.533.266,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 257 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	Tahun 2022	Tahun 2021
DAK Bidang Pendidikan	29.801.633.298,00	32.354.346.087,00
DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	22.848.236.670,00	24.724.290.403,00
DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler	799.880.000,00	0,00
DAK Bidang Pertanian Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	1.972.898.568,00
DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	1.082.312.360,00
DAK Bidang Jalan Reguler	12.524.336.282,00	14.535.552.962,00
DAK Fisik Bidang Jalan Penugasan	0,00	4.556.432.300,00
DAK Bidang Air Minum Reguler	7.350.954.854,00	0,00
DAK Bidang Air Minum Penugasan	0,00	5.279.878.806,00
DAK Bidang Sanitasi Reguler	4.304.445.000,00	0,00
DAK Bidang Sanitasi Penugasan	0,00	2.632.652.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	0,00	299.903.960,00
DAK Bidang Transportasi Laut Reguler	0,00	3.222.095.169,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	0,00	1.104.368.651,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00	397.882.000,00
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	1.148.920.000,00
Jumlah	77.629.486.104,00	93.311.533.266,00

i. Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik Kabupaten Bengkulu Selatan selama TA 2022 dan 2021 sebesar Rp210.710.908.447,00 dan Rp146.640.483.916,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 258 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik

Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Tahun 2022	Tahun 2021
DAK Non Fisik-BOS Reguler	81.602.875.514,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	0,00	240.000.000,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	240.000.000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	104.271.442.960,00	112.812.546.000,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru	2.411.750.000,00	993.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	6.678.030.000,00	7.089.600.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	773.400.000,00	1.126.300.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.940.178.510,00	18.252.050.145,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.277.408.598,00	2.769.822.625,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	350.280.600,00	390.304.000,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	1.991.251.146,00
DAK Non Fisik Dana Fasilitas Penanaman Modal	378.951.300,00	326.122.000,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	362.760.965,00	187.488.000,00
DAK Non Fisik- Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	663.830.000,00	222.000.000,00
Jumlah	210.710.908.447,00	146.640.483.916,00

j. **Penerimaan Dana Insentif Daerah**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Insentif Daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode selama TA 2022 sejumlah Rp0,00 sedangkan pada TA 2021 sebesar Rp31.134.698.000,00 dengan rincian:

Tabel 5. 259 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Insentif Daerah

Penerimaan Dana Insentif Daerah	Tahun 2022	Tahun 2021
Dana Insentif Daerah	0,00	31.134.698.000,00
Jumlah	0,00	31.134.698.000,00

k. **Penerimaan Dana Desa**

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana Desa Kabupaten Bengkalis untuk periode selama TA 2022 sejumlah Rp127.024.597.939,00 sedangkan pada TA 2021 sebesar Rp133.964.917.167,00 dengan rincian:

Tabel 5. 260 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Desa

Penerimaan Dana Desa	Tahun 2022	Tahun 2021
Dana Desa	127.024.597.939,00	133.964.917.167,00
Jumlah	127.024.597.939,00	133.964.917.167,00

l. **Penerimaan Bantuan Keuangan**

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Riau selama TA 2022 dan 2021 adalah dan Rp12.957.842.500,00 dan Rp17.763.201.160,00 dengan rincian:

Tabel 5. 261 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Bantuan Keuangan

Penerimaan Dana Bantuan Keuangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	12.957.842.500,00	17.763.201.600,00
Jumlah	12.957.842.500,00	17.763.201.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

m. Penerimaan Hibah

Pada tahun ini Penerimaan hibah teralisasi sebesar Rp808.958,15 yang merupakan sisa kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis Proyek Dana Hibah GF ATM Komponen TB pada Dinas Kesehatan yang bersumber dari dana hibah pusat tahun 2010, sehingga arus kas masuk pada pos Pendapatan Hibah selama TA 2022 dan 2021 sebesar Rp808.958,15 dan Rp82.544.910.000,00

Tabel 5. 262 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Hibah	808.958,15	82.544.910.000,00
Jumlah	808.958,15	82.544.910.000,00

n. Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Penerimaan dari Pendapatan Lainnya terdiri atas Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pendapatan Lainnya selama TA 2022 dan 2021 sejumlah Rp138.522.362.493,00 dan Rp129.050.630.338,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 263 Rincian Arus dari Pendapatan Lainnya

Penerimaan Pendapatan Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	138.522.362.493,00	129.050.630.338,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	138.522.362.493,00	129.050.630.338,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan transfer Pemerintah Provinsi Realisasi penerimaan bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah selama TA 2022 dan 2021 sejumlah Rp138.522.362.493,00 dan Rp129.050.630.338,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 264 Rincian Arus Kas Masuk Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Tahun 2022	Tahun 2021
Pajak Kendaraan Bermotor	29.967.419.478,00	38.126.230.282,51
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.785.220.348,00	22.117.233.130,49
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	45.364.296.738,00	41.675.574.344,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.082.953.355,00	1.070.056.597,00
Pajak Rokok	31.322.472.574,00	26.061.535.984,00
Jumlah	138.522.362.493,00	129.050.630.338,00

B. Arus Keluar Kas

Realisasi arus Keluar Kas sejumlah Rp3.106.810.000.834,88 merupakan saldo Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

Tabel 5. 265 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas	Tahun 2022	Tahun 2021
Pembayaran Pegawai	1.052.966.396.064,00	1.018.335.441.328,20
Pembayaran Barang dan Jasa	1.381.017.141.616,88	1.097.486.691.596,15
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	23.970.315.000,00	10.642.584.920,00
Pembayaran Belanja Hibah	109.378.573.578,00	35.834.828.114,59
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	31.227.797.850,00	37.194.371.163,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Pembayaran Tak Terduga	0,00	9.655.040,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	11.024.106.888,00	11.265.978.968,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	497.225.669.838,00	402.698.706.154,00
Jumlah	3.106.810.000.834,88	2.613.468.257.283,94

5. 5. 2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Tahun 2022	Tahun 2021
	(1.108.759.449.096,00)	(679.492.555.913,42)

Arus kas bersih dari aktivitas Investasi aset Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama TA 2022 dan 2021 sebesar defisit Rp1.108.759.449.096,00 dan defisit Rp679.492.555.913,42 terdiri dari :

Tabel 5. 266 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Kas Masuk	955.544.021,00	0,00
Arus Kas Keluar	1.109.714.993.117,00	679.492.555.913,42
Jumlah	(1.108.759.449.096,00)	(679.492.555.913,42)

A. Arus Kas Masuk

Realisasi Arus Kas Masuk sejumlah Rp955.544.021,00 merupakan Arus Kas Masuk atas Aktivitas Investasi dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5. 267 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021
PPKD	955.544.021,00	0,00
Jumlah	955.544.021,00	0,00

B. Arus Keluar Kas

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi selama TA 2022 dan TA 2021 sebesar Rp1.109.714.993.117,00 dan Rp679.492.555.913,42. Arus Keluar Kas merupakan nilai kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memperoleh aset tetap. Nilai arus keluar kas adalah sebesar Rp1.109.714.993.117,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 268 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas	Tahun 2022	Tahun 2021
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	0,00	412.940.853,70
Perolehan Peralatan dan Mesin	214.056.580.897,00	121.410.901.246,66
Perolehan Gedung dan Bangunan	163.846.016.961,00	131.209.405.612,36
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	720.331.145.069,00	415.733.389.785,70



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Perolehan Aset Tetap Lainnya	10.867.289.576,00	10.725.918.415,00
Perolehan Aset lainnya	613.960.614,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah	1.109.714.993.117,00	679.492.555.913,42

5. 5. 3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2022	Tahun 2021
	419.833.002,00	0,00

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, dan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. 269 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Masuk Kas	419.833.002,00	0,00
Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Jumlah	419.833.002,00	0,00

5. 5. 4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2022	Tahun 2021
	0,00	0,00

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pendanaan pemerintah, namun mempengaruhi nilai kas. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Selama TA 2022 aktivitas transitoris yang terjadi berupa penerimaan dan pengeluaran dari Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00 merupakan selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 270 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2022	Tahun 2021
Arus Kas Masuk	214.744.876.457,00	136.003.660.775,45
Arus Kas Keluar	214.744.876.457,00	136.003.660.775,45
Jumlah	0,00	0,00

A. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2022	Tahun 2021
	214.744.876.457,00	136.003.660.775,45



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 271 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas	Tahun 2022	Tahun 2021
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	214.744.876.457,00	136.003.660.775,45
Jumlah	214.744.876.457,00	136.003.660.775,45

a) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tahun 2022	Tahun 2021
	214.744.876.457,00	136.003.660.775,45

Penerimaan Perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp214.744.876.457,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 272 Rincian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK	Tahun 2022	Tahun 2021
PPh	63.901.900.108,00	59.293.695.523,00
PPN	86.609.782.653,00	0,00
IWP	64.233.193.696,00	15.247.834.820,15
Taperum	0,00	61.462.130.432,30
Jumlah	214.744.876.457,00	136.003.660.775,45

B. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2022	Tahun 2021
	214.744.876.457,00	136.003.660.775,45

Tabel 5. 273 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas	Tahun 2022	Tahun 2021
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	214.744.876.457,00	136.003.660.775,45
SP2D - SPJ	0,00	0,00
Jumlah	214.744.876.457,00	136.003.660.775,45

a) Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tahun 2022	Tahun 2021
	214.744.876.457,00	136.003.660.775,45

Pengeluaran Perhitungan pihak ketiga (PFK) sebesar Rp214.744.876.457,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 274 Rincian Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

PFK	Tahun 2022	Tahun 2021
PPh	63.901.900.108,00	59.293.695.523,00
PPN	86.609.782.653,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

IWP	64.233.193.696,00	15.247.834.820,15
Taperum	0,00	61.462.130.432,30
Jumlah	214.744.876.457,00	136.003.660.775,45

5. 5. 5. Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	Tahun 2022	Tahun 2021
	(886.690.673.096,58)	1.028.947.775.256,36

Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas selama TA 2022 adalah Rp886.690.673.096,58 merupakan penjumlahan dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2022 sebesar Rp221.648.942.997,42 dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2022 sebesar minus Rp1.108.759.449.096,00 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2022 sebesar Rp419.833.002,00 serta Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2022 sebesar Rp0,00.

5. 5. 6. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	Tahun 2022	Tahun 2021
	293.268.675.966,33	1.179.959.349.062,91

Saldo akhir Kas sebesar Rp293.268.675.966,33 merupakan jumlah keseluruhan kas selama TA 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.179.959.349.062,91. Saldo Kas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 275 Rincian Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas di BUD	277.994.694.649,52	1.168.554.249.066,37
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.540.999.407,00	1.581.400,00
Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00	6.308,00
Kas di Bendahara Penerimaan	1.179.559,00	1.758.070,00
Kas di Bendahara BLUD	11.452.247.027,66	11.349.091.889,54
Kas di Bendahara BOS	21.048.100,00	52.662.329,00
Kas Lainnya	258.507.223,15	0,00
Jumlah	293.268.675.966,33	1.179.959.349.062,91

a) Saldo Akhir Kas di BUD

Saldo Akhir kas di BUD selama TA 2022 sebesar Rp277.994.694.649,52 dan Tahun 2021 sebesar Rp1.168.554.249.066,37 .

Kas di BUD terdiri dari :

Tabel 5. 276 Rincian Saldo Akhir Kas di BUD

Saldo Akhir Kas di BUD	Tahun 2022	Tahun 2021
Bank Riau Kepri	277.994.694.649,52	1.168.554.249.066,37
Jumlah	277.994.694.649,52	1.168.554.249.066,37



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

b) Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.540.999.407,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran di SKPD yang terdiri dari Sisa UP (Uang Persediaan), selama TA 2022 belum disetorkan pada Rekening BUD. Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dirinci sebagai berikut

Tabel 5. 277 Rincian Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2022	Tahun 2021	Keterangan
Dinas Pendidikan	3.540.888.407,00	0,00	Sisa UP
PU	11.000,00	0,00	Sisa UP
Kecamatan Siak Kecil	100.000,00	0,00	Sisa UP
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	400,00	
Kantor Camat Talang Muandau	0,00	1.581.000,00	Sisa UP
Jumlah	3.540.999.407,00	1.581.400,00	

c) Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp1.179.559,00 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan di SKPD selama TA 2022 belum disetorkan pada Rekening BUD. Kas di Bendahara Penerimaan dapat di rinci sebagai berikut :

Tabel 5. 278 Rincian Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2022	Tahun 2021
Badan Pendapatan Daerah	1.179.559,00	1.758.070,00
Jumlah	1.179.559,00	1.758.070,00

d) Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD

Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp11.452.247.027,66 merupakan Kas di Bendahara BLUD di RSUD selama TA 2022. Kas di Bendahara BLUD dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5. 279 Rincian Saldo Akhir Kas di Bendahara BLUD

SKPD	Tahun 2022	Tahun 2021
	Kas di Bendahara BLUD	Kas di Bendahara BLUD
RSUD Mandau	7.019.066.471,56	10.395.570.750,44
RSUD Bengkalis	3.895.605.133,10	953.521.139,10
Dinas Kesehatan	537.575.423,00	0,00
Jumlah	11.452.247.027,66	11.349.091.889,54

e) Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS

Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS selama TA 2022 dan 2021 sebesar Rp21.048.100,00 dan Rp52.662.329,00 merupakan Kas di Bendahara BOS pada SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang pada tanggal 31 Desember 2022. Kas di Bendahara BOS dapat di rinci sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5. 280 Rincian Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS

Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Tahun 2022	Tahun 2021
BOS Reguler/ 393 Sekolah	0,00	51.083.262,00
BOS Kinerja/ 4 sekolah	0,00	237.660,00
BOS Afirmasi/ 6 sekolah	0,00	720.686,00
Jasa Giro BOS	560.300,00	620.721,00
Sekolah Dasar	16.713.300,00	0,00
Sekolah Menengah Pertama	3.774.500,00	0,00
Jumlah	21.048.100,00	52.662.329,00

Jumlah Kas di Bendahara BOS ini merupakan bagian dari SiLPA dan bagian dari pengakuan pendapatan secara akrual.

f) Saldo Akhir Kas Lainnya

Saldo Akhir Kas Lainnya selama TA 2022 dan 2021 sebesar Rp258.507.223,15 dan Rp0,00 merupakan Kas di Rekening Penampung pada Dinas Kesehatan sebesar Rp808.958,15 dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp257.698.265,00 dapat di rinci sebagai berikut :

Tabel 5. 281 Rincian Saldo Akhir Kas Lainnya

Saldo Akhir Kas Lainnya	Tahun 2022	Tahun 2021
Dinas Kesehatan	808.958,15	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	257.698.265,00	0,00
Jumlah	258.507.223,15	0,00

5. 5. 7. Perbandingan antara Saldo Akhir Kas dengan SiLPA

Saldo akhir kas sebesar Rp293.268.675.966,33 terdiri dari :

1) Kas di BUD	277.994.694.649,52
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	3.540.999.407,00
3) Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	0,00
4) Kas di Bendahara Penerimaan	1.179.559,00
5) Kas di Bendahara JKN	0,00
6) Kas di Bendahara BLUD	11.452.247.027,66
7) Kas di Bendahara BOS	21.048.100,00
8) Kas Lainnya	258.507.223,15
Jumlah	293.268.675.966,33

Saldo akhir kas sebesar Rp293.268.675.966,33 sama jika dibandingkan dengan saldo SiLPA dikarenakan Kas di Bendahara BOS dan saldo di kas lainnya menjadi bagian SiLPA selama Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.6. PENJELASAN POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas Atas Aktivitas Operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

2022	2021
9.199.249.753.033,92	9.215.647.863.998,17

Saldo awal Ekuitas tahun 2022 adalah sebesar Rp9.199.249.753.033,92. jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar Rp9.215.647.863.998,17 mengalami penurunan sebesar Rp16.398.110.964,25 atau 0,18% yang merupakan saldo akhir Ekuitas tahun 2021

5.6.2. Surplus(Defisit) - LO

2022	2021
(339.231.839.440,46)	(434.592.113.603,75)

Defisit- LO tahun 2022 sebesar Rp339.231.839.440,46 Sedangkan defisit tahun 2021 sebesar Rp434.592.113.603,75 maka mengalami penurunan sebesar Rp95.360.274.163,29 atau 21,94% merupakan Defisit atas kegiatan operasional (Basis Akrua), sehingga akan mengurangi nilai Ekuitas pada Neraca Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

2022	2021
-	418.194.002.639,50

Dampak Kumulatif Atas Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar mengurangi Ekuitas Awal tahun 2022 sebesar Rp0,00 sedangkan tahun 2021 sebesar 418.194.002.639,50.

5.6.4. Lain-lain

2022	2021
2.880.457.645,44	-

Lain-lain Tahun 2022 Sebesar Rp2.880.457.645,44 merupakan Koreksi Saldo Awal Tahun 2022 Dengan rincian sebagai berikut:

5.6.4.A Koreksi Nilai Piutang Tahun 2022 sebesar Rp60.213.454.438,00 Adapun rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.283 Rincian koreksi Nilai Piutang

OPD	Koreksi Nilai Piutang	Keterangan
RSUD Bengkulu	(72.151.867,00)	Koreksi lebih catat Piutang BPJS (Klaim yang telah di verifikasi dan di bayarkan BPJS lebih kecil dari piutang Yang dicatat)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	(5.800,00)	Koreksi lebih catat Piutang lainnya
	3.843.582.268,00	Koreksi Nilai Piutang DBH Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, dikarenakan SK TW 4 bulan Desember terbit pada tahun 2022 sebesar Rp3.843.582.268 dan belum tercatat sebagai piutang pada laporan keuangan audited 2021
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	56.351.056.296,00	Koreksi Nilai Piutang DBH Pusat Rp56.351.056.296 dikarenakan terbitnya PMK 127 Tahun 2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

	1.119.000,00	Koreksi piutang Lainnya sebesar Rp1.119.000 merupakan SILPA Dana P3ID tahun 2021 yang disetor pada tahun 2022 dan belum diakui sebagai piutang pada laporan audited tahun 2022
	(20.689.481,00)	Koreksi lebih catat Piutang Pajak Hotel
	934.740,00	Koreksi kurang catat Piutang Pajak Restoran
Badan Pendapatan Daerah	88.808.550,00	Koreksi kurang catat Piutang Pajak Reklame
	23.603.923,00	Koreksi kurang catat Piutang Pajak Air Tanah
	(2.803.191,00)	Koreksi lebih Lebih Piutang Pajak Air Tanah
Total	60.213.454.438,00	

5.6.4.B. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp6.229.452,60 Dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 5.284 Rincian Koreksi Nilai Penyisihan Piutang

OPD	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang 2022	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang 2021
RSUD Bengkulu	360.760,00	24.202.700,00
RSUD Kecamatan Mandau	0,00	(84.957.206,64)
Badan Pendapatan Daerah	5.868.692,60	50.289.249,50
Total	6.229.452,60	(10.465.257,14)

Tabel 5.285 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang RSUD Bengkulu

Jenis Piutang	Nilai Penyisihan Piutang 2022	Keterangan
Penyisihan Piutang BPJS	360.760,00	Koreksi yang diakibatkan karena Pengkoreksian piutang BPJS
Total	360.760,00	

Tabel 5.286 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Badan Pendapatan Daerah

Jenis Piutang	Nilai Penyisihan Piutang 2022	Keterangan
Penyisihan Piutang Pajak Hotel tahun 2016	14.156.299,00	
Penyisihan Piutang Pajak Hotel tahun 2017	3.266.591,00	
Penyisihan Piutang Pajak Restoran tahun 2018	(467.370,00)	
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah tahun 2019	(94.348,50)	
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah tahun 2019	(63.025,50)	Koreksi dikarenakan adanya koreksi Nilai Piutang Pajak
Penyisihan Piutang Pajak Reklame tahun 2020	(339.500,00)	
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah tahun 2020	280.319,10	
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah tahun 2020	(440.507,30)	
Penyisihan Piutang Pajak Reklametahun 2021	(8.541.355,00)	
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah tahun 2021	(1.888.410,20)	
Total	5.868.692,60	

5.6.4.C Koreksi Investasi Non Permanen selama periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp181.318,00 merupakan Koreksi atas kurang pencatatan Investasi Non Permanen pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sehingga menambah nilai ekuitas.

5.6.4.D Koreksi Investasi Non permanen diragukan tertagih selama periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp181.318,00 merupakan Koreksi atas kurang pencatatan Investasi Non permanen diragukan tertagih pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sehingga menambah nilai ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

5.6.4.E Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan perbaikan secara akuntansi agar akun/ pos yang tersaji dalam Laporan Keuangan Entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, Koreksi Nilai Aset pada OPD Tahun 2022 sebesar Rp7.317.761.779,13 Dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.287 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap

Jenis Piutang	Koreksi Nilai Aset Tetap 2022	Koreksi Nilai Aset Tetap 2021
Tanah	22.008.006,00	(4.378.345.992,50)
Peralatan dan Mesin	(403.047.660,00)	(915.146.561,19)
Gedung dan Bangunan	(6.728.875.757,13)	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	4.280.347.284,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	(193.000.000,00)	(24.417.999,82)
Aset Tetap Lainnya	(14.846.368,00)	0,00
Total	(7.317.761.779,13)	(1.037.563.269,51)

Tabel 5.288 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Per OPD

OPD	Koreksi Nilai Aset Tetap 2022	Koreksi Nilai Aset Tetap 2021
Dinas Pendidikan	(109.604.786,00)	(1.272.566.777,81)
Dinas Kesehatan	(132.026.925,10)	(194.136.875,16)
RSUD Bengkulu	(239.000,00)	(3.322.540,28)
RSUD Kecamatan Mandau	0,00	(2.927.600,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(49.560.000,00)	(1.127.800,00)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	0,00	(6.583.322.992,50)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
Dinas Pemadam Kebakaran	0,00	(647.640,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	(20.743.115,00)
Dinas Sosial	0,00	(921.000,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	(5.404.380,00)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	(230.000,00)
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	(17.650.000,00)	(1.390.000,00)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	0,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(5.132.799.640,00)	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	(450.000,00)
Dinas Perhubungan	(124.090.800,00)	4.266.181.850,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	(707.696,00)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	(895.000,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	(75.564.100,07)	529.598.600,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(12.824.889,45)	(2.300.000,00)
Dinas Perikanan	(16.376.621,47)	(655.375,00)
Dinas Perkebunan	0,00	0,00
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	(622.221.781,00)	604.378.000,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(96.525.000,04)	(1.375.000,00)
Sekretariat Daerah	(155.057.500,00)	167.137.000,18
Sekretariat DPRD	0,00	140.490.256,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	(450.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	631.065.931,00	1.391.101.750,00
Badan Pendapatan Daerah	(1.086.300.000,00)	(350.000,00)
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	0,00	(5.458.041,00)
Badan Penelitian dan Pengembangan	(150.000,00)	(3.499.250,00)
Inspektorat	0,00	(450.000,00)
Kantor Camat Bengkulu	(82.076.667,00)	(464.535,00)
Kantor Camat Bantan	0,00	(852.125,00)
Kantor Camat Bukit Batu	0,00	(6.129.400,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Kantor Camat Siak Kecil	(18.700.000,00)	(301.400,00)
Kantor Camat Bandar Laksamana	0,00	0,00
Kantor Camat Rupat	0,00	(7.700.000,00)
Kantor Camat Rupat Utara	(38.076.000,00)	(58.536,00)
Kantor Camat Mandau	0,00	(11.019.896,94)
Kantor Camat Pinggir	0,00	(343.750,00)
Kantor Camat Bathin Solapan	0,00	0,00
Kantor Camat Talang Muandau	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(178.984.000,00)	(6.250.000,00)
Total	(7.317.761.779,13)	(1.037.563.269,51)

Tabel 5.289 Dinas Pendidikan

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan Dan Mesin	(3.154.960,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Gedung dan Bangunan	(92.303.458,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Aset Tetap Lainnya	(14.146.368,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(109.604.786,00)	

Tabel 5.290 Dinas Kesehatan

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Tanah	375.778.075,00	Koreksi akibat kurang pencatatan atas nilai tanah pada laporan keuangan tahun 2021
Gedung dan Bangunan	(507.805.000,10)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(132.026.925,10)	

Tabel 5.291 RSUD Bengkulu

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Gedung dan Bangunan	(239.000,00)	Koreksi Aset Gedung Bangunan Karena Salah Perhitungan Nilai Hutang Gedung dan Bangunan tahun 2021
Total	(239.000,00)	

Tabel 5.292 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Gedung dan Bangunan	(49.560.000,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(49.560.000,00)	

Tabel 5.293 Dinas Lingkungan Hidup

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Gedung dan Bangunan	(17.400.000,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Aset Tetap Lainnya	(250.000,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(17.650.000,00)	

Tabel 5.294 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
------------	--------	------------



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Gedung dan Bangunan	(5.132.799.640,00)	Aset Bangunan Gedung Kantor Desa Permanen yang dihibahkan ke Pemerintah Desa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis, Nomor: 515/KPTS/XII/2018 Tanggal 18 Desember 2018, tentang Penetapan Hibah Bangunan/Gedung Kantor Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Kepada Desa di Kabupaten Bengkalis Tahun 2018
Total	(5.132.799.640,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.295 Dinas Perhubungan

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Gedung dan Bangunan	(124.090.800,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(124.090.800,00)	

Tabel 5.296 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Gedung dan Bangunan	(75.564.100,07)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(75.564.100,07)	

Tabel 5.297 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Gedung dan Bangunan	(12.824.889,45)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(12.824.889,45)	

Tabel 5.298 Dinas Perikanan

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Gedung dan Bangunan	(16.376.621,47)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(16.376.621,47)	

Tabel 5.299 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(230.346.700,00)	Koreksi Penghapusan Aset Karena Double Catat
Gedung dan Bangunan	(198.675.081,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Konstruksi Dalam Pengerjaan	(193.000.000,00)	Koreksi Penghapusan Aset Karena Tidak Masuk Kategori Aset (Kegiatan Normalisasi Parit)
Aset Tetap lainnya	(200.000,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(622.221.781,00)	

Tabel 5.300 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Gedung dan Bangunan	(96.525.000,04)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(96.525.000,04)	

Tabel 5.301 Sekretariat Daerah

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(946.000,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Gedung dan Bangunan	(154.111.500,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(155.057.500,00)	

Tabel 5.302 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Tanah	669.529.931,00	Koreksi kurang catat pada aset Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
Gedung dan Bangunan	(38.464.000,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	631.065.931,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.303 Badan Pendapatan Daerah

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Tanah	(1.023.300.000,00)	Koreksi Nilai aset Tanah dikarenakan double catat pada laporan audited 2021
Gedung dan Bangunan	(63.000.000,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(1.086.300.000,00)	

Tabel 5.304 Badan Penelitian dan Pengembangan

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Aset Tetap Lainnya	(150.000,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(150.000,00)	

Tabel 5.305 Kecamatan Bengkulu

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Gedung dan Bangunan	(82.076.667,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(82.076.667,00)	

Tabel 5.306 Kecamatan Siak Kecil

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Gedung dan Bangunan	(18.700.000,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(18.700.000,00)	

Tabel 5.307 Kecamatan Rupat Utara

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Gedung dan Bangunan	(38.076.000,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(38.076.000,00)	

Tabel 5.308 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Aset Tetap	Jumlah	Keterangan
Peralatan dan Mesin	(168.600.000,00)	Koreksi kurang catat pada aset Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
Gedung dan Bangunan	(10.284.000,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Aset Tetap Lainnya	(100.000,00)	Koreksi Nilai aset dikarenakan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi Aset
Total	(178.984.000,00)	

5.6.4.F Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp21.096.214.119,33 merupakan penyesuaian terkait dengan adanya Penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2022, dapat dilihat pada

Tabel 5.309 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan

Jenis Piutang	Koreksi Akumulasi Penyusutan 2022	Koreksi Akumulasi Penyusutan 2021
Peralatan dan Mesin	2.182.483.607,09	2.542.351.763,19
Gedung dan Bangunan	13.729.707.599,00	(13.314.464.036,73)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.167.212.280,24	(418.543.560.133,21)
Aset Tetap Lainnya	16.810.633,00	56.175.634.012,79
Total	21.096.214.119,33	(373.140.038.393,96)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.310 Rincian Koreksi Akumulasi Penyusutan Per OPD

OPD	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2022	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 2021
Dinas Pendidikan	1.033.932.681,00	50.924.665.333,70
Dinas Kesehatan	33.708.434,00	(278.174.648,84)
RSUD Bengkulu	671,00	(87.094.274,72)
RSUD Kecamatan Mandau	0,00	5.427.350,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.188.247.186,56	(357.790.948.949,60)
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	59.567.889.062,87	16.810.264.499,49
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.125.476.635,00)	(550.848.989,56)
Dinas Pemadam Kebakaran	2.955.339,00	(360.875.031,00)
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	(188.201.591,83)
Dinas Sosial	9.960.528,00	(9.115.590.850,00)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	(810.695.100,54)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(200.647.602,00)	167.759.800,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	279.130.555,56
Dinas Lingkungan Hidup	(3.563.161.233,00)	(1.347.477.836,27)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(390.750.892,00)	(1.395.895.882,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.466.610.119,00	(831.318.126,00)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	(322.486.652,57)
Dinas Perhubungan	(39.677.469.171,01)	(48.832.760.865,00)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(1.469.705.943,00)	(3.530.541,44)
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(4.135.416,00)	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	(70.121.088,00)
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	(152.076.274,00)	(2.367.725.228,44)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(22.816.357,00)	5.372.976.317,82
Dinas Perikanan	235.515.842,00	(3.237.625.043,57)
Dinas Perkebunan	(11.824.882,00)	(717581500,00)
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	369.647.931,00	(2271576792,79)
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.423.069.041,91	(3.832.463.903,00)
Sekretariat Daerah	(1.852.482.587,00)	(140.360.971,73)
Sekretariat DPRD	0,00	5.132.683.346,94
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	954.900.438,00	970.778.150,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(1.652.029.473,70)	(2.473.613.833,70)
Badan Pendapatan Daerah	28.688.671,00	157.133.696,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	358.693.000,00	542.663.133,00
Badan Penelitian dan Pengembangan	2.096.622.583,70	(1.874.577.417,70)
Inspektorat	0,00	158.450.000,00
Kantor Camat Bengkulu	(477.999.702,00)	(2.625.600.184,03)
Kantor Camat Bantan	(4.596.036,00)	(570.182.140,00)
Kantor Camat Bukit Batu	(10.249.944,00)	(889.327.785,00)
Kantor Camat Siak Kecil	(27.381.854,00)	(2.585.740.450,62)
Kantor Camat Bandar Laksamana	(307.194,00)	0,00
Kantor Camat Rupa	(117.961.239,00)	(845.425.131,36)
Kantor Camat Rupa Utara	37.518.574,00	(860.045.142,73)
Kantor Camat Mandau	(526.407.341,00)	(4.817.531.847,39)
Kantor Camat Pinggir	426.870.286,00	(978.035.021,48)
Kantor Camat Bathin Solapan	0,00	149.600,00
Kantor Camat Talang Muandau	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	158.863.506,00	(588.687.355,56)
Total	21.096.214.119,33	(373.140.038.393,96)

5.6.4.G Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp30.656.416,66 merupakan Koreksi atas lebih pencatatan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Tabel 5.311 Rincian Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

OPD	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 2022	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 2021
Dinas Kesehatan	40.446.800,00	0,00
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	(1.040.416,67)	0,00
Dinas Perhubungan	(16,67)	
Sekretariat Daerah	50,00	0,00
Kantor Camat Bengkulu	(8.750.000,00)	0,00
Kantor Camat Siak Kecil	0,00	(1.562.500,00)
Kantor Camat Bandar Laksamana	0,00	(3.093.750,00)
Kantor Camat Talang Muandau	0,00	(1.856.250,00)
Total	30.656.416,66	(6.512.500,00)

5.6.4.H Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka selama periode sampai dengan 31 Desember 2022 Sebesar Rp6.123.207.065,00 merupakan koreksi atas saldo awal pendapatan diterima dimuka yang disebabkan adanya perubahan Piutang DBH Pusat berdasarkan PMK 127 Tahun 2022

5.6.4.I Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2022 sebesar Rp65.283.661.202,03 Dapat dilihat pada rincian OPD sebagai berikut:

Tabel 5.312 Rincian Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga

OPD	2022	Keterangan
Dinas Pendidikan	(1.140.496,68)	Koreksi nilai Utang Pihak Ketiga sebesar Rp.6,79 merupakan koreksi kurang catat akibat Kesalahan perhitungan Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2021
RSUD Bengkulu	153.608.056,92	Koreksi nilai Utang Pihak Ketiga sebesar Rp.153.608.056,92 merupakan koreksi lebih catat akibat Kesalahan perhitungan Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(0,27)	Koreksi nilai Utang Pihak Ketiga sebesar Rp.0,27 merupakan koreksi kurang catat utang kepada pihak ketiga akibat adanya selisih antara pencatatan utang kepada pihak ketiga tahun 2022 dengan pembayaran utang kepada pihak ketiga
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	(49.898.750,00)	Koreksi nilai Utang Pihak Ketiga sebesar Rp.49.063.750,00 merupakan koreksi kurang catat akibat Kesalahan perhitungan Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2021
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(65.386.230.012,00)	Belanja bantuan keuangan umum Alokasi Dana Desa (ADD) 2017
Total	(65.283.661.202,03)	

5.6.4.J. Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp835.000,00 pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dikarenakan kurang catat utang jangka pendek lainnya pada laporan keuangan audited 2021

5.6.4.K Koreksi Kas Lainnya Tahun 2022 sebesar Rp257.698.265,00 merupakan koreksi kurang catat kas lainnya dikarenakan terdapat kas di rekening penampung pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang belum diakui pada laporan keuangan audited 2021.

5.6.4. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp8.862.898.371.238,90

2022	2021
8.862.898.371.238,90	9.199.249.753.033,92



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Periode yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI LAINNYA

6.1 INFORMASI REKENING GIRO YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Rekening Kas Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu yang terdiri dari rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah, rekening bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang dikelola oleh SKPD.

6.2 INFORMASI STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)

Secara garis besar, Organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu (entitas akuntansi) selama periode pelaporan yakni Tahun 2022 terdiri dari:

- Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan mencakup 3 Asisten;
- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat;
- Badan yang mencakup 7 badan;
- Dinas yang mencakup 23 dinas;
- Kantor yang mencakup 1 kantor;
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mencakup 2 RSUD yakni RSUD Bengkulu dan RSUD Kecamatan Mandau;
- Kecamatan yang terdiri dari 11 Kecamatan;

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu No. 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Didalam Peraturan Daerah tersebut ditetapkan adanya perubahan terhadap susunan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bengkulu sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Daftar OPD pada Pemkab Bengkulu Tahun 2022

No	OPD
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD Kabupaten Bengkulu
4	RSUD Kecamatan Mandau
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Dinas Pemadam Kebakaran
9	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
10	Dinas Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

No	OPD
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Dinas Ketahanan Pangan
14	Dinas Lingkungan Hidup
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Dinas Perhubungan
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Dinas Perikanan
25	Dinas Perkebunan
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
27	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
28	Sekretariat Daerah
29	Sekretariat DPRD
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
32	Badan Pendapatan Daerah
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
34	Badan Penelitian dan Pengembangan
35	Inspektorat
36	Kantor Camat Bengkalis
37	Kantor Camat Bantan
38	Kantor Camat Bukit Batu
39	Kantor Camat Siak Kecil
40	Kantor Camat Bandar Laksamana
41	Kantor Camat Rupal
42	Kantor Camat Rupal Utara
43	Kantor Camat Mandau
44	Kantor Camat Pinggir
45	Kantor Camat Bathin Solapan
46	Kantor Camat Talang Muandau
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

6.3 Informasi Lainnya

Informasi lainnya pada Pemkab Bengkulu selama periode Tahun 2022 antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Pemerintah Kabupaten Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu telah mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lain dalam hal Pelayanan Kesehatan yaitu Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Terhadap pembayaran klaim program Jamkesda RSUD Arifin Achmad, RSUD Dumai, RSUD Siak, RSUD Mandau dan RSUD Bengkulu yang termasuk pembebanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu. dengan penjelasan sebagai berikut :
 - 1) Pemerintah Kabupaten Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu telah mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten lain dalam hal Pelayanan Kesehatan yaitu Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pada 31 Desember Tahun 2022 terdapat Keterlambatan pembayaran terhadap klaim BPJS RSUD Tengku Rafi'an, RSUD Dumai. RSUD Arifin Achmad, RSUD Bengkulu serta RSUD Kecamatan Mandau sebesar Rp.978.793.666,00. Dengan rincian RSUD Teuku Rafi'an Rp.22.893.700,00, RSUD Dumai Rp.70.411.004,00, RSUD Arifin Ahmad Rp.96.860.864,00, RSUD Mandau Rp.774.873.298,00 dan RSUD Bengkulu Rp.13.754.800,00.
- b. Adanya penambahan jumlah hari kerja pada OPD :
 - 1) Dinas Pendidikan untuk 1 paket pekerjaan dengan total nilai Rp.978.539.301,00. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2023 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.
 - 2) Dinas PUPR untuk 19 paket pekerjaan dengan total nilai Rp35.036.075.756,09. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2023 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.
 - 3) Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan untuk 4 paket pekerjaan dengan total nilai Rp986.528.939,00. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2023 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.
 - 4) Sekretariat Daerah untuk 1 paket pekerjaan dengan total nilai Rp99.941.000,00. Kegiatan tersebut diselesaikan pada tahun 2023 (melewati tahun anggaran). Terhadap paket kegiatan ini untuk pelaksanaan pembayaran nantinya akan dilakukan dengan memperhitungkan nilai denda keterlambatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

6.4 Pandemi Covid-19

Dalam rangka penanganan Covid-19 tahun 2022, Pemerintah Bengkalis telah melakukan *refocussing* anggaran melalui beberapa kali pergeseran yang dituangkan dalam perubahan penjabaran APBD. sebagaimana disajikan pada tabel 6.3.

Tabel 6.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENANGANAN COVID-19
BERDASARKAN REFOCUSING 8% DARI DAU DAN DBH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

No.	Uraian Alokasi Anggaran Refocusing	Anggaran	Realisasi	%
I.	Bidang Kesehatan	47.366.529.577,00	33.516.659.381,00	70,76%
I.1	Penanganan Covid-19	14.032.537.109,00	9.996.243.677,00	71,24%
I.2	Dukungan Vaksinasi	4.962.642.000,00	2.236.831.000,00	45,07%
I.3	Dukungan pada kelurahan dan kecamatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19	707.423.000,00	535.628.500,00	75,72%
I.4	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19	5.001.492.000,00	0,00	0,00%
I.5	Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas	22.662.435.468,00	20.747.956.204,00	91,55%
II.	Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi	54.982.519.500,00	48.431.099.200,00	88,08%
III.	Bantuan Sosial Safety Net/Jaring Pengaman Sosial	31.593.644.900,00	30.913.878.426,00	97,85%
Total Penyesuaian/Refocusing APBD TA 2022 (Earmarked 8% DBH/DAU)		133.942.693.977,00	112.861.637.007,00	84,26%

Tabel 6.3
ANGGARAN DAN REALISASI PENANGANAN COVID-19
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PER OPD

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	6.572.206.386,00	3.756.566.679,00
2	RSUD Bengkalis	4.473.263.752,00	3.971.715.081,00
3	RSUD Kec. Mandau	2.219.442.371,00	2.116.585.717,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	238.424.600,00	151.376.200,00
5	Dinas Perhubungan	529.200.000,00	
6	Kecamatan Bengkalis	116.055.000,00	
7	Kecamatan Bukit Batu	82.050.000,00	72.170.000,00
8	Kecamatan Rupa	259.318.000,00	259.318.000,00
9	Kecamatan Mandau	100.000.000,00	55.340.500,00
10	Kecamatan Pinggir	150.000.000,00	148.800.000,00
11	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.231.534.600,00	4.222.009.625,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.470.858.000,00	1.370.875.733,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.692.570.100,00	3.873.995.529,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

14	Dinas Ketahanan Pangan	775.374.000,00	749.343.634,00
15	Dinas Perkebunan	19.153.475.200,00	18.258.030.244,00
16	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	11.169.389.400,00	10.863.792.888,00
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	7.606.770.000,00	7.378.757.222,00
18	Dinas Perikanan	1.882.548.200,00	1.714.294.325,00
19	Dinas Sosial	31.593.644.900,00	30.913.878.426,00



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, bahwa Gubernur/Walikota/Bupati bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah. Kemudian, khusus untuk pengelolaan keuangan daerah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan selanjutnya secara teknis Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah berupaya untuk mewujudkan amanah sebagaimana aturan perundang-undangan tersebut.

Untuk laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mengonsolidasikan laporan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam satu set laporan keuangan, yang terdiri dari 1) Laporan Realisasi Anggaran, 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 3) Neraca, 4) Laporan Operasional, 5) Laporan Arus Kas, 6) Laporan Perubahan Ekuitas dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan tersebut Pemerintah Kabupaten Bengkalis berusaha memberikan informasi yang andal, transparan dan akuntabel.

Untuk memenuhi amanah peraturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 (*audited*) yang disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyusunan Laporan Keuangan melalui proses konversi, mengingat adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bengkalis bertekad untuk selalu meningkatkan kualitas dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan persediaan dan pengelolaan pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali ditentukan lain)

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus menyinergikan regulasi peraturan perundang-undangan, dan yang paling penting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset. Prioritas pertama yang harus segera dibenahi Pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas fungsi pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Disamping pembenahan sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya yang ditingkatkan adalah kualitas dan kuantitas sistem pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan penyempurnaan aturan-aturan yang disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih memadai dan berkualitas.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa berbagai hal perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. Khusus untuk pengelolaan barang milik daerah (aset), Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 telah melakukan inventarisasi terhadap aset tetap pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pengelolaan piutang di SKPD perlu lebih ditingkatkan dan dilakukan validasi terhadap data-data piutang pada SKPD yang memiliki data piutang. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi perhatian utama dengan melakukan pendataan, validasi data dan meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

Koordinasi secara berkesinambungan harus terus ditingkatkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun ditingkat SKPD, terutama koordinasi antara pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset demi mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

Bengkalis, Juni 2023

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI